

# RKPD



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

## **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022**

**Tema : Memperkuat Pemulihan Ekonomi Masyarakat  
Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi  
Yang Berkeadilan serta Berkelanjutan**

**BAPPEDA PROVINSI PAPUA**

Kantor Gubernur Papua  
Jalan Soa Siu Dok II  
Kota Jayapura - Papua





# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 38 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Lampiran : 1 (satu).

### **GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Papua wajib menyusun RKPD Tahun 2022 yang digunakan sebagai pedoman untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 23);
16. Peraturan ...../3



16. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022.



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pemerintah nasional periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 2**

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah;
  - b. rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
  - c. prioritas pembangunan daerah;
  - d. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - e. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 19* di daerah.
- (3) RKPD Provinsi berpedoman pada RKP dan Program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan RKPD Provinsi.

(4) Evaluasi ...../5



- (4) Evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah dalam satu (1) tahun anggaran.
- (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (6) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan.
- (7) Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (8) Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 19* di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat program-program yang berorientasi pada penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19*.

### **Pasal 3**

- (1) Rancangan akhir RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi Tahun 2022
- (2) Rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas :
  - a. surat permohonan fasilitasi dari Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
  - b. rancangan akhir RKPD;
  - c. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD;
  - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan
  - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD;
  - f. hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan
  - g. daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2022.

### **Pasal 4**

- (1) Penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja SKPD yang berpedoman pada Renstra SKPD dan RPJMD.
- (3) Penyusunan Nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (4) Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan target kinerja Pemerintah Daerah dan target kinerja SKPD sebagaimana tercantum pada RPJMD dan Rentsra SKPD.



**Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 5**

- (1) Ruang Lingkup RKPD dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Dokumen RKPD;
  - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang menjelaskan tentang Kondisi Umum Daerah yang mencakup aspek geografi, aspek demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum serta dilengkapi dengan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, kinerja dana otonomi khusus dan permasalahan pembangunan daerah;
  - c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, yang terdiri dari Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
  - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, yang terdiri dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2022;
  - e. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Kerangka Pengembangan Wilayah, Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah, Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Perekonomian Wilayah, Kebijakan Pengembangan Konektivitas, Pengembangan Wilayah Pinggiran dan Perbatasan, dan Pemetaan Program Strategis Dalam Kerangka Percepatan Pembangunan Papua;
  - f. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, yang terdiri dari Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaannya;
  - g. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kunci; dan
  - h. Pentutup.
- (2) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Format Daftar Isian Fasilitas RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Maksud  
Pasal 6**

- (1) Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyusunan :
  - a. RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022; dan
  - b. RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penyusunan RKPD Provinsi sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Tahun 2018-2023, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
  - a. persiapan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Provinsi Tahun 2022;
  - b. penyusunan rancangan awal RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2022;
  - c. penyusunan rancangan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2022;
  - d. pelaksanaan musyawarah RKPD;
  - e. perumusan rancangan akhir RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2022; dan
  - f. penetapan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2022.

(3) Penyusunan ...../7

- (3) Penyusunan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Penyusunan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kewenangan dan hasil inventarisasi personil, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen.
- (5) Penyusunan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pencapaian nasional dan arah kebijakan pemerintah.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 7**

Penetapan RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

**BAB IV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

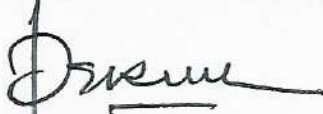
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 4 Oktober 2021

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 5 Oktober 2021  
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD  
Dr. RIDWAN M. RUMASUKUN, SE., MM  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH**  
**NIP. 19661202 198603 1 002**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan dan karuniaNya Pemerintah Provinsi Papua dapat merampungkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 ini. Sebagaimana peraturan yang berlaku, dokumen RKPD Tahun 2022 ini tetap memedomani Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023, dokumen RKP, program-program prioritas dan strategis nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 ini dilakukan di saat pandemi global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih melanda Indonesia termasuk Provinsi Papua. Oleh karena itu, perkembangan terkini dari dampak penyebaran wabah pandemi global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan kondisi sosial-ekonomi di tahun ini, tentunya secara otomatis akan menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan Provinsi Papua di tahun 2022.

Dengan telah selesainya penyusunan RKPD Tahun 2022 ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik unsur Pemerintah Pusat, para Kepala Perangkat Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen RKPD ini.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa dapat memberikan kekuatan bagi kita semua dalam membangun Provinsi Papua demi mewujudkan Visi Papua 2018-2023 yaitu : **“Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Yang Berkeadilan”**.





# DAFTAR ISI

## **KATA PENGANTAR**

## **DAFTAR ISI**

## **DAFTAR TABEL**

## **DAFTAR GAMBAR**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1 Kondisi Umum Daerah
- 2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan  
RKPD sampai Tahun Berjalan
- 2.3 Kinerja Dana Otonomi Khusus
- 2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2022

### **BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

- 5.1 Kerangka Pengembangan wilayah
- 5.2 Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah
- 5.3 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)





- 5.4 Pengembangan Perekonomian Wilayah
- 5.5 Kebijakan Pengembangan Konektivitas
- 5.6 Pengembangan Wilayah Pinggiran dan Perbatasan
- 5.7 Pemetaan Program Strategis Dalam Kerangka Percepatan Pembangunan

**BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

- 6.1 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022
- 6.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Daerah

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- 7.1 Indikator Kinerja Utama
- 5.2 Indikator Kinerja Kunci

**BAB VIII PENUTUP**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2021
Tabel 2.2	Panjang Sungai dan Luas Daerah Tangkapan di Provinsi Papua
Tabel 2.3	Potensi Mineral Logam dan Non Logam
Tabel 2.4	Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota 2018-2020
Tabel 2.5	Indikator-Indikator Kemiskinan di Provinsi Papua
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan 2016 – 2020
Tabel 2.7	Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2015-2020 (%)
Tabel 2.8	Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua Tahun 2016-2020
Tabel 2.9	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015-2020
Tabel 2.10	Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) Penduduk Usia 15-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020
Tabel 2.11	Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua Tahun 2018 - 2020
Tabel 2.12	Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua Tahun 2018 - 2020
Tabel 2.13	Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua Tahun 2018 - 2020
Tabel 2.14	Angka Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020 Berdasarkan Berat Badan dan Tinggi Badan
Tabel 2.15	Angka Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020 Berdasarkan Berat Badan per Tinggi Badan
Tabel 2.16	Angka Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Papua, Februari 2018 –Agustus 2020
Tabel 2.17	Produktifitas Total Daerah per Tenaga Kerja (juta rupiah/orang)
Tabel 2.18	Simpanan dan Kredit yang Disalurkan Sektor Perbankan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017
Tabel 2.19	Angka Partisipasi Pendidikan
Tabel 2.20	Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Tahun 2020
Tabel 2.21	Jumlah Sekolah Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2019/2020-2020/2021



Tabel	2.22	Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua
Tabel	2.23	Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2020-2021
Tabel	2.24	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup
Tabel	2.25	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup
Tabel	2.26	Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk
Tabel	2.27	Angkatan Kerja
Tabel	2.28	Lapangan Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel	2.29	Tabel Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel	2.30	Data Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)
Tabel	2.31	Produksi Kayu Hutan Menurut Jenisnya di Provinsi Papua (m3)
Tabel	2.32	Luas Areal Penggunaan Lahan Pertambangan (ha)
Tabel	3.1	Perkembangan PDRB Provinsi Papua Dari Sisi Permintaan
Tabel	3.2	Perkembangan PDRB Provinsi Papua dari sisi Lapangan Usaha
Tabel	3.3	Perkembangan Inflasi Provinsi Papua
Tabel	3.4	Indikator-Indikator Kemiskinan Di Provinsi Papua
Tabel	3.5	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Tabel	3.6	Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Tabel	3.7	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Tabel	3.8	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 s.d 2020 (Rp)
Tabel	3.9	Pagu dan Estimasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2021 s.d 2022 (Rp)
Tabel	3.10	Realisasi Dan Alokasi Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2019 dan 2020 (dalam Rp.)
Tabel	3.11	Alokasi Pembagian dan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota (dalam Rp.)
Tabel	4.1	Keselarasn Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pembangunan
Tabel	4.2	Sandingan Isu-Isu Strategis Nasional, RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dan RKPD 2022
Tabel	4.3	Telaah POKIR DPRD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 (Daftar Terlampir)

- Tabel 4.4 Persandingan antara Prioritas Nasional, Prioritas Daerah dan Fokus Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2022
- Tabel 4.5 Sasaran Makro Pembangunan Daerah Tahun 2022
- Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasara Pembangunan Tahun 2022
- Tabel 5.1 Pusat Pertumbuhan dalam pengembangan wilayah Provinsi Papua
- Tabel 5.2 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
- Tabel 5.3 Rencana Pengembangan Sebaran Sarana Prasarana Kesehatan dalam peningkatan akses dan kualitas kesehatan di Papua
- Tabel 5.4 Pengembangan Perekonomian Wilayah
- Tabel 5.5 Pengembangan Wilayah Perbatasan
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2022
- Tabel 7.2 Sasaran Makro Pembangunan Daerah
- Tabel 7.3 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2022



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Jadwal Dan Tahapan Penyusunan RKPD Dan KUA-PPAS 2022
- Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
- Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua
- Gambar 2.2 Peta Kondisi Ketinggian Wilayah Papua
- Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng
- Gambar 2.4 Peta Satuan Wilayah Sungai Provinsi Papua
- Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Alam
- Gambar 2.6 Peta Intensitas Curah Hujan
- Gambar 2.7 Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua Berdasarkan Citra 8 OLI Liputan Tahun 2020 (dalam hektar)
- Gambar 2.8 Peta Penetapan Lokasi Fasilitas Pada 5 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan 4 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Papua Tahun 2020
- Gambar 2.9 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua
- Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua (%)
- Gambar 2.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
- Gambar 2.12 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
- Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Papua dan Indonesia (%), 2015-2019
- Gambar 2.14 IPM Nasional menurut Provinsi dan Status Pembenagunan Manusia Tahun 2020
- Gambar 2.15 Status Gizi Anak Balita Umur 0 - 23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2015 - 2017 (%)
- Gambar 2.16 Pengeluaran Per Kapita Riil di Provinsi Papua (juta rupiah)
- Gambar 2.17 Struktur Pengeluaran Per Kapita di Provinsi Papua
- Gambar 2.18 Komposisi Pengeluaran Per Kapita Papua Tahun 2017 (%)
- Gambar 2.19 Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2017 (ribu rupiah)
- Gambar 2.20 Perkembangan Nilai Tukar Petani Papua menurut Subsektor Januari – Februari 2021
- Gambar 2.21 Net Ekspor Daerah dan Rasionya Terhadap PDRB

- Gambar 2.22 Penyaluran Kredit Pada UMKM di Provinsi Papua
- Gambar 2.23 Proyeksi Bonus Demografi di Provinsi Papua
- Gambar 2.24 Penyelesaian Kejahatan di Provinsi Papua dan Indonesia (%)
- Gambar 2.25 Daya Saing Investasi Berdasarkan ICOR Tahun 2014 dan 2017
- Gambar 2.26 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua
- Gambar 2.27 Angka Partisipasi Pendidikan di Provinsi Papua
- Gambar 2.28 Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan Tahun 2020
- Gambar 2.29 Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Papua Tahun 2020 (km)
- Gambar 2.30 Kondisi Rumah Layak Huni di Provinsi Papua
- Gambar 2.31 Kondisi Penyenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua
- Gambar 2.32 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua Tahun 2017 (orang)
- Gambar 2.33 Proporsi Penduduk Di Provinsi Papua dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar = 2.100 Kkal/kapita/hari)
- Gambar 2.34 Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Tamu di Provinsi Papua
- Gambar 2.35 Jumlah Tamu WNA dan WNI Tahun 2016 (orang)
- Gambar 2.36 Distribusi Penyebaran Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Papua Tahun 2016
- Gambar 2.37 Jumlah Cadangan (Reserve) yang Terdata dan Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Batubara di Provinsi Papua
- Gambar 4.1 Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023
- Gambar 5.1 Ilustrasi Kerangka Pengembangan Wilayah Provinsi Papua
- Gambar 5.2 Ilustrasi Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Papua
- Gambar 5.3 Pengembangan Kewilayahan Papua secara Hilostic, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS)
- Gambar 5.4 Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua
- Gambar 5.5 Arah Pengembangan Konektivitas MAMTA
- Gambar 5.6 Arah Pengembangan Konektivitas MEE PAGO
- Gambar 5.7 Arah Pengembangan Konektivitas LA PAGO
- Gambar 5.8 Arah Pengembangan Konektivitas SAERERI



Gambar 5.9 Arah Pengembangan Konektivitas ANIM HA







## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 3 telah mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Salah satu dokumen dari perencanaan pembangunan daerah yang disebutkan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 260 juga mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk mencapai kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen-dokumen perencanaan ini dipedomani oleh Visi Provinsi Papua 2018-2023 yaitu "Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Yang Berkeadilan" untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan.

RKPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022 disusun berdasarkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD. Sedangkan perencanaan melalui pendekatan teknokratis



dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu.

Adapun perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang kepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Terakhir, untuk pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, penyusunan RKPD 2022 juga diperkuat dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial (HITS) dengan memperhatikan pada beberapa hal yaitu :

1. Pengendalian perencanaan;
2. Konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran;
3. Perencanaan berbasis kewilayahan, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Integrasi sumber pendanaan.

Selanjutnya, untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, penyusunan RKPD 2022 menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Melalui penerapan berbasis IT (Informasi dan Teknologi) tersebut diharapkan RKPD 2022 akan lebih berkualitas, yang dapat memenuhi beberapa kriteria antara lain:

1. Disusun berdasarkan penjabaran dari RPJMD;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD konsisten dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur;
5. Program dan kegiatan dalam RKPD dilengkapi dengan pendanaan yang terukur dan menunjukkan prakiraan maju.

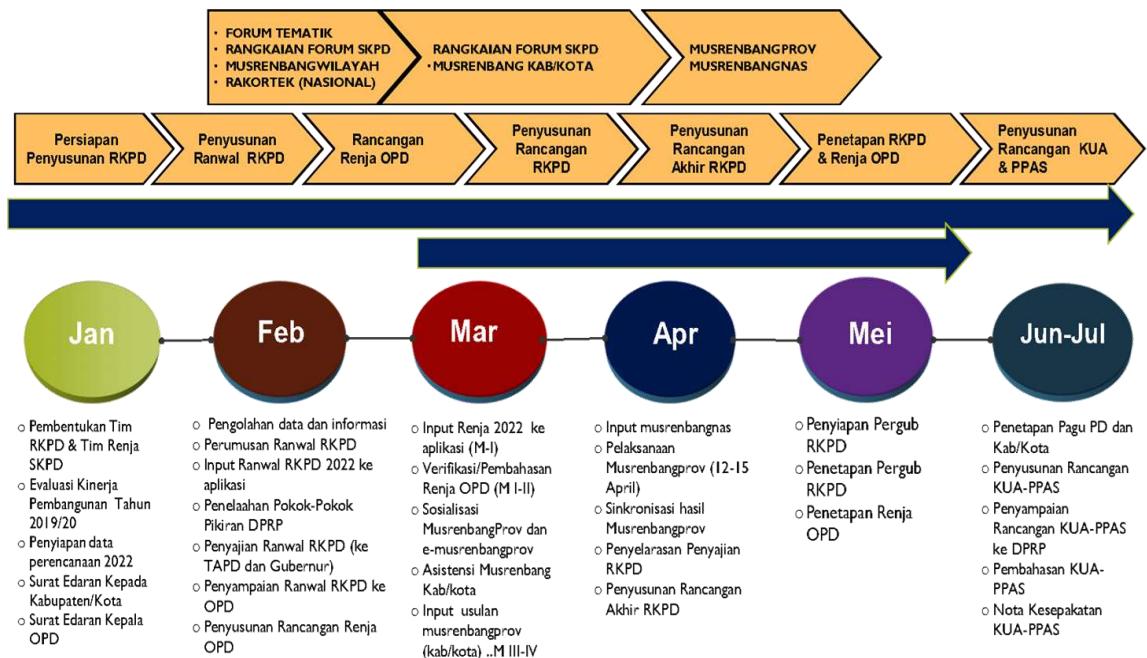
Untuk menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas tersebut, maka proses penyusunan RKPD 2022 dilaksanakan dalam beberapa tahap, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, meliputi : (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan Musrenbang; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan. Semua





ini dijabarkan dalam jadwal dan tahapan penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Provinsi Papua 2022 sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Jadwal Dan Tahapan Penyusunan RKPD Dan KUA-PPAS 2022**



Untuk itu pondasi yang dibangun melalui RKPD 2022 harus lebih baik yang diwujudkan dengan perumusan prioritas daerah yang komprehensif dan holistik, yang dijabarkan secara integratif dan spasial, serta disusun secara teknokratik, partisipatif, politik, *bottom-up* dan *top-down*. Semua ini merupakan rangkaian proses sistematis dan terstruktur yang diimplementasikan melalui *Sistem Informasi Pembangunan Daerah* yang menjadi inovasi dari penyusunan RKPD Provinsi Papua saat ini, oleh karena hirarkinya semakin bertambah kuat dan terkendali yang akan menjamin dan memastikan terintegrasinya RKPD dengan RPJMD 2018-2023, RENSTRA-PD 2018-2023, RENJA-PD 2022, dan kepentingan seluruh *stakeholder* pembangunan.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2021 adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat;



2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Inpres Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025;
19. Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;
21. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, yang selanjutnya mengalami perubahan kedua kali melalui Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus.
22. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

RKPD Provinsi Papua Tahun 2022 selain disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023, juga berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, RPJPD, RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Provinsi Papua Tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program

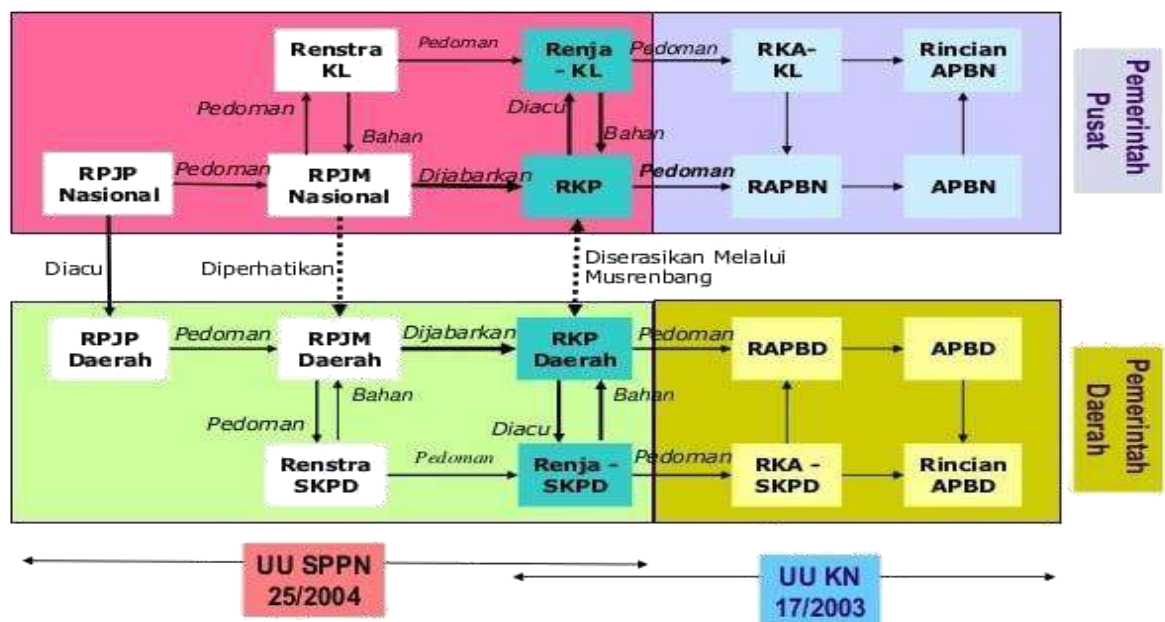




Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD 2022 ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2.

**Gambar 1.2**  
**Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**



Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004  
Undang-undang 17 Tahun 2003



Mengacu pada Gambar 1.2 tersebut dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah: (1) RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas, (2) RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. (3) selanjutnya RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja-PD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi OPD dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2022, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Papua tahun 2022 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2022.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2022 ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Papua sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud : (1). Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022, (2). Mewujudkan sinergi rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Sedangkan tujuannya adalah : (1). Sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022; (2). Menjadi landasan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022; (3). Menjadi acuan penyusunan RKPD tahun 2022 bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua; (4). Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan.



## 1.5 Sistematika Penulisan Dokumen RKPD 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022 meliputi :

**BAB I PENDAHULUAN.** Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen RKPD.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.** Menjelaskan mengenai kondisi faktual daerah yang dijabarkan menjadi Kondisi Umum Daerah mencakup Aspek Geografi, Aspek Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum, serta dilengkapi dengan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan, Kinerja Dana Otonomi Khusus, dan Permasalahan Pembangunan Daerah.

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.** Bab ini terdiri atas Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.** Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan, serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022.

**BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA.** Bab ini terdiri dari Kerangka Pengembangan Wilayah, Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah, Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Perekonomian Wilayah, Kebijakan Pengembangan Konektifitas, Pengembangan Wilayah Pinggiran dan Perbatasan dan Pemetaan Program Strategis Dalam Kerangka Percepatan Pembangunan Papua.

**BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH,** memuat tentang program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2022, serta rencana kerja perangkat daerah dan pendanaannya.





**VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.** Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VIII PENUTUP.** Merupakan bab terakhir, yang pada dasarnya memuat tentang rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2022 yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan daerah Provinsi Papua.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1 Kondisi Umum Daerah**

##### **2.1.1 Aspek Geografi**

Aspek geografi dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana.

##### **2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

###### **A. Luas dan Batas Wilayah**

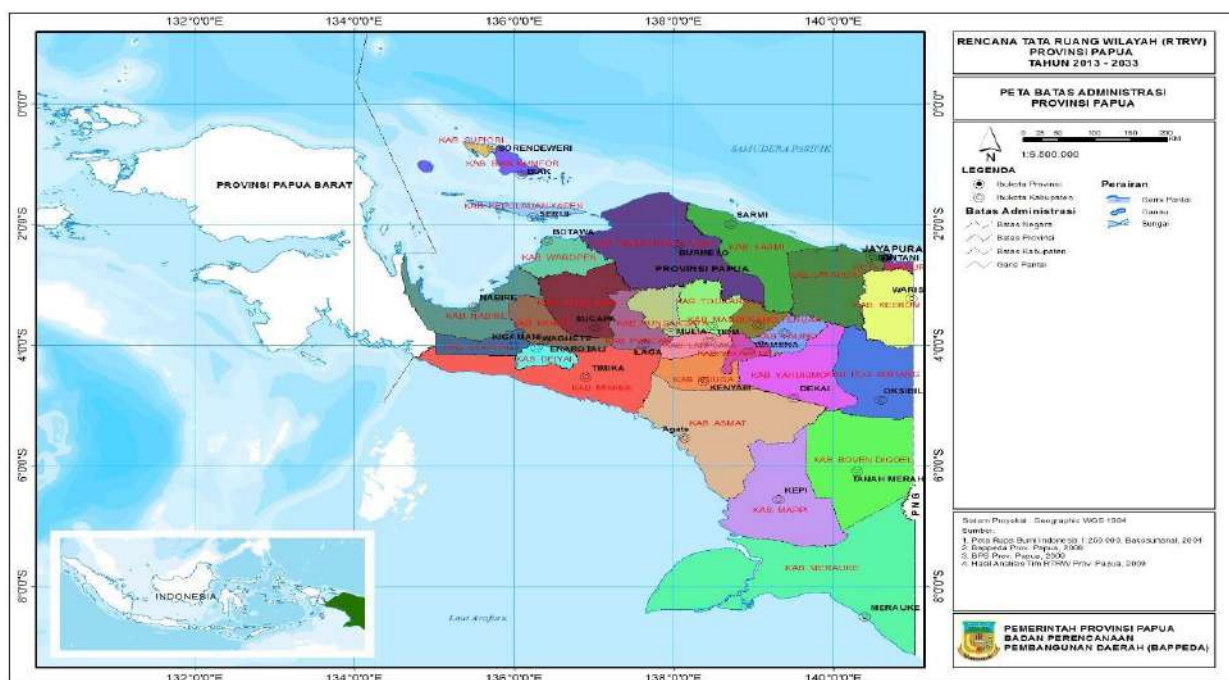
Posisi Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 01°00' LU - 9°10' LS dan 134°00' BT - 141°05' BT dengan luas 32.027.839 hektar. Wilayah administrasi Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, yang terbagi menjadi 470 Distrik dan 4.378 Kampung. Secara administratif Provinsi Papua berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Samudra Pasifik
- b. Sebelah Selatan : Laut Arafuru
- c. Sebelah Barat : Papua Barat
- d. Sebelah Timur : Papua New Guinea

Sementara jika diperhatikan dari luas wilayah, terlihat jelas bahwa Kabupaten Sarmi memiliki luas yang paling besar di Papua yakni mencapai 3.558.900 hektar, dan yang paling kecil adalah Kabupaten Supiori hanya seluas 52.800 hektar. Sedangkan bila diamati menurut wilayah adat, berturut-turut luas wilayah yang paling besar adalah Wilayah Mamta seluas 8.624.691 hektar, kemudian Anim Ha seluas 8.215.000 hektar, La Pago seluas 7.467.900 hektar, Mee Pago seluas 5.507.848 hektar, dan terakhir Saireri seluas 2.212.400 hektar.



**Gambar 2.1**  
**Peta Batas Administrasi Provinsi Papua**



**Tabel. 2.1.**  
**Kondisi Wilayah Administratif Provinsi Papua Tahun 2020**

Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )*	Ibu Kota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan	Keterangan
<b>Anim Ha</b>	Merauke	47.406,90	Merauke	20	190	14	Dataran Mudah Akses
	Asmat	24.687,57	Agats	23	221	4	Dataran Sulit Akses
	Boven Digoel	24.665,98	Tanah Merah	20	111	5	
	Mappi	23.178,45	Keppi	15	164	2	
<b>La Pago</b>	Jayawijaya	2.331,19	Wamena	40	331	15	Pegunungan Tengah
	Lanny Jaya	3.439,79	Tiom	39	356	-	
	Mamberamo Tengah	3.384,14	Kobakma	5	59	-	
	Nduga	5.381,47	Kenyam	32	248	-	
	Pegunungan Bintang	14.655,36	Oksibil	34	277	-	
	Puncak	5.618,84	Ilaga	25	206	-	
	Puncak Jaya	2.446,50	Mulia	26	302	-	
	Tolikara	6.149,67	Karubaga	46	545	-	
	Yahukimo	15.057,90	Dekai	51	518	1	
	Yalimo	3.658,76	Elelim	5	300	-	
<b>Mee Pago</b>	Nabire	4.549,75	Nabire	15	89	9	Dataran Mudah Akses
	Mimika	2.300,37	Timika	18	147	24	Dataran Sulit Akses
	Deiyai	2.325,88	Waghete	5	67	-	Pegunungan Tengah
	Dogiyai	4.522,15	Kigamani	10	79	-	
	Intan Jaya	9.336,60	Sugapa	8	97	-	
<b>Saireri</b>	Paniai	20.686,00	Enarotali	24	216	-	Dataran Mudah Akses
	Biak Numfor	13.017,45	Biak	19	262	23	
	Kepulauan Yapen	4.936,37	Serui	16	165	18	
	Supiori	634,24	Sorendiweri	5	38	1	
<b>Mamta</b>	Waropen	5.381,47	Waren	12	117	1	Dataran Sulit Akses
	Jayapura	14.390,16	Sentani	19	144	17	Dataran Mudah Akses
	Keerom	9.015,03	Arso	11	91	-	
	Sarmi	13.965,58	Sarmi	19	111	2	
Mamberamo Raya	28.034,87	Burmeso	9	59	-		



Wilayah Adat	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )*	Ibu Kota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Kelurahan	Keterangan
	Kota Jayapura	950,38	Jayapura	5	39	23	Dataran Sulit Akses
	<b>Total</b>	<b>316.552,6</b>		<b>576</b>	<b>5.549</b>	<b>159</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Papua Dalam Angka 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.1, terdapat 19 kabupaten di wilayah Papua yang berada di daerah dataran sulit akses dan pegunungan. Dari 5.549 kampung yang teridentifikasi melalui data statistik tahun 2021, sebanyak 4.349 kampung terletak di daerah pegunungan dan sulit akses, dimana kurang lebih 80% dari seluruh kampung tersebut masih merupakan daerah yang terisolasi dari akses transportasi. Keragaman kondisi geografi wilayah kabupaten/kota yang tidak seimbang baik itu dilihat dari luas maupun letak wilayahnya, menjadi salah satu kendala bagi pemerintah provinsi selama ini dalam memberi pelayanan publik ke seluruh pelosok kampung secara optimal.

Masalah lainnya adalah yang terkait dengan wilayah administrasi, terutama sengketa tapal batas antarwilayah kabupaten. Misalkan Kabupaten Tolikara yang mengklaim memiliki luas 1.456.400 hektar menurut UU pemekaran selama ini mempunyai persoalan sengketa wilayah dengan beberapa kabupaten di sekelilingnya, seperti dengan Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Yahukimo. Begitu juga dengan Kabupaten Kepulauan Yapen yang memiliki luas wilayah 205.000 hektar bersengketa tapal batas dengan Kabupaten Nabire. Permasalahan tapal batas ini jika tidak ditangani segera akan menjadi penyulut pecahnya konflik horisontal yang lebih besar di masa mendatang

## B. Topografi

Wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah dataran rendah, pesisir, dan pegunungan yang terdiri atas tiga deretan pegunungan yaitu : 1) Pegunungan Utara di lingkaran luar, 2) deretan Pegunungan Selatan di lingkaran dalam, serta 3) deretan Pegunungan Tengah yang merupakan tepi dari The Australian Continent. Daerah pegunungan berada pada ketinggian di antara 3000-4000 dan lebih dari 4000 meter dari permukaan laut (mdpl). Wilayah tertinggi terdapat di Kabupaten Puncak Jaya dengan ketinggian 2.980 mdpl sedangkan yang paling rendah adalah Kota Jayapura dengan ketinggian rata-rata 4 mdpl.

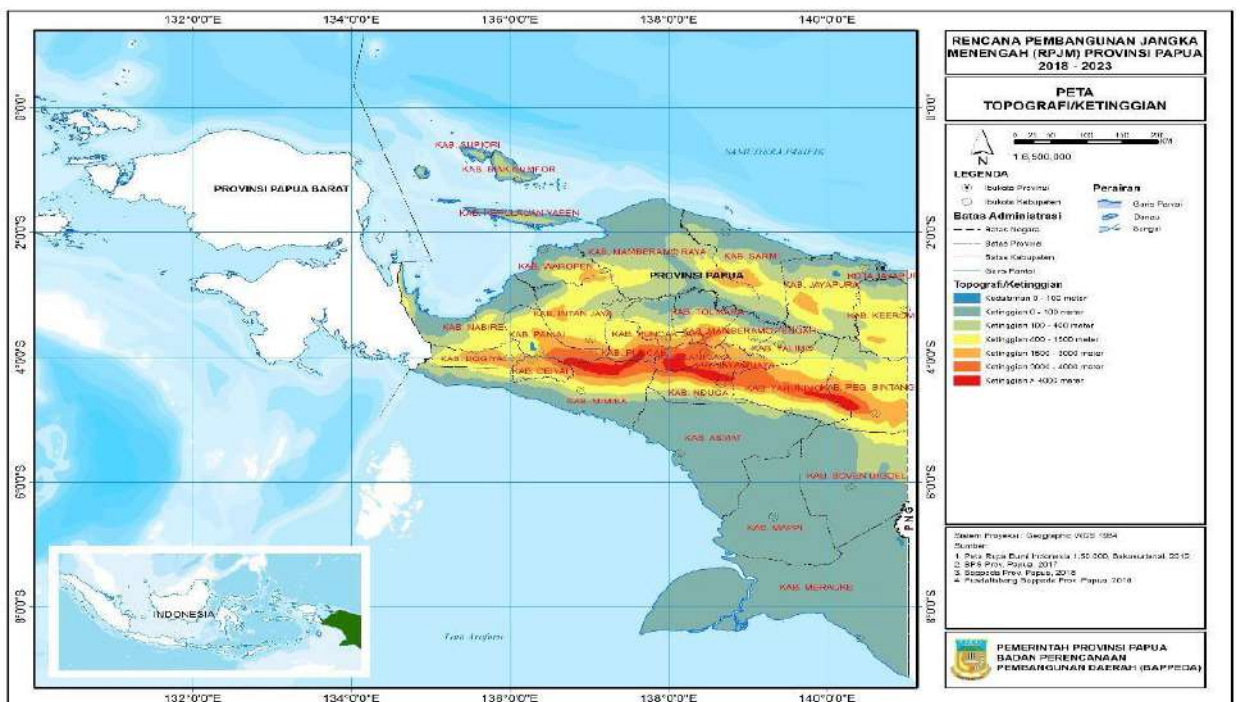
Kelerengan yang mendominasi wilayah provinsi Papua adalah lereng landai (0–8)% menempati 45,9% dan lereng sangat terjal (>40%) menempati 43,3%, yang tersebar pada wilayah Haanim, Meepago, Mamta dan Laapago.



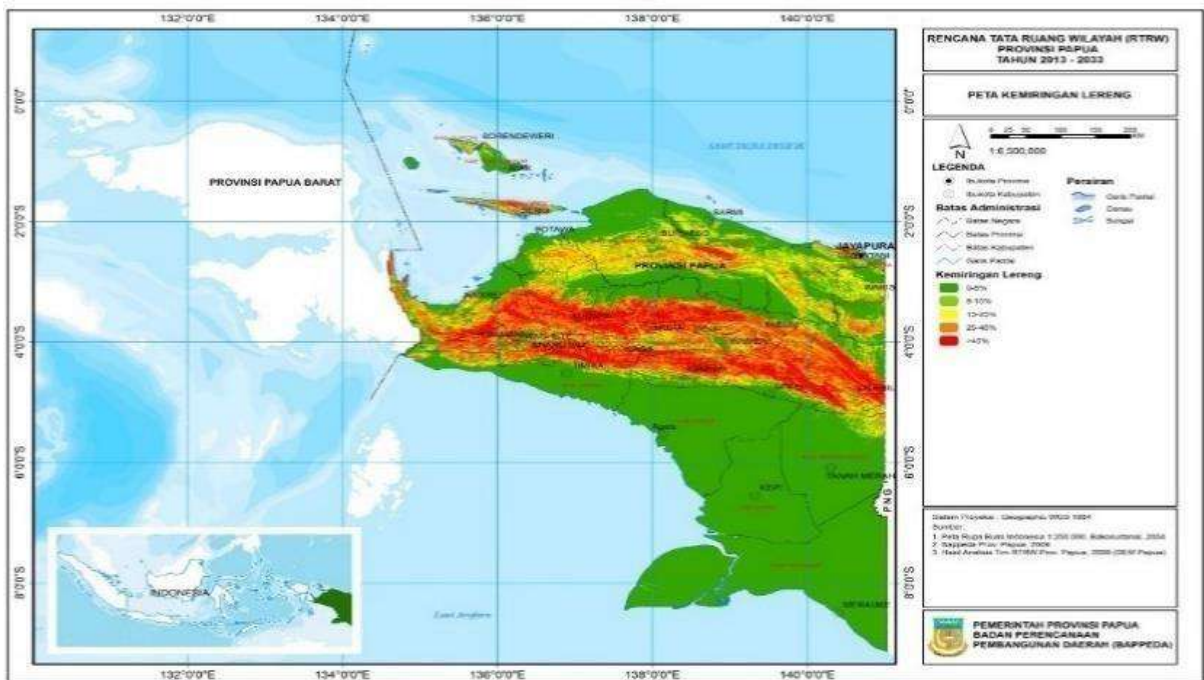


Kondisi topografi Papua yang sangat ekstrim menyebabkan pembangunan jaringan transportasi darat sangat sulit dilakukan dan membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk juga dalam pembangunan jaringan fasilitas publik lainnya seperti listrik, air bersih, informasi dan komunikasi juga terkendala dengan kondisi topografi ini. Semuanya membutuhkan biaya besar dan sangat mahal yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Karenanya dalam hal pembangunan infrastruktur Papua, peran pemerintah pusat sangat diperlukan selama ini.

**Gambar 2.2**  
**Peta Kondisi Ketinggian Wilayah Papua**



**Gambar 2.3**  
**Peta Kemiringan Lereng**



### C. Hidrologi

Provinsi Papua memiliki 64 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total panjang sungai 35.924,737 km dan total luas daerah tangkapan 572.753, 823 km<sup>2</sup> (lihat Tabel 2.2). Banyaknya jumlah DAS menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki kekayaan Sumber Daya Air yang berlimpah. Sungai-sungai besar yang terbentang dan danau yang tersebar di Papua dapat menjadi sumber energi listrik terbarukan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi produktif, pendapatan asli daerah, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

**Tabel. 2.2.**  
**Panjang Sungai dan Luas Daerah Tangkapan di Provinsi Papua**

Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan (Km <sup>2</sup> )
Memberamo Hilir	660.457	80.099,16
Turitatu Hilir	788.626	47.872,90
Turiku Hilir	930.094	34.912,40
Apauwer	252.59	2.998,00
Wiru	155.114	2.494,80
Verkume	155.798	1.845,50
Biri	116.087	2.173,00
Sermo	151.866	1.599,20
Tor	244.29	3.153,60
Van Dallen	513.64	8.585,15
Wediman	875.27	11.492,30
Digul Kanan	420.912	7.253,70
Digul Hilir	1,178.81	33.698,04
Digul Kiri	615.753	6.162,50
Digul Timur	196.058	3.189,91



Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan (Km <sup>2</sup> )
Digul Barat	196.01	2.489,90
Ein Hilir	1,956.46	65.315,43
Ein Hulu	509.886	5.337,72
Wapoga	574.393	10.637,14
Sobger	1.262.169	35.174,80
Turitatu Tengah	662.304	20.312,70
Bigadu	315.5	9.103,53
Sirowo	150.915	4.013,00
Turiku Hulu	10.628.779	7.925,61
Maro	559.804	9.909,00
Tami	320.328	7.015,40
Omba	157.253	3.427,60
Yawe	147.289	4.170,30
Lorentz	747.383	8.717,65
Kumbe	262.015	3.282,00
Wanggar	361.35	4.776,20
Kapiraya	121.26	2.860,90
Peter	682.955	10.992,30
Otokwa	187.337	3.395,30
Sentani	35.04	968,60
Grime	110.725	1.050,00
Bunga	397.783	3.457,07
Vriendschaps	475.472	5.912.508,00
Bian	640.218	12.080,12
Kamura	118.525	2.187,60
Rombak	346.119	1.971,20
Nadubuai	222.608	1.971,20
Brazza	990.666	10.088,02
Parongga	31.33	593,20
Yawe	61.296	1.272,00
Akimuga	288.925	2.660,10
Mimika	477,71	4.670,01
Aidoma	306.834	3.184.599,00
Minajerwi	447.597	5.054,70
Cemara	280.4	2.556,40
Otokwa	181.007	1.662,00
Nordwest	624.39	7.832,82
Odamun	264.36	6.808
Dolok	224.573	3.119,20
Bulaka	331.26	6.418,01
Siriwo	155.759	1.187,60
Kumbe	38.4	483,90
Paranggo	94.882	774,90
Kamura	270.438	2.243,20
Mappi	524.98	7.596,00
Biak	84.27	467,15



Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan (Km <sup>2</sup> )
Supiori	83.457	245.917,00
Yapen	298.986	1.266.089,00
Gesa	457.979	5.551,02

Sumber : RPJPD Provinsi Papua 2005-2025

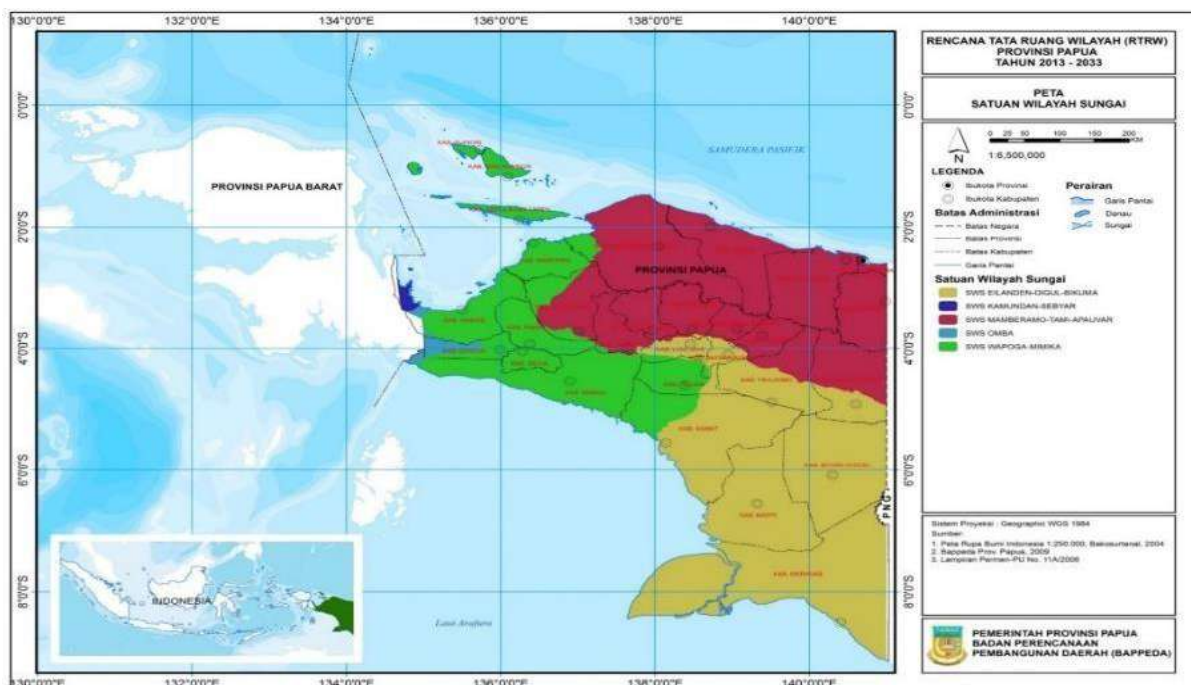
Adapun berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai menetapkan pembagian wilayah sungai di Provinsi Papua sebagai berikut :

- 1) WS Mamberamo-Tami-Apauvar (kewenangan BWS Papua), terdiri atas beberapa DAS:DAS Mamberamo, DAS Gesa, DAS Bigabu, DAS Sobger, DAS Tariku, DAS Nawa, DAS Taritatu, DAS Van Dalen, DAS Tami, DAS Sermo, DAS Grimer dan DAS Sentani.
- 2) WS Einlanden-Digoel-Bikuma (kewenangan BWS Papua Merauke), terdiri atas beberapa daerah aliran sungai:DAS Einlanden, DAS Digoel, DAS Maro, DAS Kumber, DAS Bulaka, DAS Bian, DAS Dolak, DAS Digoel dan DAS Cemara.
- 3) Wilayah sungai Omba (lintas Provinsi Papua-Provinsi Papua Barat, kewenangan Papua Barat), terdiri atas WS Omba mencakup beberapa DAS:DAS Omba, DAS Lengguru, DAS Madefa, DAS Bedidi dan DAS Bomberai.
- 4) Wilayah sungai lintas kabupaten/kota terdiri atas WS Wapoga Mimika (kewenangan Dinas PU Provinsi), yang mencakup beberapa DAS:DAS Wapoga, DAS Aikimuga, DAS Otokwa, DAS Minarjerwi, DAS Kamura, DAS Mimika, DAS Yawe, DAS Parongga, DAS Aidoma, DAS Wanggar, DAS Siriwo, DAS Rombak, DAS Nadubuai, DAS Yapen, DAS Biak, DAS Supiori dan DAS Kemabu.





**Gambar 2.4**  
**Peta Satuan Wilayah Sungai Provinsi Papua**



Instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS cukup banyak, misalkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Bakosurtanal, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan banyaknya pihak yang terlibat, baik itu secara administrasi, perencanaan dan teknis dilapangan, maka diperlukan adanya koordinasi intensif berbagai pihak terkait baik lintas sektoral maupun lintas daerah.

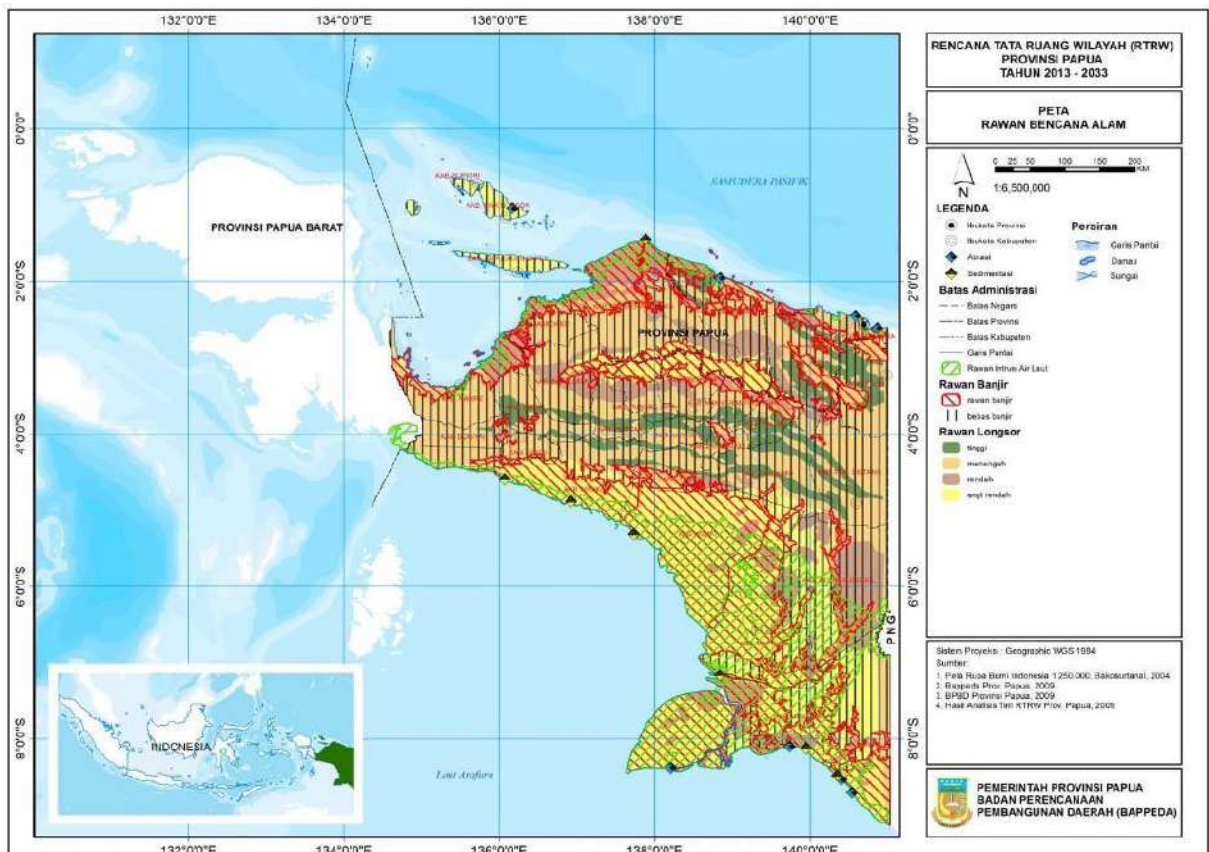
Selain memberi peluang yang besar untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, banyaknya sungai dan rawa juga merupakan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Papua. Pada wilayah yang dikelilingi rawa atau banyak rawa membuat pembangunan jalan di daerah-daerah tersebut membutuhkan konstruksi yang lebih kokoh dibanding biasanya, yang dipastikan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Seringkali ditemukan pada pembangunan jalan di Papua, dalam satu lajur tidak sampai ratusan kilo ada perubahan formasi dari tanah keras ke tanah lunak, gambut dan rawa. Kondisi ini yang menyebabkan perkiraan biaya pembangunan jalan di wilayah Papua selalu bisa over estimated. Banyaknya sungai juga menjadi permasalahan tersendiri, karena pembangunan jalan harus dihubungkan juga dengan banyaknya jembatan yang dibangun di atas sungai, yang akhirnya membutuhkan biaya yang lebih besar.



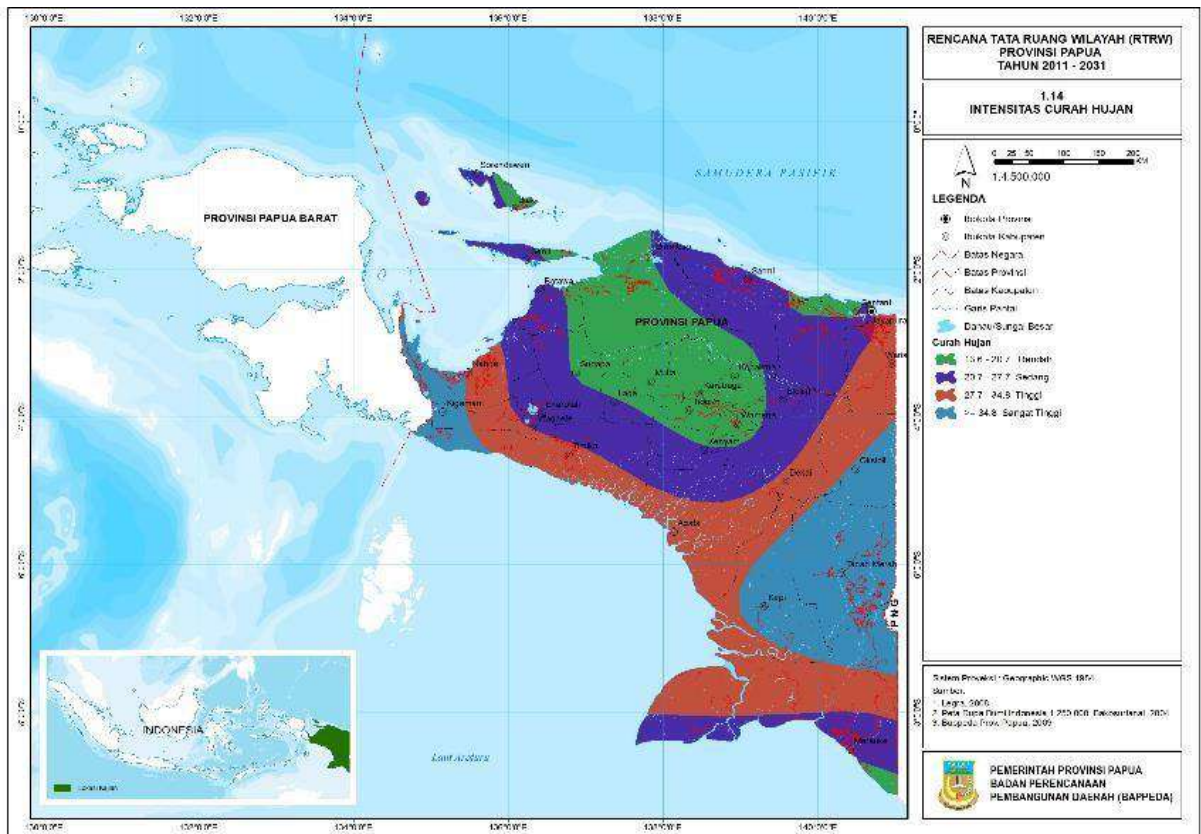
## D. Klimatologi

Iklm Papua termasuk dalam iklim hutan hujan tropis (tropical rain forest), yang dipengaruhi oleh musim kemarau, hujan, dan angin Muson yang menyebabkan Papua kaya dengan flora dan fauna khas hutan hujan tropis. Secara umum, musim kemarau di Papua terjadi di Bulan Juni-September, sedangkan musim hujan terjadi pada Bulan Desember-Maret, dengan masa peralihan pada Bulan April-Mei dan Bulan Oktober-November. Terdapat 32,4% tanah di wilayah Papua berada di kelas kemiringan di atas 40° dan rawa-rawa yang luas terutama di sepanjang pesisir pantai Selatan Papua yang terbentang hingga ke hulu sungai-sungai pedalaman. Curah hujan di Provinsi Papua cukup tinggi. Data curah hujan dan hari hujan dari berbagai stasiun lima tahun terakhir menunjukkan angka merata di hampir seluruh wilayah di provinsi Papua. Terdapat kecenderungan jumlah curah hujan meningkat sejalan dengan peningkatan ketinggian tempat Pola penyebaran curah hujan menunjukkan adanya variasi antar wilayah, dari curah hujan sedang (1750 mm), tinggi (2500-4000mm), hingga sangat tinggi (>4000mm), secara umum dapat dikatakan tinggi.

**Gambar 2.5**  
**Peta Rawan Bencana Alam**



**Gambar 2.6**  
**Peta Intensitas Curah Hujan**



Penyebaran curah hujan sedang, hanya dijumpai di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yahukimo. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya memiliki curah hujan tinggi hingga sangat tinggi (lihat Gambar 2.6).

Selain memiliki potensi yang menguntungkan, curah hujan yang tinggi juga dapat memberikan permasalahan bagi bidang pertanian, perhubungan, infrastruktur jalan, dan sebagainya. Dampak langsung dari curah hujan ada yang dirasakan seketika, dan ada yang dirasakan secara lambat. Dampak langsung seketika, misalnya curah hujan yang tinggi atau terus menerus dapat menimbulkan tanah longsor saat itu. Kondisi ini dapat dilihat sering terjadi di daerah-daerah pegunungan seperti di Yalimo, Lanni Jaya, Puncak Jaya, dan sebagainya.

Suhu udara di Provinsi Papua, sangat variatif. Pada daerah pegunungan dengan variasi ketinggian wilayah yang beragam memiliki suhu udara minimum 15°C dan daerah pesisir dan landai suhu maksimal mencapai 33°C. Kelembaban udara rata-rata yaitu 7885% dan durasi penyinaran matahari di Provinsi papua berada pada level 35-68% dengan tekanan udara rata-rata 1.008 mbs.



Kondisi yang ekstrim juga terjadi di beberapa daerah pegunungan dengan adanya hujan yang tinggi diiringi dengan butiran es sehingga menimbulkan hujan es. Hujan es yang pernah terjadi di tahun 2015 berlangsung selama 10 hari di tiga Kampung di Distrik Agadugume Kabupaten Puncak misalkan mengakibatkan tanaman di kebun warga membusuk dan mati, dan kurang lebih 10.000 jiwa penduduk yang mendiami tiga kampung tersebut terancam mengalami rawan pangan akibat peristiwa ini. Fenomena yang sama juga terjadi di Kabupaten Lanny Jaya dan Puncak Jaya.

### 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

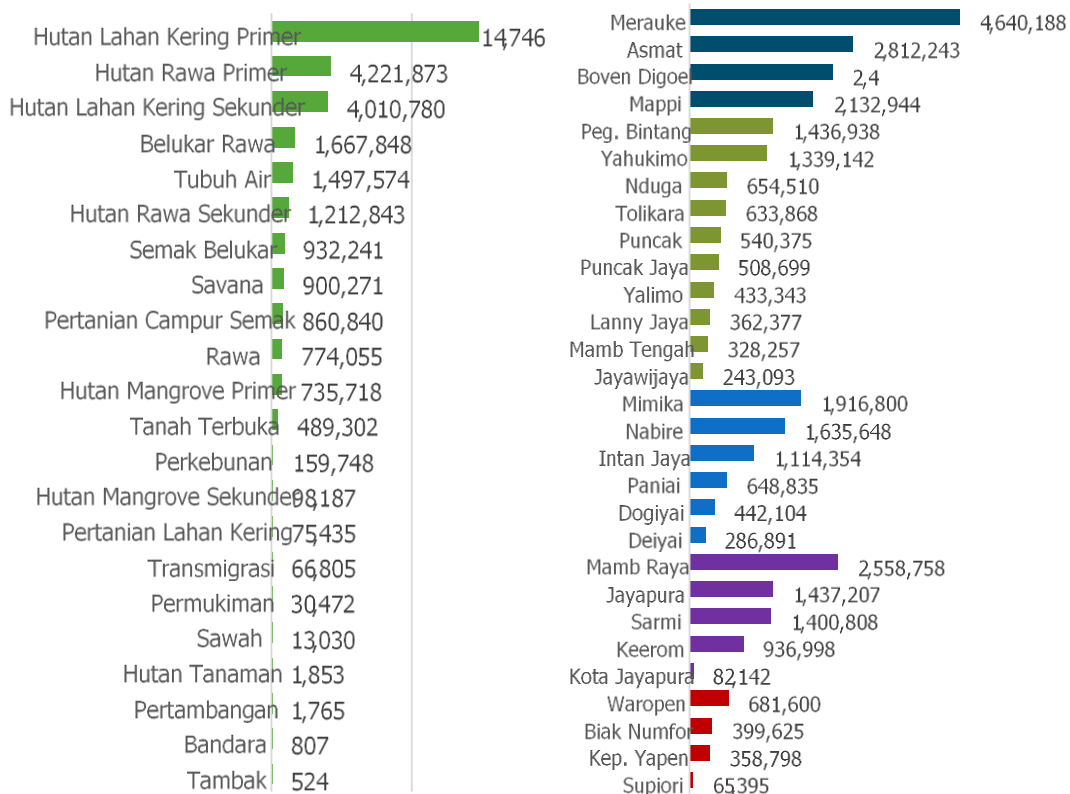
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2013-2033, maka potensi pengembangan wilayah dalam jangka panjang ialah sebagai berikut :

#### A. Potensi Hutan

##### 1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Provinsi Papua memiliki 3 jenis kawasan peruntukan hutan produksi, yaitu: Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi tetap (HP), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

**Gambar 2.7**  
**Kondisi Tutupan Lahan Provinsi Papua Berdasarkan Citra 8 OLI Liputan Tahun 2020 (dalam hektar)**



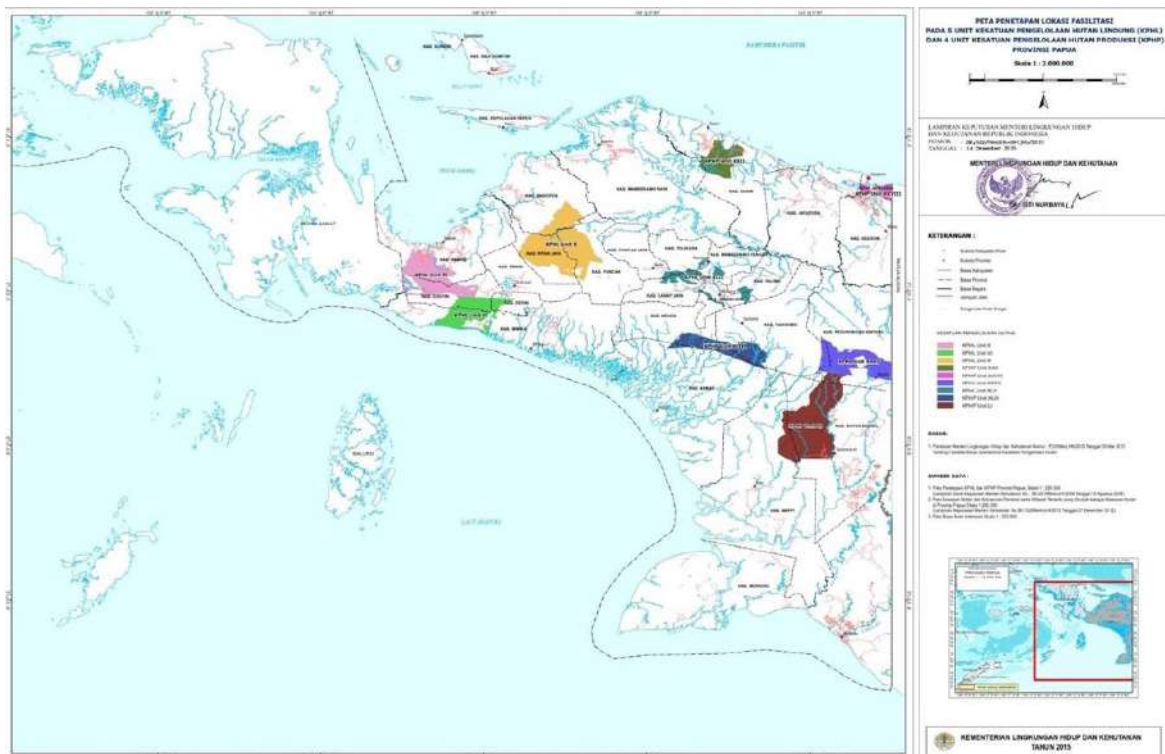
Sumber : BPKH Wilayah X Provinsi Papua, 2020 (data diolah)





Hutan Produksi Terbatas memiliki kriteria: a) memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125-174, b) kawasan hutan yang digunakan untuk budi daya hutan alam. Sedangkan Hutan Produksi tetap (HP) memiliki kriteria: 10 memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124, b) kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) memiliki kriteria, sebagai berikut: a) memiliki faktor kemiringan, lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 dan/atau, b) merupakan kawasan yang jika dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, c) kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya.

**Gambar 2.8**  
**Peta Penetapan Lokasi Fasilitas Pada 5 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan 4 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Papua Tahun 2020**



Sumber : BPKH Wilayah X Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MenLHK/2015 Tentang Fasilitas Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan, di Provinsi Papua terdapat 9 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dimana secara garis besarnya terdiri atas KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) yang tersebar pada : (1) KPHL Unit II Lintas Nabire, Dogiyai, (2) KPHL Unit VI Lintas Mimika, Dogiyai, Deyiai, (3) KPHL Unit X Lintas



Intan Jaya, Waropen, Puncak, (4) KPHP Unit XXII Sarmi, (5) KPHL Unit XLII Lintas Lanny Jaya, Puncak Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, (6) KPHP Unit XLIII Lintas Yahukimo, Nduga, (7) KPHL Unit XXXV Lintas Pegunungan Bintang, Yahukimo, (8) KPHP Unit LI Lintas Boven Digul, Pegunungan Bintang, dan (9) KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.8 di atas.

## **2. Kawasan Hutan Rakyat**

Kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan dengan kriteria 22elativ yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik. Selain itu, 22elativ hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. Pada 22elativ ini, kegiatan yang diperbolehkan ialah kegiatan permanen berdasarkan 22elativ tebang butuh.

## **3. Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perkebunan**

Kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan terdiri dari pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura. Kawasan ini memiliki beberapa kriteria, yaitu: kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai 22elativ pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

Kegiatan pada 22elativ pertanian adalah pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat yang diatur oleh pemerintah kabupaten dan atau oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, kegiatan pertanian skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus lebih dulu memiliki kajian studi AMDAL.

Penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlaur dalam air drainase) dan polusi industry pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL. Kawasan yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang. Kawasan pertanian diharapkan menyediakan kegiatan pertanian berskala besar untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja yang merupakan penduduk asli setempat, baik Orang Asli Papua maupun pendatang.

Potensi pengembangan lahan pertanian di Papua masih terbuka sangat lebar melalui klarifikasi status lahan untuk pembangunan pertanian oleh Pemerintah dan masyarakat adat, pengembangan infrastruktur pertanian termasuk jaringan irigasi, jaringan jalan pendukung pertanian, pasar, peningkatan SDM secara konsisten dan terpadu, dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun 22elati pertanian. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan yang tersedia secara tepat dan



lestari bukan tidak mungkin mengangkat Provinsi Papua sebagai sentra produksi pertanian di wilayah timur, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, dan melestarikan sumber pangan 23elat yang sudah terbukti adaptif untuk ketahanan pangan dan kelestarian budaya setempat. Kegiatan perkebunan juga masih terbatas pada komoditas dengan orientasi pada pasar 23elat. Meski demikian, beberapa investasi perkebunan untuk kakao dan kopi telah menunjukkan kemajuan dan layak dikembangkan dengan basis pengelolaan oleh masyarakat adat.

## **B. Potensi Perikanan**

### **1. Perikanan Tangkap**

Provinsi Papua memiliki kawasan pantai kurang lebih 1.170 mil laut. Secara umum, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua terbagi dua, yaitu perairan utara Papua tergabung dalam yang mencakup perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik dengan pantai 509 mil laut (916 km) dan luas diperkirakan 6.110 mil laut (11.000 km<sup>2</sup>) sebagai 23elativ yang kaya akan sumberdaya perikanan Pelagis Besar (Tuna, Paruh Panjang, Cakalang, dan Tenggiri). Sedangkan pada bagian selatan, Papua masuk dalam WPP 718 yang mencakup perairan Laut Arafura dengan 23elativ pantai 662 mil laut (1.191 km) dengan luas perairan 7.944 mil laut (14.300 km) dan merupakan 23elativ yang kaya akan sumberdaya Ikan Demersal (Udang, Kakap Merah, Kakap Putih, Bawal, Pari, Cucut dan Ikan Pelagis kecil lainnya (Teri, Tongkol, Kembung). Kelompok ikan lainnya adalah Ikan Kerapu, Napoleon, Lobster dan ikan hias. Papua memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, terutama pada wilayah pesisir dan lautnya. Sumber daya ini dapat dilihat dari berbagai ekosistem 23elati yang ada (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Selain itu, Papua juga memiliki potensi sumberdaya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan potensi Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang. Berbagai sumberdaya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir dan Laut Papua. Pengembangan perikanan tangkap meliputi wilayah:

- Laut Papua Utara dengan pusat kegiatan di Biak, dan Jayapura;
- Laut Papua Selatan dengan pusat kegiatan di Mimika dan Merauke.

Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relative sederhana. Perikanan tangkap yang digunakan oleh masyarakat relative masih bersifat tradisional,



contohnya 24relativ insang, pancing dan alat tangkap lainnya seperti tonda, tombak serta kalawai (tombak bermata banyak).

## 2. Perikanan Budidaya

Secara umum, Kawasan Bentang Laut Papua memiliki potensi budidaya kelautan dan perikanan sangat besar. Pemanfaatan ruang pada produksi budidaya kelautan dan perikanan dibagi menurut prioritas penanganannya sebagai berikut:

- Perikanan budidaya laut di Teluk Cendrawasih, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura;
- Perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabupaten Sarmi dan Waropen;
- Perikanan budidaya air tawar (kolam) di Kabupaten Jayawijaya dan Jayapura, serta Kota Jayapura.

Peta produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua tersebar di seluruh pesisir dan pulau-pulau, meskipun pemanfaatannya terbatas di daerah pesisir Jayapura dan Kabupaten Nabire. Di kedua kabupaten potensial tersebut jenis perikanan budidaya perairan umum, dengan jenis ikan unggulan kerapu dan baronang, sedangkan untuk perairan laut terbesar di Kabupaten Biak dengan budidaya unggulan rumput laut yang dapat terus ditingkatkan produktivitasnya.

## C. Potensi Pertambangan

Pulau Papua terbentuk dari hasil benturan Lempeng Benua Australia (Australia Plate) yang bergerak ke Utara dengan Lempeng Pasifik (Pacific Crustal Plate) yang bergerak 24relativ Barat. Konsentrasi mineral-mineral logam diperkirakan terdapat pada Lajur Pegunungan Tengah Papua. Posisi tektonik Papua yang berada di Lingkar Pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan mineral logam maupun non logam yang besar, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.3.

**Tabel. 2.3.**  
**Potensi Mineral Logam dan Non Logam**

KABUPATEN /KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL
<b>Kota Jayapura</b>	S.Numbai, Kodam	Emas
	S. Yapis, Kel. Imbi	Emas
	S. APO	Emas
	S. Entrop	Emas
	S. Perumnas IV	Emas
	S. Borgonjie	Emas
	S. Kujabu, Waena	Emas
<b>Jayapura</b>	Sentani	Kobal, Tungsten, Nikel, Asbes
	S. Kemiri	Emas
	Sentani	Emas
	S. Deyau, Sentani	Emas





KABUPATEN /KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL
	S. Sawe Sentani	Emas
	S. Ayapo Sentani	Emas
	S. Tami	Krom
	Tg. Tanahmerah	Talk
	Waris	Emas, tembaga, timah hitam
	Web	Emas, perak
	Arso	Krom, batubara
	Depapre	Marmer
	Bonggo	Batubara
	Genyem	Batubara
	Siduarisi	Nikel Laterit
	S.Pis dan S.Pas	Emas
	Senggi	Tembaga, timah hitam
	Jayawijaya	Kurulu
Assolokobal		Pasir Kuarsa, batu gamping
Asologaima		Batubara
Borme Utara		Emas
Okbibab		Tungsten
Soba		Timbal-Seng
Holuwan		Timbal-Seng
Bokondini		Tembaga, emas
Tiom		Emas, batu garam
Mbua		Batubara
Nalca		Emas
Dabera		Emas, tembaga
Aboyi		Emas, 25relative25g
Nabire		Yaur
	Logari	Emas
	S. Sanoba, Nabire	Emas
	S.Nabarua, Nabire	Marmer
	Uwapa	Seng, Kaolin
	Jali Bumi, Topo	Emas
	Cemara, Topo	Emas
	Haiura	Emas, tembaga
	Wapoga	Emas
Biak Numfor	Supiori	Emas, Batu Kapur
	Korido	Kalsit
	Biak	Fosfat, Pasir Besi
Kep. Yapen	Yapen	Pasir Besi
	P. Num	Nikel
Waropen	Waropen Bawah	Emas
	Waropen Atas	Batu bara
Merauke	Jair	Emas, perak
	Mediptana	Tembaga, timah hitam, seng
	Kuoh	Emas
Puncak Jaya	Obaa	Emas, Perak
	Ilu	Arsenit, tembaga
	Ilaga	Arsenit, tembaga, emas, perak
Paniai	Enarotali	Pasir kuarsa
	Bilogai	Emas
	Mapia	Garnet



KABUPATEN /KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL
	Kemabu	Tembaga, Emas
	Uwagimamo	Emas, tembaga, bismuth
	Mandoga	Tembaga, emas
	Komopa	Tembaga, emas
<b>Mimika</b>	Tembagapura	Tembaga, perak, emas

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

Berdasarkan potensi geologinya, wilayah Papua mempunyai kekayaan bahan galian mineral yang sangat besar dan potensial. Mulai dari emas, tembaga, nikel, timah, batu kapur, gamping, dan sebagainya tersedia di wilayah ini. Akan tetapi, meskipun kekayaan mineral tersebut sudah teridentifikasi sejak lama, namun hanya sedikit wilayah yang dapat memanfaatkan potensi tersebut. Salah satunya di Kabupaten Mimika yang memiliki potensi tembaga dan emas terbesar di dunia yang selama ini telah dikelola oleh perusahaan multinasional yaitu PT. Freeport Indonesia. Sedangkan di daerah-daerah penghasil emas lainnya seperti di Paniai dan Nabire lebih banyak dikelola oleh penambangan rakyat dengan jumlah yang sangat kecil.

Eksplorasi pertambangan di Papua sangat berisiko. Ditambah lagi cadangannya berada di lokasi-lokasi terpencil yang minim infrastruktur, tersembunyi di hutan dan pegunungan. Pada saat eksplorasi, membutuhkan penelitian khusus untuk menemukan cadangan mineral di Papua. Wilayah pertambangan secara topografi sangat sulit sehingga tak mudah merancang infrastruktur untuk tambang. Semua kondisi ini menjadi kendala bagi investor lain untuk menanamkan modalnya di daerah pertambangan mineral. Sehingga perusahaan besar pertambangan yang ada masih sangat sedikit. Investasi pertambangan di Papua perlu dalam skala besar dengan resiko bisnis tinggi yang membutuhkan stabilitas jangka panjang.

#### **D. Potensi Pariwisata**

Provinsi Papua memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua ialah: Taman Nasional Lorentz di Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya dan Asmat, Taman Nasional Wasur di Merauke, dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Nabire. Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua dikelompokkan menjadi 7 kawasan yaitu obyek wisata bahari, obyek wisata air terjun, obyek wisata pulau, obyek wisata budaya, obyek wisata sejarah, obyek wisata religi, dan obyek wisata alam.



Selain itu, ada beberapa obyek wisata di Provinsi Papua yang tidak termasuk ke dalam 7 kelompok di atas, yaitu: KP Asmat (Kabupaten Asmat), TW Parieri (Kabupaten Biak Numfor), SM. D. Bian (Kabupaten Boven Digoel), DS. Anguruk (Kabupaten Mappi), TR. Timika dan Kuala Kencana (Kabupaten Mimika), KP Paradoi (Kabupaten Nabire), dan KP. Kurudu dan KP. Paradoi (Kabupaten Waropen). Pemanfaatan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

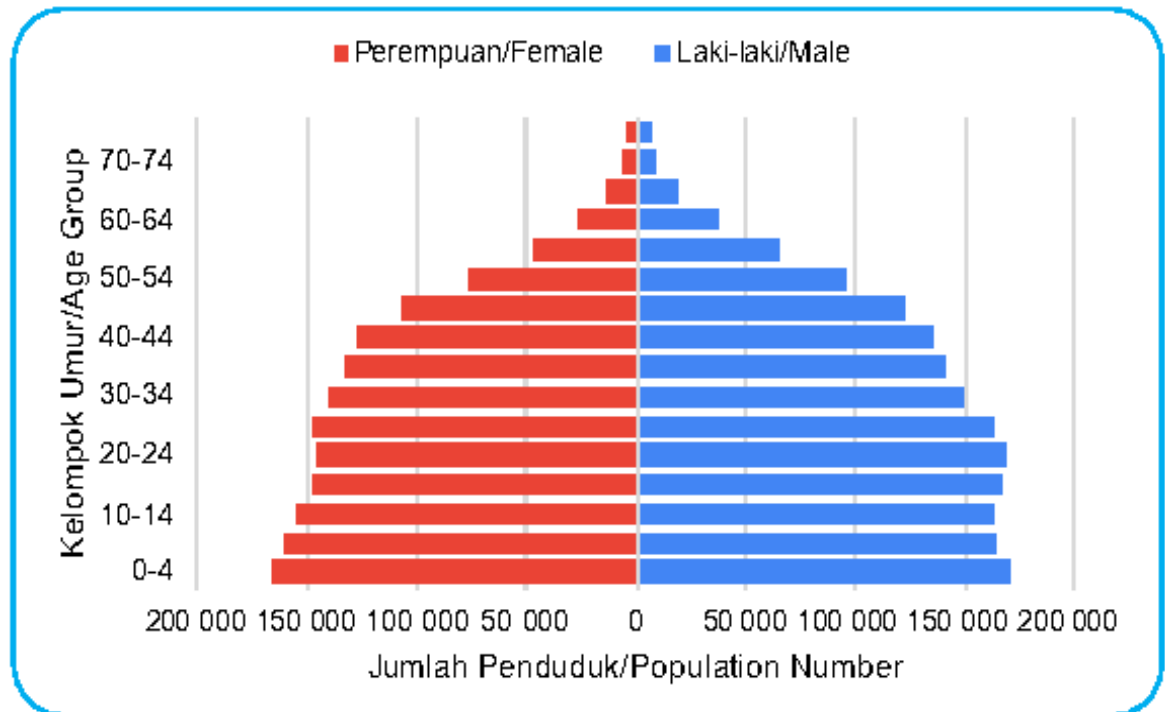
### **2.1.2 Aspek Demografi**

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 mencatat jumlah penduduk Papua pada bulan September 2020 sebanyak 4.303.707 juta jiwa. Dari jumlah tersebut 53,32% berjenis kelamin laki-laki sedangkan 46,68% nya Perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Papua terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Papua mengalami penambahan dengan laju pertumbuhan penduduk 4,27%.

Berdasarkan bentuk piramida penduduk yang ekspansif mencirikan struktur penduduk di Provinsi Papua selama ini adalah struktur penduduk muda. Lihat Gambar 2.9 berikut ini.



**Gambar 2.9**  
**Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua**



Sumber : Papua Dalam Angka 2020, BPS Provinsi Papua

Menurut komposisi penduduk berdasarkan kelompok umurnya, Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 55,97 persen dari total populasi, meningkat hingga mencapai 69,73 persen di tahun 2020. Perbedaan yang tajam antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia masih berada dalam masa bonus demografi, tidak terkecuali di Provinsi Papua.





**Gambar 2.10**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua (%)**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2003-2010	2010-2019 <sup>2</sup>
(1)	(5)	(6)
<i>Kabupaten/Regency</i>		
1. Merauke	28,71	15,26
2. Jayawijaya	90,00	10,20
3. Jayapura	65,79	16,77
4. Nabire	70,27	14,83
5. Kepulauan Yapen	31,86	21,05
6. Biak Numfor	28,43	19,27
7. Paniai	162,00	14,67
8. Puncak Jaya	144,93	26,76
9. Mimika	102,54	19,73
10. Boven Digoel	-	22,93
11. Mappi	-	25,50
12. Asmat	-	26,15
13. Yahukimo	-	15,05
14. Pegunungan Bintang	-	14,86
15. Tolikara	-	20,57
16. Sarmi	-	21,65
17. Keerom	-	16,48
18. Waropen	-	26,47
19. Supiori	-	29,52
20. Mamberamo Raya	-	30,27
21. Nduga	-	23,70
22. Lanny Jaya	-	19,58
23. Mamberamo Tengah	-	20,78
24. Yalimo	-	22,23
25. Puncak	-	20,43
26. Dogiyai	-	15,31
27. Intan Jaya	-	20,78
28. Deiyai	-	16,95
<i>Kota/Municipality</i>		
1. Jayapura	47,41	15,95
<b>Papua</b>	<b>70,44</b>	<b>18,28</b>

Sumber : Papua Dalam Angka 2020, BPS Provinsi Papua

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2019), laju pertumbuhan penduduk Papua sebesar 18,28 persen per tahun. Terjadi perlambatan laju pertumbuhan penduduk jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk periode 2003-2010 yang sebesar 70,44 persen, meski demikian, laju pertumbuhan



penduduk Papua periode ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sebesar 1,25 persen.

**Gambar 2.11**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	169 762	165 491	335 253
5-9	164 163	160 344	324 507
10-14	163 091	154 796	317 887
15-19	166 965	147 490	314 455
20-24	168 098	146 419	314 517
25-29	162 671	147 671	310 342
30-34	149 656	140 101	289 757
35-39	140 149	132 481	272 630
40-44	134 943	126 947	261 890
45-49	121 920	107 063	228 983
50-54	96 235	75 602	171 837
55-59	65 522	47 631	113 153
60-64	37 252	26 756	64 008
65-69	18 827	13 632	32 459
70-74	8 917	6 820	15 737
75+	6 519	5 368	11 887
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 774 690</b>	<b>1 604 612</b>	<b>3 379 302</b>

Sumber : Papua Dalam Angka 2020, BPS Provinsi Papua

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Papua berjumlah 1,77 juta orang, dan jumlah penduduk perempuan di Provinsi Papua adalah sekitar 1,60 juta orang.



**Gambar 2.12**  
**Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Penduduk (ribu jiwa) <i>Population (thousand person)</i>	
	2010 <sup>1</sup>	2019 <sup>2</sup>
(1)	(2)	(4)
<i>Kabupaten/Regency</i>		
1. Merauke	195 716	227 411
2. Jayawijaya	196 085	217 887
3. Jayapura	111 943	131 802
4. Nabire	129 893	150 308
5. Kepulauan Yapen	82 951	101 204
6. Biak Numfor	126 798	152 401
7. Paniai	153 432	177 410
8. Puncak Jaya	101 148	129 300
9. Mimika	182 001	219 689
10. Boven Digoel	55 784	69 211
11. Mappi	81 658	103 292
12. Asmat	76 577	97 490
13. Yahukimo	164 512	190 887
14. Pegunungan Bintang	65 434	75 788
15. Tolikara	114 427	139 111
16. Sarmi	32 971	40 515
17. Keerom	48 536	57 100
18. Waropen	24 639	31 514
19. Supiori	15 874	20 710
20. Mamberamo Raya	18 365	24 086
21. Nduga	79 053	98 595
22. Lanny Jaya	148 522	178 995
23. Mamberamo Tengah	39 537	48 201
24. Yalimo	50 763	62 605
25. Puncak	93 218	113 204
26. Dogiyai	84 230	97 902
27. Intan Jaya	40 490	49 293
28. Deiyai	62 119	73 199
<i>Kota/Municipality</i>		
1. Jayapura	256 705	300 192
<b>Papua</b>	<b>2 833 381</b>	<b>3 379 302</b>

Sumber : Papua Dalam Angka 2020, BPS Provinsi Papua

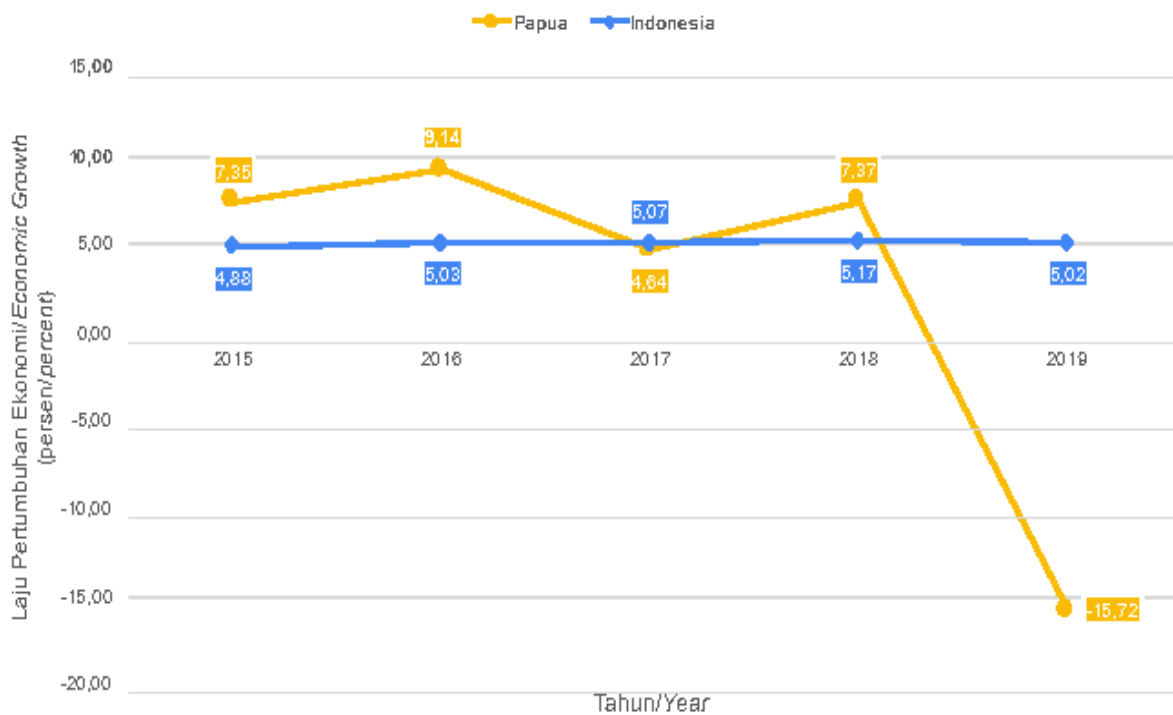


### 2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### A. PDRB Perkapita

Secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Terlihat bahwa capaian PDRB perkapita provinsi Papua secara umum mengalami peningkatan positif. Nilai PDRB per kapita Papua pada Tahun 2019 sebesar Rp 56,14 juta, menurun jika dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 63,43 juta atau turun sebesar -11,50 persen. Penurunan ini disebabkan terutama oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang selama tahun 2019 mengalami penurunan produksi. Proporsi penduduk yang bekerja pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sangat kecil, maka jika ingin melihat gambaran PDRB per Kapita masyarakat Papua secara umum lebih baik dengan melihat PDRB tanpa Pertambangan dan Penggalian. Jika tanpa pertambangan dan penggalian, PDRB per kapita Tahun 2019 sebesar Rp 42,88 juta, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2018 yang senilai Rp 40,15 juta yaitu sebesar 6,79 persen.

**Gambar 2.13**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Papua dan Indonesia (%), 2015-2019**



Sumber : Papua Dalam Angka 2020, BPS Provinsi Papua





## B. Indeks Gini

**Tabel. 2.4.**  
**Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota 2018-2020**

Kabupaten/Kota	Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota		
	2018	2019	2020
Merauke	0,388	0,386	0,380
Jayawijaya	0,318	0,318	0,342
Jayapura	0,337	0,401	0,432
Nabire	0,367	0,360	0,349
Kepulauan Yapen	0,374	0,381	0,400
Biak Numfor	0,430	0,372	0,401
Paniai	0,367	0,351	0,380
Puncak Jaya	0,352	0,415	0,376
Mimika	0,263	0,293	0,339
Boven Digoel	0,424	0,392	0,448
Mappi	0,416	0,416	0,427
Asmat	0,385	0,398	0,403
Yahukimo	0,400	0,414	0,394
Pegunungan Bintang	0,380	0,373	0,448
Tolikara	0,361	0,340	0,388
Sarmi	0,420	0,436	0,424
Keerom	0,382	0,432	0,396
Waropen	0,279	0,369	0,346
Supiori	0,382	0,364	0,319
Mamberamo Raya	0,405	0,411	0,211
Nduga	0,212	0,188	0,187
Lanny Jaya	0,232	0,297	0,281
Mamberamo Tengah	0,248	0,248	0,330
Yalimo	0,337	0,320	0,362
Puncak	0,233	0,321	0,302
Dogiyai	0,359	0,366	0,326
Intan Jaya	0,358	0,312	0,269
Deiyai	0,351	0,336	0,357
Kota Jayapura	0,310	0,305	0,278
Provinsi Papua	0,384	0,394	0,392

Sumber : Papua Dalam Angka 2020, BPS Provinsi Papua

Secara umum, nilai Gini Ratio Provinsi Papua selama periode 2018 s/d Maret 2020 terus mengalami fluktuasi. Apabila dilihat berdasarkan wilayah adat, Anim Ha merupakan wilayah adat yang cenderung mengalami perbaikan ketimpangan pendapatan sepanjang tahun 2018-2020. Sedangkan wilayah lainnya cenderung mengalami fluktuasi ketimpangan pendapatan.



### C. Tingkat Kemiskinan

Pada bulan Maret 2020, tingkat kemiskinan yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan dengan Bulan Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Bulan Maret 2020 mengalami penurunan 1,62% (yoy) menjadi 911,37 ribu orang, namun meningkat 1,12% dibandingkan dengan Bulan September 2020. Persentase penduduk miskin pada Bulan Maret 2020 memiliki tren yang sama dengan jumlah penduduk miskin, yaitu menurun dibandingkan dengan Bulan Maret 2019, namun meningkat jika dibandingkan dengan Bulan September 2019. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,64%.

**Tabel. 2.5.**  
**Indikator-Indikator Kemiskinan di Provinsi Papua**

Tahun	Bulan	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapital/bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persentase Penduduk Miskin
2017	Maret	457.541	7,49	2,82	27,62
	September	464.056	6,24	1,93	27,76
2018	Maret	499.463	6,73	2,28	27,74
	September	518.811	5,91	1,82	27,43
2019	Maret	540.099	7,17	2,60	27,53
	September	557.099	6,07	1,98	26,64
2020	Maret	563.099	6,16	2,08	26,6
	September	580,643	6,90	2,35	26,8

Sumber : BPS, 2021 (diolah)

Meskipun telah mengalami peningkatan, Provinsi Papua masih menjadi Provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia. Sementara, persentase penduduk miskin nasional pada Maret 2020 sebesar 10,08%, Garis Kemiskinan (GK) merupakan suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. GK di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan. pada periode September 2019, GK Papua Rp 557.236,00 lalu mengalami peningkatan menjadi Rp 562.992,00 pada periode Maret 2020, nilai tersebut jauh lebih



tinggi dari rata-rata GK nasional sebesar Rp 454.652,00. Hal tersebut menandakan biaya hidup minimal di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan.

Kemudian, dari tingkat kesenjangan pendapatan menunjukkan terjadinya penurunan, terjadinya penurunan dilihat dari nilai gini 0,394 pada periode Maret 2019 menjadi 0,392 pada periode Maret 2020. Kesenjangan antara pengeluaran rata-rata penduduk miskin dengan GK yang ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan mencapai sebesar 6,16 pada periode Maret 2020 dibandingkan dengan periode Maret 2019 yang tercatat sebesar 7,17.

**Tabel. 2.6.**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan 2016 – 2020**

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) <i>Poverty Line</i> (rupiah/capita/month)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor People</i> (thousand)		
	Perkotaan <i>Urban</i>	Perdesaan <i>Rural</i>	Perkotaan <i>Urban</i>	Perdesaan <i>Rural</i>	Perkotaan + Perdesaan <i>Urban + Rural</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2016</b>					
Maret/ March	466 985	412 991	37,08	874,25	911,33
September/ September	479 294	425 264	35,77	879,10	914,87
<b>2017</b>					
Maret/ March	498 368	441 287	39,17	858,51	897,69
September/ September	508 403	446 994	41,06	869,36	910,42
<b>2018</b>					
Maret/ March	542 542	482 000	41,28	876,35	917,63
September/ September	566 903	499 615	37,78	877,44	915,22
<b>2019</b>					
Maret/ March	588 744	520 117	41,01	885,35	926,36
September/ September	603 458	538 088	43,93	857,02	900,95
<b>2020</b>					
Maret/ March	611 115	542 695	43,63	857,74	911,37
September/ September	622 346	562 412	44,73	867,50	912,23

Sumber: BPS Papua, PDA Provinsi Papua 2021 (data diolah)

Menurut kewilayahan, daerah yang paling miskin selama ini adalah di perdesaan. Sampai tahun 2020 (September) tercatat kemiskinan di perdesaan mencapai 35,69%, atau turun sebesar 1,38% dibandingkan Tahun 2016. Sedangkan di perkotaan sebesar 4,59% yang mengalami kenaikan sebesar 0,38% dibandingkan tahun 2016.



**Tabel. 2.7.**  
**Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2015-2020 (%)**

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index		
	Perkotaan Urban	Perdesaan Rural	Perkotaan+ Perdesaan Urban+Rural
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>2016</b>			
Maret/ March	0,88	12,39	9,37
September/ September	0,78	9,82	7,43
<b>2017</b>			
Maret/ March	0,65	10,03	7,49
September/ September	0,56	8,40	6,24
<b>2018</b>			
Maret/ March	0,84	8,98	6,73
September/ September	0,76	7,94	5,91
<b>2019</b>			
Maret/ March	0,71	9,76	7,17
September/ September	0,59	8,26	6,07
<b>2020</b>			
Maret/ March	0,62	8,26	6,16
September/ September	0,82	9,34	6,90
<b>2015</b>			
Maret/ March	0,22	5,60	4,19
September/ September	0,20	3,53	2,65
<b>2016</b>			
Maret/ March	0,15	3,81	2,82
September/ September	0,08	2,63	1,93
<b>2017</b>			
Maret/ March	0,24	3,06	2,28
September/ September	0,23	2,45	1,82
<b>2018</b>			
Maret/ March	0,17	3,58	2,60
September/ September	0,13	2,72	1,98
<b>2019</b>			
Maret/ March	0,14	2,85	2,08
September/ September	0,17	3,22	2,35

Sumber data : BPS Papua, PDA Provinsi Papua 2021 (data diolah)

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, tingkat keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan juga perlu diukur dari seberapa besar





perubahan yang terjadi pada tingkat kedalaman (P1) dan keparahan (P2) dari kemiskinan. Dimana semakin tinggi nilai indeks P1 ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang menggambarkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Berikutnya, semakin tinggi angka indeks P2 maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Papua selama tahun 2016-2020 cenderung mengalami fluktuatif dalam kisaran yang tidak terlalu berbeda jauh, namun telah menunjukkan perbaikan yang positif.

#### D. Indeks Pembangunan Manusia

**Tabel. 2.8.**  
**Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua Tahun 2016-2020**

IPM dan Komponen Pembentuknya	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Angka Harapan Hidup (Tahun)</b>	65,1	65,1	65,4	65,65	65,79
<b>Harapan Lama Sekolah (Tahun)</b>	10,2	10,5	10,8	11,05	11,08
<b>Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)</b>	6,1	6,2	6,5	6,65	6,69
<b>Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)</b>	6637	6996	7159	7,336	6,359
<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	58,05	59,09	60,06	60,84	60,44
<b>Pertumbuhan IPM (%)</b>	1,4	1,79	1,64	1,23	-0,66

Sumber data : BPS Papua, PDA Provinsi Papua 2021 (data diolah)

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pada Tahun 2020 sebesar 60,44. Angka ini menurun sebesar 0,40 poin atau turun 0,66 persen dibandingkan tahun 2019 dan Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh Pendidikan selama 6,69 tahun, hampir setara masa pendidikan untuk menamatkan jenjang pendidikan kelas 1 SMP. Nilai tersebut lebih lama 0,04 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) sekaligus dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

**Tabel. 2.9.**  
**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015-2020**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Kabupaten/Regency</i>						
1. Merauke	67,75	68,09	68,64	69,38	69,98	70,09
2. Jayawijaya	54,18	54,96	55,99	56,82	57,79	58,03
3. Jayapura	70,04	70,50	70,97	71,25	71,84	71,69
4. Nabire	66,49	66,64	67,11	67,70	68,53	68,83
5. Kepulauan Yapen	65,28	65,55	66,07	67,00	67,76	67,66
6. Biak Numfor	70,85	71,13	71,56	71,96	72,57	72,19
7. Paniai	54,20	54,34	54,91	55,83	56,58	56,31
8. Puncak Jaya	44,87	45,49	46,57	47,39	48,33	48,37
9. Mimika	70,89	71,64	72,42	73,15	74,13	74,19
10. Boven Digoel	59,02	59,35	60,14	60,83	61,51	61,53
11. Mappi	56,11	56,54	57,10	57,72	58,30	58,15
12. Asmat	46,62	47,31	48,49	49,37	50,37	50,55
13. Yahukimo	46,63	47,13	47,95	48,51	49,25	49,37
14. Pegunungan Bintang	40,91	41,90	43,24	44,22	45,21	45,44
15. Tolikara	46,38	47,11	47,89	48,85	49,68	49,50
16. Sarmi	60,99	61,27	62,31	63,00	63,45	63,63
17. Keerom	63,43	64,10	64,99	65,75	66,59	66,40
18. Waropen	62,35	63,10	64,08	64,80	65,34	64,94
19. Supiori	60,09	60,59	61,23	61,84	62,30	62,30
20. Mamberamo Raya	48,29	49,00	50,25	51,24	52,20	51,78
21. Nduga	25,47	26,56	27,87	29,42	30,75	31,55
22. Lanny Jaya	44,18	45,16	46,49	47,34	48,00	47,86
23. Mamberamo Tengah	43,55	44,15	45,50	46,41	47,23	47,57
24. Yalimo	44,32	44,95	46,19	47,13	48,08	48,34
25. Puncak	39,41	39,96	41,06	41,81	42,70	43,04

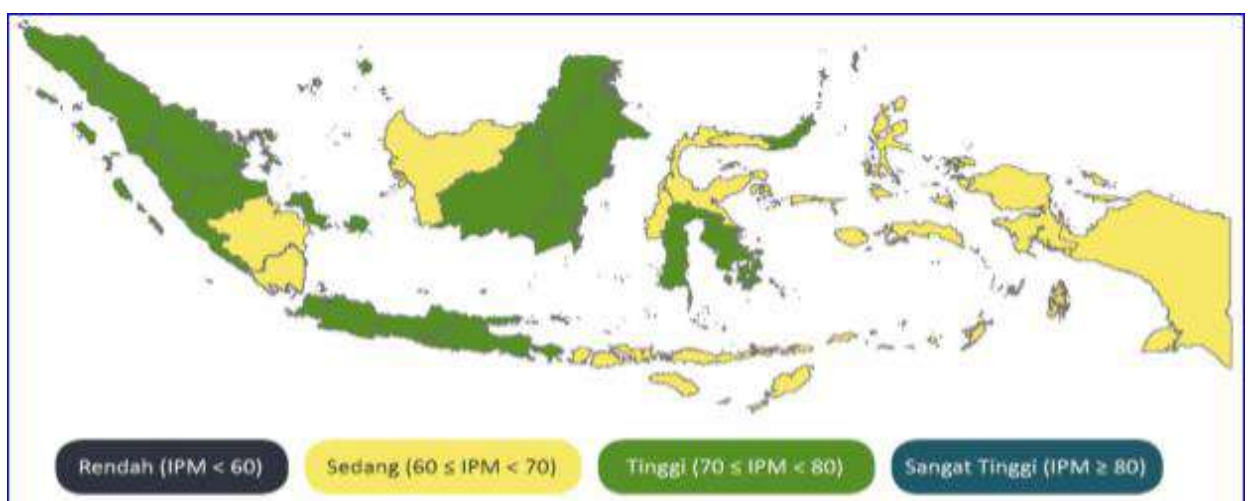


Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26. Dogiyai	52,78	53,32	54,04	54,44	55,41	54,84
27. Intan Jaya	44,35	44,82	45,68	46,55	47,51	47,79
28. Deiyai	48,28	48,50	49,07	49,55	50,11	49,46
Kota/Municipality						
1. Jayapura	78,05	78,56	79,23	79,58	80,16	79,94
<b>Papua</b>	<b>57,25</b>	<b>58,05</b>	<b>59,09</b>	<b>60,06</b>	<b>60,84</b>	<b>60,44</b>

Sumber data : BPS Papua, PDA Provinsi Papua 2021 (data diolah)

Dalam perhitungan IPM terdapat Beberapa indikator yang sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungannya. Seperti Angka melek huruf yang dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik juga PDB per kapita yang dianggap tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

**Gambar 2.14**  
**IPM Nasional menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2020**



Sumber: BPS Papua, 2020

Dan selama tahun 2017-2020, Papua menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia. Kondisi ini berdampak pada terjadi



perubahan status pembangunan manusia Papua dari berstatus “rendah” menjadi berstatus “sedang”.

IPM kabupaten/kota di wilayah Papua sepanjang tahun 2015-2020 sebagian besar masuk dalam kategori IPM rendah. Kota Jayapura selama periode tersebut dapat dikatakan yang paling konsisten dalam peringkat pertama di Provinsi Papua, dimana sampai dengan tahun 2020 nilai IPM Kota Jayapura telah mencapai 80,16 poin. Kemudian di ikuti dengan Kabupaten Mimika pada urutan ke-2, dan Kabupaten Biak Numfor di urutan ke3. Adapun pada tahun 2020 daerah dengan IPM terendah di Kabupaten Nduga (urutan ke 29), Puncak (urutan 28) dan Pegunungan Bintang (urutan ke 27).

### E. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kondisi literasi suatu masyarakat disuatu daerah. Angka melek huruf ini merupakan salah satu komponen penentu tingkat kualitas pembangunan pendidikan di suatu daerah. Oleh karena itu Angka Melek huruf merupakan bagian dari indikator penting pembangunan daerah khususnya di bidang pendidikan. Provinsi Papua tampaknya kurang optimal untuk meningkatkan penduduk yang melek huruf sepanjang tahun 2015-2018.

**Tabel. 2.10.**  
**Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH)**  
**Penduduk Usia 15-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020**

Kabupaten	Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) 15-24 Menurut Kabupaten/Kota (Persen)	
	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Buta Huruf (ABH)
	2020	2020
Merauke	100,00	-
Jayawijaya	86,83	13,17
Jayapura	99,05	0,95
Nabire	100,00	-
Kepulauan Yapen	99,44	0,56
Biak Numfor	99,84	0,16
Paniai	78,49	21,51
Puncak Jaya	69,34	30,66
Mimika	99,98	0,02
Boven Digoel	98,12	1,88
Mappi	90,44	9,56



Kabupaten	Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) 15-24 Menurut Kabupaten/Kota (Persen)	
	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Buta Huruf (ABH)
	2020	2020
Asmat	80,85	19,15
Yahukimo	89,34	10,66
Pegunungan Bintang	86,57	13,43
Tolikara	82,29	17,71
Sarmi	100,00	-
Keerom	96,84	3,16
Waropen	99,34	0,66
Supiori	100,00	-
Mamberamo Raya	97,31	2,69
Nduga	85,87	14,13
Lanny Jaya	81,12	18,88
Mamberamo Tengah	75,20	24,80
Yalimo	89,95	10,05
Puncak	75,42	24,58
Dogiyai	74,49	25,51
Intan Jaya	74,90	25,10
Deiyai	72,88	27,12
Kota Jayapura	99,62	0,38
Provinsi Papua	90,78	9,22

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

Dalam tabel di atas terlihat bahwa AMH (Angka Melek Huruf) Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 90,78%, sedangkan Angka Buta Huruf adalah 9,22%. Keadaan ini menunjukkan bahwa angka rata-rata di Provinsi Papua cukup menunjukkan keadaan yang cenderung makin baik.

## F. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator penting capaian pembangunan pendidikan di daerah dapat dilihat dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Data ini digunakan untuk melihat akses penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.





**Tabel. 2.11.**  
**Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua Tahun 2018 - 2020**

Kabupaten	Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2018	2019	2020
Merauke	8,49	8,56	8,72
Jayawijaya	5,17	5,30	5,51
Jayapura	9,60	9,79	10,04
Nabire	9,53	9,70	10,00
Kepulauan Yapen	9,07	9,19	9,46
Biak Numfor	10,00	10,22	10,33
Paniai	4,20	4,38	4,57
Puncak Jaya	3,51	3,61	3,62
Mimika	9,76	9,91	10,17
Boven Digoel	8,32	8,55	8,78
Mappi	6,29	6,30	6,31
Asmat	4,74	4,82	4,94
Yahukimo	4,01	4,02	4,26
Pegunungan Bintang	2,49	2,61	2,81
Tolikara	3,62	3,63	3,64
Sarmi	8,52	8,53	8,82
Keerom	7,83	8,00	8,01
Waropen	8,87	9,18	9,20
Supiori	8,39	8,60	8,81
Mamberamo Raya	5,46	5,65	5,66
Nduga	0,85	0,97	1,13
Lanny Jaya	3,18	3,19	3,20
Mamberamo Tengah	2,78	2,90	3,15
Yalimo	2,44	2,58	2,79
Puncak	1,95	1,96	2,15
Dogiyai	4,91	4,92	4,93
Intan Jaya	2,51	2,64	2,84
Deiyai	2,99	3,00	3,01
Kota Jayapura	11,30	11,55	11,56
Provinsi Papua	6,52	6,65	6,69

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

Dari table di atas, secara umum perkembangan RLS Provinsi Papua mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih dibawah target program pendidikan wajib belajar 9 tahun, dimana hingga tahun 2019 tercatat RLS Provinsi Papua hanya



mencapai 6,69 tahun. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua dalam menyerap penduduk usia sekolah. Beberapa daerah di Provinsi Papua telah memiliki capaian RLS yang cukup baik, namun sebagian besar kabupaten di Provinsi Papua masih memiliki capaian RLS yang relatif rendah.

## G. Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Lama Sekolah, keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dalam capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah bagi penduduk usia sekolah. Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan dapat dimanfaatkan penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

**Tabel. 2.12.**  
**Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua Tahun 2018 - 2020**

Kabupaten	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2018	2019	2020
Merauke	13,24	13,59	13,88
Jayawijaya	11,58	11,93	12,27
Jayapura	14,17	14,19	14,20
Nabire	11,14	11,59	11,92
Kepulauan Yapen	12,24	12,72	12,73
Biak Numfor	13,94	13,95	13,96
Paniai	10,47	10,48	10,49
Puncak Jaya	6,59	6,96	7,24
Mimika	11,77	12,17	12,40
Boven Digoel	10,99	11,06	11,07
Mappi	10,53	10,54	10,55
Asmat	8,47	8,74	9,02
Yahukimo	7,59	7,60	7,61
Pegunungan Bintang	5,79	6,14	6,25
Tolikara	8,04	8,28	8,60
Sarmi	11,55	11,81	12,05
Keerom	12,14	12,41	12,42
Waropen	12,77	12,78	12,79
Supiori	12,72	12,73	12,74



Kabupaten	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2018	2019	2020
Mamberamo Raya	11,30	11,78	11,79
Nduga	2,95	3,29	3,61
Lanny Jaya	8,01	8,35	8,62
Mamberamo Tengah	8,33	8,63	8,93
Yalimo	8,46	8,83	9,11
Puncak	4,93	5,19	5,39
Dogiyai	10,13	10,57	10,58
Intan Jaya	7,11	7,36	7,65
Deiyai	9,79	9,80	9,81
Kota Jayapura	14,99	15,00	15,01
Provinsi Papua	10,83	11,05	11,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2021

Dari table di atas secara umum, perkembangan HLS Provinsi Papua mengalami sedikit peningkatan. Dalam kurun waktu lima tahun capaian HLS Provinsi Papua rata-rata meningkat sebesar 0,24 poin per tahun, dimana pada tahun 2020 HLS Provinsi Papua mencapai 11,08 tahun, yang mengindikasikan secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal.

## H. Angka Harapan Hidup

Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan, indikator penting yang perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator pada level dampak yang mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat secara umum pada suatu waktu tertentu. Berikut ini merupakan perkembangan AHH Provinsi Papua.

Upaya mempercepat kenaikan AHH tidak semata hanya urusan bidang kesehatan saja. AHH ini sangat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, proporsi pengeluaran rumah tangga, aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi antarsektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang sekaligus juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar wilayah yang masih terasa sampai saat ini.



**Tabel. 2.13.**  
**Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua Tahun 2018 - 2020**

Kabupaten	Angka Harapan Hidup (Tahun)		
	2018	2019	2020
Merauke	66,71	66,93	67,00
Jayawijaya	58,99	59,39	59,64
Jayapura	66,66	66,93	67,05
Nabire	67,72	67,97	68,06
Kepulauan Yapen	68,85	69,06	69,12
Biak Numfor	68,00	68,20	68,25
Paniai	65,94	66,27	66,44
Puncak Jaya	64,65	64,98	65,15
Mimika	72,06	72,27	72,32
Boven Digoel	59,16	59,64	59,97
Mappi	64,56	64,91	65,11
Asmat	56,88	57,53	58,05
Yahukimo	65,52	65,80	65,93
Pegunungan Bintang	64,08	64,34	64,44
Tolikara	65,30	65,58	65,71
Sarmi	66,00	66,26	66,36
Keerom	66,35	66,60	66,69
Waropen	65,99	66,24	66,33
Supiori	65,53	65,81	65,94
Mamberamo Raya	57,18	57,55	57,77
Nduga	54,82	55,12	55,27
Lanny Jaya	65,79	66,00	66,06
Mamberamo Tengah	63,14	63,44	63,59
Yalimo	65,10	65,34	65,42
Puncak	65,33	65,61	65,74
Dogiyai	65,32	65,60	65,73
Intan Jaya	65,26	65,51	65,60
Deiyai	64,83	65,11	65,24
Kota Jayapura	70,15	70,38	70,45
Provinsi Papua	65,36	65,65	65,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua 2018

Secara umum capaian AHH Provinsi Papua mengalami kecenderungan yang relatif meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai angka tertinggi di tahun 2020 sebesar 65,79 tahun, atau naik sebesar 0,4 tahun bila dibandingkan tahun 2019.

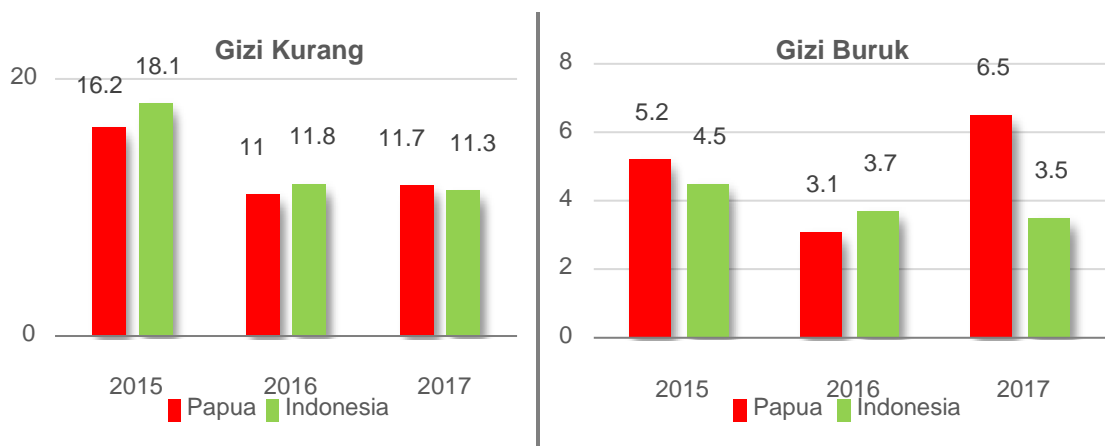


Meningkatnya AHH menunjukkan adanya keberhasilan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua.

### I. Persentase Balita Gizi Buruk

Pemantauan Status Gizi (PSG) merupakan kegiatan pemantauan perkembangan status gizi balita yang dilaksanakan setiap tahun secara berkesinambungan untuk memberikan gambaran tentang kondisi status gizi balita. Status gizi buruk bayi usia 0-23 bulan di Provinsi Papua cukup memprihatinkan, karena selama tahun 2015-2017 kecenderungannya mengalami peningkatan, yakni dari 5,2% di tahun 2015 menjadi 6,5% di tahun 2017. Padahal untuk jangka waktu yang sama secara keseluruhan gizi buruk di Indonesia mengalami penurunan. Angka gizi buruk di Papua juga terlihat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Indonesia yang pada tahun 2017 hanya sebesar 3,5%.

**Gambar 2.15**  
**Status Gizi Anak Balita Umur 0 - 23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2015 - 2017 (%)**



**Tabel. 2.14.**  
**Angka Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020 Berdasarkan Berat Badan dan Tinggi Badan**

No	Kabupaten/ Kota	BB/U				TB/U			
		Sangat Kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Risiko Lebih	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
1	Merauke	125	426	3397	306	168	535	3463	50
2	Jayawijaya	8	41	546	14	53	127	422	7
3	Jayapura	38	226	2130	169	88	292	2030	9
4	Nabire	152	584	4851	303	187	598	5024	55
5	Kepulauan Yapen	48	154	1614	16	58	212	1546	14
6	Biak Numfor	106	460	2680	129	131	294	2830	22





No	Kabupaten/ Kota	BB/U				TB/U			
		Sangat Kurang	Kurang	Berat Badan Normal	Risiko Lebih	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
7	Paniai	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Puncak Jaya	0	0	294	6	0	1	299	0
9	Mimika	137	478	4897	376	219	601	4663	71
10	Boven Digoel	154	603	3411	100	342	793	3098	33
11	Mappi	75	322	2468	65	133	252	2512	23
12	Asmat	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Yahukimo	0	0	1	0	0	0	1	0
14	Pegunungan Bintang	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tolikara	2	15	190	4	0	6	205	0
16	Sarmi	11	66	529	51	15	82	554	6
17	Keerom	34	152	1339	108	34	169	1419	3
18	Waropen	37	112	445	13	28	70	393	5
19	Supiori	27	100	419	15	22	93	445	0
20	Mamberamo Raya	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Nduga	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Lanny Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Mamberamo Tengah	20	58	562	24	47	117	496	4
24	Yalimo	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Puncak	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dogiyai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Intan Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Deiyai	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kota Jayapura	167	776	6788	558	248	653	7187	58
	<b>Jumlah</b>	<b>1141</b>	<b>4573</b>	<b>36561</b>	<b>2257</b>	<b>1773</b>	<b>4895</b>	<b>36587</b>	<b>360</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2021

**Tabel. 2.15.**  
**Angka Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahu 2020 Berdasarkan Berat Badan per Tinggi Badan**

No	Kabupaten/Kota	BB/TB					
		Gizi Buruk	Gizi Kurang	Normal	Risiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
1	Kab Merauke	177	308	3194	388	108	53
2	Kab Jayawijaya	9	23	497	61	7	11
3	Kab Jayapura	34	143	1835	281	98	30
4	Kab Nabire	250	435	4518	482	110	76
5	Kab Kepulauan Yapen	24	124	1611	56	13	4
6	Kab Biak Numfor	91	256	2495	267	86	65
7	Kab Paniai	0	0	0	0	0	0



No	Kabupaten/Kota	BB/TB					
		Gizi Buruk	Gizi Kurang	Normal	Risiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
8	Kab Puncak Jaya	0	0	223	71	6	0
9	Kab Mimika	114	271	4459	514	148	56
10	Kab Boven Digoel	85	345	3479	246	71	41
11	Kab Mappi	57	189	2498	132	32	15
12	Kab Asmat	0	0	0	0	0	0
13	Kab Yahukimo	0	0	1	0	0	0
14	Kab Pegunungan Bintang	0	0	0	0	0	0
15	Kab Tolikara	5	13	184	9	0	0
16	Kab Sarmi	16	41	517	60	15	7
17	Kab Keerom	31	101	1297	133	40	23
18	Kab Waropen	36	65	381	16	2	0
19	Kab Supiori	14	44	465	26	11	1
20	Kab Mamberamo Raya	0	0	0	0	0	0
21	Kab Nduga	0	0	0	0	0	0
22	Kab Lanny Jaya	0	0	0	0	0	0
23	Kab Mamberamo Tengah	19	31	519	71	17	7
24	Kab Yalimo	0	0	0	0	0	0
25	Kab Puncak	0	0	0	0	0	0
26	Kab Dogiyai	0	0	0	0	0	0
27	Kab Intan Jaya	0	0	0	0	0	0
28	Kab Deiyai	0	0	0	0	0	0
29	Kota Jayapura	159	591	6422	654	226	112
<b>JUMLAH</b>		<b>1121</b>	<b>2980</b>	<b>34595</b>	<b>3467</b>	<b>990</b>	<b>501</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2021

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Provinsi Papua termasuk paling tinggi memiliki stunting di atas rata-rata Indonesia bersama 19 provinsi lainnya.

Keadaan stunting yang terlihat tinggi di Provinsi Papua ini, yaitu mencapai 32,80%, perlu ditangani segera dengan efektif, agar manfaat bonus demografi yang akan diterima selama periode 2020-2030 mendatang dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Papua.



## J. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di Papua menurun dibandingkan kondisi Februari 2020. Jumlah angkatan kerja mencapai 1,84 juta orang atau bertambah 6.240 ribu orang dibandingkan Agustus 2019.

Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2020 berkurang dibandingkan Agustus 2019. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Papua pada Februari 2020 mengalami penurunan sekitar 2,19 persen dibanding Agustus 2019.

**Tabel. 2.16.**  
**Angka Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama**  
**Provinsi Papua, Februari 2018 –Agustus 2020**

Jenis Kegiatan Utama	2018		2019		2020
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Penduduk 15+	2.332.383	2.320.862	2.378.923	2.394.887	2.433.130
2. Angkatan Kerja	1.851.486	1.835.963	1.808.848	1.842.203	1.830.409
Bekerja	1.797.668	1.777.207	1.746.963	1.775.030	1.764.113
Penganggur	53.818	58.756	61.885	67.173	66.296
3. Bukan Angkatan Kerja	480.897	484.899	570.075	552.684	602.721
Sekolah	193.332	176.043	220.158	188.438	217.936
Mengurus RT	243.493	256.249	277.906	293.959	316.567
Lainnya	44.072	52.607	72.011	70.287	68.218
4. TPAK (%)	79,38	79,11	76,04	76,92	75,23
5. TPT (%)	2,91	3,20	3,42	3,65	3,62

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021

Jumlah pengangguran di Papua pada Agustus 2020 sebanyak 66.296 orang. Angka tersebut mengalami peningkatan sejak Februari 2020. Jumlah pengangguran bertambah 4.411 orang dibandingkan dengan keadaan tahun lalu pada periode sama.

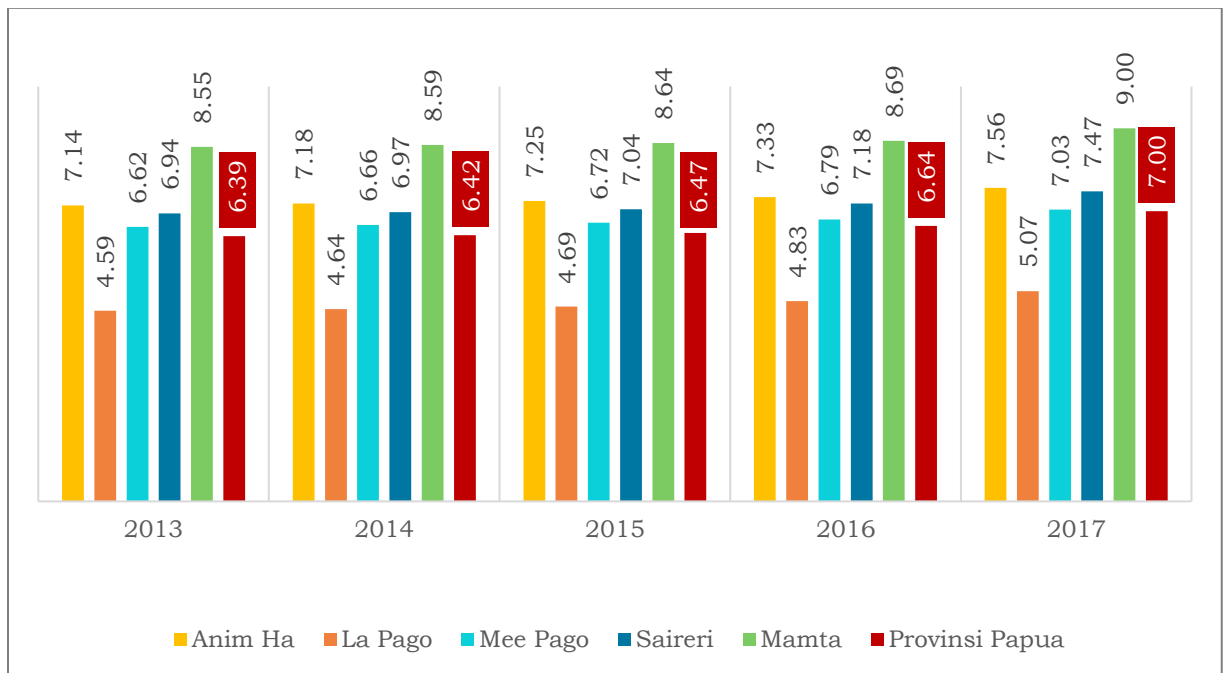


## 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.1.4.1 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Papua, sebagaimana yang ditunjukkan pada Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2013-2017 sebesar 2,27%. Dimana pada tahun 2017 tercatat pengeluaran per kapita rumahtangga di Papua kurang lebih sebesar Rp. 7 juta (lihat Gambar 2.16).

**Gambar 2.16**  
**Pengeluaran Per Kapita Riil di Provinsi Papua (juta rupiah)**

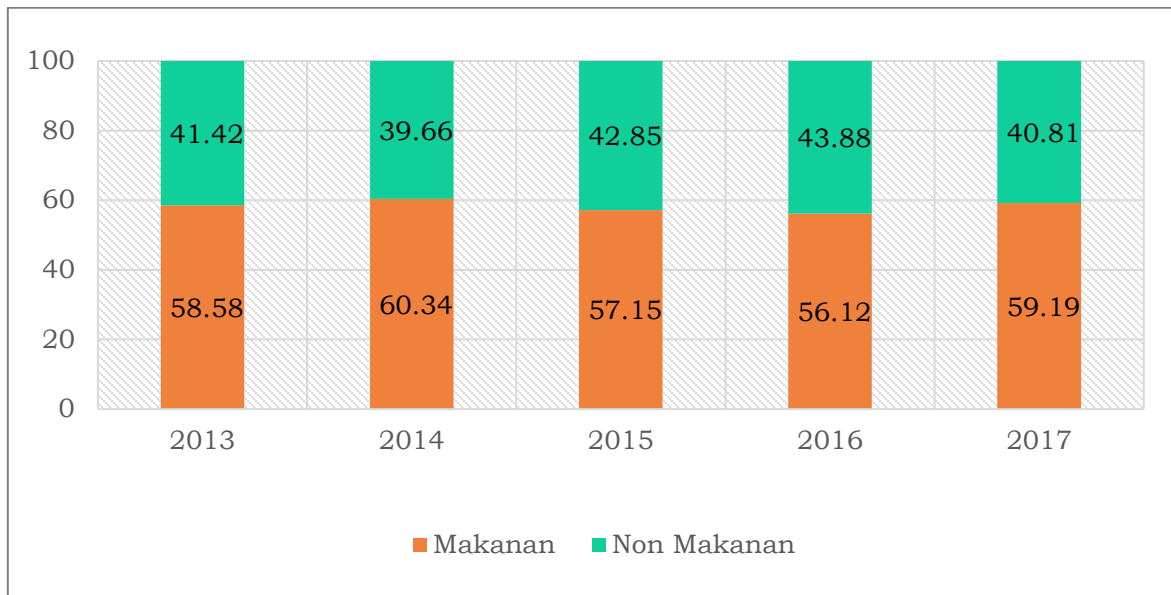


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sebagian besar pengeluaran rumah tangga di Provinsi Papua dialokasikan pada pengeluaran makanan, dengan persentasinya rata-rata sebesar 58,28% per tahun sepanjang periode 2013-2017. Berarti sisanya sebesar 41,72% dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan nonmakanan (lihat Gambar 2.17).



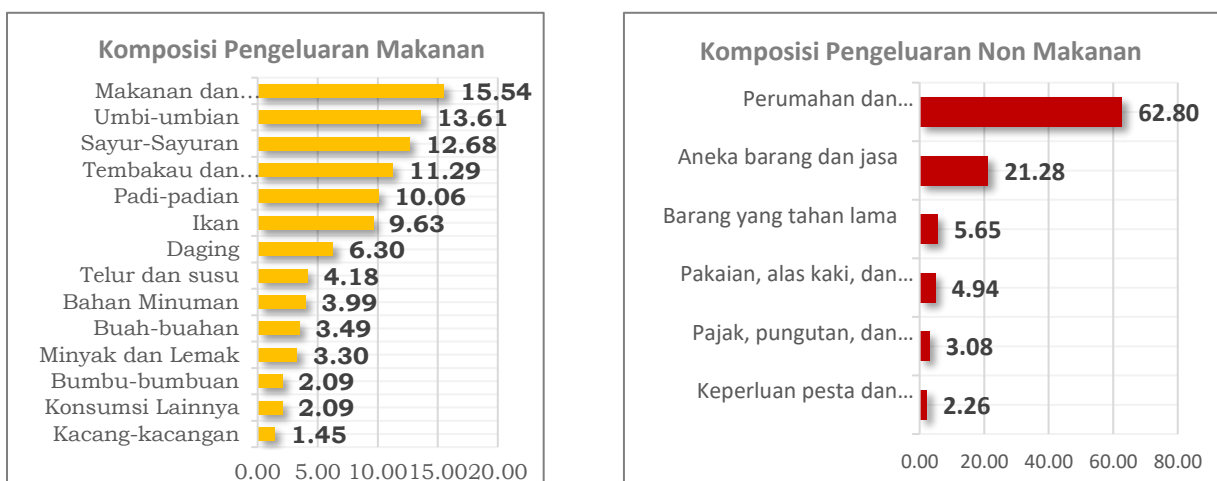
**Gambar 2.17**  
**Struktur Pengeluaran Per Kapita di Provinsi Papua**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Pola konsumsi penduduk Papua untuk makanan lebih dominan dibelanjakan pada makanan dan minuman jadi (15,54%). Kemudian untuk memenuhi kebutuhan kalori dan protein lebih besar dialokasikan pada umbi-umbian dan padi-padian, masing-masing sebesar 13,61% dan 10,06%. Serta untuk pemenuhan vitamin, lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, dengan alokasi pengeluarannya sebesar 12,68%. Adapun untuk nonmakanan, pengeluaran masyarakat lebih banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga, proporsinya bisa mencapai 62,80% dari total pengeluaran. Menyusul kemudian untuk aneka barang sebesar 21,28%. Paling rendah untuk keperluan pesta dan upacara, sebesar 2,26% (lihat Gambar 2.58).

**Gambar 2.18**  
**Komposisi Pengeluaran Per Kapita Papua Tahun 2017 (%)**



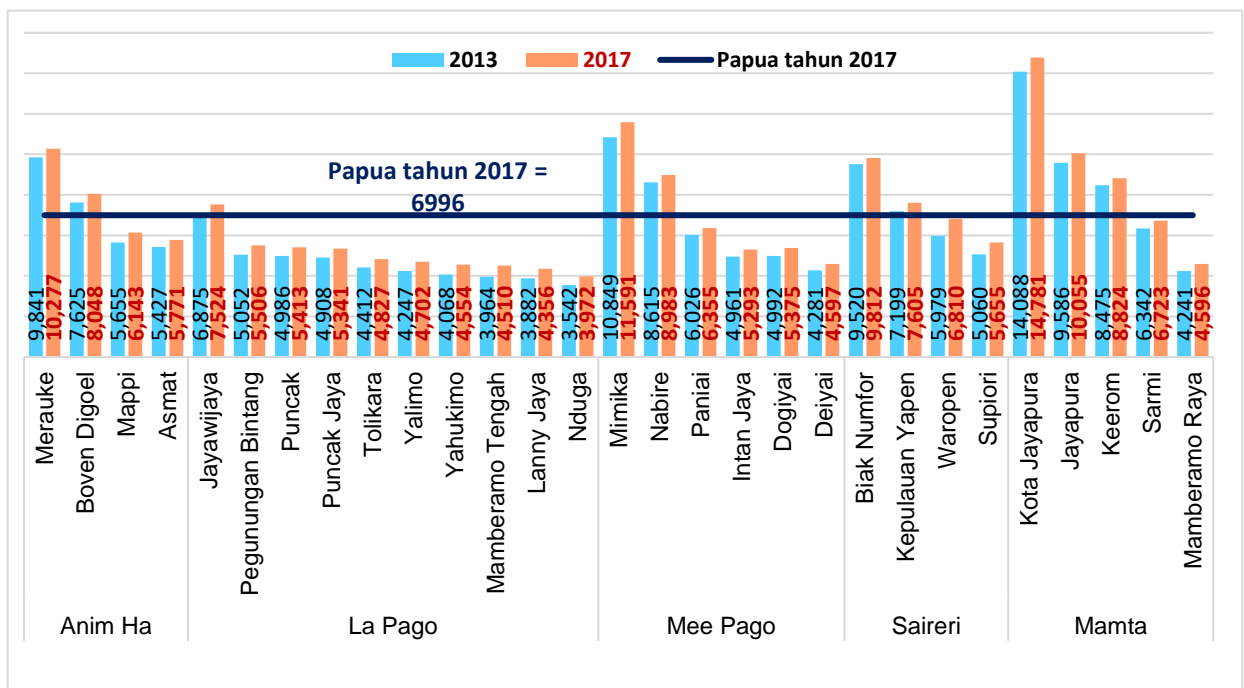
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)





Selanjutnya bila dilihat menurut kabupaten/kota, sepanjang tahun 2013-2017 ada 2 (dua) wilayah yang terindikasi mempunyai pengeluaran per kapita paling tinggi di Provinsi Papua, yakni Kota Jayapura dengan rata-rata sebesar Rp. 14.322 ribu per tahun, dan Kabupaten Mimika sebesar Rp. 11.087 ribu per tahun. Sedangkan yang terendah selama itu adalah Kabupaten Nduga hanya sebesar Rp. 3.694 ribu per tahun.

**Gambar 2.19**  
**Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2013 dan 2017 (ribu rupiah)**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sementara jika diamati per wilayah adat, terpetakan pada wilayah adat Anim Ha yang paling tinggi pengeluaran per kapita di tahun 2017 adalah Kabupaten Merauke yakni sebesar Rp. 9.994 ribu, kemudian untuk La Pago adalah Kabupaten Jayawijaya, sebesar Rp. 7.524 ribu, Mee Pago adalah Kabupaten Mimika sebesar Rp. 11.591 ribu, Saireri adalah Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 9.812 ribu, dan di Mamta adalah Kota Jayapura sebesar Rp. 14.781 ribu.

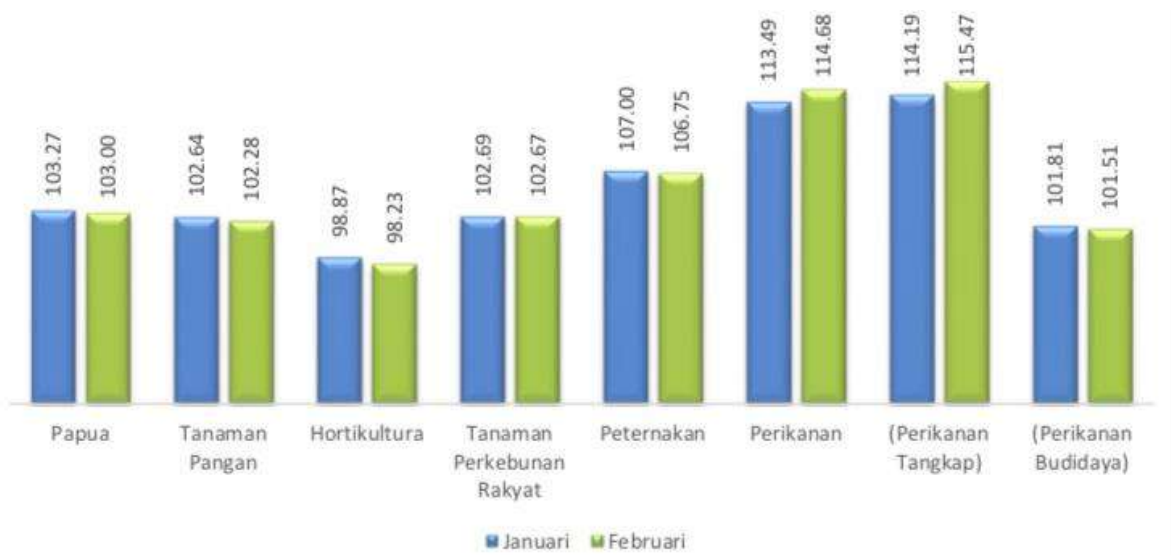
#### 2.1.4.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga diterima petani (It) terhadap indeks harga dibayar petani (Ib) (%) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di pedesaan, NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara



relatif, semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP Papua Februari 2021 tercatat turun -0,26 persen menjadi 103,00 dibandingkan NTP Januari. Berdasarkan pemantauan harga pedesaan di beberapa daerah di Papua, perubahan Indeks NTP disebabkan karena perubahan indeks harga yang dibayar petani (Ib) lebih besar dari pada perubahan Indeks Harga yang diterima petani (It).

**Gambar 2.20**  
**Perkembangan Nilai Tukar Petani Papua menurut Subsektor**  
**Januari – Februari 2021**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

Gambar di atas menunjukkan perkembangan NTP Papua bulan Februari 2021 dengan bulan sebelumnya, perubahan angka indeks yang terjadi yaitu subsektor tanaman pangan turun -0,35 persen, hortikultura turun -0,64 persen, tanaman perkebunan rakyat turun -0,03 persen, peternakan turun -0,23 persen, dan subsektor perikanan naik 1,05 persen.

Permasalahan rendahnya NTP antara lain disebabkan oleh (1) skala usaha budi daya pertanian yang relatif kecil; (2) harga komoditas berfluktuasi, terutama pada saat panen raya; (3) pembangunan infrastruktur yang belum merata sehingga menyebabkan harga jual rendah dan harga kebutuhan lain tinggi; (4) aplikasi teknologi yang belum optimal, hal ini antara lain disebabkan karena terbatasnya permodalan petani yang mengakibatkan produktivitas rendah (5) daya saing komoditas pertanian relatif rendah; (6) laju pertumbuhan harga konsumsi dan harga sarana produksi lebih tinggi dari laju pertumbuhan harga komoditas; (7) dari sisi konsumsi rumah tangga, pertumbuhan pengeluaran untuk bahan makanan, makanan jadi, perumahan dan sandang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan. Akibat berbagai masalah ini,



membuat NTP di Provinsi Papua selama ini paling rendah di Indonesia bersama Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Aceh.

### 2.1.4.3 Produktivitas total daerah

Ukuran produktivitas daerah dapat memvisualisasikan kapasitas dan daya saing tenaga kerja dalam menghasilkan satu satuan nilai tambah atau PDRB. Perkembangan produktivitas daerah Provinsi Papua selama tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2,85% per tahun, serta rata-rata produktivitas Rp. 79,53 juta per tenaga kerja per tahun. Lihat Tabel 2.19 di bawah ini.

**Tabel. 2.17.**  
**Produktivitas Total Daerah per Tenaga Kerja (juta rupiah/orang)**

Tahun	Pertanian	Industri	Jasa	Produktivitas Total Daerah
2013	11.47	634.28	139.71	71.66
2014	12.64	701.03	136.69	75.05
2015	12.29	722.52	166.00	77.92
2016	14.11	676.55	134.80	85.44
2017	13.82	666.01	154.53	87.59
<b>Rata-rata Produktivitas Per tahun</b>	12.86	680.08	146.35	79.53
<b>Rata-rata Pertumbuhan (%)</b>	4.77	1.23	2.55	2.85

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Oleh karena pendidikan tenaga kerja di sektor pertanian pada umumnya sangat rendah (SD/tidak tamat SD/tidak sekolah) menyebabkan produktivitas daerah di sektor tersebut paling rendah diantara semua sektor. Rata-rata per tahun selama periode 2013-2017 hanya mencapai Rp. 12,86 juta per tenaga kerja per tahun. Beda dengan sektor industri yang mencapai Rp. 680,08 juta per tenaga kerja per tahun, dan sektor jasa sebesar Rp. 146,35 juta per tenaga kerja per tahun. Namun demikian, pertumbuhan produktivitas daerah di sektor pertanian tampak lebih tinggi dibandingkan industri dan jasa. Tingkat pertumbuhan produktivitas daerah sektor pertanian bisa mencapai 4,77% per tahun sepanjang tahun 2013-2017, jauh di atas sektor industri sebesar 1,25% per tahun dan sektor jasa sebesar 2,85% per tahun. Ini mengindikasikan bahwa penerapan teknologi di sektor pertanian lebih cepat dibandingkan sektor industri dan jasa.

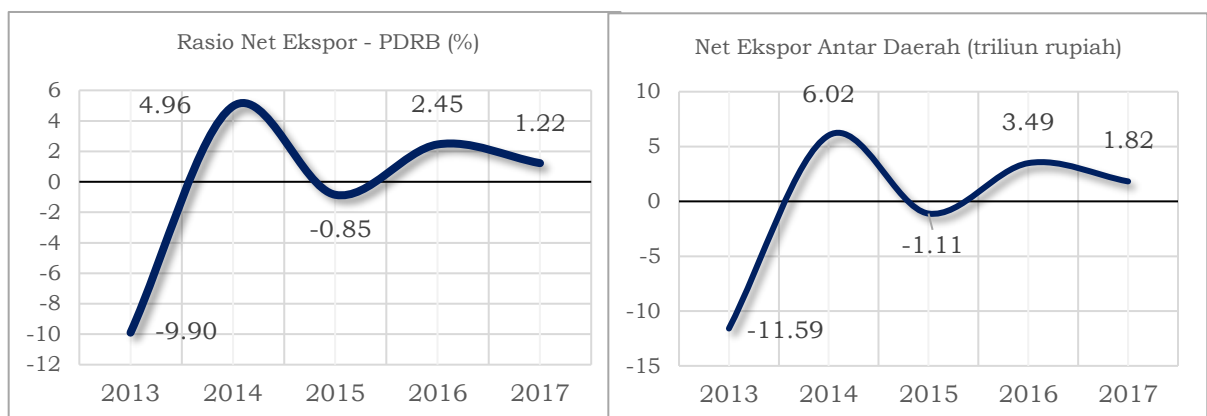


#### 2.1.4.4 Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB

Sebagai suatu wilayah yang terbuka, aktifitas perdagangan ekspor dan impor Provinsi Papua terlihat sangat berfluktuatif. Hal ini ditandai dengan variasi perubahan Net Ekspor (selisih ekspor dan impor) yang naik turun selama periode 2013-2017. Sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 2.67, net ekspor Provinsi Papua mengalami defisit sebanyak 2 kali, yakni di tahun 2013 sebesar Rp. 11,59 triliun, dan tahun 2015 sebesar Rp. 1,11 triliun. Namun untuk tahun 2014, 2016 dan 2017 semuanya mengalami surplus, dimana yang terbesar terjadi pada tahun 2014 mencapai Rp. 6,02 triliun.

Melalui perbandingan antara net ekspor dengan PDRB dapat ditemukan bagaimana daya saing ekonomi suatu daerah jika dihadapkan pada kinerja perdagangannya. Terlihat disini daya saing ekonomi Provinsi Papua masih sangat rendah yang diindikasikan rasio net ekspor PDRB selama periode 2013-2017 rata-rata dibawah batas minimum yaitu -0,42%.

**Gambar 2.21**  
**Net Ekspor Daerah dan Rasionya Terhadap PDRB**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Ketergantungan perekonomian terhadap satu sektor saja yakni sektor pertambangan membuat perdagangan regional Provinsi Papua belum stabil. Tinggi rendahnya net ekspor sangat bergantung pada kinerja produksi di sektor pertambangan yakni bijih tembaga dan emas yang dikelola oleh PT. Freeport Indonesia. Fenomena yang terjadi di tahun 2013 dan 2015 ketika ada penurunan ekspor tembaga secara drastis oleh PT. Freeport Indonesia membuktikan hal tersebut. Rasio net ekspor PDRB Provinsi Papua langsung turun sampai ke titik nadir -9,90% tahun 2013 dan -0,85% tahun 2015. Untuk itu, memang sudah sepatutnya perekonomian daerah tidak hanya ditopang oleh satu atau dua sektor saja. Membangun dan mengembangkan industri substitusi impor dan promosi ekspor



berbasis pertanian dan berkelanjutan menjadi salah satu jalan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing kinerja perdagangan dimasa mendatang.

#### 2.1.4.5 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR

Ketersediaan dana perbankan dalam upaya meningkatkan daya saing investasi regional sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kinerja perbankan di suatu daerah perlu dijaga dan ditingkatkan agar tidak kolaps (jatuh). Terkait dengan hal ini, salah satu indikator yang dapat menunjukkan dengan baik bagaimana kondisi kinerja perbankan suatu daerah adalah rasio pinjaman terhadap simpanan di bank, atau dalam konteks perbankan disebut Loan to Depositi Ratio disingkat LDR, meskipun mulai tahun 2015 cara perhitungan LDR telah mengalami perubahan. Sebagian kalangan perbankan mengatakan batas aman LDR adalah 85%, atau toleransinya antara 85% - 100%.

**Tabel. 2.18.**  
**Simpanan dan Kredit yang Disalurkan Sektor Perbankan di Provinsi Papua Tahun 2013-2017**

Tahun	Indikator Perbankan	Kelompok Bank			Total Bank
		Bank Pemerintah	Bank Swasta Nasional	Bank Perkreditan Rakyat	
2013	Kredit (juta rupiah)	15,119,851	3,260,913	451,170	18,831,934
	Simpanan (juta rupiah)	21,977,198	6,479,949	224,667	28,681,814
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	68.80	50.32	200.82	65.66
2014	Kredit (juta rupiah)	17,318,451	3,210,030	-	20,528,481
	Simpanan (juta rupiah)	26,420,175	7,296,942	251	33,717,117
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	65.55	43.99	-	60.88
2015	Kredit (juta rupiah)	18,863,362	3,395,402	778	22,259,542
	Simpanan (juta rupiah)	29,104,180	7,128,072	294	36,232,546
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	64.81	47.63	264.63	61.44
2016	Kredit (juta rupiah)	21,145,894	3,171,884	857,702	25,175,480
	Simpanan (juta rupiah)	29,104,180	7,128,072	345,672	36,577,924
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	72.66	44.50	248.13	68.83
2017	Kredit (juta rupiah)	23,193,087	3,382,726	976,556	27,552,369
	Simpanan (juta rupiah)	31,099,076	6,846,209	495,431	38,440,716
	Rasio Kredit-Simpanan (%)	74.58	49.41	197.11	71.67

Sumber: Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat, 2018 (data diolah)

Perkembangan LDR di Provinsi Papua jika diperhatikan secara keseluruhan masih sangat aman, karena berada di bawah batas 85%, dengan kecenderungan yang terus mengalami peningkatan, yang menandakan semakin banyak kredit yang disalurkan. Pada tahun 2013, posisi LDR perbankan di Provinsi Papua sebesar 65,66%, kemudian di tahun 2017 naik menjadi 71,67%. Sehingga rata-rata LDR di Provinsi Papua selama periode tahun 2013-2017 adalah 65,70% per tahun.

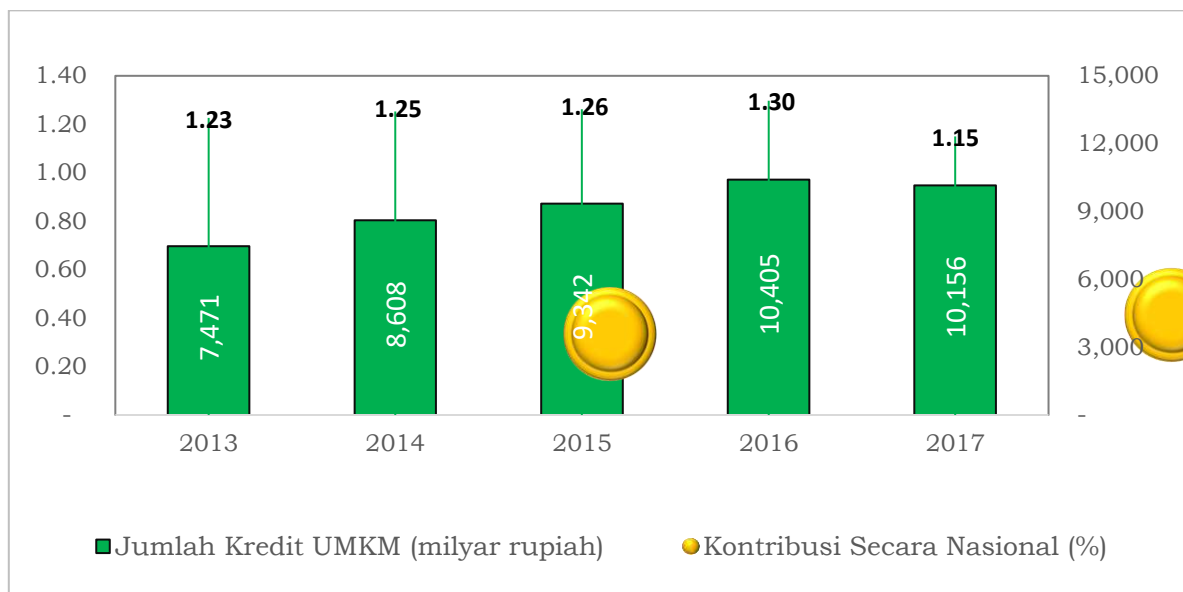
Jika diperhatikan menurut jenis bank, terpetakan bahwa semua bank pemerintah dan swasta di Provinsi Papua dalam posisi LDR yang sangat aman, rata-





rata masih dibawah 60%. Akan tetapi untuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat), kondisinya sangat memprihatinkan, karena rasio LDR BPR setiap tahunnya jauh di atas nilai 100, bahkan lebih dari 200% per tahun (sangat tidak aman), yang mengindikasikan jumlah kredit (pinjaman) jauh lebih besar dibandingkan dana pihak ketiga yang disimpan. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka dipastikan dalam lima tahun mendatang banyak BPR yang kolaps. Padahal daya jangkau BPR ini ke pengusaha golongan lemah, dan masyarakat berpendapatan rendah atau miskin di daerah perdesaan sangat tinggi sekali. Oleh karena itu perlu adanya penguatan, pembinaan dan pendampingan dari pemerintah provinsi melalui kebijakan fiskal untuk menjaga dan melindungi BPR agar tidak kolaps dimasa mendatang. Terlebih lagi jika melihat proporsi penyaluran kredit oleh bank di Provinsi Papua selama ini kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sangat rendah sekali, di bawah 15 triliun rupiah per tahun, dan sekitar 1,4% saja kontribusinya secara nasional (lihat Gambar 2.22), maka BPR menjadi satu-satunya alternatif terbaik untuk meningkatkan pemberian kredit bagi UMKM di Provinsi Papua.

**Gambar 2.22**  
**Penyaluran Kredit Pada UMKM di Provinsi Papua**



Sumber: Bank Indonesia, 2018 (data diolah)

#### 2.1.4.6 Rasio ketergantungan

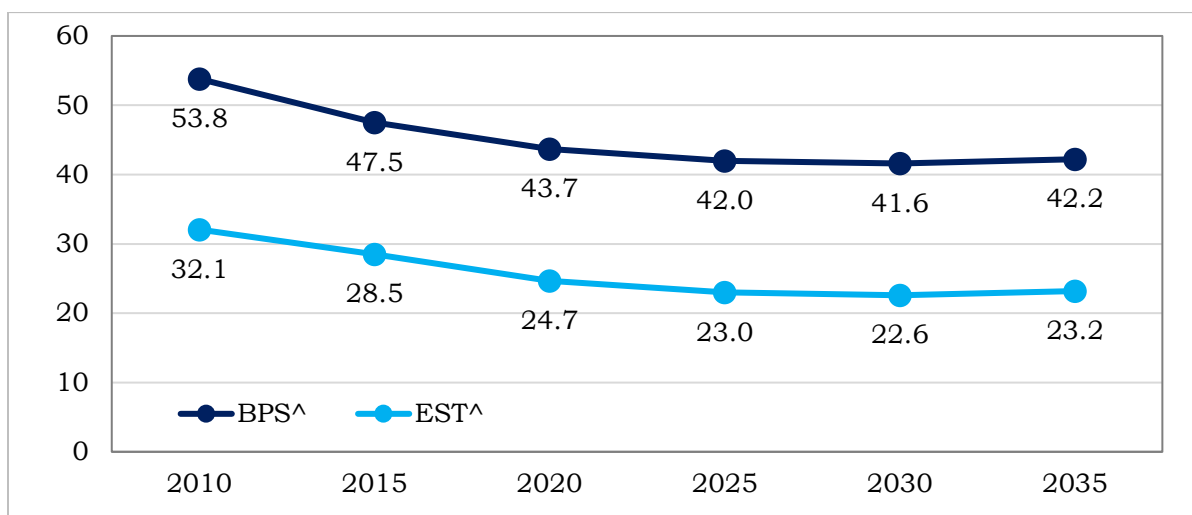
Terdapat kecenderungan pertumbuhan penduduk usia produktif di Provinsi Papua lebih cepat dibandingkan penduduk usia non produktif. Jika diamati berdasarkan kelompok usia produktif 15-64 tahun, terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok usia ini proporsinya cenderung meningkat. Tahun 2013 penduduk usia produktif mencapai 66,83% dan tahun 2016 meningkat menjadi 68,23% dari total penduduk Papua, hal



ini berarti jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dari jumlah penduduk usia non produktif.

Dampak dari semakin meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, menyebabkan rasio ketergantungan terlihat mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Jika menggunakan data proyeksi yang bersumber dari BPS, terlihat bahwa rasio ketergantungan yang cenderung menurun dari 53,8% tahun 2010 turun menjadi 42,2% pada tahun 2035, sedangkan berdasarkan estimasi terlihat gap yang cukup besar, yaitu tahun 2010 rasio ketergantungan mencapai 32,1% turun menjadi 23,2% tahun 2035. Semua ini menggambarkan terjadinya bonus demografi di Provinsi Papua antara tahun 2020-2030 (lihat Gambar 2.24).

**Gambar 2.23**  
**Proyeksi Bonus Demografi di Provinsi Papua**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

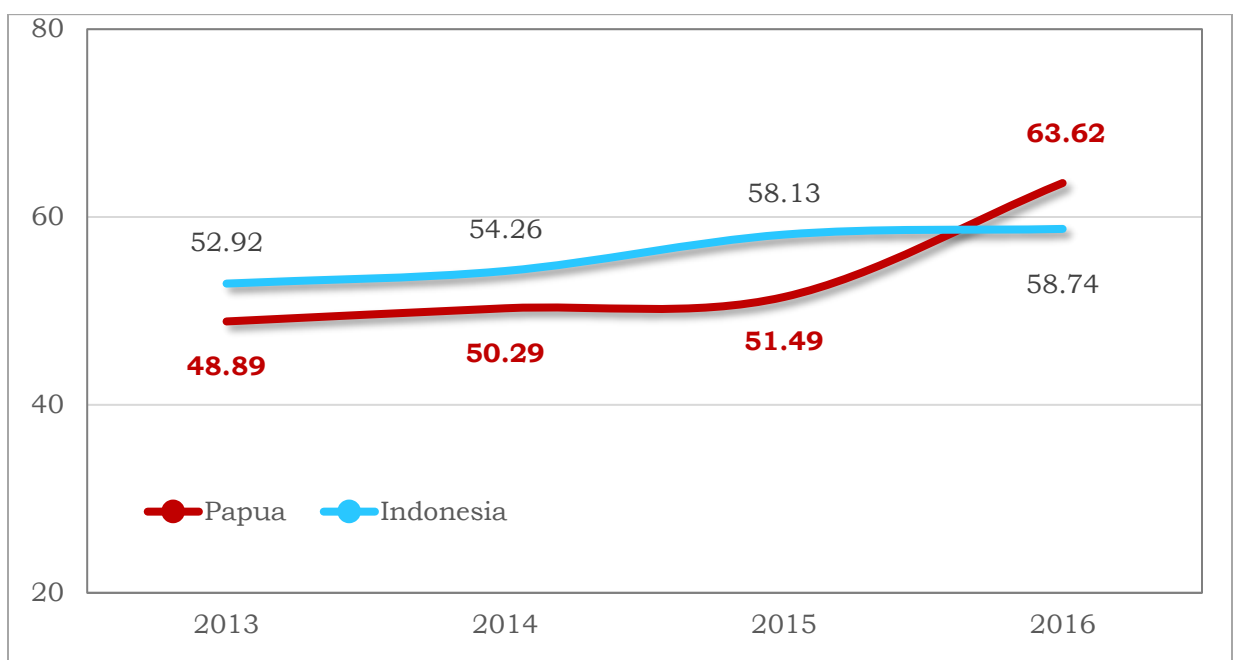
Bonus demografi yang akan terjadi di Provinsi Papua pada tahun 2020-2030 harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas. Adanya bonus demografi menandakan bahwa penduduk usia produktif (15-64) lebih banyak dibandingkan penduduk yang nonproduktif (0-14 dan lebih dari 64 tahun), sehingga merupakan modal yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik dan berkualitas. Akan tetapi mereka ini merupakan penduduk yang produktif untuk bekerja, membutuhkan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, dan pangan lebih banyak, karenanya perluasan lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih tinggi, serta pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih banyak harus diwujudkan pada saat itu.



### 2.1.4.7 Angka kriminalitas yang Tertangani

Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor merupakan syarat mutlak yang harus ditunjukkan oleh pemerintah Provinsi Papua, agar daya saing investasi regional dapat terus meningkat setiap tahun. Salah satu cara untuk mendukung hal tersebut adalah melalui penanganan penyelesaian kejahatan. Meskipun bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, namun pemerintah daerah Papua dapat memfasilitasinya melalui kebijakan fiskal untuk memperkuat dan mendukung penanganan kejahatan yang dilakukan oleh POLRI (Polisi Republik Indonesia).

**Gambar 2.24**  
**Penyelesaian Kejahatan di Provinsi Papua dan Indonesia (%)**



Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

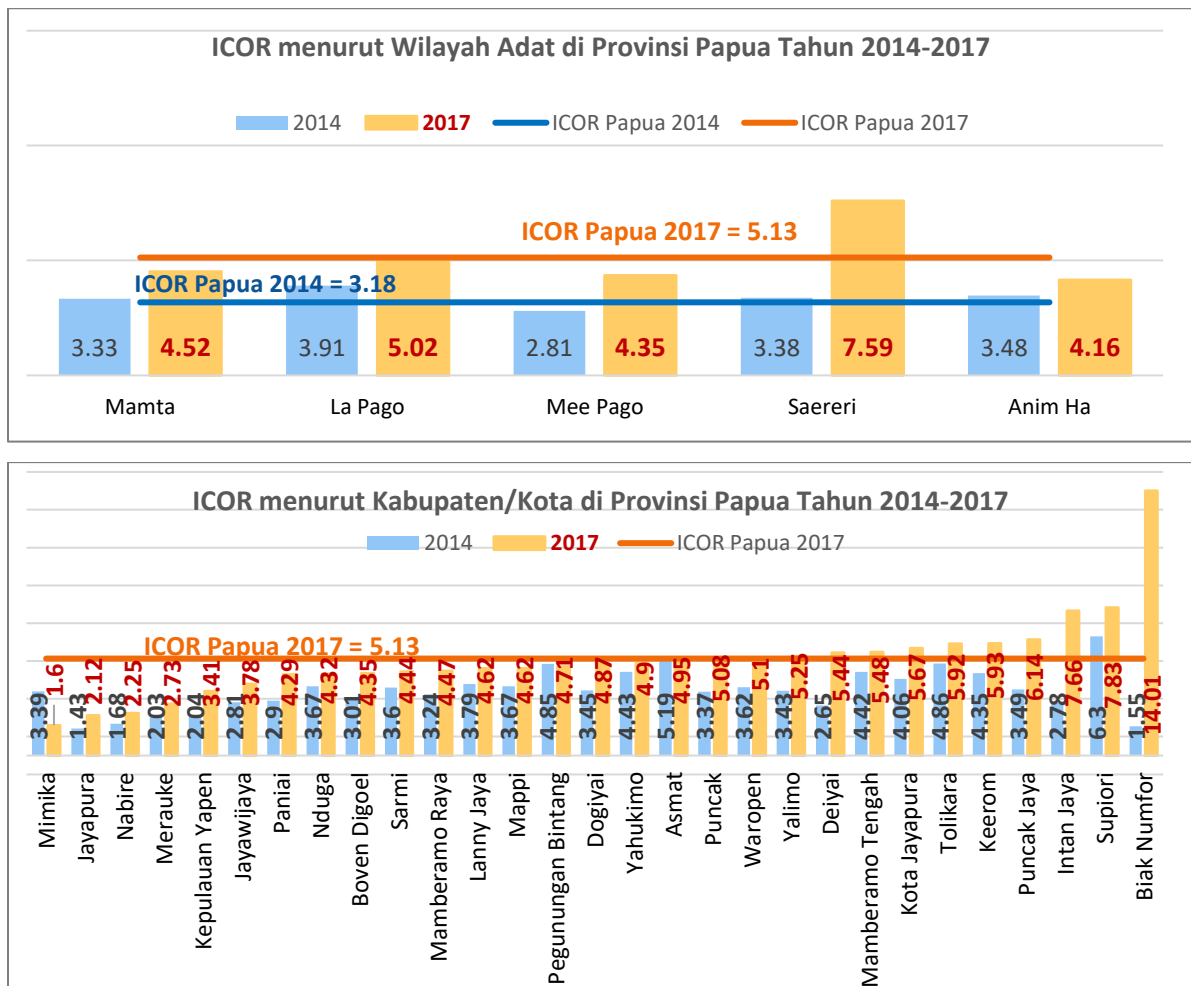
Berdasarkan indikator keamanan Clearance Rate (Persentase Penyelesaian Kejahatan) dalam Gambar 2.66, penyelesaian kejahatan di Provinsi Papua relatif lebih baik dibandingkan tingkat nasional, terutama pada tahun 2016, persentasenya dapat meningkat dan lebih tinggi dibandingkan secara nasional yaitu 63,62%, dengan rata-rata kenaikan sekitar 3,68% per tahun selama periode 2013-2016. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tingkat keamanan di Provinsi Papua setiap tahunnya semakin membaik, yang mana hal ini merupakan hasil kesigapan POLRI bersama pemerintahan daerah dalam menangani atau menyelesaikan kejahatan yang selama ini terjadi di wilayah Papua.



### 2.1.4.8 Daya Saing Investasi

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang merupakan rasio antara tambahan output dengan tambahan modal dapat dijadikan suatu indikator penentu keberhasilan dalam meningkatkan daya saing investasi. Dengan adanya indikator ini, para penyusun rencana pembangunan ekonomi bisa mengetahui berapa investasi yang diperlukan agar ekonomi tumbuh sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pakar ekonomi biasanya menggunakan nilai ICOR moderat antara 2 – 4 poin sebagai indikasi iklim investasi di suatu wilayah dalam kondisi yang menguntungkan.

**Gambar 2.25**  
**Daya Saing Investasi Berdasarkan ICOR Tahun 2014 dan 2017**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua belum mampu menciptakan dan mempertahankan iklim investasi yang dapat menguntungkan investor. Fakta ini terekam pada nilai ICOR di setiap daerah yang cenderung lebih besar dari 4 poin, dan mengalami kenaikan rata-rata dalam interval 0,15% - 14% per tahun selama periode 2013-2017. Sehingga secara keseluruhan ICOR Provinsi Papua sebesar 5,13 pada tahun 2017, dan mengalami kenaikan sekitar 0,25% per tahun jika dibandingkan tahun 2014. ICOR sebesar 5,13 mempunyai arti bahwa untuk



menciptakan nilai PDRB sebesar 1 rupiah diperlukan tambahan investasi sebesar 5,13 rupiah.

Dalam konteks kewilayahan, dapat dikatakan bahwa wilayah adat yang dapat memberikan keuntungan lebih baik bagi para investor adalah wilayah adat Anim Ha. Karena secara rata-rata ICOR untuk wilayah Anim Ha paling rendah, dan mendekati batas tertinggi ICOR moderat yakni sebesar 4,16 poin. Sementara untuk wilayah adat lainnya terlihat belum menguntungkan, terutama di wilayah adat Saireri dan La Pago masing-masing sebesar 7,59 poin dan 5,02 poin. Adapun untuk kabupaten/kota secara terpisah, teridentifikasi 6 kabupaten yang terlihat lebih menguntungkan para investor untuk berinvestasi yakni Kabupaten Jayawijaya dengan ICOR sebesar 3.78 poin, Kepulauan Yapen sebesar 3.41 poin, Merauke sebesar 2.73 poin, Nabire sebesar 2.25 poin, Jayapura sebesar sebesar 2.12 poin, dan yang paling rendah Mimika sebesar 1.60 poin.

### **2.1.5 Aspek Pelayanan Umum**

Pelayanan umum merupakan aspek krusial dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah adalah menyelenggarakan aspek pelayanan umum yang dimaksud berfokus pada: (1) layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan. Oleh karena itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan.

#### **2.1.5.1 Layanan Urusan Wajib Dasar**

Layanan urusan pemerintahan ini sebenarnya hanya meliputi enam urusan, namun keseluruhannya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan ini difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

##### **1. Pendidikan**

Tahun 2020, persentase penduduk usia 7-24 tahun di Provinsi Papua yang masih bersekolah ada sebanyak 61,68 %. Sedangkan, sisanya sebanyak 13,80 % dan 24,52 % adalah penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi. Pada periode yang sama, Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Papua untuk tingkat





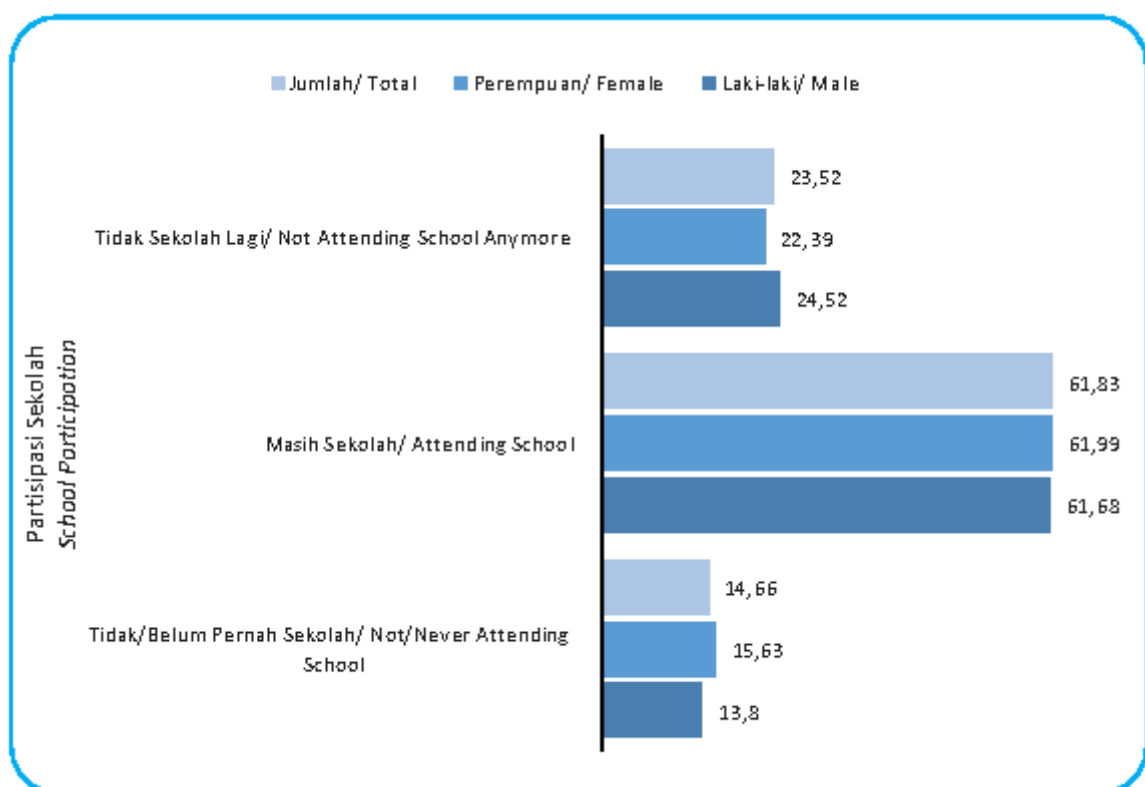
Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidiyah (MI)/sederajat adalah sebesar 79,27 persen. Persentase ini semakin menurun pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah (MA)/ sederajat sebesar 44,73%. Pola yang sama terjadi juga untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dimana APK SD/MI/sederajat adalah 91,27% dan menurun hingga APK SMA/SMK/MA sederajat sebesar 76,55%.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk suatu daerah merupakan asset yang potensial dalam upaya pengembangan daya saing daerah dalam berbagai aspek pembangunan. Kualitas penduduk suatu daerah merupakan penentu utama dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Namun asset tersebut membutuhkan perhatian khusus, jika potensi tersebut tidak dikelola dengan baik, sebaliknya justru akan menjadi beban suatu daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia yang besar di Provinsi Papua harus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas secara sistematis salah satunya melalui pendidikan.

#### A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

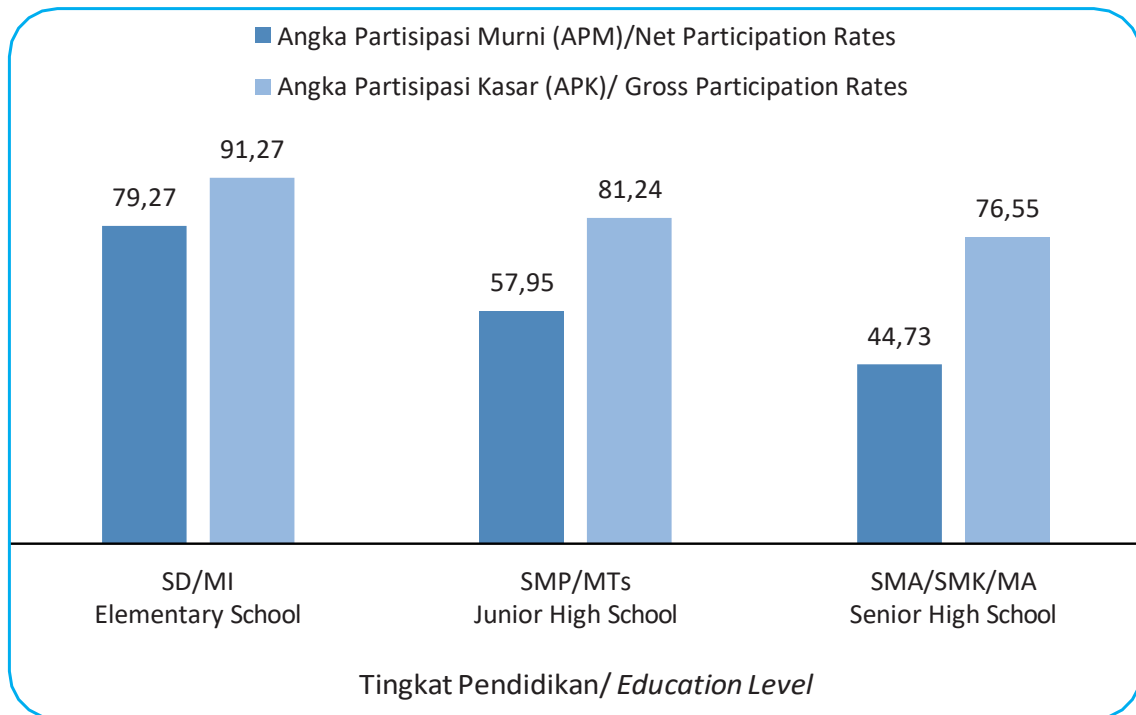
**Gambar 2.26**  
**Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua**



Sumber data: BPS Provinsi Papua, PDA 2021 (data diolah)



**Gambar 2.27**  
**Angka Partisipasi Pendidikan di Provinsi Papua**



Sumber data: BPS Provinsi Papua, PDA 2021 (data diolah)

Selain itu, Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya di provinsi Papua terlihat semakin meningkat angkanya tetapi belum mencapai hasil yang memuaskan. Bisa jadi disebabkan karena ada yang drop out atau masih berada di jenjang SMP. Nilai rata-rata capaian APM setiap jenjang pendidikan SD masih mendominasi jika dibandingkan tingkat SMP dan SMA/SMK. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya proporsi penduduk usia sekolah di Provinsi Papua yang sekolah tepat waktu atau sesuai dengan jenjang pendidikan ideal. Masih ada ketimpangan penduduk yang cukup tinggi terhadap akses pendidikan.



**Tabel. 2.19.**  
**Angka Partisipasi Pendidikan**

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	Angka Partisipasi Murni (APM) <i>Net Participation Rates</i>		Angka Partisipasi Kasar (APK) <i>Gross Participation Rates</i>	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI <i>Elementary School</i>	79,15	79,27	91,94	91,27
SMP/MTs <i>Junior High School</i>	57,19	57,95	78,11	81,24
SMA/SMK/MA <i>Senior High School</i>	44,21	44,73	76,33	76,55

Sumber data: BPS Provinsi Papua, PDA 2021 (diolah)

## B. Angka Putus Sekolah

**Tabel. 2.20.**  
**Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Karakteristik Tahun 2020**

Karakteristik	Jenjang Pendidikan		
	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	2,47	4,49	0,75
<b>Jenis Kelamin</b>			
Laki-laki	2,54	3,47	0,82
Perempuan	2,39	5,61	0,66
<b>Daerah Tempat Tinggal</b>			
Perkotaan	0,57	0,57	0,01
Perdesaan	3,10	6,18	1,33

Sumber data: BPS Provinsi Papua, 2021 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan Jenjang pendidikan SMP/Sederajat memiliki angka putus sekolah tertinggi dibandingkan dengan jenjang yang lain. Pada tahun 2020, 44 s/d 45 dari 1.000 penduduk putus sekolah di jenjang SMP/ sederajat. Dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SD/ sederajat, 24 s/d 25 di antaranya harus putus sekolah. Sedangkan, angka putus sekolah pada jenjang SM/ sederajat yang paling kecil dimana 7 s/d 8 dari 1.000 penduduk yang mengenyam pendidikan SM/ sederajat putus sekolah, lebih rendah sekitar 3 dari nasional.

## C. Perkembangan Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan Tabel 2.25 di bawah ini, terlihat bahwa jumlah sekolah jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK di Provinsi Papua terjadi peningkatan setiap tahunnya



dengan rata-rata pertumbuhan peningkatan jumlah sekolah bernilai positif. Artinya, penambahan sekolah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang cenderung semakin melek terhadap pendidikan. Sedangkan pada pendidikan sekolah dasar sepanjang tahun 2019/2020 terlihat cenderung berkurang sampai dengan tahun 2020/2021 (lihat Tabel 2.25).

**Tabel. 2.21.**

**Jumlah Sekolah Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2019/2020-2020/2021**

Jenjang Pendidikan	2019/2020	2020/2021
<b>Taman Kanak - Kanak</b>	730	656
<b>Sekolah Dasar</b>	2.636	2.614
<b>Sekolah Menengah Pertama</b>	745	743
<b>Sekolah Menengah Atas</b>	375	380
<b>Sekolah Menengah Kejuruan</b>	138	257

Sumber: BPS Provinsi Papua, PDA 2021 (diolah)

**D. Perkembangan Guru dan Murid**

**Tabel. 2.22.**

**Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua**

Jenjang Pendidikan	2019/2020 (org)	2020/2021 (org)
<b>Taman Kanak-Kanak</b>	2.680	2.745
<b>Sekolah Dasar</b>	18.747	19.499
<b>Sekolah Menengah Pertama</b>	8.738	9.298
<b>Sekolah Menengah Atas</b>	7.300	7.655
<b>Sekolah Menengah Kejuruan</b>	2.873	5.605

Sumber: BPS Provinsi Papua, PDA 2021 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dengan semakin banyaknya jumlah sekolah sehingga kebutuhan guru juga semakin bertambah untuk semua jenjang pendidikan. Pendidikan sekolah dasar memiliki jumlah guru sampai dengan tahun 2021 mencapai 19.499 orang, kemudian untuk SMP mencapai 9.298 orang, pendidikan SMA sebesar 7.655 orang dan SMK mencapai 5.605 orang.



**Tabel. 2.23.****Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2020-2021**

Jenjang Pendidikan	2019/2020	2020/2021
	(org)	(org)
<b>Taman Kanak-Kanak</b>	31.222	32.327
<b>Sekolah Dasar</b>	453.467	450.765
<b>Sekolah Menengah Pertama</b>	135.743	134.091
<b>Sekolah Menengah Atas</b>	101.341	104.631
<b>Sekolah Menengah Kejuruan</b>	36.154	65.282

Sumber: BPS Provinsi Papua, PDA 2021 (diolah)

Seiring dengan adanya peningkatan jumlah guru dan murid di Provinsi Papua pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) juga sangat berdampak terhadap ketersediaan guru dan persebarannya selama ini.

Jika dilihat berdasarkan kewilayahan di Provinsi Papua, rata-rata rasio guru terhadap murid dikabupaten/kota nilainya sangat bervariasi. Rata-rata wilayah adat Mamta, Saereri dan Anim Ha memiliki rasio guru terhadap murid cukup ideal, meskipun di antara ketiganya masih terdapat daerah dengan rasio yang cukup tinggi di antaranya Mamberamo Raya, Mappi dan Asmat. Sedangkan pada wilayah adat La Pago dan Mee Pago didominasi oleh daerah yang memiliki rasio guru terhadap murid dapat dikatakan cukup tinggi, meskipun tidak semua masuk dalam kategori belum ideal. Adapun daerah dengan rasio guru terhadap murid cukup tinggi di antaranya adalah Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya, Paniai, Dogiyai dan Deiyai.

## 2. Kesehatan

### A. Angka kematian Bayi (AKB)

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

**Tabel. 2.24.****Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup**

No.	Indikator	2019	2020	2021
1.	Angka Kematian Bayi	24	23	22

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2021





Berdasarkan Gambar 2.32 diketahui bahwa Provinsi Papua memiliki kasus AKB yang cukup tinggi, namun cenderung menurun.. Kasus AKB yang terjadi di Provinsi Papua merupakan akumulasi dari 29 kabupaten/kota yang tersebar di 5 wilayah adat.

## B. Angka Kematian Ibu (AKI)

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

**Tabel. 2.25.**

### **Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup**

No.	Indikator	2019	2020	2021
1.	Angka Kematian Ibu	216	212	208

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2021

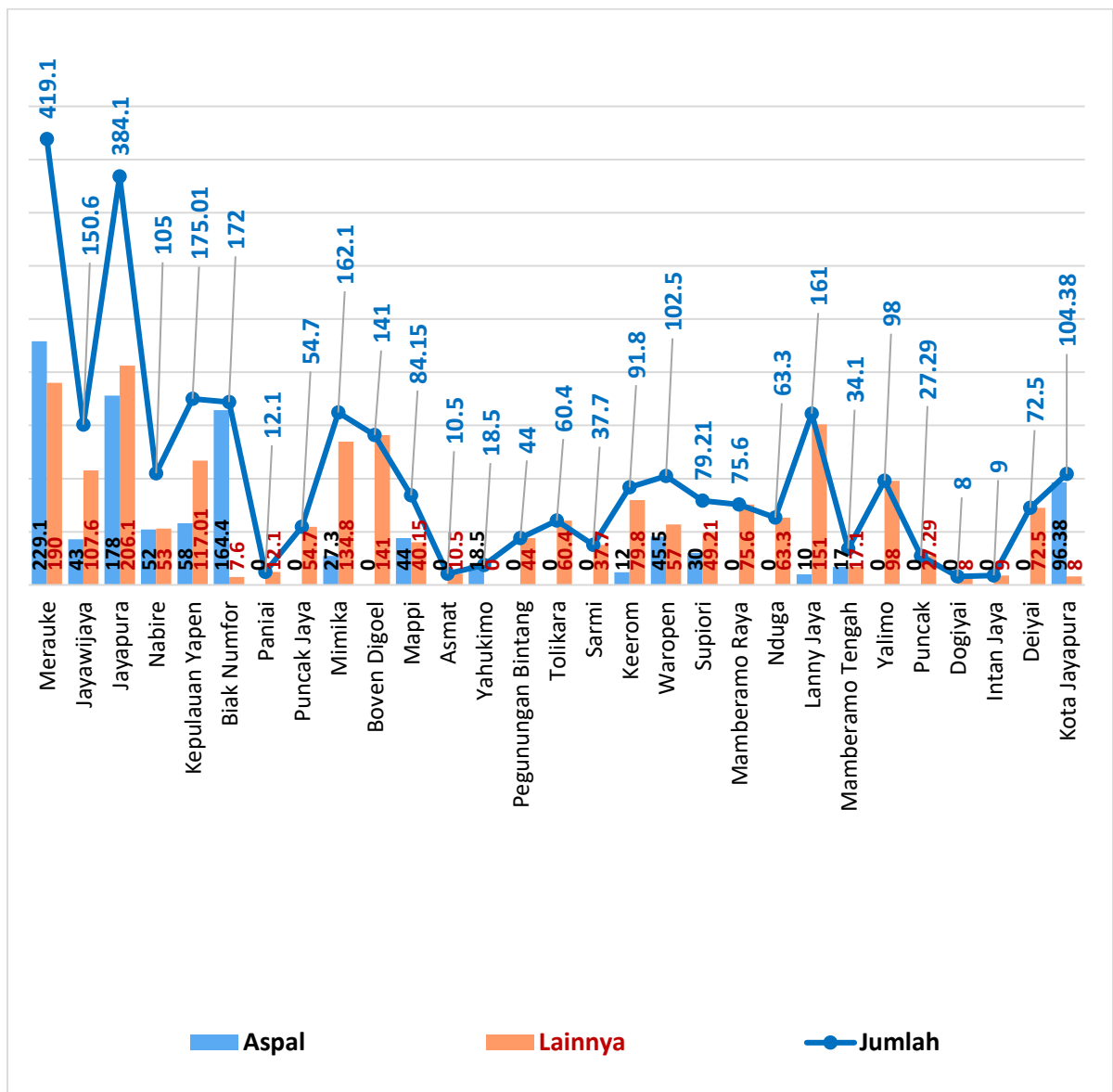
Kasus angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua per 100.000 penduduk selama ini dapat dikatakan cukup tinggi namun cenderung mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2019 kasus AKI mencapai 216 kasus, terus menurun sampai dengan 208 kasus pada tahun 2020. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengurangi kasus AKI di Provinsi Papua untuk tahun-tahun yang akan datang.

## 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aksesibilitas dan Mobilitas Daerah Lima kabupaten/kota dengan jalan provinsi terpanjang di Papua terdapat di Kabupaten Merauke 419,10 km (14,17%), Kabupaten Jayapura 384,10 km (12,99%), Kabupaten Kepulauan Yapen 175,01 km (5,92%), Kabupaten Biak Numfor 172 km (5,82%), dan Kabupaten Mimika 162,10 km (5,48%).



**Gambar 2.28**  
**Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan Tahun 2020**

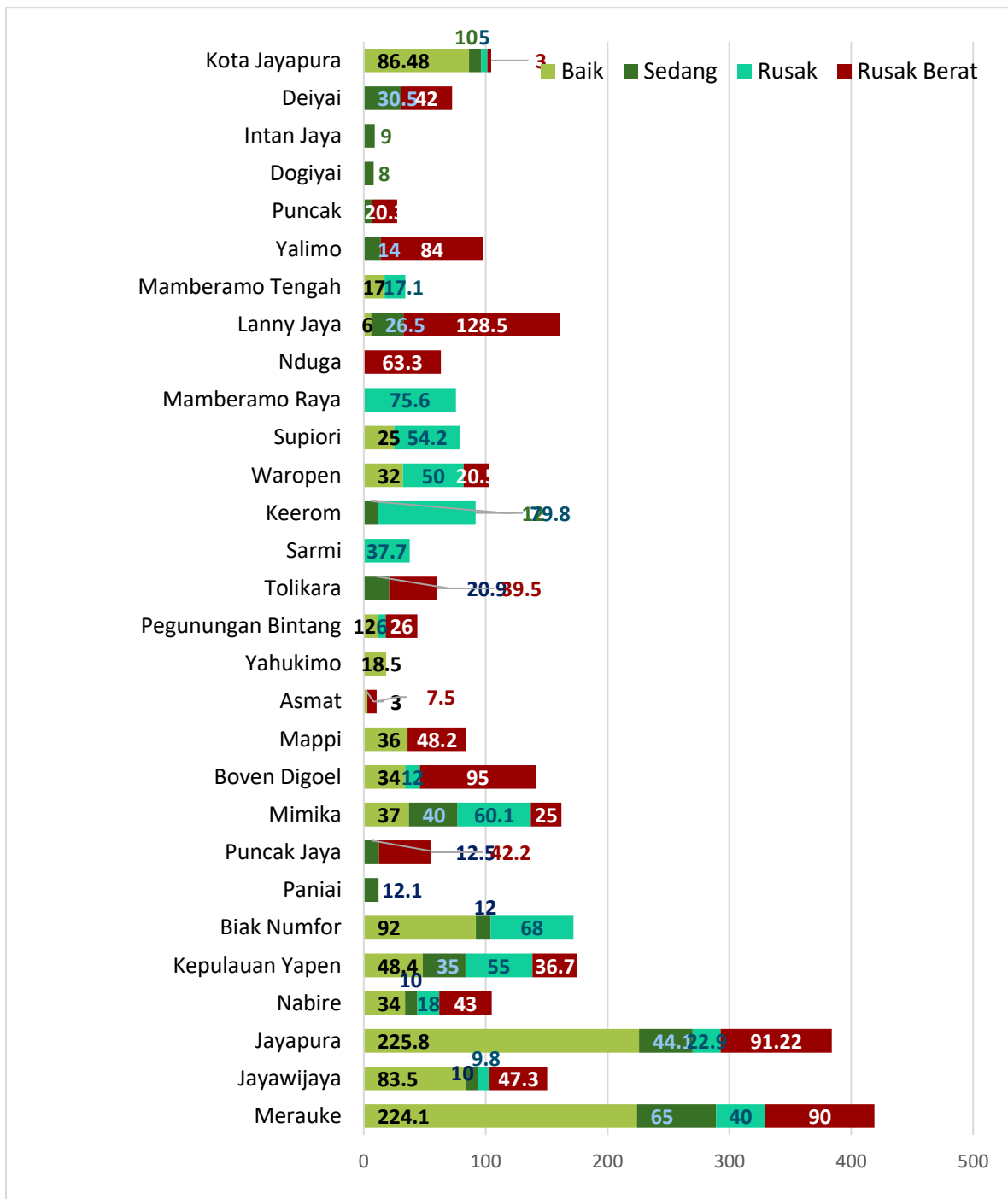


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021(data diolah)

Berdasarkan jenis permukaannya, panjang jalan di Papua yang sudah dilapisi aspal sepanjang 1.025,18 km (34,66%) dan yang belum dilapisi aspal atau jalan lainnya sepanjang 1.932,46 km (65,34%). Jalan aspal terpanjang terdapat di Kabupaten Merauke 229,10 km (22,35%), Kabupaten Jayapura 178 km (17,36%), Kabupaten Biak Numfor 164,40 km (16,04%), Kota Jayapura 96,38 km (9,40%), dan Kabupaten Kepulauan Yapen 58 km (5,66%).



**Gambar 2.29**  
**Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Papua Tahun 2020 (km)**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

Pada tahun 2020, sepertiga dari panjang jalan provinsi di Papua berada dalam kondisi baik yaitu sepanjang 1.014,78 km (34,31%), kondisi sedang sepanjang 378,60 km (12,80%), sisanya dengan persentase yang cukup besar (52,89%) berada dalam kondisi rusak dan rusak berat. Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo, dan Kota Jayapura merupakan kabupaten yang kondisi jalan provinsinya sudah baik secara umum, dimana persentase panjang jalan kondisi baik lebih besar dari jalan kondisi sedang, rusak, dan rusak berat. Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten



Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Yalimo merupakan kabupaten yang lebih dari 75% jalannya berada dalam kondisi rusak dan rusak berat.

### A. Tempat Ibadah

Struktur penduduk menurut agama di Provinsi Papua menunjukkan sebagian besar penduduk Papua memeluk agama Kristen Protestan. Hal ini berpengaruh pada jumlah gereja Protestan yang banyak ditemukan di Provinsi Papua yaitu sebanyak 6.223 bangunan.

**Tabel. 2.26.**  
**Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Masjid <i>Mosque</i>	Gereja Protestan <i>Protestant Church</i>	Gereja Katholik <i>Catholic Church</i>	Pura <i>Temple</i>	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Kabupaten/Regency</i>					
1. Merauke	235	218	167	7	3
2. Jayawijaya	19	598	104	1	-
3. Jayapura	263	465	22	3	3
4. Nabire	202	328	52	7	3
5. Kepulauan Yapen	20	335	3	1	1
6. Biak Numfor	67	257	6	2	1
7. Paniai	13	125	52	-	-
8. Puncak Jaya	2	370	2	-	-
9. Mimika	134	207	70	1	2
10. Boven Digoel	24	109	75	1	1
11. Mappi	5	106	8	1	-
12. Asmat	15	157	89	-	-
13. Yahukimo	2	559	12	-	-
14. Pegunungan Bintang	1	175	34	-	-
15. Tolikara	2	341	-	-	-
16. Sarmi	25	147	5	1	-
17. Keerom	168	176	49	3	1
18. Waropen	15	120	2	-	-
19. Supiori	1	40	-	-	-
20. Mamberamo Raya	4	50	1	-	-
21. Nduga	1	138	1	-	-
22. Lanny Jaya	1	283	1	-	-
23. Mamberamo Tengah	1	65	-	-	-
24. Yalimo	1	128	1	-	-
25. Puncak	2	251	5	-	-
26. Dogiyai	1	81	11	-	-
27. Intan Jaya	1	52	2	-	-
28. Deiyai	1	42	18	-	-
<i>Kota/Municipality</i>					
1. Jayapura	221	300	22	1	3
<b>Papua</b>	<b>1 447</b>	<b>6 223</b>	<b>814</b>	<b>29</b>	<b>18</b>

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

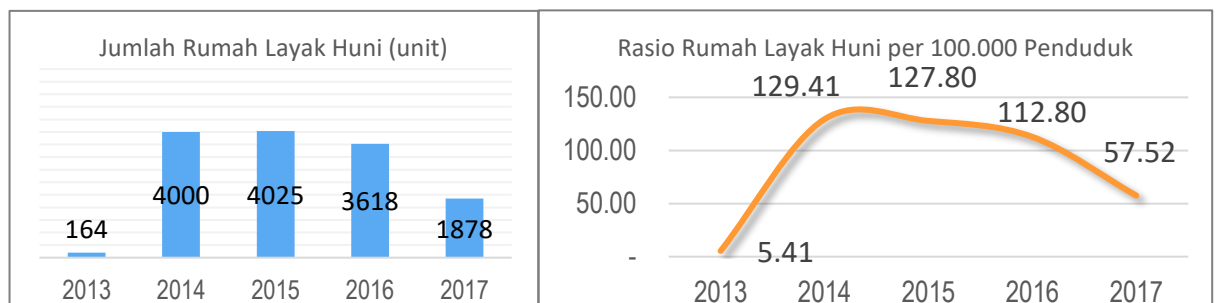
### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi perumahan di Provinsi Papua sepanjang tahun 2013-2017 memiliki trend yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Peningkatan jumlah rumah layak huni



terjadi pada tahun 2013-2015 yaitu sebesar 4.025 unit (2015), namun terjadi penurunan jumlah unit sampai dengan tahun 2017 (1.878 unit). Secara kumulatif total rumah layak huni yang terbangun hingga tahun 2017 sebanyak 13.685 unit (lihat Gambar 2.97). Perbandingan ketersediaan rumah layak huni untuk 100.000 penduduk di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2017 adalah 58 unit/100.000 penduduk.

**Gambar 2.30**  
**Kondisi Rumah Layak Huni di Provinsi Papua**

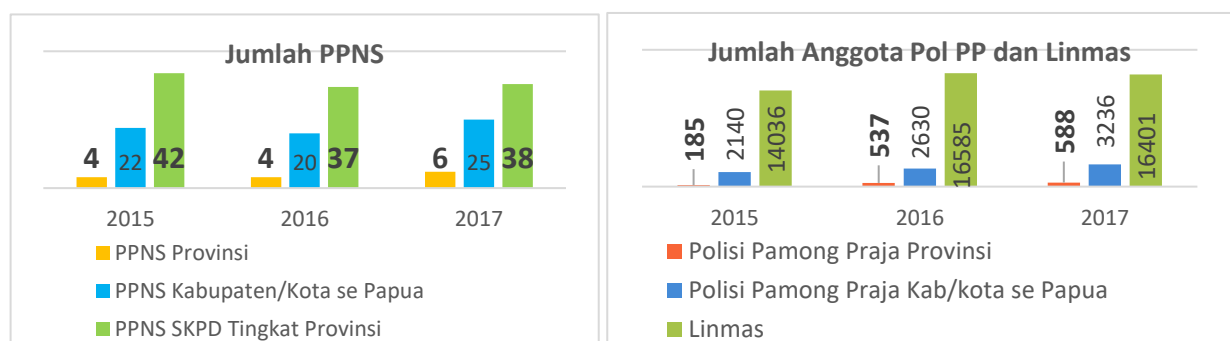


Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

## 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Perlindungan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentraman dan ketertiban umum, karena mencakup persiapan dan pembekalan masyarakat dalam penanganan bencana, maupun keikutsertaan dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

**Gambar 2.31**  
**Kondisi Penyenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua**



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

## 6. SOSIAL

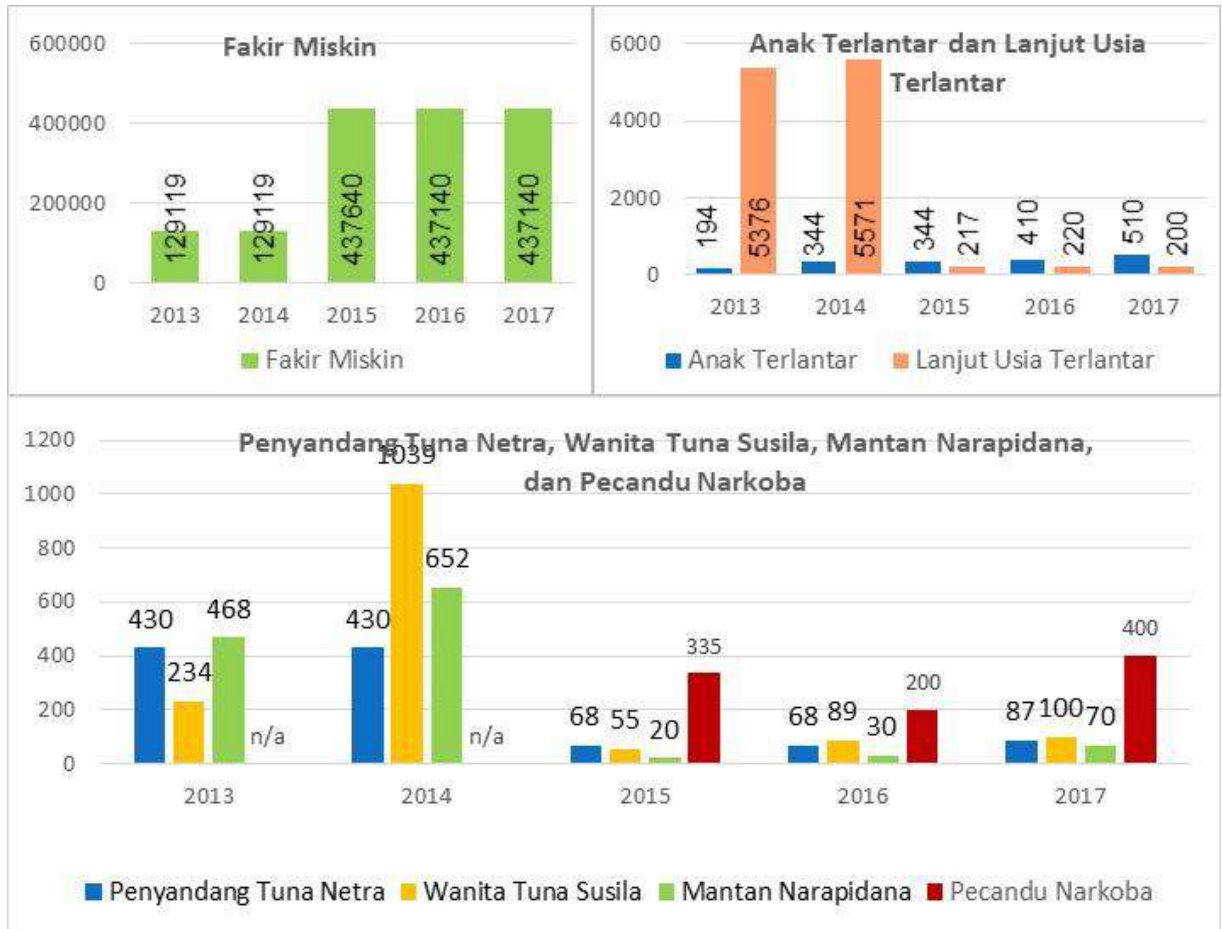
Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya





penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua. Hal ini terindikasi melalui tingginya jumlah fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, wanita tuna susila, mantan narapidana, dan pecandu narkoba pada rentang tahun 2013-2017 (lihat Gambar 2.33).

**Gambar 2.32**  
**Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua**  
**Tahun 2017 (orang)**



Sumber: Bappeda Papua 2018

Pada lima tahun terakhir, jumlah anak terlantar mengalami peningkatan dari 194 anak (tahun 2013) menjadi 510 anak (tahun 2017). Peningkatan juga terjadi pada jumlah fakir miskin dari 129.119 orang (tahun 2013) menjadi 437.140 orang (tahun 2017). Peningkatan ini tergolong tinggi karena secara agregat meningkat 3 kali lipat dalam rentang waktu 5 tahun. Trend yang relatif menurun terjadi pada lanjut usia terlantar, yaitu 5.376 orang (tahun 2013) menjadi 200 orang (tahun 2017).

Kondisi yang fluktuatif namun cenderung meningkat terjadi pada penyandang tuna netra, wanita tuna susila, mantan narapidana, dan pecandu narkoba. Jumlah wanita tuna susila pada tahun 2014 sebanyak 1.039 orang dan berkurang menjadi 55 orang pada tahun 2015. Namun, mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 menjadi



100 orang. Berkurangnya jumlah wanita tuna susila pada tahun 2015 dikarenakan peraturan Bupati Kabupaten Jayapura untuk menutup lokasi prostitusi Tanjung Elmo. Jumlah mantan narapidana di Provinsi Papua pada tahun 2013 sebanyak 468 jiwa meningkat menjadi 652 jiwa pada tahun 2014. Namun terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar 20 jiwa dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 70 jiwa. Adapun jumlah pecandu narkoba yang teridentifikasi pada tahun 2015 sebanyak 335 orang, kemudian pada tahun 2016 turun menjadi 200 orang namun pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 400 orang. Kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan penyalahgunaan Napza di Papua karena masih banyak para pecandu narkoba yang belum teridentifikasi.

## 2.1.5.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

### 1. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja didefinisikan dengan penduduk usia 15 tahun ke atas. Di tahun 2020, penduduk usia kerja di Provinsi Papua sebanyak 2,45 juta jiwa. Jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua adalah sebanyak 1,69 juta jiwa yang didominasi oleh laki-laki (58,44 persen). Meski demikian peran perempuan dalam ketenagakerjaan tidak bisa diabaikan.

**Tabel. 2.27.**  
**Angkatan Kerja**

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Bekerja <i>Working</i>	Pernah Bekerja <i>Ever Worked</i>	Angkatan Kerja <i>Economically Active</i>		Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Economically Active</i>	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja <i>Percentage of Working to Economically Active</i>
			Pengangguran <sup>1</sup> <i>Unemployment<sup>1</sup></i>	Tidak Pernah Bekerja <i>Never Worked</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19	90 993	283	8 692	8 975	99 968	91,02
20-24	165 526	2 501	15 703	18 204	183 730	90,09
25-29	230 025	3 096	13 259	16 355	246 380	93,36
30-34	230 154	2 789	6 540	9 329	239 483	96,10
35-39	210 544	1 849	4 570	6 419	216 963	97,04
40-44	209 988	2 301	4 064	6 365	216 353	97,06
45-49	174 976	1 351	2 601	3 952	178 928	97,79
50-54	154 882	827	1 459	2 286	157 168	98,55
55-59	102 437	354	1 176	1 530	103 967	98,53
60+	122 220	1 677	566	2 243	124 463	98,20
<b>Papua</b>	<b>1 691 745</b>	<b>17 028</b>	<b>58 630</b>	<b>75 658</b>	<b>1 767 403</b>	<b>95,72</b>

Sumber data : BPS Provinsi Papua, PDA 2021 (data diolah)



**Tabel. 2.28.**  
**Lapangan Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin**

Lapangan Pekerjaan Utama <i>Main Industry</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	619 900	512 050	1 131 950
2	12 245	954	13 199
3	23 757	12 730	36 487
4	43 178	930	44 108
5	61 697	82 642	144 339
6	47 092	1 545	48 637
7	12 046	12 982	25 028
8	1 889	378	2 267
9	8 279	1 018	9 297
10	100 167	26 864	127 031
11	24 054	23 336	47 390
12	7 428	14 381	21 809
13	15 458	8 493	23 951
14	11 537	4 715	16 252
<b>Jumlah/Total</b>	<b>988 727</b>	<b>703 018</b>	<b>1 691 745</b>

Sumber data : BPS Provinsi Papua, PDA 2021 (data diolah)

**Tabel. 2.29.**  
**Tabel Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Angkatan Kerja</b> <i>Economically Active</i>	1 038 467	728 936	1 767 403
Bekerja/ <i>Working</i>	988 727	703 018	1 691 745
Pengangguran Terbuka <i>Unemployment</i>	49 740	25 918	75 658
<b>Bukan Angkatan Kerja</b> <i>Economically Inactive</i>	262 274	419 468	681 742
Sekolah/ <i>Attending School</i>	90 965	78 240	169 205
Mengurus Rumah Tangga <i>Housekeeping</i>	106 597	315 770	422 367
Lainnya/ <i>Others</i>	64 712	25 458	90 170
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 300 741</b>	<b>1 148 404</b>	<b>2 449 145</b>

Sumber data : BPS Provinsi Papua, PDA 2021 (data diolah)



## 2. Angkatan Kerja Perempuan

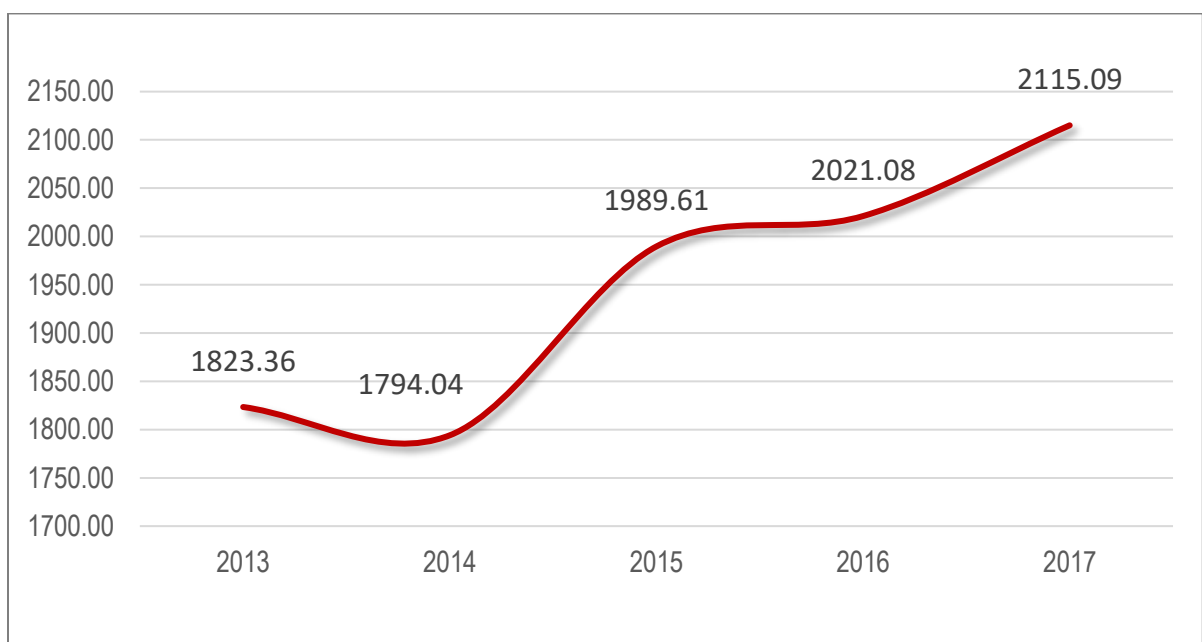
Partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Papua untuk perbandingan tahun 2013 dan tahun 2017 mengalami peningkatan pada masing-masing daerah di 29 kabupaten/kota. Tercatat Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua secara keseluruhan meningkat dari 696,618 orang di tahun 2013 menjadi 722,644 orang pada tahun 2017 atau meningkat sebesar sebesar 3,60 persen. Secara kewilayahan, terdapat beberapa daerah yang juga mengalami peningkatan di antaranya terdapat 18 kabupaten/kota, sedangkan 11 daerah lainnya mengalami penurunan meskipun tidak begitu signifikan perubahannya.

## 3. Pangan

### A. Tingkat Konsumsi Pangan

Konsumsi kalori atau protein adalah banyaknya kalori atau protein yang benar-benar dikonsumsi per orang per hari. Rata-rata wanita memerlukan asupan sebanyak 2000 kalori per harinya, sedangkan pria rata-rata membutuhkan asupan sebanyak 2500 kalori perhari.

**Gambar 2.33**  
**Proporsi Penduduk Di Provinsi Papua dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar = 2.100 Kkal/kapita/hari)**



Sumber: BPS RI, 2018 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 2.105, asupan kalori Provinsi Papua dalam rentang waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2013 asupan kalori mencapai 1.823 kkal/kapita/hari dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2017 menjadi 2.115 kkal/kapita/hari. Kondisi ini



mengindikasikan bahwa asupan kalori di Provinsi Papua telah memenuhi standar yang ditentukan.

## B. Pertanian

Kondisi pertanahan khususnya di Provinsi Papua sering menjadi masalah yang serius, sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam menindaklanjuti permasalahan-permasalahan pertanahan. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, terdapat penurunan peralihan tanah di Provinsi Papua dari 7.057 hektar pada tahun 2016 menjadi 5.887 hektar pada tahun 2017. Adapun proporsi luas peralihan tanah dengan jual-beli mengalami peningkatan dari 87,96% pada tahun 2016, menjadi 88,51% pada tahun 2017 (lihat Tabel 2.34).

**Tabel. 2.30.**  
**Data Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)**

Tahun	Jual beli	Pewarisan	Hibah	Tukar menukar	Lelang	Total
<b>2016</b>	6.208	559	254	6	30	7057
<b>2017</b>	5.211	451	197	3	25	5887

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2017

Berdasarkan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) nomor : SK.6979/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2017 target alokasi untuk Provinsi Papua seluas ±729.116 hektar, yang berasal dari : Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas ± 190.119 hektar, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif seluas ± 362.336 hektar, Program pemerintah untuk pencadangan percontohan sawah baru seluas ± 9.053 hektar, Pemukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas ± 97.421 hektar, Pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas ± 57.219 hektar, Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat seluas ± 1.666 hektar, Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat seluas ±11.302 hektar.

### 2.1.5.3 Layanan Urusan Pilihan

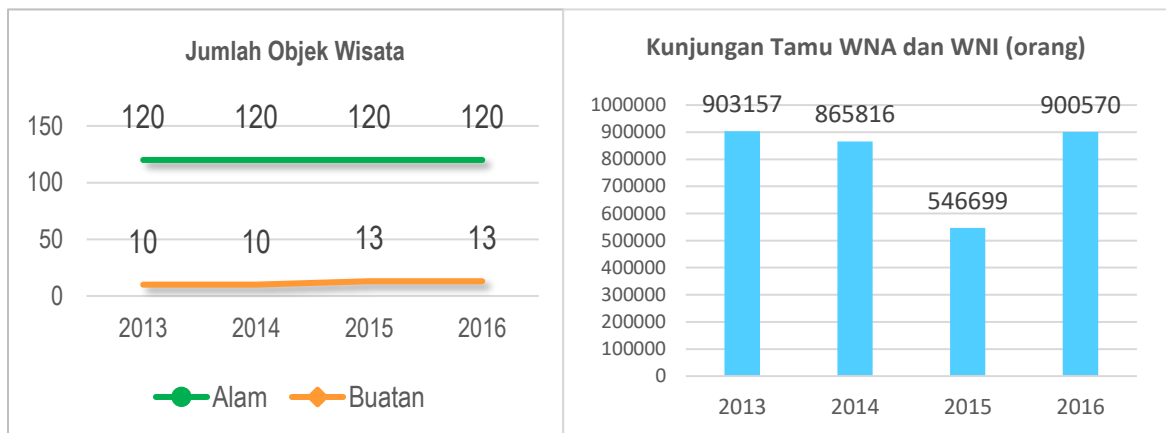
#### A. Pariwisata

Potensi pariwisata di Provinsi Papua sangat beragam jenisnya yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Objek wisata di Papua terbagi atas dua kelompok yaitu wisata



alam dan wisata buatan. Tercatat objek wisata alam di Provinsi Papua terdiri dari 120 objek, dan objek wisata buatan sebanyak 13 objek (lihat Gambar 2.34).

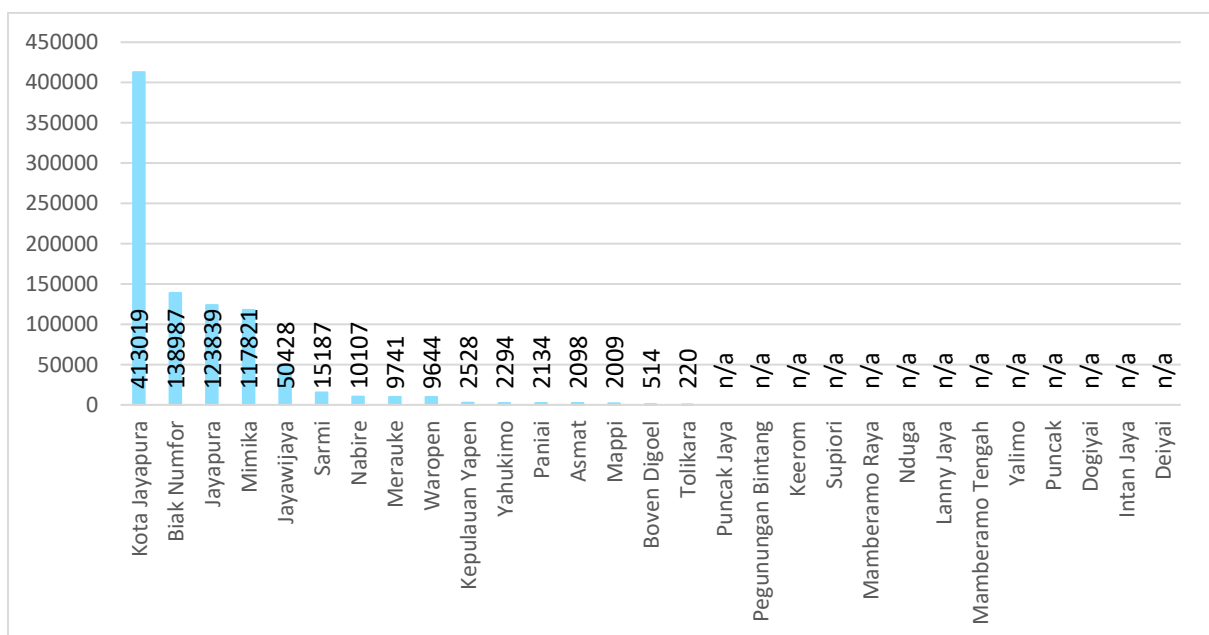
**Gambar 2.34**  
**Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Tamu di Provinsi Papua**



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2018 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.35, diketahui bahwa kunjungan wisata di Provinsi Papua cenderung mengalami penurunan baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Sebaran kunjungan wisatawan di Papua tidak terlepas dari adanya event-event yang dilaksanakan hampir ada di setiap tahun di berbagai daerah di Papua. Tercatat sampai dengan tahun 2016 jumlah wisatawan dalam negeri maupun mancanegara mencapai 900,570 orang atau meningkat sebesar 39,29% dari tahun sebelumnya. Selain itu, lama kunjungan wisatawan di Papua sangat beragam dalam rentang waktu empat tahun terakhir, tercatat rata-rata lama kunjungan berkisar antara 2-6 hari setiap tahunnya.

**Gambar 2.35**  
**Jumlah Tamu WNA dan WNI Tahun 2016 (orang)**



Sumber: Statistik BPS





## **B. Pertanian**

Perkembangan pertanian di Provinsi Papua dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian Papua dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Papua. Berdasarkan Tabel 2.47, diketahui bahwa rata-rata produktifitas pertanian terus mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat pada produktifitas total di Papua terus menurun dari 9,82 ton/ha di tahun 2013 menjadi 7,37 ton/ha di tahun 2016 dan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Rata-rata setiap tahunnya produktifitas berkurang hingga mencapai 8,65%. Hal ini disebabkan juga oleh produksi total pertanian yang terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,16% khususnya pada tanaman padi sawah yang setiap tahunnya memiliki jumlah produksi menurun paling tinggi yaitu sebesar 12,32% per tahunnya.

Secara keseluruhan terdapat empat komoditi dengan produktifitas mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu Jagung, Kacang Kedelai, Kacang Tanah dan Ubi Kayu. Sedangkan padi sawah dan ubi jalar mengalami penurunan hingga mencapai masing-masing sebesar 27,86 dan 0,07%. Namun secara nilai produksi terlihat bahwa hampir semua jenis komoditi ini terus mengalami perbaikan, kecuali padi sawah.

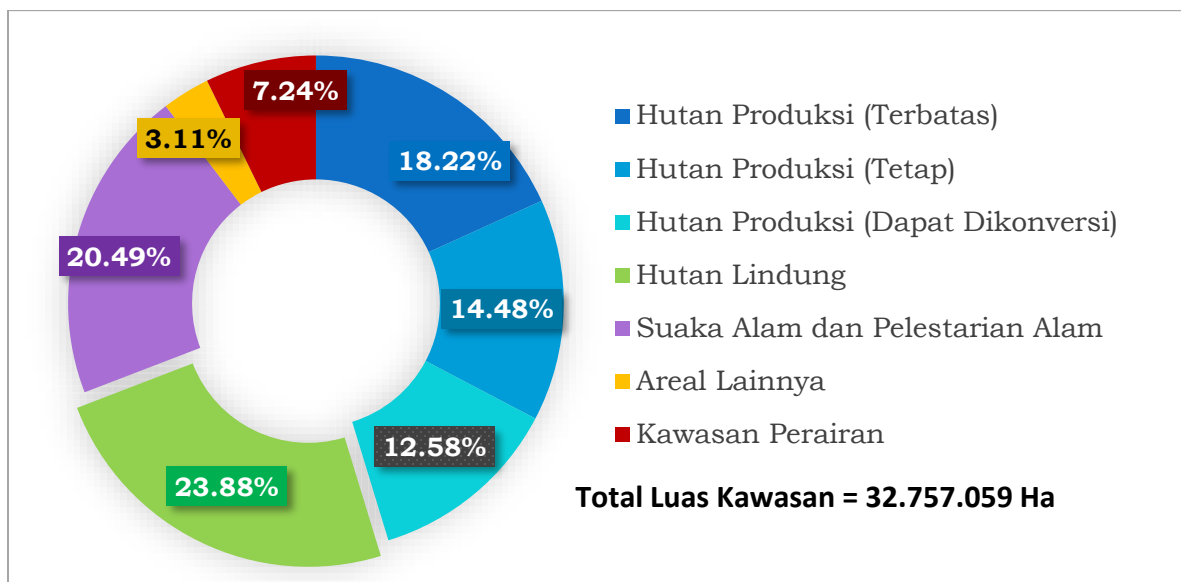
Dalam bidang perkebunan, secara keseluruhan luas panen untuk 12 komoditi di Provinsi Papua tercatat pada tahun 2013 sebesar 99.182 ha dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2017 sebesar 257,059 ha atau meningkat sebesar 61.42%. Produktivitas tanaman perkebunan di Provinsi Papua secara keseluruhan terus mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2013 adalah sebesar 400 ton/ha naik menjadi 441 ton/ha atau meningkat sebesar 9,35%. Jika dilihat per komoditi, tanaman cengkeh dan karet memiliki produktivitas tertinggi yaitu bisa mencapai di atas 90-95% yaitu pada tahun 2013 ke tahun 2017. Kemudian diikuti oleh komoditi pinang dan mente yang memiliki produktivitas berkisar antara 40-60% untuk tahun 2013 ke tahun 2017. Sedangkan komoditi lainnya hanya mampu meningkat di bawah 20% untuk tahun 2013-2017 (lihat Tabel 2.48).

## **C. Kehutanan**

Secara keseluruhan total luas kawasan di Provinsi Papua adalah sebesar 32.757.059 Ha yang terdiri atas hutan produksi (terbatas), hutan produksi (tetap), hutan produksi (dapat dikonversi), hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, areal lainnya dan kawasan perairan (lihat Gambar 2.37).



**Gambar 2.36**  
**Distribusi Penyebaran Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Papua**  
**Tahun 2016**



Sumber: Bappeda Papua, 2018 (data diolah)

Dengan luas kawasan hutan yang cukup luas, di dalamnya terdapat beberapa potensi hasil hutan yang cukup banyak di antaranya ialah produksi kayu bulat, kayu gergajian, kayu kapis dan verner dengan jumlah produksi yang berbeda-beda setiap jenisnya sepanjang tahun 2013-2017 (lihat Tabel 2.49). Produksi kayu bulat dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2014-2015 sempat mengalami peningkatan sebesar 58,79% dan kemudian kembali terjadi penurunan hingga di tahun 2017 yaitu dengan nilai produksi sebesar 439,11 m3. Selain itu, produksi kayu gergajian dan kayu lapis juga tercatat mengalami penurunan jumlah produksi terkecuali untuk verner yang terlihat mengalami peningkatan di tahun 2016-2017 sebesar 48,29% atau sebesar 302,85 m3.

**Tabel. 2.31.**  
**Produksi Kayu Hutan Menurut Jenisnya di Provinsi Papua (m3)**

Tahun	Kayu Bulat	Kayu Gergajian	Kayu Lapis	Verner
<b>2013</b>	578.440.360	465.516.793	213.840.594	-
<b>2014</b>	479.582.120	471.751.917	243.660.310	-
<b>2015</b>	1.163.665.550	526.274.724	279.573.630	-
<b>2016</b>	949.705.300	443.587.206	124.145.276	156.601.043
<b>2017</b>	439.119.900	124.022.400	-	302.848.336

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)



#### D. Energi dan Sumber Daya Mineral

Luas lahan pertambangan secara keseluruhan sampai dengan tahun 2016 tercatat adalah sebesar 3,35 juta ha yang terdiri atas kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan penambangan liar. Sepanjang tahun 2013-2016 luas areal penambangan terus meningkat dengan rata-rata 33,55% setiap tahunnya. Meningkatnya luas areal pertambangan di Provinsi Papua didominasi oleh kegiatan eksplorasi yang meningkat pesat pada tahun 2015-2016.

**Tabel. 2.32.**  
**Luas Areal Penggunaan Lahan Pertambangan (ha)**

Uraian	2013	2014	2015	2016
<b>Eksplorasi</b>	100,204	100,204	3,023,359	3,257,179
<b>Eksploitasi</b>	100,204	100,402	100,402	100,402
<b>Area Penambangan Liar</b>	789	789	789	789
<b>Total</b>	201,197	201,395	3,123,761	3,358,370

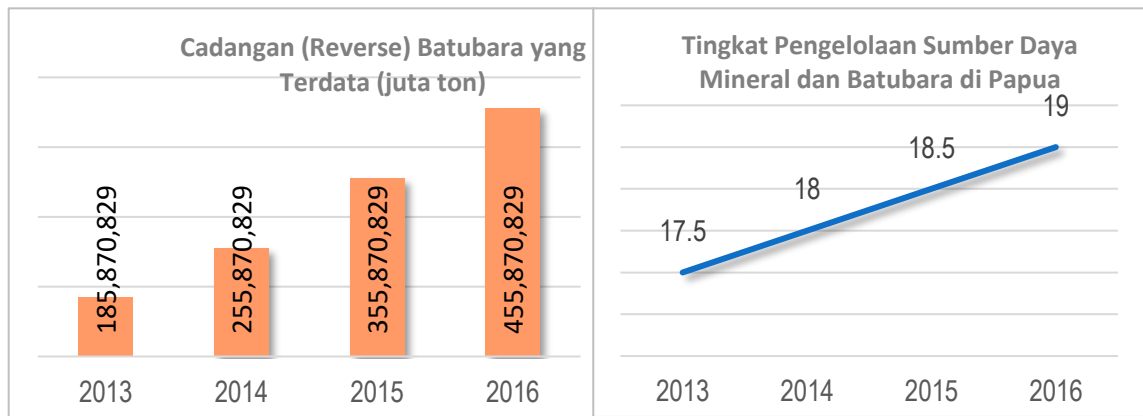
Sumber: Bappeda Papua, 2018

#### E. Potensi Sumber Daya Mineral

Jumlah cadangan berubara yang terdata di Provinsi Papua pada tahun 2013 mencapai 185,9 juta ton dan pada tahun 2016 meningkat mencapai 455,9 juta ton. Peningkatan tersebut disebabkan karena bertambahnya daerah yang ditemukan potensi sumber daya batubara di wilayah Papua. Perlu adanya perhatian dari pemerintah Provinsi Papua untuk mengeksplorasi sumber daya batubara yang ada sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Adapun persentase pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Provinsi Papua hingga tahun 2016 baru mencapai 19% (lihat Gambar 2.32). Ekplorasi yang lebih mendalam perlu dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan sumberdaya sebagaimana kegunaannya. Namun pemerintah perlu memperhatikan keberlangsungan sumberdaya yang ada dan tidak merusak lingkungan.



**Gambar 2.37**  
**Jumlah Cadangan (Reserve) yang Terdata dan Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Batubara di Provinsi Papua**



Sumber: Bappeda Papua, 2018 (data diolah)



## BAB III

### KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 bertemakan **Memantapkan Pemulihan Ekonomi Dan Sistem Kesehatan Menuju Transformasi Ekonomi Yang Inklusif**, tema ini didukung oleh tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2022 yang juga menekankan pada penguatan pemulihan ekonomi masyarakat. Ini menunjukkan upaya yang serius dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk selama masa Pandemi Covid 19.

Rumusan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah tentu akan diarahkan untuk upaya pemulihan ekonomi masyarakat, dan ini selaras dengan Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2022 yang telah dicanangkan yaitu Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan, merata dan adil dan Prioritas Nasional yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi Provinsi Papua tahun 2022 memiliki tema “Memperkuat Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan serta Berkelanjutan”.

Masa pandemic dengan penyebaran virus COVID-19 mendorong pemerintah Provinsi Papua untuk menerapkan kebijakan pembatasan aktifitas perekonomian yang disebut sebagai Pembatasan Sosial yang Diperluas dan Diperketat (PSDD) sebagai upaya pencegahan penyebaran. Ini wujud kepedulian pemerintah untuk tetap dan terus berupaya memulihkan kondisi ekonomi rakyat.

Pada triwulan IV 2020 perekonomian Papua mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi di Papua pada triwulan IV didorong oleh kinerja Lapangan Usaha pertambangan dan penggalian yang semakin membaik seiring dengan peningkatan produktifitas dan kadar tembaga. Kinerja pertambangan dan penggalian dapat menopang sektor non pertambangan yang masih mengalami kontraksi secara tahunan.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mengalami pemulihan secara bertahap meskipun belum dapat kembali kepada tingkat sebelum penyebaran virus COVID-19. Konsumsi pemerintah diperkirakan akan semakin membaik sejalan dengan



percepatan realisasi anggaran. Ekspor luar negeri diperkirakan akan tetap menjadi penopang kinerja perekonomian.

### 3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah

**Tabel 3.1.**  
**Perkembangan PDRB Provinsi Papua Dari Sisi Permintaan**

<b>PDRB (%yoy)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Sisi Permintaan</b>	Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi
<b>Konsumsi Rumah Tangga</b>	27,55	26,14	27,45	28,28
<b>Investasi</b>	16,91	16,8	16,92	17,43
<b>Konsumsi Pemerintah</b>	10,98	9,97	10,47	10,78
<b>Net Eksport Antar Negara</b>	2,81	2,19	2,30	2,37
<b>Net Eksport Antar Daerah</b>	-10,81	-7,94	-8,34	-8,59

Sumber data: Bank Indonesia, 2020 (diolah)

Dari sisi permintaan, konsumsi RT masih menjadi sumber pertumbuhan utama ekonomi Papua. Secara agregat, pada tahun 2022 konsumsi RT diperkirakan tumbuh positif. Kinerja konsumsi RT pada tahun 2022 secara umum didorong oleh penanganan pandemic COVID-19 serta peningkatan aktivitas ekonomi sepanjang tahun 2022.

Kemudian konsumsi pemerintah pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh. Secara umum, kinerja konsumsi pemerintah akan didorong oleh program penanganan dampak COVID-19 yang ditunjukan untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Program penanganan pemerintah diperkirakan tetap berlangsung pada tahun 2022 dengan skema penyaluran yang lebih baik setelah mempelajari penyaluran pada tahun 2020 dan 2021.

Ekspor pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh positif. Peningkatan ekspor tahun 2022 diperkirakan akan didorong oleh perkembangan pemulihan perekonomian negara tujuan utama dan peningkatan produktifitas serta kadar mineral pada tambang terbesar di Papua.

Kemudian investasi pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh positif. Peningkatan investasi pada tahun 2022 terutama didorong dengan percepatan pembangunan tambang bawah tanah Papua. Investasi ini diperkirakan akan berjalan sesuai dengan rencana tahunan pengembangan tambang.





**Tabel 3.2.**  
**Perkembangan PDRB Provinsi Papua dari sisi Lapangan Usaha**

PDRB(% <i>,yoy</i> ) Sisi Produksi Pertanian	2019					2020				
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
Pertanian, Kehutanan Perikanan	3,59	1,38	0,97	1,15	1,75	0,29	1,74	3,21	2,30	1,88
Pertambangan dan Penggalian	0,08	1,56	2,87	2,95	1,98	5,39	5,29	10,83	8,33	8,03
Industri Pengolahan	2,27	3,58	2,10	0,28	2,05	0,91	1,09	0,73	2,28	1,24
Pengadaan Listrik, Gas	2,45	3,22	2,65	2,91	2,80	0,98	-0,34	-0,24	-1,42	-0,26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,78	1,23	1,32	0,71	0,99	-0,19	0,03	-0,33	-0,80	-0,31
Konstruksi	3,23	3,35	3,32	3,20	3,25	1,50	1,29	1,27	1,79	1,45
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,86	4,06	3,17	0,17	3,18	1,87	3,95	4,63	5,00	3,85
Transportasi dan Pergudangan	9,86	6,57	6,30	1,63	5,87	1,04	-6,67	0,09	-2,79	-1,54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,96	3,87	3,63	1,37	3,14	2,43	2,73	2,53	2,95	2,57
Informasi dan Komunikasi	6,54	5,19	-1,44	-1,65	1,87	-2,83	-1,22	0,93	0,90	-0,52
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,44	1,09	0,82	1,74	0,88	-0,70	-0,18	0,48	0,14
Jasa Perantara Keuangan	2,65	2,52	0,82	0,72	1,63	0,66	-1,82	-1,10	-0,28	-0,61
Real Estate	4,42	2,07	0,34	-0,67	1,45	-2,76	1,19	0,84	0,36	-0,08
Jasa Perusahaan	6,59	2,58	1,56	-1,98	1,95	-1,46	1,89	3,40	3,25	1,78
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,24	3,44	6,14	7,24	5,74	8,91	7,70	8,77	6,10	7,80
Jasa Pendidikan	1,48	2,40	1,31	1,52	1,68	1,36	2,06	2,19	2,82	2,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,12	5,69	7,38	7,71	6,05	7,48	4,59	3,74	1,72	4,22
Jasa Lainnya	5,19	4,58	3,54	-0,07	3,16	1,40	3,99	5,15	5,70	4,07

Sumber data : Bank Indonesia, 2020 (diolah)

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pada tahun 2022 LU pertambangan dan penggalian masih menjadi sumber pertumbuhan utama ekonomi Papua. LU pertambangan dan penggalian pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sejalan dengan target produksi dan penjualan mineral yang lebih tinggi oleh tambang terbesar di Papua. Peningkatan produktifitas tambang sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan pada tambang bawah tanah. Dengan pembangunan tambang bawah tanah yang dilaksanakan sesuai dengan target, maka produktifitas dari tambang bawah tanah dapat berada pada kisaran 80-



90 % kapasitas penuh. Hal ini akan memberikan peningkatan produksi yang tinggi dibandingkan tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut, hasil tambang pada tambang bawah tanah yang memiliki kadar lebih tinggi akan dapat memberikan nilai tambah pada produksi pertambangan.

Sementara itu, kinerja konstruksi diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kinerja konstruksi sepanjang tahun 2021 yang disebabkan oleh perubahan jangka waktu proyek oleh pemerintah serta penundaan beberapa proyek pemerintah.

Kemudian, kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2022. Peningkatan kinerja pertanian sejalan dengan kondisi cuaca yang relative stabil pada tahun 2022 sehingga mendorong produksi pertanian dan perikanan lebih tinggi. Pemulihan konsumsi rumah tangga diperkirakan mendorong kinerja LU pertanian dan perikanan. Di samping itu, pemulihan permintaan industri pengolahan baik di dalam maupun di luar Papua yang membutuhkan bahan baku hasil hutan, diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Melihat dampak pandemic COVID-19 pada sektor non pertambangan sepanjang tahun 2021, maka diperlukan strategi dalam pemulihan daya beli masyarakat pada tahun 2022. Pemberian insentif kepada UMKM dan pelaku usaha yang terdampak sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan. Pemberian bantuan kepada rumah tangga yang terdampak juga diperlukan untuk memberikan bantalan untuk meminimalkan dampak keuangan. Hal ini diperlukan untuk menjaga konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2022. Penguatan digitalisasi pada sektor pemerintahan dan perdagangan menjadi strategi untuk penjualan selama masa pemulihan pasca pandemic COVID-19.

### 3.1.2 Tingkat Inflasi dan Kemiskinan di Provinsi Papua

**Tabel 3.3.**  
**Perkembangan Inflasi Provinsi Papua**

Inflasi (%yoy)	2018				2019				2020			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>Nasional</b>	3,40	3,12	2,88	3,13	2,48	3,28	3,39	2,72	2,96	1,96	1,42	1,45
<b>Papua</b>	3,16	4,09	5,31	6,36	2,58	2,79	2,69	0,66	1,21	1,03	1,93	1,65
Jayapura	4,18	4,42	5,63	6,70	2,98	3,00	2,63	0,59	0,28	0,14	1,38	0,60
Merauke	0,44	3,22	4,43	5,42	2,13	1,44	2,44	1,06	-0,20	1,94	1,48	1,45



Timika	n/a	n/a	n/a	n/a	1,98	3,30	3,10	0,53	-0,13	2,48	3,54	4,23
--------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	-------	------	------	------

Sumber data: BPS, 2021 (diolah)

Inflasi Provinsi Papua selama triwulan III tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini dipicu oleh relative tingginya inflasi pada kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, tembakau serta sandang. Terkait terbatasnya pasokan daging sapi menjadi pemicu relative lebih tingginya inflasi pada triwulan laporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan harga emas global pada triwulan III tahun 2019 ikut memengaruhi dinamika harga emas perhiasan di Provinsi Papua. Dengan dinamika perkembangan harga pada triwulan III Tahun 2019, Provinsi Papua mencatat inflasi sebesar 3,72 persen (yoy). Sampai dengan akhir Desember 2019 inflasi di perkirakan sebesar 3,4 persen (yoy) meningkat dari inflasi 2018 sebesar 3,27 persen (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan III Tahun 2019 bersumber dari kelompok bahan makanan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Tekanan inflasi Papua pada triwulan IV 2020 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2020.

Inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan IV 2020 diperkirakan didorong oleh penurunan persediaan makanan dari dalam Papua akibat berakhirnya musim panen. Selain itu, faktor curah hujan dan gelombang tinggi yang meningkat pada triwulan IV 2020 baik diwilayah utara maupun selatan Papua memberikan tekanan produksi pertanian serta penangkapan ikan oleh nelayan.

Tekanan peningkatan permintaan menjelang libur akhir tahun dan hari besar keagamaan nasional perayaan Natal dan Tahun Baru dapat mendorong peningkatan inflasi pada triwulan IV 2020. Mengingat liburan akhir tahun 2020 lebih Panjang dibandingkan dengan akhir tahun 2019 karena penundaan cuti Bersama hari raya Idul Fitri menjadi di akhir Desember 2020. Berdasarkan surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 440 Tahun 2020, 03 Tahun 2020, libur akhir tahun 2020 ditetapkan pada 24 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021.

Relaksasi pembatasan perjalanan dapat mendorong momentum libur panjang akhir tahun untuk dimanfaatkan masyarakat melakukan perjalanan ke/dari/intra Papua. Dengan demikian, peningkatan permintaan pada kelompok transportasi, khususnya komoditas angkutan udara, dapat mendorong tekanan inflasi pada komoditas angkutan udara di triwulan IV 2020.



Pada triwulan IV 2020 tepatnya bulan Desember, terdapat agenda besar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di 11 Kabupaten di Provinsi Papua. Berdasarkan pengalaman sebelumnya di beberapa daerah, Pilkada dapat mendorong belanja dan meningkatkan inflasi.

**Tabel 3.4.**  
**Indikator-Indikator Kemiskinan Di Provinsi Papua**

Tahun	Bulan	GarisKemiskinan (Rupiah/Kapital /bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persentase Penduduk Miskin
2017	Maret	457.541	7,49	2,82	27,62
	September	464.056	6,24	1,93	27,76
2018	Maret	499.463	6,73	2,28	27,74
	September	518.811	5,91	1,82	27,43
2019	Maret	540.099	7,17	2,60	27,53
	September	557.099	6,07	1,98	26,64
2020	Maret	563.099	6,16	2,08	26,6
	September	580,643	6,90	2,35	26,8

Sumber data : BPS, 2021 (diolah)

Pada bulan Maret 2020, tingkat kemiskinan yang ditunjukkan dengan jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan dengan Bulan Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Bulan Maret 2020 mengalami penurunan 1,62% (yoy) menjadi 911,37 ribu orang, namun meningkat 1,12% dibandingkan dengan Bulan September 2020. Persentase penduduk miskin pada Bulan Maret 2020 memiliki tren yang sama dengan jumlah penduduk miskin, yaitu menurun dibandingkan dengan Bulan Maret 2019, namun meningkat jika dibandingkan dengan Bulan September 2019. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,64%. Meskipun telah mengalami peningkatan, Provinsi Papua masih menjadi Provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia. Sementara, persentase penduduk miskin nasional pada Maret 2020 sebesar 10,08%, Garis Kemiskinan (GK) merupakan suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. GK di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan. pada periode September 2019, GK Papua Rp 557.236,00 lalu



mengalami peningkatan menjadi Rp 562.992,00 pada periode Maret 2020, nilai tersebut jauh lebih tinggi dari rata-rata GK nasional sebesar Rp 454.652,00. Hal tersebut menandakan biaya hidup minimal di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan.

Kemudian, dari tingkat kesenjangan pendapatan menunjukkan terjadinya penurunan, terjadinya penurunan dilihat dari nilai gini 0,394 pada periode Maret 2019 menjadi 0,392 pada periode Maret 2020. Kesenjangan antara pengeluaran rata-rata penduduk miskin dengan GK yang ditunjukkan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan mencapai sebesar 6,16 pada periode Maret 2020 dibandingkan dengan periode Maret 2019 yang tercatat sebesar 7,17.

Dalam kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia, sebagaimana telah diuraikan pada Bab terdahulu bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) sekaligus dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam perhitungan IPM terdapat Beberapa indikator yang sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungannya. Seperti Angka melek huruf yang dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik juga PDB per kapita yang dianggap tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Dari Tabel diatas terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua pada Tahun 2020 sebesar 60,44. Angka ini menurun sebesar 0,40 poin atau turun -0,66 persen dibandingkan tahun 2019 dan Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh Pendidikan selama 6,69 tahun, hampir setara masa pendidikan untuk menamatkan jenjang pendidikan kelas 1 SMP. Nilai tersebut lebih lama 0,04 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.



### **3.1.3 Prospek Perekonomian Provinsi Papua Tahun 2022**

Secara agregat, prospek perekonomian Papua pada tahun 2022 diproyeksikan tumbuh positif, lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun 2021. Secara umum peningkatan kinerja ekonomi Papua pada tahun 2022 didorong oleh perbaikan kinerja pertambangan terbesar di Papua dimana produksi tambang berasal dari tambang bawah tanah yang mengalami peningkatan produktivitas sejalan dengan kadar tembaga dan emas yang lebih tinggi dibandingkan tambang terbuka. Penanganan pandemic COVID-19 di tahun 2021 yang menjadi penentu pemulihan aktivitas perekonomian sepanjang tahun 2022. Pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas pada semester I tahun 2022 diperkirakan akan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tumbuh meskipun terbatas. Efektivitas dan penyebaran vaksin COVID-19 yang diperkirakan dapat didistribusikan pada triwulan II atau III 2021 menjadi penentu pemulihan perekonomian sepanjang tahun 2022.

### **3.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2022**

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, melalui kebijakan yang diarahkan pada:
  - a. Reformasi prosedur perijinan investasi;
  - b. Mengembangkan kualitas dan kuantitas informasi peluang investasi daerah, Membangun sarana dan prasarana investasi, dan
  - c. Menyiapkan dokumen pendukung penyusunan regulasi.
2. Tercapainya stabilitas makro ekonomi, melalui kebijakan yang diarahkan pada:
  - a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa;
  - b. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri;
  - c. Pengendalian laju inflasi.
3. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
  - a. Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah;
  - b. Fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah;
  - c. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis;
  - d. Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
  - e. Pengembangan sarana promosi hasil produksi;





- f. Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah;
  - g. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, Penyediaan lembaga keuangan mikro di tingkat Distrik/ Kampung.
4. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
- a. Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya;
  - b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri;
  - c. Kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah;
  - d. Pemberian akses perbankan bagi industri kecil dan menengah;
  - e. Mendorong kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta;
  - f. Menyusun kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir;
  - g. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial, dan Penyediaan sarana prasarana klaster industri.
  - h. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah.
5. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat, melalui kebijakan yang diarahkan pada:
- a. Optimalisasi lahan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan lingkungan hidup;
  - b. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah;
  - c. Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat;
  - d. Meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani;
  - e. Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping ditingkat masyarakat;
  - f. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
6. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat, melalui kebijakan yang diarahkan pada:
- a. Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan;
  - b. Pengembangan usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat;
  - c. Pengembangan industri kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu;
  - d. Pengembangan usaha wisata alam masyarakat adat;
  - e. Pemetaan partisipatif masyarakat adat pemilik hak ulayat;



- f. Pengembangan sertifikasi usaha pemanfaatan industri kayu rakyat masyarakat adat dan
  - g. Mengembangkan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tata kelola kehutanan.
7. Berkembangnya perekonomian wilayah berbasis ekonomi kerakyatan, berkelanjutan dan merata, melalui kebijakan yang diarahkan :
- a. Pengembangan Perekonomian Wilayah Berbasis Komoditas Lokal, yaitu : (1) pengembangan sektor primer berupa komoditi perkebunan (kopi, kakao, karet, sagu, tebu, kelapa sawit, buah merah), komoditi tanaman pangan (ubi jalar, padi), perikanan laut dan budidaya, peternakan besar, kecil, dan unggas, serta pertambangan rakyat; (2) pengembangan sektor sekunder berupa komoditi industri pengolahan tepung sagu dan ubi jalar, buah merah, minyak curah, pengolahan ikan, dan pengolahan kayu; (3) pengembangan sektor tersier berupa pariwisata, perdagangan dan jasa.
  - b. Pengembangan Klaster Ekonomi yang memiliki daya saing, yang diarahkan pada pengembangan : (1) Klaster Pertanian di Wamena, Tanah Merah, Kepi, Merauke, Mimika, Sarmi, dan Jayapura; (2) Klaster Perkebunan di Wamena, Nabire, Jayapura, (3) Klaster Perikanan di Kepi, Merauke, Mimika, Sarmi, Keerom, Jayapura, Biak Numfor dan Waropen; (4) Klaster Pariwisata KPPN Timika-Lorentz di Kabupaten Mimika, KPPN Jayawijaya di Kabupaten Jayawijaya; KSPN Wasur dan KPPN Kimaam di Kabupaten Merauke; KPPN Danau Bian di Kabupaten Merauke; KPPN C.A. Weyland di Kabupaten Nabire; KPPN Paniai di Kabupaten Paniai; KSPN Agats- Asmat di Kabupaten Asmat; KPPN di Timika-Lorentz dan sekitarnya di Kab. Mimika dan Jayawijaya; KSPN Sentani di Kab. Jayapura, KPPN Jayapura; KSPN Biak dan KPPN Numfor Kabupaten Biak numfor; KPPN Serui di Kabupaten Kep.Yapen; KPPN Supiori di kabupaten Supiori

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam Rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan peñata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintahan daerah sebenarnya memerikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah



untuk melakukan peran yang lebih aktif Dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan Aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

1. Pajak daerah dan retribusi daerah
  - a. Peningkatan kemudahan pembayaran pajak berbasis teknologi (ATM, android, Payment Point)
  - b. Peningkatan reward bagi masyarakat taat pajak dan penghapusan denda pajak berdasar tingkat tunggakan
  - c. Peningkatan pendataan masyarakat wajib pajak dan sosialisasi pada perusahaan wajib pajak air permukaan
  - d. Peningkatan pendataan potensi dan asset provinsi yang dapat menjadi obyek retribusi daerah
  - e. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan retribusi dengan OPD penghasil
  - f. Peningkatan akses pelayanan samsat, terutama di daerah pedalaman
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
  - a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
  - b. Peningkatan koordinasi dan evaluasi dengan perusahaan/BUMD penghasil
  - c. Identifikasi perusahaan potensial untuk investasi modal
  - d. Mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
3. Kebijakan Dana Perimbangan  
Pemerintah provinsi papua akan berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal pembagian dana hasil pajak dan bukan pajak termasuk perolehan Dana Alokasi Umum



### 3.2.1.1 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua

**Tabel 3.5.**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua**

No.	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertum- buan (%)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>13.402.682.921.968,20</b>	<b>15.104.934.356.670,80</b>	<b>12.662.509.557.913,50</b>	<b>-1,73%</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>964.174.750.665,24</b>	<b>1.903.014.146.178,85</b>	<b>1.255.685.466.969,77</b>	<b>31,68%</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	802.831.524.858,00	1.469.202.829.921,00	986.672.016.100,00	25,08%
1.1.2.	Retribusi Daerah	60.553.730.969,60	27.038.220.738,61	19.537.313.848,33	-41,55%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.911.412.021,00	24.739.418.877,00	31.983.026.838,00	68,49%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.878.082.816,64	382.033.676.642,24	217.493.110.183,44	143,39%
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>4.413.188.563.218,00</b>	<b>4.522.405.712.374,00</b>	<b>3.402.100.028.906,00</b>	<b>- 11,15%</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	924.050.996.588,00	707.243.299.539,00	694.866.304.495,00	-12,61%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.571.298.119.000,00	2.616.545.381.000,00	2.330.020.003.000,00	-4,60%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	917.839.447.630,00	1.198.617.031.835,00	377.213.721.411,00	-18,97%
1.2.4	Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>8.025.319.608.085,00</b>	<b>8.679.514.498.118,00</b>	<b>8.004.724.062.037,72</b>	<b>0,19%</b>
1.3.1.	Hibah	443.450.000,00	612.000.000,00	1.567.116.824,00	97,04%
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4.	Dana Penyesuaian	98.000.000,00	0,00	0,00	-50,00%
1.3.5.	Dana Otonomi Khusus	5.620.854.115.000,00	5.850.230.158.000,00	5.288.694.844.000,00	-2,76%
1.3.6.	Dana Tambahan Infrastruktur	2.400.000.000.000,00	2.824.446.537.000,00	2.711.275.076.000,00	6,84%
1.3.7.	Sumbangan Pihak Ketiga	3.924.043.085,00	4.225.803.118,00	3.187.025.213,72	-8,45%
1.3.8.	Dana Intensif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2021



### 3.2.1.2 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah provinsi Papua

**Tabel 3.6.**  
**Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua**

No.	Uraian	KINERJA REALISASI PENDAPATAN DAERAH		
		2018 %	2019 %	2020 %
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>95,82</b>	<b>100,36</b>	<b>95,97</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>68,56</b>	<b>98,51</b>	<b>118,41</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	69,36	101,48	110,43
1.1.2.	Retribusi Daerah	50,51	91,11	108,51
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22,23	97,63	126,39
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117,74	89,07	175,84
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>96,89</b>	<b>101,80</b>	<b>82,33</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	121,38	103,44	108,12
1.2.2	Dana Alokasi Umum	100,00	100,00	99,86
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	75,10	104,96	32,63
1.2.4	Dana Tambahan Infrastruktur	-	-	-
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>99,98</b>	<b>100,04</b>	<b>100,04</b>
1.3.1.	Hibah	40,31	122,40	313,42
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
1.3.4.	Dana Penyesuaian	-	-	-
1.3.5.	Dana Otonomi Khusus	100	100,00	100,00
1.3.6.	Dana Tambahan Infrastruktur	1000	100,00	100,00
1.3.7.	Sumbangan Pihak Ketiga	78,48	422,58	318,7
1.3.8.	Dana Intensif Daerah	0,00	0,00	0,00

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2021

### 3.2.1.3 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Papua

**Tabel 3.7.**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Papua**

No.	Uraian	PROYEKSI 2021	PROYEKSI 2022
		Rp	Rp
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>14.763.746.028.757,00</b>	<b>14.259.020.993.270,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.765.651.609.757,00</b>	<b>1.260.926.574.270,00</b>



No.	Uraian	PROYEKSI 2021	PROYEKSI 2022
		Rp	Rp
1.1.1.	Pajak Daerah	1.398.183.395.930,00	893.458.360.443,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	16.133.487.808,00	17.684.201.408,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.304.838.272,00	25.304.838.272,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	326.029.887.747,00	324.479.174.147,00
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>4.894.072.394.000,00</b>	<b>4.894.072.394.000,00</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	683.458.786.000,00	683.458.786.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.391.513.927.000,00	2.391.513.927.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.819.099.681.000,00	1.819.099.681.000,00
1.2.4	Dana Tambahan Infrastruktur	0	0
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>8.104.022.025.000,00</b>	<b>8.104.022.025.000,00</b>
1.3.1.	Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00
1.3.2	Dana Darurat	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	0
1.3.4	Dana Penyesuaian	0	0
1.3.5	Dana Otonomi Khusus	5.464.079.464.000,00	5.464.079.464.000,00
1.3.6	Dana Tambahan Infrastruktur	2.622.758.143.000,00	2.622.758.143.000,00
1.3.7	Sumbangan Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
<b>1.3.8</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>15.684.418.000,00</b>	<b>15.684.418.000,00</b>

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2021

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

**Tabel 3.8.**  
**Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 s.d 2020 (Rp)**

No	Uraian	Realisasi		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
2.1.1	Belanja Pegawai	1,615,614,102,438,00	2.364.908.576.164,00	1.959.301.849.150,00
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah	2,123,552,050,331,45	1.613.095.350.495,00	2.464.238.139.238,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	39,237,700,000,00	60.778.240.000,00	51.843.550.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*	353.528.828.007,00	828.799.492.988,00	472.573.932.979,00





No	Uraian	Realisasi		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*	4.639.063.377.476,00	2.290.235.705.220,00	2.603.501.328.399,96
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	15.000.848.783,00	188.612.418.360,00
<b>B</b>	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>8.774.996.058.252,45</b>	<b>7.172.818.213.650,00</b>	<b>7.740.071.218.126,96</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>			
2.2.1	Belanja Pegawai			223.467.808.881,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.165.655.288,00	4.012.305.795.609,79	3.511.520.112.785,40
2.2.3	Belanja Modal	1.918.505.428.471,71	2.236.551.423.150,79	805.448.611.036,20
<b>C</b>	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6.718.671.083.759,71</b>	<b>6.248.857.218.760,58</b>	<b>4.540.436.532.702,60</b>
<b>D</b>	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>15.493.667.142.012,20</b>	<b>13.421.675.432.410,60</b>	<b>12.280.507.750.829,60</b>

Sumber Data : BPKAD Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

**Tabel 3.9.**  
**Pagu dan Estimasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2021 s.d 2022 (Rp)**

KODE	URAIAN	PAGU 2021	ESTIMASI 2022
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.765.651.609.757</b>	<b>1.800.964.641.952</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.398.183.395.930	1.426.147.063.849
4.1.02	Retribusi Daerah	27.714.487.808	28.268.777.564
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.304.838.272	25.810.935.037
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	314.448.887.747	320.737.865.502
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>12.996.594.419.000</b>	<b>13.256.526.307.380</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	12.996.594.419.000	13.256.526.307.380
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.530.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.500.000.000	1.530.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>14.763.746.028.757</b>	<b>15.059.020.949.332</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.474.362.637.575</b>	<b>11.703.849.890.327</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	4.262.598.475.082	4.347.850.444.584
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.171.548.769.244	4.254.979.744.629
5.1.05	Belanja Hibah	2.939.948.856.688	2.998.747.833.822
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	100.266.536.561	102.271.867.292



KODE	URAIAN	PAGU 2021	ESTIMASI 2022
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.244.687.958.046</b>	<b>1.255.059.407.275</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	26.157.500.000	26.680.650.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.294.843.060	216.540.739.921
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	825.825.134.362	842.341.637.049
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	162.897.169.367	166.155.112.754
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.275.752.500	3.341.267.550
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>153.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	150.000.000.000	153.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>2.885.861.362.709</b>	<b>2.943.578.589.963</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	767.987.401.259	783.347.149.284
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.117.873.961.450	2.160.231.440.679
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>15.758.964.362.330</b>	<b>16.055.487.887.565</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(995.218.333.573)</b>	<b>(996.466.938.232)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.115.218.333.573</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.115.218.333.573	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>1.115.218.333.573</b>	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>120.000.000.000</b>	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	120.000.000.000	120.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>995.218.333.573</b>	<b>995.218.333.573</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>15.878.964.362.330</b>	<b>15.878.964.362.330</b>

Sumber data: \*Pagu Induk SIPD 2021, data diolah ; \*\*proyeksi 3% data diolah

Penyusunan anggaran belanja tahun 2022 berpedoman pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang didasarkan pada beberapa hal yaitu : (1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah; (2) Prinsip penyusunan APBD; (3) Kebijakan penyusunan APBD; (4) Teknis penyusunan APBD; dan (5) Hal khusus lainnya.

RKP Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan



rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 6 (enam) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD. 6 (enam) prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dimaksud, meliputi:

1. Peningkatan akses kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan/SDM
2. Penguatan stabilitas keamanan & demokrasi;
3. Mengoptimalkan nilai tambah komoditas unggulan di luar sektor tambang;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas oap dalam memanfaatkan peluang ekonomi
5. Pemantapan infrastruktur dasar dan konektifitas teknologi dan informatika antar wilayah
6. Meminimalkan tingkat kerentanan bencana dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2022 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2022 berpedoman pada RKPD Tahun 2022 masing-masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2022 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD provinsi Tahun 2022.

Adapun untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:



1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat
5. waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
7. Mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
8. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
9. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Oleh karena itu arah kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2022 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD, program prioritas nasional dalam RKP, dan program strategis nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Papua, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian, urusan pembangunan, Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan dan ketimpangan;
2. Dukungan terhadap RPJMN 2020–2024, RKP 2021 dan RKP 2022;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar 10%;
5. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan pada pemerintahan kampung, hibah, Bansos dan subsidi;
6. Penggunaan Dana DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian/BOS, dan Dana Otonomi Khusus;



7. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
8. Dukungan penyelenggaraan PON XX Tahun 2021;
9. Pembinaan bagi atlet berprestasi;
10. Dukungan terhadap DPRP dan MRP;
11. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial.
12. Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas dalam rangka memenuhi janji politik dan program prioritas kepala daerah;
13. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan di jabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
15. Efisiensi Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah.

### **3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pada tabel 3.9 juga memuat tentang Pembiayaan Daerah karena sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tampilan dan tabel dijadikan satu antara Pembelanjaan dan Pembiayaan. Dalam pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan yang memuat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan yang memuat tentang penyertaan modal daerah.

Arah kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam pembiayaan daerah tahun 2022 diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada item-item pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

### **3.2.4 Kebijakan Belanja Daerah Yang Bersumber Pada Dana Otonomi Khusus**

Terkait dengan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, disebutkan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas



Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, pada Pasal 5 bahwa Sumber Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua adalah : (a) dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua per seratus) dana alokasi umum nasional, dan (b) dana tambahan infrastruktur.

Belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus menurut Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 di atas akan dikelola dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, melalui pembagian 20% untuk pemerintah provinsi, dan 80% untuk pemerintah kabupaten/kota, setelah dari total penerimaan dana Otonomi Khusus dikeluarkan untuk pembiayaan program strategis lintas kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah diarahkan dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa pembagian penerimaan dana otonomi khusus antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di atur dengan terlebih dahulu dikurangi kebutuhan dana untuk program strategis lintas Kabupaten/Kota.

Selama tahun 2013-2016, program strategis lintas kabupaten/kota yang diamanatkan oleh Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 tersebut telah diterjemahkan kedalam program-program strategis Otonomi Khusus yang lazim dikatakan Urusan Bersama (Program Strategis Lintas Kabupaten/Kota) yang mencakup kebijakan-kebijakan afirmatif yang strategis bagi Orang Asli Papua yaitu Prospek, KPS (Kartu Papua Sehat), Gerbangmas Hasrat Papua, Perumahan Rakyat dan Pendidikan. Serta Bangun Generasi Keluarga Papua (Bangga Papua) yang dimulai pada tahun 2018. Oleh karena itu berdasarkan realisasi penerimaan dana otsus tahun 2019, dan alokasi Otonomi Khusus di tahun 2020, serta merujuk kepada pembagian dana Otonomi Khusus untuk kabupaten/kota yang telah dilakukan selama ini, selengkapny dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 3.10.**  
**Realisasi Dan Alokasi Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2019 dan 2020 (dalam Rp.)**

Uraian	Realisasi 2019	Alokasi 2020
<b>Total Dana Otsus</b>	<b>5.850.230.158.000</b>	<b>5.288.694.844</b>
<b>Provinsi</b>	<b>389.351.314.600</b>	<b>389.351.314.600</b>
<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.557.405.258.400</b>	<b>1.557.405.258.400</b>
<b>Urusan Bersama</b>	<b>3.903.473.585.000</b>	<b>3.341.938.271.000</b>
a. Dinas Pendidikan	1.075.246.526.900	976.929.140.000
b. Dinas Kesehatan	156.991.000.000	92.991.000.000
c. RSUD Jayapura	291.000.000.000	200.000.000.000
d. RSUD Abepura	140.000.000.000	141.700.000.000
e. RS Jiwa Abepura	50.000.000.000	52.250.000.000





Uraian	Realisasi 2019	Alokasi 2020
f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.000.000.000	
g. Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil	1.000.000.000	
h. Dinas Komunikasi dan Informatika	6.328.812.000	
i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.000.000.000	
j. Dinas Pemuda dan Olahraga	665.934.875.510	39.070.860.000
k. Dinas Kelautan dan Perikanan	8.000.000.000	8.000.000.000
l. Dinas Pariwisata	5.000.000.000	5.000.000.000
m. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dinas Pertanian Dan Perikanan)	10.000.000.000	32.000.000.000
n. Dinas Perkebunan	6.000.000.000	
o. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.000.000.000	
p. Dinas Kehutanan	8.000.000.000	8.000.000.000
q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja)	5.000.000.000	32.154.027.000
r. Sekretariat Daerah	65.268.836.000	
s. Sekretariat MRP	250.000.000.000	232.400.000.000
t. Bappeda	9.500.000.000	
u. BPKAD (BTL)	1.129.203.534.590	1.521.443.244.000

Sumber data : BPKAD Provinsi Papua 2021 (data diolah)

Menurut ketentuan Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 bahwa pembiayaan program pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang bersumber pada Dana Otonomi Khusus dianggarkan sebagai belanja bantuan khusus pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia unggul Papua. Sedangkan pembiayaan program perumahan rakyat dianggarkan sebagai belanja bantuan khusus perumahan layak huni bagi orang asli Papua.

Pengelolaan belanja Dana Otsus yang merupakan pembagian 80% untuk pemerintah kabupaten/kota, dan 20% untuk pemerintah provinsi telah diarahkan alokasi belanjanya sebagai berikut :

- a. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarannya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi;
- b. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarannya dialokasikan untuk pelayanan Kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit,



- perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
- c. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima per seratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan ekonomi bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan;
  - d. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh per seratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
  - e. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 6% (enam per seratus);
  - f. Pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 2 % (dua per seratus); dan
  - g. Pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan di atas, dialokasikan maksimal 2% (dua per seratus).

Menurut Perdasus Nomor 13 Tahun 2016, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang telah diarahkan di atas akan dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran atas Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dimana penundaan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

**Tabel 3. 11.**  
**Alokasi Pembagian dan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota**  
**(dalam Rp.)**

Wilayah Adat Dan Kabupaten/Kota		Realisasi 2019	Alokasi 2020	Target 2021
<b>ANIMHA</b>		<b>232.103.024.357,08</b>	<b>232,103,024,357.08</b>	<b>236,925,866,000</b>
1	Merauke	48.495.887.123,16	48,495,887,123.16	49,503,578,000
2	Mappi	61.685.777.431,10	61,685,777,431.10	62,967,539,000
3	Asmat	61.939.361.529,60	61,939,361,529.60	63,226,392,000
4	Boven Digoel	59.981.998.273,22	59,981,998,273.22	61,228,357,000



Wilayah Adat Dan Kabupaten/Kota		Realisasi 2019	Alokasi 2020	Target 2021
<b>MAMTA</b>		<b>210.426.739.846,85</b>	<b>210,426,739,846.85</b>	<b>214,799,173,000</b>
5	Kota Jayapura	31.867.021.099,00	31,867,021,099.00	32,529,182,000
6	Jayapura	46.073.463.891,39	46,073,463,891.39	47,030,819,000
7	Sarmi	44.404.979.591,99	44,404,979,591.99	45,327,666,000
8	Keerom	29.015.053.505,56	29,015,053,505.56	29,617,954,000
9	Mamberamo Raya	59.066.221.758,91	59,066,221,758.91	60,293,552,000
<b>MEE PAGO</b>		<b>325.082.440.569,00</b>	<b>325,082,440,569.00</b>	<b>331,837,291,000</b>
10	Nabire	45.756.973.242,93	45,756,973,242.93	46,707,752,000
11	Mimika	31.309.836.558,85	31,309,836,558.85	31,960,420,000
12	Paniai	64.189.783.336,76	64,189,783,336.76	65,523,575,000
13	Dogiyai	61.730.319.464,80	61,730,319,464.80	63,013,007,000
14	Intan Jaya	61.756.420.382,30	61,756,420,382.30	63,039,650,000
15	Deiyai	60.339.107.583,36	60,339,107,583.36	61,592,887,000
<b>LA PAGO</b>		<b>624.311.440.273,37</b>	<b>624,311,440,273.37</b>	<b>637,283,935,000</b>
16	Jayawijaya	51.356.987.511,63	51,356,987,511.63	52,424,128,000
17	Puncak Jaya	64.622.624.148,52	64,622,624,148.52	65,965,410,000
18	Puncak	64.316.106.423,53	64,316,106,423.53	65,652,523,000
19	Yahukimo	65.595.198.072,37	65,595,198,072.37	66,958,193,000
20	Peg. Bintang	62.592.857.239,28	62,592,857,239.28	63,893,467,000
21	Tolikara	64.759.842.666,91	64,759,842,666.91	66,105,480,000
22	Nduga	62.185.842.294,06	62,185,842,294.06	63,477,995,000
23	Lanny Jaya	65.793.806.208,36	65,793,806,208.36	67,160,928,000
24	Mamb. Tengah	61.543.588.793,15	61,543,588,793.15	62,822,396,000
25	Yalimo	61.544.586.915,56	61,544,586,915.56	62,823,415,000
<b>SAERERI</b>		<b>165.481.613.353,70</b>	<b>165,481,613,353.70</b>	<b>168,920,137,000</b>
26	Biak Numfor	32.258.636.567,29	32,258,636,567.29	32,928,935,000
27	Supiori	43.402.635.532,33	43,402,635,532.33	44,304,494,000
28	Kepulauan Yapen	45.992.775.230,57	45,992,775,230.57	46,948,454,000
29	Waropen	43.827.566.023,51	43,827,566,023.51	44,738,254,000

Sumber data : BPKAD Provinsi Papua 2021 (data diolah)

Tabel diatas memuat tentang realisasi, alokasi, dan target belanja dana Otonomi Khusus pada setiap pemerintah Kabupaten/Kota untuk Tahun 2019, 2020 dan 2021. Hal ini mengacu pada implementasi amanat Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 yang memuat tentang realisasi, alokasi, dan target pengelolaan belanja yang bersumber pada dana Otonomi Khusus serta kebutuhan belanja.



Undang Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk tahapan 20 (dua puluh) tahun berakhir tahun 2021 ini dan masih dalam proses RUU (Rancangan Undang undang) tentang perubahan untuk perpanjangan 20 (dua puluh) tahun kedepan, karena itu belum bisa ditampilkan proyeksi alokasi belanja dan alokasi Pembagian serta Penyaluran Dana Otsus untuk tahun 2022.



## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2022 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target Visi dan Misi sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2022. Disamping harus taat dengan RTRW juga harus berlandaskan RPJPD, dimana rencana pembangunan tahun 2022 ini merupakan bagian perencanaan tahapan ke empat tahunan dari RPJMD Tahun 2019-2023 dan merupakan bagian perencanaan tahapan ke lima tahunan dari RPJPD Tahun 2005–2025 Tahap V, dimana pembangunan pada tahap ini ditujukan untuk memperkuat Papua yang berkeadilan, mengurangi kesenjangan sosial dan antar wilayah, meningkatnya ketahanan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan asset alam Papua. Selain itu prioritas pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang dimuat dalam RKP Tahun 2022.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan gambaran terhadap pencapaian tujuan. Rumusan terhadap tujuan dan sasaran diterjemahkan dari visi dan misi pembangunan daerah. Untuk memberi tuntunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka perlu diperhatikan visi pembangunan Provinsi Papua periode 2019 – 2023, adalah **“PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN”**.

Berkenaan dengan perwujudan visi pembangunan Provinsi Papua, elaborasi dari visi telah menghasilkan dan menetapkan 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Papua periode 2019-2023, dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:



### **1. Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM.**

Memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan periode 2019-2023, yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. SDM yang berdaya saing juga akan tercapai jika SDM Papua terjaga pasokan pangannya terjamin dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Untuk itu kemandirian pangan dan gizi merupakan prioritas dalam pembangunan Papua.

### **2. Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI.**

Terjaminnya ketentraman dan ketertiban akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat Papua, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan. Oleh karena itu Pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama, menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Provinsi Papua, penerapan dan penegakan hukum dan HAM yang dilaksanakan secara tegas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan HAM serta peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Masyarakat yang demokratis merupakan landasan penting untuk tercapainya masyarakat yang mandiri. Untuk mewujudkan hal itu dilakukan dengan memperkuat kelembagaan sosial politik dan peran masyarakat, melaksanakan tata pemerintahan yang terdesentralisasi pada tingkat distrik dan kampung, meningkatkan partisipasi dan transparansi, mendorong peningkatan peran media massa dan pers dalam pembangunan.

### **3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**

Peningkatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatnya daya saing suatu daerah. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Oleh karena itu langkah-langkah yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, demikian pula perubahan *mind-set*, *culture-set* dan pengembangan budaya kerja akan dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Demikian juga upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantas korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Reformasi birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang





harmonis antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kampung, untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua dengan baik, termasuk melalui pembiayaan bersama dan transfer anggaran yang mendukung pemerataan dan keadilan.

#### **4. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan.**

Penguatan dan percepatan perekonomian Provinsi Papua akan tetap melanjutkan pengembangan ekonomi daerah untuk memperkuat ekonomi daerah yang berbasis potensi masing-masing wilayah dan kampung. Dengan menitikberatkan pada hubungan antar wilayah/kampung didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/daerah yang kokoh serta berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan perwilayahan berdasarkan karakteristik/ kondisi wilayah dan potensi masing-masing wilayah serta peningkatan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu produk dan menciptakan nilai tambah. Pengembangan wilayah tetap dilakukan berbasis kultural yaitu wilayah ***La Pago, Mee Pago, Mamta, Saereni*** dan ***Animha***, yang akan difokuskan pada pembangunan berbasis kampung dengan prinsip kesetaraan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kualitas hidup di seluruh wilayah Papua, sehingga mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih mampu mendorong percepatan kemandirian masyarakat asli Papua.

#### **5. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.**

Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua tahun 2019-2023 mengingat pelaksanaan pembangunan di masa lalu, belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh Masyarakat. Penyebabnya antara lain, proses pembangunan yang tidak adil sedemikian intensif pada masa lalu sehingga dampaknya tidak dapat diselesaikan atau diperbaiki dalam satu periode pelaksanaan pembangunan. Dalam lima tahun ke depan, penguatan pemerataan dan keadilan akan dilakukan untuk setiap kebijakan dan kegiatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan



kesehatannya. Pemerintah Daerah akan memperkuat pengawasan dan pengendalian dari semua program agar benar-benar menysasar orang Asli Papua khususnya yang berada di kampung-kampung. Selanjutnya pengurangan kemiskinan akan diprioritaskan bantuan langsung (cash transfer) kepada seluruh penduduk anak usia 4 tahun ke bawah dan usia 60 tahun keatas melalui Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA) dan perlindungan sosial melalui bantuan langsung dan program pembedayaan KAT dan bantuan sosial PMKS. Untuk memperkuat perekonomian di level wilayah akan menerapkan trilogi pengembangan ekonomi Papua, yaitu : 1) perubahan pola pikir masyarakat; 2) pengwilayahan komoditas unggulan daerah; 3) penerapan prinsip tanam, petik, olah dan jual.

Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan dengan 5 (lima) misi pembangunan dengan 7 (tujuh) tujuan pembangunan, 33 (tiga puluh tiga) sasaran pembangunan dan 159 (seratus lima puluh sembilan) strategi pembangunan sebagaimana tabel berikut ini :



**Tabel 4.1**  
**Keselarasan Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pembangunan**

Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM</b>		
1. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	1. Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1. Penguatan sistem inovasi daerah melalui pengembangan IPTEK di PTN/PTS 2. Akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua 3. Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan 4. Perlindungan sosial untuk menjamin generasi emas papua 5. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya gratis bagi masyarakat Papua 6. Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (SD kecil dan pendidikan berpola asrama). 7. Peningkatan profesionalisme dan tunjangan guru untuk daerah tertinggal dan terluar. 8. Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, dan tunjangan guru 9. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan berbasis e-learning
	2. Meningkatkan budaya baca pada masyarakat	1. Peningkatan budaya baca masyarakat 2. Perluasan dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan pengarsipan



Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
	3. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1460 232 2290 297">1. Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan pemenuhan Gizi masyarakat</li> <li data-bbox="1460 297 2290 508">2. Memperkuat dan memantapkan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua melalui pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak (Pelayanan kesehatan Kaki Telanjang), puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service, dan telemedicine</li> <li data-bbox="1460 508 2290 613">3. Peningkatan kesehatan ibu, Bayi dan balita serta peningkatan dan pemenuhan Gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Papua.</li> <li data-bbox="1460 613 2290 686">4. Pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC.</li> <li data-bbox="1460 686 2290 833">5. Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan secara merata disemua Puskesmas dan jaringannya, dengan diprioritaskan pada peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran SDM Kesehatan</li> <li data-bbox="1460 833 2290 1044">6. Penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan sesuai dengan tingkat kesulitan, peningkatan kompetensi SDM kesehatan serta adanya jaminan keamanan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan Kesehatan</li> <li data-bbox="1460 1044 2290 1117">7. Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat.</li> <li data-bbox="1460 1117 2290 1287">8. Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringan serta pengembangan puskesmas rawat inap yang didukung tenaga fasilitas kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah.</li> </ol>



Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		9. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan Papua (KPS) baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran 10. Peningkatan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiap siagaan masyarakat. 11. Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan 12. Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah
	4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	1. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah terutama dalam bidang kewirausahaan 2. Menumbuhkan talenta-talenta kewirausahaan di kalangan pemuda 3. Meningkatkan aktualisasi seni dan budaya pemuda 4. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan pemuda 5. Percepatan peningkatan kapasitas SDM pemuda OAP 6. Meningkatkan prestasi melalui kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dan pengembangan industri olah raga Indonesia
	5. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	1. Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar. 2. Perbaikan sistem distribusi dan logistik termasuk pergudangan secara terintegrasi dengan memperhatikan supply chain, agar mampu mengurangi gejolak harga dan pasokan secara musiman pada komoditas pangan utama.



Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		3. Penguatan petani dan menjaga daya beli serta nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga- harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani. 4. Melaksanakan kebijakan industri hilir pertanian dengan diberikan insentif dan pengembangannya 5. Penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat resiko yang dapat dijaga
2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan soaial keagamaan	1. Meningkatkan pembinaan mental dan spiritual masyarakat
		2. Pembinaan kelembagaan umat beragama
	2. Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat	3. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam aktivitas keagamaan dengan bantuan kepada lembaga agama dan yayasan pengelola pendidikan keagamaan
		1. Peningkatan apresiasi terhadap adat dan budaya dalam berbagai bidang kehidupan
		2. Penguatan pemberdayaan lembaga Adata dan budaya
<b>Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta KehidupanDemokrasi memperkuat Bingkai NKRI</b>		
1. Meningkatkan keamanan, ketentramandan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua	1. Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum	1. Menumbuh kembangkan ketentraman dan ketrriban umum
	2. Meningkatnya keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban swakarsa
		1. Memperkuat peran adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan
3. Meningkatnya penegakan HAM		2. Menciptakan dan melembagakan komunikasi politik sehingga kepentingan Orang Asli Papua dapat diartikulasikan dan diagregasikan dalam pembuatan/ pengambilan keputusan publik
		1. Memperkuat kemitraan dan kolaborasi efektif dengan lembaga-lembaga penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum dan HAM





Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		2. Meningkatkan fasilitasi berbagai lembaga pada kasus pelanggaran HAM 3. Peningkatan kesadaran masyarakat pada HAM
<b>Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan</b>		
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	1. Pemantapan sistem pengalokasian dana otonomi khusus yang efisien, efektif dan berkeadilan 2. Penguatan implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua 3. Pengembangan instrumen kebijakan afirmatif bagi OAP dalam penyelenggaraan otonomi khusus 4. Penguatan kelembagaan dan rambu-rambu hukum otonomi khusus Provinsi Papua 5. Mendata dan menjamin OAP memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil 6. Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan
	2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Mengoptimalkan Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah 2. Meningkatkan sistem monitoring, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah



Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		3. Meningkatkan tata hukum dan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan daerah 4. Meningkatkan upaya fasilitasi penyelesaian tapal batas antar wilayah kabupaten 5. Meningkatkan pengembangan sistem pencegahan korupsi 6. Meningkatkan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis online dan transparan 7. Menciptakan fungsi lembaga perwakilan rakyat DPRD dan MRP dalam menjalankan amanah rakyat 8. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan 9. Mengarusutamakan inovasi dalam pelayanan publik bersifat lintas sektor 10. Memperbaiki prosedur kerja dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan 11. Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan Alokasi Dana Kampung 12. Menata struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan 13. Meningkatkan komunikasi dan transparansi informasi kebijakan pemerintah daerah 14. Perluasan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis e-government
	3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang terintegratif secara sektoral dan spasial 2. Memperkuat Perencanaan Pembangunan berbasis Data/Bukti ( <i>evidence base planning</i> ) serta penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan 3. Membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk



Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		<p>berperan dalam pembangunan daerah</p> <p>4. Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata guna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas, dan tidak melampaui dayadukung dan daya tampung lingkungan</p> <p>5. Peningkatan pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemenuhan infrastruktur</p> <p>6. Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan</p> <p>4. Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah</p> <p>1. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP</p> <p>2. Meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas penyusunan APBD</p> <p>3. Memperkuat dan melanjutkan sistem Tunjangan Kinerja Daerah bagi ASN</p> <p>4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan melalui pengawasan kinerja dan pemberantasan korupsi yang tegas</p>



Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi Keempat, Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural Secara Berkelanjutan</b>		
1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	1. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi inklusif	1. Peningkatan efisiensi modernisasi dan nilai tambah disektor tanaman pangan/perkebunan/ peternakan dengan mutu dan kualitas prima 2. Peningkatan produktivitas tanaman pangan/perkebunan/peternakan melalui penerapan teknologi, serta fasilitasi pemasaran 3. Perbaikan sistem distribusi dan logistik komoditas tanaman pangan/ perkebunan/ peternakan termasuk pergudangan secara terintegrasi dengan memperhatikan suplay change 4. Menjaga kestabilan harga dan komoditas tanaman pangan/ perkebunan/ peternakan yang dapat memerikan keuntungan kepada petani dan peternak 5. Penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk peggunaan secara tepat dan akurat yang dapat dijaga 6. Pengembangan klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan tanaan pangan/perkebunan/peternkan yang terhubung dengan PW, PL, PN 7. Penguatan kelembagaan petani/peternak untuk peningkatan produktivitas dan pemasaran dalam masyarakat local 8. Memantapkan hubungan antar wilayah/daerah/kampung dengan membangun infrastruktur dan keterkaitan sistem



Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		produksi dan distribusikomoditas pertanian dan perkebunan, serta pelayanan yang kokoh serta berkesinambungan.
		9. Penguatan kemauan dan kemampuan masyarakat kampung untuk berinovasi dalam produksi dan mengelolan anaman pangan/perkebunan/ peternakan lokal. 10. Mengembangkan jarinagn informasi pasar lokal untuk komoditas unggulan pertanian/perkebunan/peternakan ditiap wilayah 11. Pembangunan dan pengembangan klaster akwasan eonomi khusus berbasis wilayah adat 12. Pengembangan industri pertanian/perkebunan/perternakan yang berbasis padat karya
	2. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasiketimpangan pendapatan	1. Pengembangan industri pertambangan yang berkelanjutan 2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertambangan 3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sektor pertambangan 4. Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas 5. Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di limawilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan
	3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	1. Meningkatkan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan 2. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) 3. Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup 4. Konservasi sungai dan danau 5. Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas



Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
	4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan melalui melibatkan masyarakat sekitar hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan 2. Optimalisasi konservasi sumberdaya alam hayati 3. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah (value added) komoditas 4. Peningkatan industri non pertanian (off farm) yang mampu mendorong perkembangan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah 5. Meningkatkan kemitraan usaha mikro kecil menengah dengan perbankan dan fasilitasi pemasaran produk 6. Pengembangan kepariwisataan diutamakan pada kegiatan ekoturisme yang bernilai tambah tinggi, sehingga secara efektif dan efisien dapat mendukung upaya pengembangan kemandirian ekonomi dengan dampak lingkungan dan budaya serendah mungkin
	4. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya 1. Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur perikanan 2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat 3. Peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi ikan
	6. Meningkatnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	1. Peningkatan daya saing tenaga kerja disertai dengan perluasan kesempatan kerja 2. Peningkatan fasilitasi konflik industri 2. Perbaikan iklim investasi dan usaha serta keberpemihakan kepada sektor usaha kecil menengah (UKM) sebagai lapangan kerja yang terintegrasi dengan kebijakan urusan lainnya 4. Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan





Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
	7. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor- sektor andalan daerah	1. Peningkatan daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah 2. Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan khusus berbasis wilayah adat 3. Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas
2. Mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar	1. Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	1. Meningkatkan akses transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh masyarakat di wilayah Papua
		2. Memantapkan hubungan antar wilayah/ daerah/ kampung dengan penyediaan infrastruktur transportasi dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah / daerah yang kokoh serta berkesinambungan
		3. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Ekonomi Berbasis Keunggulan Masing-masing Wilayah
		4. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan dengan RTRW Provinsi
	2. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	1. Pengendalian pemanfaatan ruang
		2. Sosialisasi rencana tata ruang dan penegakan hukum serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan
		3. Peningkatan pembinaan penataan ruang dan pertanahan
		4. Peningkatan kapasitas penegakan hukum terhadap rencana tata ruang
		5. Penataan guna lahan permukiman di perkotaan
3. Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	1. Meningkatkan kapasitas daya tampung jaringan irigasi dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	
	2. Penyediaan dan pengelolaan air baku	



Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		3. Pengendalian banjir dan abrasi pantai
	4. Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat 2. Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan dan air limbah
	5. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	1. Peningkatan ketersediaan energi (listrik / penerangan) 2. Peningkatan energi alternatif
	6. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	1. Peningkatan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah 2. Mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi
<b>Misi Kelima, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu</b>		
1. Meningkatkan pemerataan pembangunan	1. Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	1. Fasilitasi penataan kelembagaan kampung, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat 2. Penguatan dan pendampingan tata kelola pemerintahan kampung serta memperkuat peran distrik dalam pembangunan kampung dan pelayanan kepada masyarakat 3. Melakukan perbaikan kebijakan pembagian dana Otsus ke Kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan. 4. Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu. 5. Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan. 6. Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)



Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi
		7. Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan Alokasi Dana Kampung
	2. Meningkatnya efektivitas upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	1. Peningkatan akses masyarakat di wilayah pegunungan terhadap infrastruktur pelayanan dasar dan perekonomian
		2. Pemenuhan rumah layak huni untuk OAP
		3. Akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua
		4. Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)
	3. Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	1. Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu.
	4. Meningkatkan pemberdayaan	2. Optimalisasi kerjasama perbatasan dengan negara tetangga 1. Revitalisasi dan optimalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah dan SDM



## 4.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2022

Prioritas pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah secara bertahap hingga mencapai sasaran RPJMD Tahun 2019-2023, di tahun 2022 ini pembangunan memasuki pada fase keempat. Adapun proses perumusan prioritas pembangunan dengan memperhatikan :

### 4.2.1 Fokus Pembangunan Tahun 2022

RKPD tahun 2022 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dalam rangka mewujudkan visi “Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan”. Untuk Pembangunan tahun 2022 ini difokuskan pada upaya Memperkuat agenda Papua berkeadilan dengan menurunnya kesenjangan antar daerah dan antar individu, meningkatnya ketahanan masyarakat, jaminan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan asset alam Papua, sebagaimana fokus pembangunan dalam RPJMD Tahun 2019-2023 di bawah ini.

**Gambar 4.1**  
**Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023**



Arah kebijakan pembangunan merupakan fokus pembangunan daerah disetiap tahun selama lima tahun. Pentahapan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus dalam setiap tahun selama lima tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tahapan pelaksanaan pembangunan akan menjelaskan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah berdasarkan fokus prioritas dan waktu pelaksanaan, sedangkan Arah Pembangunan Kewilayahan akan menjelaskan arah dan strategi pembagunan kewilayahan berbasis 5 (lima) wilayah yaitu La Pago, Mee Pago, Anim Ha, Saereri, dan Mamta.

Isu-isu Strategis Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2022 yang berhubungan dengan Isu Nasional, dimana setelah melakukan kajian terhadap kondisi Provinsi Papua dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Provinsi Papua. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua tahun 2019-2023, karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis utama Provinsi Papua.

Selain fokus pembangunan yang menjadi arah kebijakan pembangunan di tahun 2022, penyusunan tema pembangunan pada tahun ini juga merujuk kepada isu-isu strategis nasional, isu strategis RPJMD Provinsi Papua 2019-2023 dan isu strategis RKPD Provinsi Papua Tahun 2022, yang dapat dijabarkan kesandingannya sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Sandingan Isu-Isu Strategis Nasional, RPJMD Provinsi Papua**  
**Tahun 2019-2023 dan RKPD 2022**

<b>Isu Strategis Kewilayahan Dalam Rancangan RPJMN 2022-2024</b>	<b>Isu Strategis RPJMD Provinsi Papua 2019-2023</b>	<b>Isu Strategis RKPD Provinsi Papua 2022</b>
1. Pemenuhan pelayanandasar	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), baik dari Status Golongan Pendapatan, Gender maupun Antar Wilayah	1. Rendahnya akses kualitas dan kuantitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan



Isu Strategis Kewilayahan Dalam Rancangan RPJMN 2022-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Papua 2019-2023	Isu Strategis RKPD Provinsi Papua 2022
	2. Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan	2. Stabilitas keamanan dalam mendukung Demokrasi masih rendah
	3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik	3. Rendahnya Tata Kelola Pemerintahandan Kapasitas OAP Dalam memanfaatkan Peluang Ekonom
2. Peningkatan daya saing daerah 3. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah	4. Pertumbuhan Ekonomi yang Meratadan Berkelanjutan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	4. Belum optimalnya Nilai tambah Komoditas Unggulan di Luar Sektor Tambang
4. Penurunan ketimpangan antarwilayah 5. Pemanfaatan Ruang dan Urbanisasi	5. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten serta Peningkatan Kualitas Ekosistem dan Jasa Lingkungan	1. Terbatasnya Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi antar wilayah 6. Tingginya kerentanan Bencana dan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Penjabaran isu-isu strategis daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 di atas, dapat disampaikan sebagai berikut :

**1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), baik dari Status Golongan Pendapatan, Gender maupun Antar Wilayah**





Isu strategis ini didasarkan pada kondisi ketertinggalan yang dialami oleh hampir semua wilayah di Papua dalam bidang pendidikan, kesehatan dan jaminan ketersediaan gizi yang memadai.

**Dalam Bidang Pendidikan**, beberapa indikator menunjukkan bahwa daya saing pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas masih terkendala oleh berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan pokok misalnya adalah; cakupan sekolah pada daerah dengan aglomerasi rendah belum optimal, tenaga pendidik belum berkualitas dan merata, penerapan kurikulum sesuai dengan standar belum maksimal terutama di wilayah adat La Pago dan Mee Pago dan Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas masih relatif rendah.

**Demikian juga dalam Bidang Kesehatan** yang kondisinya hampir sama dengan bidang pendidikan, Akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas masih menjadi faktor krusial di hampir semua wilayah Papua yang ditandai dengan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) walaupun terlihat secara merata mengalami peningkatan di Papua, Demikain juga terkait stunting (pendek) perlu mendapatkan perhatian di Papua karena capaiannya yang berada diatas rata-rata Indonesia. Fakta lainnya lagi adalah Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Papua per 100.000 penduduk selama ini termasuk dalam kategori tinggi, dimana data terakhir tahun 2017 menunjukkan terjadi kematian ibu sebesar 289 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Papua secara keseluruhan masih rendah, hanya 41,52% di tahun 2017, termasuk juga kunjungan K4 lengkap bagi ibu hamil sangat rendah hanya sebesar 40,90% pada tahun 2017. Sedangkan dari sumber daya kesehatan yang tersedia, terlihat bahwa sebaran Puskesmas di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2016 belum terdistribusi secara merata ke 29 kabupaten/kota. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah rasio dokter terhadap penduduk, dimana pada tahun 2016 hanya mencapai 24,13 dokter per 100.000 penduduk. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab juga belum maksimalnya penanganan penyakit malaria di Provinsi Papua, sehingga sampai tahun 2017 tercatat API Provinsi Papua paling tinggi di Indonesia yaitu 59 per 1.000 penduduk, yang cenderung meningkat bila dibandingkan tahun 2014. Dalam hal kasus HIV/AIDS terindikasi jumlah kasus kematian akibat virus mematikan tersebut terus mengalami kenaikan, hingga pada tahun 2017 tercatat ada 1.883 kematian akibat HIV/AIDS.



**Selanjutnya dalam Bidang Gizi**, Papua seringkali masih dibayangi oleh adanya ancaman kelaparan di beberapa wilayah yang disebabkan oleh kondisi alam ataupun masalah rantai distribusi pangan yang kurang lancar serta beberapa penyebab eksternal lain. Oleh sebab itu, Upaya penciptaan ketahanan pangan merupakan prasyarat untuk kedaulatan pangan. Kondisi Ketahanan pangan di Papua sampai dengan saat ini masih rendah. Untuk itu pengembangan dan peningkatan produksi komoditi pangan local dan membudayakan konsumsi pangan local perlu ditingkatkan di Papua untuk mencapai kedaulatan pangan dan menciptakan ketahanan pangan. Masalah pangan di Papua merupakan salah satu penyebab gizi buruk kondisi stunting di Papua

## **2. Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan**

Kondisi kurang stabilnya kemanan serta demokrasi lokal yang kurang kondusif seringkali mengganggu aktivitas pembangunan daerah di beberapa wilayah di Provinsi Papua. Beberapa rumusan permasalahan yang patut diperhatikan kedepan terkait dengan isu strategis Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan adalah; masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM, tingkat kesadaran terhadap HAM masih rendah, masih tingginya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, masih tingginya konflik sosial, belum optimalnya pelayanan keagamaan antar umat, menurunnya toleransi kehidupan beragama, belum maksimalnya toleransi antar umat beragama, belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, belum optimalnya kehidupan berdemokrasi secara baik, masih banyaknya kasus money politic dalam berdemokrasi.

## **3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik**

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik menjadi satu isu krusial yang menjadi penyokong penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkualitas. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Disiplin ASN meningkat secara signifikan dan Pemerintah Provinsi Papua telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK atas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini memberikan indikasi bahwa upaya keras dalam memperbaiki tatakelola pemerintahan selama lima tahun terakhir, telah berada dalam arah yang benar. Meskipun demikian



capaian selama periode sebelumnya masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Harus ada upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tatakelola pemerintahan ini.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Pada periode 2013-2018 telah dilakukan Reformasi Birokrasi, dilakukan dengan langkah-langkah peningkatan disiplin bagi ASN, peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan penerapan e-Government Provinsi Papua pada perencanaan dan penganggaran daerah, pendapatan daerah, investasi daerah, serta penerapan system Tunjangan Kinerja Daerah. Kesemuanya itu, diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik dan penanggulangan korupsi.

Oleh karena itu langkah-langkah yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, demikian pula perubahan mind-set, culture-set dan pengembangan budaya kerja akan dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Demikian juga upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantas korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan akan dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Reformasi Birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang harmonis antara Pemerintah, Provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua secara murni dan konsekuen.

#### **4. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.**

Pertumbuhan ekonomi menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan yang dilakukan oleh multi stakeholder di Papua. Hal ini terkait dengan penciptaan kue pembangunan yang akan didistribusikan kepada seluruh masyarakat Papua. Patut dijadikan pelajaran bahwa proses pembangunan ekonomi pada masa lalu telah menciptakan pertumbuhan yang memadai namun belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan



seluruh masyarakat. Penyebabnya antara lain, belum cukup inklusifnya pertumbuhan ekonomi yang tercipta yang diandai dengan rendahnya pelibatan tenaga kerja lokal serta tumpuan pertumbuhan yang berbasis sektor ekstraktif yang cenderung merusak lingkungan hidup.

Pada masa mendatang perlu dinisiasi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan berbasis komoditas dan karakteristik lokal didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian perlu penguatan supra dan infrastruktur bagi percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada sektor-sektor ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan perikanan dan kelautan, Disamping itu perhatian juga harus diarahkan pada pengembangan sektor-sektor non ekstraktif dan ekonomi kreatif yang memberi nilai tambah berlipat seperti; sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

#### **5. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten serta Peningkatan Kualitas Ekosistem dan Jasa Lingkungan.**

Isu strategis pengurangan kesenjangan, peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah dan kabupaten serta peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan penting artinya dalam konteks pembangunan di Papua. Terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten bisa jadi disebabkan oleh tidak memadainya infrastruktur wilayah yang mengakibatkan mahalnya investasi bagi pengembangan wilayah disamping belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi investor. Disamping itu, pengelolaan potensi suatu wilayah seringkali berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, kedepan harus dicari terobosan pengembangan potensi wilayah yang selaras dengan peningkatan kualitas ekosistem dan jasa lingkungan.

RPJMD Provinsi Periode 2019-2023 merupakan tahap ke empat dalam proses pencapaian Visi Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua. Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang seperti yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik. Dimana agenda atau tema tahap keempat pembangunan jangka Panjang Provinsi Papua yang sesuai dengan periode RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, ditujukan untuk



Memperkuat agenda Papua berkeadilan dengan menurunnya kesenjangan antar daerah dan antar individu, meningkatnya ketahanan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan aset alam Papua. Arah kebijakan RPJPD ini juga menjadi rujukan dalam penyusunan tema pembangunan 2022.

Pembangunan Provinsi Papua tidak akan terlepas dari arah dan kebijakan pembangunan nasional, oleh karenanya tema pembangunan nasional di tahun 2022 juga menjadi rujukan perumusan tema pembangunan Provinsi Papua tahun 2022. Dalam hal ini telah ditetapkan Tema RKP 2022 adalah **“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif”**, yang memuat 7 (tujuh) prioritas nasional yaitu : (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan Berkelanjutan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas yang berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6). Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; (7). Memperkuat stabilitas Polhumkam dan Transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan isu-isu strategis nasional dan daerah pada tahun 2022, tema RKP 2022, serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005- 2025, selain itu karena pendekatan penyusunan RKP dan RKPD 2022 dilakukan dengan penguatan pelaksanaan kebijakan money follow program priority, , yang menjadikan RKPD 2022 sangat strategis untuk memastikan tercapainya sasaran-sasaran utama RPJMD 2019-2023 dalam proses mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera Berkeadilan, maka secara substansial rumusan terhadap tema pembangunan RKPD tahun 2022 adalah: **“Memperkuat Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan serta Berkelanjutan”**. Dengan unsur utama dalam tema tersebut adalah : (1) Peningkatan akses kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; (2) Penguatan stabilitas keamanan dan demokrasi; (3) Mengoptimalkan nilai tambah komoditas luar sector tambang; (4) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Kapasitas OAP dalam memanfaatkan peluang ekonomi (5) Pemantapan infrastruktur dasar dan konektifitas teknologi dan informatika antar wilayah dan (6). Meminimalkan tingkat kerentanan bencana



dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

#### **4.2.2 Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (SDGs). Agenda internasional ini untuk menjawab tuntutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim yang diupayakan dalam bentuk aksi nyata. Diharapkan agenda ini dapat tercapai di tahun 2030, dengan tujuan dan target meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan





pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Agenda SDGs tersebut diatas sangat relevan dengan konteks pembangunan Papua untuk saat ini maupun yang akan datang. Oleh karena itu Provinsi Papua juga berupaya sama untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil sintesis terhadap 169 TPB, terdapat 10 isu strategis prioritas pembangunan berkelanjutan yang menjadi penekanan dan urgensi bagi pembangunan di Provinsi Papua sebagai berikut:

1. Administrasi kependudukan
2. Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak
3. Akses terhadap pelayanan Kesehatan
4. Akses terhadap Pendidikan
5. Ekonomi lokal dan pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan
6. Kerusakan hutan dan lingkungan
7. Ketahanan energi
8. Ketahanan pangan
9. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10. Tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum

Selanjutnya dari hasil KLHS RPJMD, maka TPB yang perlu diperkuat dalam perencanaan program berdasarkan isu strategis sebagai berikut :

- a. Menjaga dan memperbaiki transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan koordinasi (tata kelola) Lingkungan hidup dan Sumberdaya Alam;
- b. Memastikan masyarakat Papua, khususnya OAP mendapatkan Pendidikan yang layak dan memadai, Kualitas Sanitasi dan Air Bersih yang layak, Asupan Gizi dan Kesehatan Lingkungan yang baik, Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang inklusif;
- c. Melakukan perencanaan dan menginternalisasi pembangunan ekonomi hijau



dengan tetap menjaga dan melestarikan budaya masyarakat dan kearifan lokal dalam pembangunan dan tata guna lahan.

#### **4.2.3 Telaah RTRW Provinsi Papua**

Salah satu dasar penentuan prioritas daerah adalah mempertimbangkan arahan RTRW Provinsi Papua khususnya wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi untuk dapat diprioritaskan. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wewenang Pemerintah Provinsi dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi adalah melaksanakan:

1. Penetapan kawasan strategis provinsi;
2. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
3. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
4. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
5. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
6. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Detail terhadap Kawasan Strategis Provinsi

Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 Sistem perkotaan di Provinsi Papua terdiri atas PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), dan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKN dan PKW ditentukan oleh pemerintah, sedangkan PKL ditetapkan dalam RTRW Provinsi berdasarkan kajian akademis dan usulan pemerintah kabupaten/kota. Untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan ditentukan PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) .

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan kawasan perkotaan yang berperan sebagai pintu gerbang ke kawasan internasional dan memiliki potensi untuk



mendorong perkembangan wilayah sekitarnya dan berfungsi sebagai pusat pengembangan kegiatan jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa provinsi.

**a. Rencana pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Provinsi Papua**

**1) Jayapura**

PKN Jayapura sebagai simpul transportasiskala nasional, pusat jasa dan pusat pengolahan.

**2) Timika**

Timika, merupakan simpul transportasi utama yang melayani wilayah selatan Provinsi Papua dan kawasan pertambangan sebagai kawasan strategis nasional, didukung dengan keberadaan bandara Mozes Kilangin.

Beberapa kawasan perkotaan di Provinsi Papua memiliki potensi berperan sebagai Pusat Kegiatan Nasional.

**b. Rencana pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) Provinsi Papua**

**1) Wamena**

PKNp Wamena sebagai pendorong percepatan pertumbuhan baian tengah.

**2) Biak**

Biak adalah kawasan strategis nasional sebagai kawasan andalan dan potensi pengembangan pariwisata.

**3) Merauke**

PKNp Merauke sebagai pendorong percepatan pertumbuhan baian selatan.

**c. Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi Papua**

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah perkotaan sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten. PKW ditentukan berdasarkan kriteria sebagaiberikut:

- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;



- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Dalam RTRWN, pusat-pusat perkotaan di Provinsi Papua yang ditentukan sebagai PKW adalah Merauke, Biak, Muting, Bade, Wamena, Nabire, Arso, Sarmi. Dengan diusulkannya Merauke, Wamena, dan Biak sebagai PKNp, maka ketiganya tidak lagi sebagai PKW.

### **1) Nabire**

Nabire memiliki peran sebagai pusat pelayanan wilayah barat. Keberadaan jalan provinsi yang menghubungkan Nabire- Waghete-Enarotali-Timika, dan pelabuhan pengumpan, dan bandara Wanggar menjadikan Nabire memiliki peran strategis menunjang perkembangan wilayah sekitarnya.

### **2) Muting**

Muting pada saat ini merupakan pusat pelayanan wilayah bagian selatan, dan sebagai titik pertemuan dari Boven Digoel dan Pegunungan Bintang menuju Merauke.

### **3) Sarmi**

Pada saat ini merupakan pusat pelayanan wilayah utara bagian tengah. Beberapa kawasan perkotaan di Provinsi Papua memiliki potensi berperan sebagai PKW, di samping perkotaan Nabire, Muting, dan Sarmi.

## **d. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Dipromosikan menjadi PKW (pusat distribusi barang dan jasa untuk beberapa kabupaten karena memiliki fasilitas perkotaan yang memadai sebagai berikut:**

### **1) Dekai**

Dekai di Kabupaten Yahukimo merupakan pusat perkotaan yang akan dikembangkan sebagai PKW Promosi. Dekai merupakan pusat simpul masuknya barang dan jasa serta pusat pengembangan industri di wilayah selatan masuk ke Pegunungan Tengah dari Pelabuhan Logpon

### **2) Kapi**

Kapi merupakan ibukota Kabupaten Mappi.

### **3) Enarotali**



Enarotali merupakan pusat perkotaan yang akan dikembangkan sebagai PKW promosi. PKW promosi Enarotali ini merupakan pusat distribusi barang dan jasa untuk beberapa kabupaten seperti Intan Jaya, Deiyai, dan Puncak.

#### **4) Waris**

Waris memiliki fasilitas perkotaan memadai.

#### **e. Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah perkotaan sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa distrik. Kriteria penentuan PKL adalah:

- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Penetapan PKL diarahkan pada setiap Ibukota Kabupaten yang tidak memiliki fungsi sebagai PKN maupun PKW.

### **4.2.4 Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD Provinsi Papua**

Perumusan RKPD salah satunya mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga Pokok-Pokok Pikiran ini memiliki nilai yang strategis karena akan menjadi salah satu rujukan dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah. Bagi anggota DPRD penyusunan pokok pikiran ini sekaligus merupakan penyaluran aspirasi masyarakat yang diterima pada saat komunikasi dengan masyarakat. Penyusunan pokok-pokok pikiran ini telah diupayakan untuk selaras dengan prioritas pembangunan serta ketersediaannya kapasitas anggaran dengan mempertimbangkan asas manfaat, efisien, efektivitas sesuai mekanisme perundangan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan nantinya ada kesinambungan program dan kegiatan sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Papua 2019-2023.

#### **4.2.4.1 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu :

- a. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengarahkan penyusunan program pembangunan di Provinsi Papua dengan tujuan



mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Papua.

- b. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Papua.

Tujuan disusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu :

- a. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Provinsi Papua, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2022;
- b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2022;
- c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Provinsi Papua melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022;
- d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD;
- e. Mewujudkan aspirasi masyarakat Provinsi Papua dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD;
- f. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

#### **4.2.4.2 Telaah POKIR DPRD Provinsi Papua**

Penyampaian saran dan pendapat yang dituangkan didalam telaah pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun konsep perencanaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.3. sebagai berikut :

**Tabel 4.3.**  
**Telaah POKIR DPRD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022**  
**(Daftar Terlampir)**





#### 4.2.5 Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan berbagai rumusan kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional maupun provinsi, yakni:

1. Isu-isu strategis nasional dan daerah yang menjadi permasalahan pembangunan, serta akar permasalahan dari pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah;
2. Komitmen-komitmen nasional, seperti program pembangunan yang berkeadilan (penanggulangan kemiskinan dan Sustainable Development Goals/SDG's) sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 dan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004;
3. Tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2022;
4. Sasaran pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023;
5. Arah pembangunan tahap ke-III RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005- 2025;
6. Pokok-pokok pikiran DPRP Provinsi Papua terhadap penyusunan RKPD 2022;
7. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2021, dan target Tahun 2022 yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah provinsi yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada tahun 2022.

Pedoman selanjutnya adalah memperhatikan isu strategis yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023, yaitu

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi), baik dari Status Golongan Pendapatan, Gender maupun Antar Wilayah
2. Pemantapan Rasa Aman dan Suasana Demokrasi yang Kondusif sebagai Landasan Utama Pembangunan
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Publik
4. Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan berbasis Komoditas dan Karakteristik Lokal didukung oleh Pembangunan Infrastruktur yang Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
5. Pengurangan Kesenjangan, Peningkatan Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas antar Wilayah dan Kabupaten serta Peningkatan Kualitas Ekosistem dan Jasa Lingkungan



RKPD tahun 2022 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Selain itu perumusannya harus memperhatikan kondisi yang sedang berlangsung (*existing condition*) dalam pembangunan yang tengah dilakukan. Terkait kondisi yang sedang berlangsung permasalahan yang sedang dihadapi adalah merebahnya wabah Covid-19 yang sampai hari ini belum bisa diatasi dengan maksimal. Perumusan tema pembangunan nasional yaitu **“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan Menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif”**. Rumusan tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2022 sebagai berikut **“Memperkuat Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**, yang sudah dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2019-2023 yaitu: “Melanjutkan Peningkatan Kualitas SDM Dan Perekonomian Daerah Berbasis Wilayah Dan Berkelanjutan Disertai Pemantapan Rasa Aman Dan Tata Kelola”.

Dari parameter-parameter tersebut dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Papua tahun 2021, maka **Prioritas Pembangunan Tahun 2022 Provinsi Papua** yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Peningkatan akses kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan SDM
2. Penguatan Stabilitas Keamanan dan Demokrasi
3. Mengoptimalkan nilai tambah komoditas unggulan di luar sektor tambang
4. Penguatan Tata kelola pemerintahan dan kapasitas OAP dalam memanfaatkan peluang ekonomi
5. Pemantapan infrastruktur dasar dan konektivitas teknologi dan informatika antar wilayah
6. Meminimalkan tingkat kerentanan bencana dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

Berdasarkan berbagai rumusan kebijakan pembangunan dan tema pembangunan di atas, maka prioritas pembangunan daerah dan fokus kebijakan pembangunan Provinsi Papua tahun 2022 yang diselaraskan dengan prioritas nasional tahun 2022 seperti dalam tabel 4.4 berikut :



**Tabel 4.4**  
**Persandingan antara Prioritas Nasional, Prioritas Daerah dan Fokus Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2022**

Prioritas Nasional Tahun 2022	Prioritas Daerah Tahun 2022	Fokus Pembangunan 2022
PN 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	PD3 Mengoptimalkan Nilai Tambah komoditas unggulan di luar sector tambang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan pendayagunaan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan</li> <li>- Mengoptimalkan tingkat produksi komoditas unggulan</li> <li>- Meningkatkan tingkat kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan</li> </ul>
PN2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PD5 Pemantapan infrastruktur dasar dan konektivitas teknologi dan informatika antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kebutuhan air bersih untuk pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi</li> <li>- Mengintegrasikan sistem transportasi</li> </ul>
PN3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	PD1 Peningkatan akses kuantitas dan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas pendidikan</li> <li>- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</li> </ul>
PN4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PD2 Penguatan stabilitas keamanan dan demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kestabilan kondusifitas daerah dan kohesivitas sosial masyarakat</li> <li>- Meningkatkan peran perempuan dan pemuda dalam demokrasi</li> </ul>
PN5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	PD3 Mengoptimalkan nilai tambah komoditas unggulan di luar sector tambang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan pendayagunaan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan</li> <li>- Mengoptimalkan tingkat produksi komoditas unggulan</li> <li>- Meningkatkan tingkat kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan</li> </ul>
PN6 Membangun lingkungan, hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	PD3 Mengoptimalkan nilai tambah komoditas unggulan di luar sector tambang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan pendayagunaan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan</li> <li>- Mengoptimalkan tingkat produksi komoditas unggulan</li> <li>- Meningkatkan tingkat kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan</li> </ul>



Prioritas Nasional Tahun 2022	Prioritas Daerah Tahun 2022	Fokus Pembangunan 2022
	PD6 Meminimalkan tingkat kerentanan bencana dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunkan intensitas terjadi bencana</li> <li>- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</li> </ul>
	PD2 Penguatan stabilitas keamanan dan demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kestabilan kondusifitas daerah dan kohesivitas sosial masyarakat</li> <li>- Meningkatkan peran perempuan dan pemuda dalam demokrasi</li> </ul>
PN7 Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	PD4 Penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas OAP dalam memanfaatkan peluang ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan kualitas perencanaan pembangunan &amp; konsistensi antar dokumen</li> <li>- Mengoptimalkan peranan kelembagaan adat/budaya</li> </ul>



Prioritas pembangunan sebagaimana tersebut diatas akan menjadi petunjuk terhadap penentuan program prioritas dan kegiatan prioritas yang secara fungsional dirumuskan oleh Kabupaten/Kota dan yang dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua. Hal ini sejalan dengan pemikiran terhadap paradigma **“Money Follow Program Priority”** atau dalam terjemahan “Uang Mengikuti Program Prioritas”. Perumusan program/kegiatan bagi Provinsi, Kab/Kota juga mempertimbangkan limitasi kewenangan dalam UU No 23 Tahun 2014. Pilihan penggunaan terhadap paradigma tersebut merubah paradigma sebelumnya yaitu **“Money Follow Function”** yang selama ini cenderung dilakukan oleh Kab/Kota atau SKPD/OPD Provinsi.

Dengan terumuskannya prioritas pembangunan tahun 2022, maka ketersediaan anggaran diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan tahun 2022. Oleh karena itu dibutuhkan kemauan dan sinergitas dari Organisasi Perangkat Daerah guna mencapai prioritas dan target daerah.

Rumusan prioritas yang telah disusun diharapkan selaras dengan rumusan prioritas dan RKP Nasional Tahun 2022, yang meletakkan isu Papua tidak lagi dirumuskan pada topik prioritas tetapi dipetakan menurut kegiatan dalam RPJMN tahun 2022-2023, yaitu: Major project pengembangan wilayah adat La Pago dan major project Pengembangan Kawasan Perbatasan PKSN Merauke, Pengembangan Kawasan Perbatasan (PKSN) Jayapura, diturunkan dalam Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak di wilayah Saireri, SKPT Sarmi dan Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) Arso di wilayah adat Mamta dan SKPT Timika di Meepago, serta KPPN Merauke di wilayah adat Ha Anim, pengembangan jalan trans (perbatasan) dan jembatan udara Papua (Wamena, Dekai, Oksibil, Elelim, Ilaga, Moses Kilangin, Pengembangan Program TOL bersubsidi (Mappi, Serui, Meruuke), pembangunan trans/lingkar Biak, pembangunan bandar udara dan PLTU Nabire, Pengendali Banjir dan IPLT Jayapura dan Merauke, Pembangunan 10 juta sambungan listrik rumah, Perluasan distribusi air bersih dan akses sanitasi, penyelesaian program 35.000 MV, penuntasan infrastruktur TIK /BTS, pengembangan 2 waduk multiguna.



#### 4.2.6 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Prioritas Pembangunan tahun 2022 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2022 yang berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Adapun Sasaran Makro Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2022 sebagai perwujudan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023, adalah:

**Tabel 4.5**  
**Sasaran Makro Pembangunan Daerah Tahun 2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET RPJPD
1	<b>IPM</b>	Indeks	60,06	62,20	65	70
2	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	%	27,43	25.73 - 26.28	20	< 19
3	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	7,33	6,43 – 7,58	5 – 6,5	6,21
4	<b>PDRB Perkapita Tanpa Tambang</b>	Juta Rp	40,12	29,95 – 30,27	50	> 40
5	<b>Gini Rasio</b>	%	0,384	0,34 - 0,39	0,385	-
6	<b>Pengangguran Terbuka</b>	%	2,91	2,27 - 3.60	2,57 – 1,75	2,5
7	<b>Konektivitas Wilayah</b>	%	64,29	70	100	-
8	<b>Intensitas Emisi GRK</b>	Ton CO2/Juta rupiah	0.329	0.311	0,282	-

Sedangkan keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2022 dengan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.6**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasara Pembangunan Tahun 2022**

Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Sasaran Pembangunan	Indikator	Target Tahun 2022	OPD
1	2	3	4	5
<b>Peningkatan Kualitas SDM</b>	1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,17	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, Rumah Sakit Jiwa, Dinas Pekerjaan Umum dan
		2. Harapan Lama Sekolah	11,25	
		3. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	76,88	



Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Sasaran Pembangunan	Indikator	Target Tahun 2022	OPD
1	2	3	4	5
		4. Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3	48,99	Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Olah Raga dan Pemuda, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan
	2. Meningkatnya budaya baca pada masyarakat	1. Cakupan kabupaten/kota yang memiliki sarana dan prasarana perpustakaan yang berkualitas	21,00	
	3. Meningkatnya prestasi olah raga dan Sukses penyelenggaraan PON	1. Perolehan medali emas dalam PON	90,00	
		2. Jumlah atlet yang berprestasi pada event olahraga nasional	5,00	
	4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	1. Persentase organisasi pemuda yang aktif	71,46	
		2. Persentase pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan	18,98	
	5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	67,33	
		2. Angka Kematian Bayi (AKB)	6,00	
		3. Angka Kematian Ibu (AKI)	230,16	
		4. Angka Kesakitan	5,08	
	6. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	1. Cakupan daerah rawan pangan	10,00	
		2. Persentase kenaikan cadangan pangan	28,43	
		3. Persentase penduduk tahan pangan	49,01	
	7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial keagamaan	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,31	
		2. Cakupan pembinaan organisasi keagamaan	55,91	
	8. Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat	1. Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	1,00	
		2. Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	0,00	
<b>Penguatan stabilitas keamanan dan demokrasi</b>	1. Meningkatnya penegakan HAM	1. Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM)	3,00	
		2. Rata-rata Nilai Skor Peduli HAM	60,00	
	2. Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum	1. Rasio kriminalitas yang ditangani	66,73	





Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Sasaran Pembangunan	Indikator	Target Tahun 2022	OPD		
1	2	3	4	5		
	3. Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,31			
	4. Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	1. Nilai skor aspek kebebasan sipil	93,56			
		2. Nilai skor aspek hak- hak politik	45,35			
		3. Nilai skor aspek lembaga demokrasi	56,63			
<b>Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, merata dan adil</b>	1. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua (salah kamar P4)	1. Tingkat capaian realisasi program- program Otsus yang direncanakan	93,00	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Umum, Biro Humas dan Protokol, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa, Biro Otonomi Khusus, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Badan Penghubung Daerah, Sekretariat Majelis Rakyat Papua, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan		
		2. Cakupan kabupaten/kota yang menyampaikan infografis hasil pengelolaan dana Otsus	5,00			
	2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (P4)	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B			
		2. Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	79,51			
		3. Capaian Implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	85,00			
		4. Persentase kenaikan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui ULP	5,00			
		5. Indeks Kinerja Pembangunan	52,12			
		6. Indeks Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Papua	5,50			
			7. Cakupan inovasi pelayanan publik yang masuk dalam List Outstanding (terpuji)		1,00	
			8. Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan		30,00	
	3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta	1. Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	85,00			
		2. Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	40,00			



Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Sasaran Pembangunan	Indikator	Target Tahun 2022	OPD
1	2	3	4	5
	kegiatan pembangunan daerah (P4)	3. Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	57,20	
		4. Rasio belanja langsung dalam komposisi APBD	41,53	
	4. Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah (P4)	1. Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	WTP	
		2. Ketepatan waktu Penetapan APBD	Tepat waktu	
		3. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	10,46	
		4. Indeks Kinerja Pembangunan	52,12	
		5. Indeks Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Papua	5,50	
	5. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi inklusif			
	6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim (P6)			
	7. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan			
<b>Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Kapasitas OAP</b>	1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan (P3)	1. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	26,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil
		2. Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	1,97	
		3. Laju Deforestasi	34,86	
	2. Membangun struktur	1. Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	8,94	



Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Sasaran Pembangunan	Indikator	Target Tahun 2022	OPD
1	2	3	4	5
	perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama pada sektor-sektor industry manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif	2. Indeks Kemahalan Kontruksi	214,39	dan Menengah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		3. Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB	2,79	
		4. Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan	1,00	
		5. Persentase koperasi aktif dan berkembang	56,11	
		6. Jumlah UMKM yang berkembang	3.703,00	
		7. Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.162,26	
		8. Lama Tinggal Wisatawan	2,65	
		3 Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan antarpersonal, antarsektor dan antarwilayah	1. Persentase tenaga lokal yang terserap pada sektor pertambangan	
		2. Cakupan produk pertanian lokal yang terserap dalam usaha pertambangan	5,00	
		3. Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	18,17	
	4 Meningkatkan daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja (P3)	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	80,45	
		2. Tingkat Kesempatan Kerja	97,59	
		3. Persentase tenaga kerja yang berpendidikan tinggi	31,80	
		4. Persentase tenaga kerja OAP yang terserap di sektor industri manufaktur dan jasa	10,00	
	5 Meningkatkan daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah (P3)	1. Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	58.389.000	
		2. Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	81.753.000	
		3. Lama hari pengurusan ijin investasi	60,00	
	6 Meningkatkan Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung	1. Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	45,00	



Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Sasaran Pembangunan	Indikator	Target Tahun 2022	OPD
1	2	3	4	5
	produktivitas wilayah (P5)			
		2 Persentase jaringan irigasi fungsional	45,00	
<b>Pemantapan Infrastruktur Dasar Dan Konektifitas Anar Wilayah</b>	1 Pengarusutamaan Pembangunan rendah karbon sebagai upaya tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan	1 Tingkat penurunan emisi gas rumah kaca (gas karbon)	7,34	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri, Biro Otonomi Khusus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
		2 Indeks Kualitas Udara	92,93	
	3 Indeks Kualitas Air	78,65		
	4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	81,52		
	5 Rasio capaian indikator-indikator pembangunan berkelanjutan SDGs	35,36		
	6 Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan SDGs	3,00		
2 Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	1 Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan	65,52		
		2 Persentase jalan provinsi dengan kualitas baik	41,42	
		3 Persentase jembatan provinsi dengan kualitas baik	37,72	
3 Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	1 Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	45,00		
		2 Persentase jaringan irigasi fungsional	45,00	



Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Sasaran Pembangunan	Indikator	Target Tahun 2022	OPD
1	2	3	4	5
	4 Meningkatkan Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	1 Cakupan Rumah Layak Huni	59,72	
		2 Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	36,36	
		3 Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	60,53	
	5 Meningkatkan ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	1 Cakupan ketersediaan Mikrohidro energi listrik perdesaan	20,00	
		2 Cakupan ketersediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di wilayah perdesaan	50,00	
		3 Persentase rumah tangga perdesaan yang menggunakan sumber penerangan listrik	42,73	
	6 Meningkatkan jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	1 Persentase penduduk +5 thn menggunakan telepon seluler	46,15	
		2 Prosentase distrik yang terlayani Sistem Komunikasi dan informasi	25,10	
<b>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</b>	1 Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis kampung	1 Cakupan kampung yang telah menjalankan pelayanan pemerintahan	0,00	
		2 Cakupan kampung yang berkembang	18,27	
	2 Meningkatkan efektivitas upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	1 Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	0,00	
		2 Jumlah penduduk Miskin OAP	611,50	
	3 Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah-wilayah perbatasan menjadi halaman depan negara	1 Jumlah Lokpri di Papua yang potensial bisa berkembang	1,00	
		2 Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan di perbatasan	175,00	
		3	20,00	
		4	25,00	



Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Sasaran Pembangunan		Indikator	Target Tahun 2022	OPD
1	2		3	4	5
			5 Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan di perbatasan	0,50	
			6 Cakupan wilayah perbatasan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	8,00	
	4	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	1 Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	50,00	
			2 Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	20,00	
			3 Persentase jumlah orang yang bekerja	97,68	
	5	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana	1 Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Tinggi	
			2 Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	0,00	
			3 Cakupan kampung tangguh bencana	10,00	
	6	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	1 Indeks Pemberdayaan Gender	79,69	
			2 Cakupan KDRT	313,00	
			3 Proporsi perempuan di DPRD	20,00	
	7	Meningkatnya pemberdayaan terhadap Komunitas Adat Terpencil ( KAT) dan bantuan sosial			



Prioritas Pembangunan Tahun 2022	Sasaran Pembangunan	Indikator	Target Tahun 2022	OPD
1	2	3	4	5
	Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			





## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Analisis ini sangat penting artinya dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan pada wilayah yang masih terbelakang. Semua ini diperlukan untuk dapat meningkatkan proses pembangunan daerah sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pada tingkat wilayah diperlukan karena kondisi permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan tidak sama. Untuk itu sejak tahun 2013 Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan lima Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis **Wilayah Adat** di Papua dengan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi sektoral dan spasial.

**5 (Lima) KPE (Kawasan Pengembangan Ekonomi) berbasis wilayah adat** yang dimaksud adalah :

- a. **Wilayah adat Saireri** yang terdiri atas kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah Kepulauan Teluk Cenderawasih yaitu Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen;
- b. **Wilayah adat Mamta** yang terbagi atas kabupaten yang berada disepanjang sungai mamberamo hingga lautan pasifik yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Mamberamo Raya;
- c. **Wilayah adat Me Pago** yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah sisi barat terdiri atas Kabupaten Mimika, Nabire, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai dan Deyiai;
- d. **Wilayah adat La Pago** yang terletak di kawasan Pegunungan Tengah sisi timur, terdiri atas Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Nduga, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya dan Pegunungan Bintang;
- e. **Wilayah adat Anim Ha** yang berada di wilayah selatan Papua, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel.



## 5.1 Kerangka Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Berkeadilan maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua. Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Pengembangan wilayah Papua merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah Adat Papua. Dalam 5 (lima) tahun mendatang, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Gambar 5.1.

### Ilustrasi Kerangka Pengembangan Wilayah Provinsi Papua



Kerangka pengembangan wilayah Papua untuk mempercepat pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah tersebut adalah sebagai berikut:



1. Penguatan pusat pertumbuhan sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth) dengan menggali potensi dan keunggulan daerah di setiap wilayah adat. Dalam hal ini diperlukan pengembangan industri pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan di wilayah penyangga (hinterland) yang diiringi pengembangan lokasi pemasaran, dan peningkatan skill OAP agar aktif terlibat dalam pengembangan sektor unggulan tersebut.
2. Percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kemandirian kampung atau perkampungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembentukan klaster komoditas lokal yang diiringi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan organisasi produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan. Budidaya dan nilai tambah lahan komunal dikembangkan dalam mendorong ketahanan pangan, kegiatan ekonomi, yang didukung efisiensi perdagangan lokal, pengembangan keterampilan, serta peningkatan kemampuan kerjasama pemanfaatan lahan komunal dengan pihak luar secara berkelanjutan.
3. Peningkatan kesejahteraan di kawasan perbatasan melalui penguatan kegiatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur di kawasan PKSN, PLBN, dan lokasi prioritas. Dalam hal ini diperlukan pengintegrasian fungsi PLBN, PKSN, dengan lokasi prioritas, yang didukung penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan lokasi prioritas.
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan, terutama untuk daerah pinggiran. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan tersebut dilakukan dengan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dengan insentif dan disinsentif, memastikan keberadaan sekolah kecil di kampung dan sekolah berasrama, serta pengembangan kurikulum lokal berbasis budaya dan kearifan lokal.
5. Pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pemerataan kesempatan ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, dan konsistensi penerapan penataan ruang.
6. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
7. Pengelolaan urbanisasi dengan memastikan perencanaan dan penerapan tata guna lahan berkelanjutan, yang disertai pencegahan konflik horizontal, pengendalian kerusakan lingkungan, serta penyediaan rumah layak dan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan.



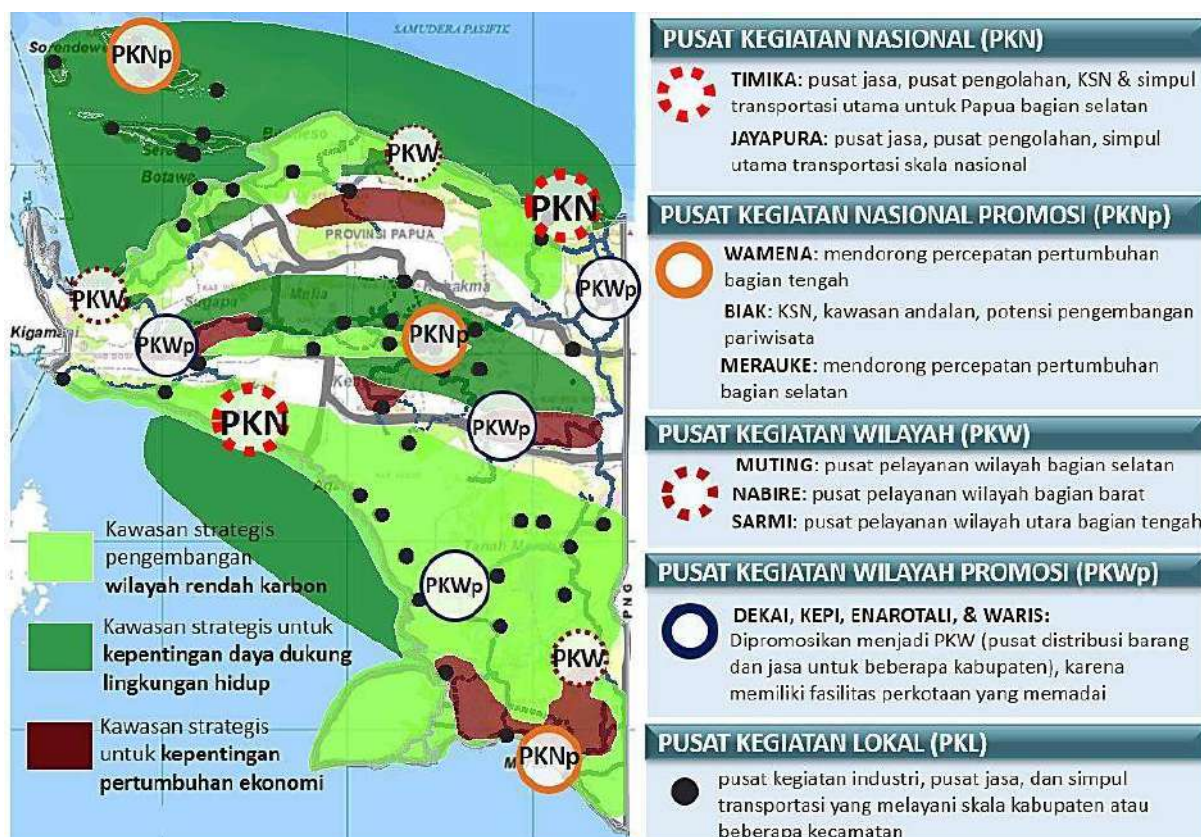
## 5.2 Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan kewilayahan Papua terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khususnya dalam penetapan fungsi ruang dan lokasi pengembangan wilayah. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam hal ini, kebijakan umum pembangunan berkelanjutan “Green Growth berbasis wilayah adat” diperlukan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah Papua, khususnya dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, akselerasi pembangunan wilayah tertinggal, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan mengacu pada kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Papua, pengembangan kewilayahan Papua yang direncanakan secara holistic, integratif, tematik dan spasial maka dapat dirumuskan sebagaimana terlihat pada Gambar 5.3 bawah ini.

**Gambar 5.2.**

### Ilustrasi Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Provinsi Papua



Dengan mengacu pada kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Papua, pengembangan kewilayahan Papua yang direncanakan secara holistic, integratif, tematik

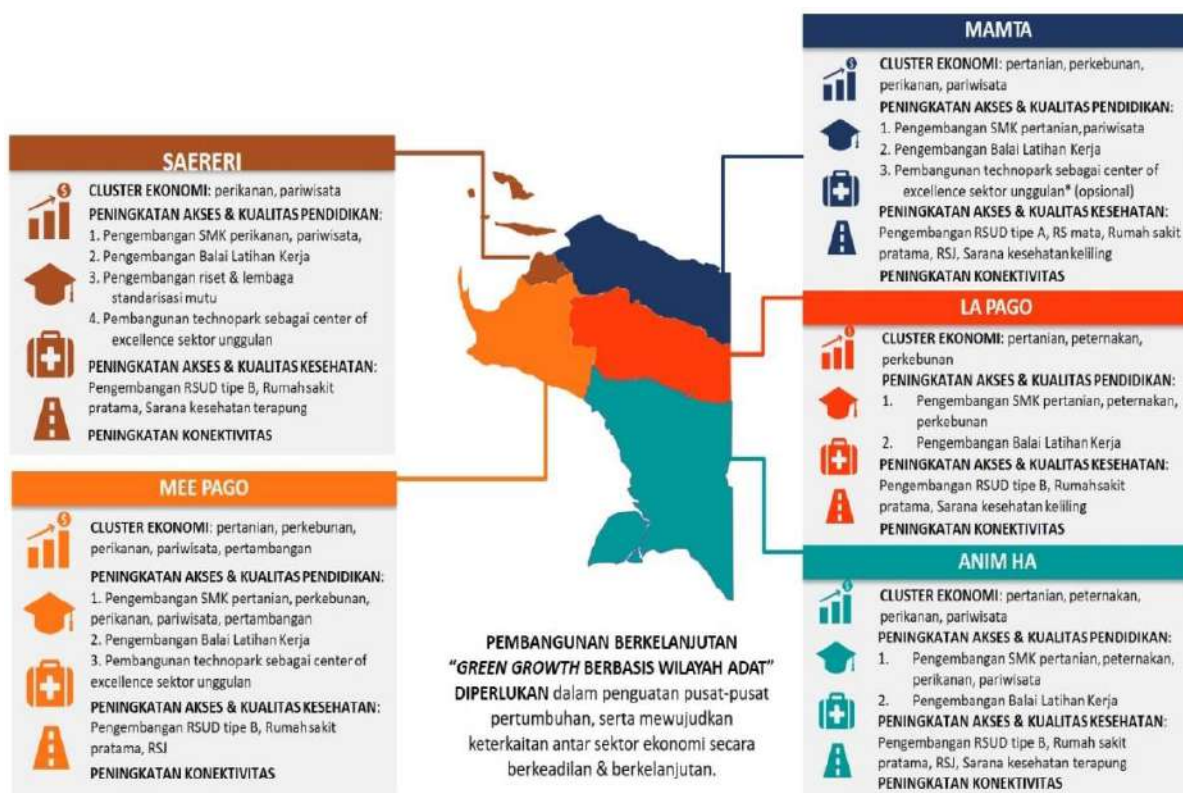




dan spasial (HITS) maka dapat dirumuskan sebagaimana terlihat pada Gambar 5.3 di bawah ini.

**Gambar 5.3.**

**Pengembangan Kewilayahan Papua secara Hilostic, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS)**



**Tabel 5.1.**

**Pusat Pertumbuhan dalam pengembangan wilayah Provinsi Papua**

PUSAT PERTUMBUHAN	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	<p><b>KEDUDUKAN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pintu gerbang ke kawasan internasional</li> <li>berpotensi mendorong perkembangan wilayah sekitarnya</li> <li>pusat pengembangan kegiatan jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional</li> </ul> <p>atau beberapa provinsi</p>				
			<p><b>Timika di Kab. Mimika</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KSN</li> <li>simpul transportasi utama yang melayani Papua bagian selatan</li> </ul>	<p><b>Kota Jayapura dan Kab. Jayapura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>simpul utama transportasi skala nasional dengan adanya pelabuhan laut dan bandara Sentani</li> </ul>	
Pusat Kegiatan	<p><b>KEDUDUKAN:</b> dipromosikan menjadi PKN</p>				



PUSAT PERTUMBUHAN	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Nasional promosi (PKNp)	<b>Wamena di Kab. Jayawijaya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>mendorong percepatan pertumbuhan bagian tengah Papua</li> </ul>	<b>Merauke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>mendorong percepatan pertumbuhan di bagian selatan Papua</li> </ul>			<b>Biak</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>KSN</li> <li>kawasan andalan, potensi pengembangan pariwisata</li> </ul>
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	<b>KEDUDUKAN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>mendukung PKN</li> <li>pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten</li> </ul>				
		<b>Muting di Kab. Merauke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pusat pelayanan wilayah bagian selatan</li> </ul>	<b>Nabire</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pusat pelayanan wilayah barat</li> <li>menunjang wilayah sekitarnya dengan adanya jalan, pelabuhan, dan bandara</li> </ul>	<b>Sarmi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pusat pelayanan wilayah utara bagian tengah</li> </ul>	
Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)	<b>KEDUDUKAN:</b> dipromosikan menjadi PKW				
	<b>Dekai di Kab. Yahukimo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pusat simpul masuknya barang dan jasa</li> <li>pusat pengembangan industri di wilayah selatan</li> </ul>	<b>Kepi di Kab. Mappi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ibukota Kab. Mappi</li> </ul>	<b>Enarotali di Kab. Paniai</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pusat distribusi barang dan jasa untuk beberapa kabupaten seperti Intan Jaya, Deiyai, dan Puncak</li> </ul>	<b>Waris di Kab. Keerom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>memiliki fasilitas perkotaan memadai</li> </ul>	
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<b>KEDUDUKAN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.</li> <li>simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. (Semua ibukota kabupaten yang tidak termasuk PKN, PKNp, dan PKW maka ditentukan sebagai PKL)</li> </ul>				

### 5.3 Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

#### a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan SDM di Papua untuk mewujudkan “green growth” berbasis wilayah adat” dan pengembangan kluster ekonomi dilakukan dengan pembentukan SDM unggul melalui center of knowledge, politeknik agroindustri, technopark, SMK pertanian, dan balai latihan kerja yang terletak di lokasi-lokasi strategis dalam pembentukan kluster ekonomi setiap wilayah adat.

Secara umum SDM di kluster pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata di Papua harus menguasai kompetensi dasar untuk dapat menjalankan kegiatan budidaya, pengolahan dan pemasaran. Selain itu, keberadaan pusat kluster yang



membantu memberikan informasi mengenai peluang pasar untuk hasil produk budidaya olahan pertanian tersebut mengharuskan para pelaku usaha pertanian menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat tersebut tidak harus dipelajari secara mandiri, namun terdapat lembaga antar klaster yang menjalin kemitraan dengan berbagai aktor yaitu pemerintah, pelaku usaha pertanian eksternal, akademisi, swasta, organisasi sosial, dan lembaga keuangan eksternal untuk membantu SDM pelaku usaha pertanian. Bentuk bantuan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk pelatihan atau sosialisasi, namun juga dalam bentuk studi banding, penelitian & pengembangan, investasi, serta memberi bantuan input (benih, pupuk, modal, teknologi, dll). Kemitraan tersebut diharapkan dapat mendorong SDM pelaku usaha pertanian di Papua yang saling bertukar input, output, pengetahuan, informasi dan teknologi serta bekerja sama dengan pelaku usaha pertanian eksternal, sehingga dapat tercipta SDM yang kompeten, kompetitif, dan inovatif dalam implementasi green growth berbasis wilayah adat.

**Tabel 5.2.**  
**Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan**

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Politeknik Agroindustri terakreditasi B	Wamena di Kab. Jayawijaya* (*opsional)	Kab. Merauke* (*opsional)			
Technopark sebagai <i>center of excellence</i> sektor unggulan klaster ekonomi	v	v	V	V	v
SMK pertanian, pariwisata, dan/atau pertambangan	Wamena di Kab. Jayawijaya	Kab. Merauke	Timika di Kab. Mimika Kab. Nabire	Kab. Jayapura Kab. Sarmi	Kab. Biak Numfor
Balai Latihan Kerja (BLK)	Wamena di Kab. Jayawijaya  Kab. Yahukimo	Kab. Merauke  Kepi di Kab. Mappi  Kab. Boven Digoel	Timika di Kab. Mimika Kab. Nabire	Kab. Jayapura	Kab. Biak Numfor
Lembaga standarisasi mutu					Kab. Biak Numfor

Tentu saja strategi pembangunan pendidikan menengah dan tinggi di atas tidak mengabaikan strategi yang saat ini telah dilakukan untuk mendukung pendidikan dasar,





yaitu melalui penguatan sekolah kecil dan sekolah berasrama untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar.

## b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Papua dilakukan dengan mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman sesuai dengan karakteristik wilayah, Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan kearifan lokal masyarakat Papua. Dalam implementasi upaya peningkatan tersebut diperlukan peran aktif masyarakat khususnya dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal. Secara umum, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Papua dilakukan dengan pemberian tunjangan tenaga kesehatan, penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan, pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana kesehatan, pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pengembangan obat-obat tradisional, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular HIV Aids, TB paru, dan malaria.

**Tabel 5.3.**  
**Rencana Pengembangan Sebaran Sarana Prasarana Kesehatan dalam peningkatan akses dan kualitas kesehatan di Papua**

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
RSUD tipe A				Kota Jayapura	
RSUD tipe B	v	v	V		v
Rumah sakit pratama	Kab. Tolikara  Kab. Pegunungan Bintang	Mindiptana di Kab. Boven Digoel	Kab. Dogiyai	Kab. Sarmi	Kab. Supiori
		Muting di Kab. Merauke			
Rumah sakit mata				Kota Jayapura	
Rumah sakit jiwa		Kab. Merauke	Kab. Mimika	Kota Jayapura	
Sarana kesehatan terapung		v		v	
Sarana kesehatan keliling				v	v

Sebagaimana bidang pendidikan, penguatan di bidang kesehatan sekunder juga paralel dengan strategi pengembangan kesehatan primer dan kesehatan berbasis masyarakat melalui skema dukungan otonomi khusus.

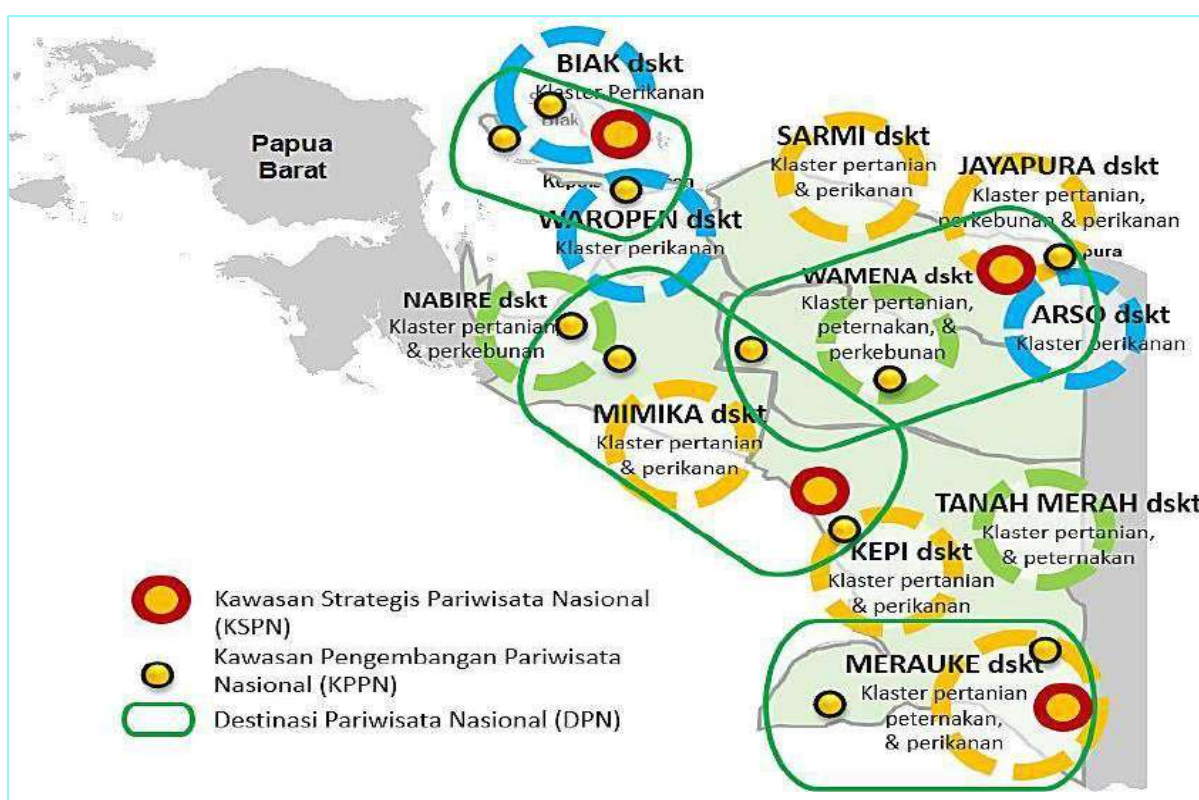


## 5.4 Pengembangan Perekonomian Wilayah

Pengembangan ekonomi wilayah adat secara umum disesuaikan berdasarkan potensi pengembangan komoditas lokal, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta prospek pasar. Sebagai perwujudan pengembangan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir di Papua terdapat arah pengembangan klaster (cluster) pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata di Papua. Penentuan lokasi klaster telah mempertimbangkan potensi komoditas

lokal, kedudukan dan fungsi lokasi dalam sistem perkotaan, kondisi infrastruktur pendukung, arahan KLHS, serta penetapan fungsi lindung dan budidaya dalam RTRWP.

**Gambar 5.4.**  
**Ilustrasi Pengembangan Klaster Ekonomi di Papua**



Tantangan dalam pengembangan klaster ekonomi di Papua adalah dampak yang tidak dapat dirasakan dalam jangka waktu yang pendek sehingga diperlukan upaya lebih agar klaster ekonomi terbentuk secara berkelanjutan. Klaster yang berhasil adalah klaster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal. Klaster tersebut memiliki jaringan lokal, akses yang baik pada permodalan, institusi penelitian dan pengembangan, tenaga kerja yang berkualitas, melakukan kerjasama yang baik antara perusahaan dan lembaga lainnya, mengikuti perkembangan teknologi, dan adanya tingkat inovasi yang tinggi.



**Tabel 5.4.  
Pengembangan Perekonomian Wilayah**

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
<b>PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN WILAYAH BERBASIS KOMODITAS LOKAL</b>					
Sektor Primer	kopi, buah merah, ubi jalar, sagu	padi, karet, kopi, tebu, perikanan, peternakan, kelapa sawit	kopi, buah merah, ubi jalar, tambang, perikanan, sagu	kakao, kelapa dalam, kelapa sawit, perikanan	hasil Laut, perikanan
Sektor Sekunder	industri pengolahan sagu, buah merah, ubi jalar, kopi	industri pengolahan tebu, kelapa sawit, peternakan, dan pengalengan ikan	industri pengolahan hasil pertambangan, pertanian, dan/ atau perkebunan	industri pengolahan ikan dan hasil perkebunan	industri kayu, pengolahan ikan
Sektor Tersier	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa
<b>PENGEMBANGAN KLASTER EKONOMI DI PAPUA</b>					
Klaster Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wamena dan sekitarnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah Merah dan sekitarnya</li> <li>• Keping dan sekitarnya</li> <li>• Merauke dan sekitarnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nabire dan sekitarnya</li> <li>• Mimika dan sekitarnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarmi dan sekitarnya</li> <li>• Jayapura dan sekitarnya</li> </ul>	
Klaster Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wamena dan sekitarnya</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nabire dan sekitarnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jayapura dan sekitarnya</li> </ul>	
Klaster Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wamena dan sekitarnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah Merah dan sekitarnya</li> <li>• Merauke dan sekitarnya</li> </ul>			
Klaster Perikanan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keping dan sekitarnya</li> <li>• Merauke dan sekitarnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mimika dan sekitarnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarmi dan sekitarnya</li> <li>• Arso dan sekitarnya</li> <li>• Jayapura dan sekitarnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biak dan sekitarnya</li> <li>• Waropen dan sekitarnya</li> </ul>
Klaster Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPPN Timika-Lorentz dan sekitarnya di Kab. Mimika dan Jayawijaya</li> <li>• KPPN Jayawijaya di Kab. Jayawijaya</li> <li>• KPPN Wamena di Kab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KSPN Wasur-Merauke dan sekitarnya di Kab. Merauke</li> <li>• KPPN Kimaam dan sekitarnya di Kab. Merauke</li> <li>• KPPN Danau Bian dan sekitarnya di Kab. Merauke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPPN C.A. Weyland dan sekitarnya di Kab. Nabire</li> <li>• KPPN Paniai dan sekitarnya di Kab. Paniai</li> <li>• KSPN Agats-Asmat dan sekitarnya di Kab. Asmat</li> <li>• KPPN Timika-Lorentz dan sekitarnya di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KSPN Sentani dan sekitarnya di Kab. Jayapura</li> <li>• KPPN Jayapura dan sekitarnya di Kota Jayapura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KSPN Biak dan sekitarnya di Kab. Biak</li> <li>• KPPN Numfor dan sekitarnya di Kab. Biak numfor</li> <li>• KPPN Serui dan sekitarnya di Kab. Kep. Yapen</li> <li>• KPPN Supiori dan</li> </ul>



	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
	Jayawijaya		Kab. Mimika dan Jayawijaya		sekitarnya di Kab. Supiori

Dalam pengembangan kluster ekonomi terdapat interaksi di dalam kluster ekonomi, interaksi antar kluster ekonomi, interaksi di dalam wilayah adat, antar wilayah adat, maupun interaksi dengan wilayah luar Papua, berupa: (1) aliran barang dalam penciptaan nilai tambah yang ramah lingkungan (green added value); (2) aliran informasi & pengetahuan (sharing of knowledge) yang mendorong keterampilan dan inovasi; serta (3) aliran pemasaran. Interaksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing komoditas lokal, serta dapat memberikan multiplier effect terhadap sektor ekonomi lainnya, tanpa mengabaikan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Dalam pemanfaatan kluster pariwisata, terdapat hubungan integrasi antara kluster pariwisata dengan kluster lainnya, yaitu sebagai lokasi promosi dan pemasaran output produksi kluster ekonomi.

Pada implementasi kebijakan umum pembangunan berkelanjutan “Green Growth berbasis wilayah adat”, maka arah pengembangan juga difokuskan pada penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian limbah. Tantangan terbesar dari implementasi ini adalah diperlukan arahan yang tepat dari para pemangku kepentingan agar teknologi ramah dapat digunakan sebaik mungkin oleh setiap pelaku usaha pertanian dari hulu hingga hilir di dalam pengembangan kluster ekonomi.

## 5.5 Kebijakan Pengembangan Konektivitas

Pengembangan konektivitas Papua diarahkan untuk memadukan sistem pelayanan transportasi antarmoda, dalam menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas di dalam maupun antar wilayah adat, khususnya antara pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga.



Pada pengembangan klaster, infrastruktur menghubungkan lokasi produksi komoditas berbasis sumber daya lokal dengan pusat pertumbuhan dan wilayah luar Papua, khususnya dalam pengembangan ekonomi OAP. Dengan adanya aksesibilitas yang memadai diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta menarik dan mengembangkan minat investasi di berbagai sektor, baik pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, maupun pertambangan.

## **5.6 Pengembangan Wilayah Pinggiran dan Perbatasan**

Pengembangan wilayah pinggiran menjadi prioritas daerah dalam pembangunan pelayanan dasar terutama untuk menjamin bahwa pelayanan dasar, kesempatan ekonomi dan infrastruktur dasar sampai ke kampung-kampung yang ada di wilayah pinggiran. Salah satu Kawasan pinggiran yang perlu mendapatkan prioritas pembangunan adalah kawasan perbatasan. Pembangunan Kawasan perbatasan bertujuan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Terdapat 2 (dua) pendekatan pembangunan dalam mengembangkan kawasan perbatasan di Papua, yaitu pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach). Pendekatan keamanan dilakukan melalui:

- Transformasi kelembagaan lintas batas negara menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu, yaitu costum, immigration, quarantine, security (CIQS);
- Peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana pengamanan perbatasan laut dan darat, yang melibatkan peran aktif masyarakat;
- Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan;

Adapun pendekatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach) dilakukan melalui:

- Penguatan kegiatan ekonomi berbasis komoditas lokal di PLBN, PKS, dan lokpri yang mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga, serta didukung pembangunan infrastruktur & pelayanan dasar
- Pembangunan SDM yg handal & pemanfaatan IPTEK
- Pembangunan konektivitas antara PKS, lokpri, PKW, & PKN
- Penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan di lokasi prioritas
- Peningkatan kerjasama perdagangan dengan negara tetangga

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, maka peran provinsi Papua akan lebih banyak pada pendekatan kesejahteraan masyarakat. Karena menyangkut Pusat Kegiatan



Strategis Nasional (PKSN) , maka penyelenggaraan kewenangan ini tentu saja dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi juga akan mendorong daerah kabupaten di perbatasan agar mendayagunaan sumber daya ekonomi lokal dalam mendukung PKSN agar pembangunan PKSN memberikan kontribusi positif bagi penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat kampung-kampung di sekitarnya.

**Tabel 5.5.**  
**Pengembangan Wilayah Perbatasan**

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	<b>KEDUDUKAN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• menunjang sektor strategis nasional</li> <li>• menunjang pengembangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi</li> <li>• daerah penyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang telah ada</li> <li>• berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga</li> <li>• pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga</li> <li>• simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya</li> </ul>				
	<b>Oksibil di Kab. Pegunungan Bintang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pertumbuhan</li> </ul>	<b>Tanah Merah di Kab. Boven Digoel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina,</li> </ul>		<b>Arso di Kab. Keerom</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat pertumbuhan</li> </ul>	
	wilayah sekitarnya	dan keamanan terpadu; <ul style="list-style-type: none"> <li>• pusat perdagangan skala internasional</li> <li>• pengembangan sekolah bertaraf internasional</li> </ul>		wilayah sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan sekolah bertaraf internasional</li> </ul>	
PKSN Promosi	<b>KEDUDUKAN:</b> Kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara				



	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
		<b>Merauke di Kab. Merauke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu;</li> <li>peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan</li> <li>pusat perdagangan skala internasional</li> <li>pengembangan sekolah bertaraf internasional</li> </ul>		<b>Jayapura</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu</li> <li>peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan</li> <li>pusat perdagangan skala internasional</li> </ul>	
Lokasi Prioritas (lokpri) perbatasan	<b>KEDUDUKAN:</b> Kawasan yang mempercepat pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik di Perbatasan				
	<b>Kab. Pegunungan Bintang (9 distrik)</b> Batom, Iwur, Kiwirok, Pepera, Oksomol, Tarub, Murkim, Kiwirok Timur, Mufinop	<b>Kab. Merauke (5 distrik)</b> Eligobel, Muting, Sota, Ulilin, Naukenjeri  <b>Kab. Boven Digoel (4 distrik)</b> Mindiptana, Tanah Merah, Jair, Waraopko		<b>Kab. Keerom (5 distrik)</b> Web, Senggi, Waris, Arso Timur, Towe  <b>Kota Jayapura (2 distrik)</b> Muara Tami, Jayapura Utara	<b>Kab. Supiori (3 distrik)</b> Supirori Barat, Supirori Utara, Kepulauan Aruri
Pulau-Pulau Terkecil Terluar (PPKT)	<b>KEDUDUKAN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yang berperan dalam kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia</li> <li>Penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain</li> <li>Penempatan sarana bantu navigasi pelayaran</li> <li>Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk usaha kelautan dan perikanan, ekowisata bahari, pendidikan dan penelitian, pertanian subsisten, dan industri jasa maritime</li> </ul>				
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)	<b>KEDUDUKAN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan basis sektor kelautan dan perikanan</li> </ul>				
		<b>SKPT Merauke</b>	<b>SKPT Timika</b>	<b>SKPT Sarmi</b>	<b>SKPT Biak Numfor</b>
Pos Lintas Batas Negara (PLBN)		<b>PLBN Sota</b> di Kabupaten. Merauke		<b>PLBN Skouw</b> di Kota Jayapura	





## 5.7 Pemetaan Program Strategis dalam Kerangka Percepatan Pembangunan Papua

Berikut pemetaan program strategis berdasarkan pengembangan kewilayahan Provinsi Papua dalam kerangka percepatan pembangunan Papua:

### 1. Wilayah Adat Mamta

- a. Program/lokasi dalam **Inpres/RPJMN sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD;**
  1. Pembangunan dan Optimalisasi BLK VTC berbasis komoditas lokal di Kabupaten Jayapura
  2. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Depapre (Kabupaten Jayapura)
  3. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Sarmi (Kabupaten Sarmi)
  4. Penyediaan dan pengelolaan air baku di Kawasan Perkotaan Jayapura
  5. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pembangunan terminal barang dan penumbang di PLBN Skouw
- b. Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (inpres/ RPJMN);**
  1. Pembangunan/revitalisasi SMK di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi
  2. Penguatan dan Peningkatan RSUD di Kabupaten Jayapura Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Sarmi
  3. Pembangunan pelabuhan peti kemas Depapre di Jayapura
  4. Pembangunan terminal type B di Kab./kota Jayapura, Sarmi, Keerom
  5. Pembangunan dermaga-dermaga di Danau Sentani
  6. Pembangunan Bandara Kustra di Kabupaten Mamberamo Raya
  7. Pembangunan Pelabuhan Wakde di Kabupaten Sarmi
  8. Pembangunan pembangkit listrik hydropower di Kabupaten Membramo Raya
- c. Program/lokasi ada dalam rencana nasional (inpres/RPJMN) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**
  1. Asrama Mahasiswa Nusantara di Kota Jayapura
  2. Papua Youth Creative Hub di Jayapura
  3. Pengembangan Pusat Kajian kebudayaan bertaraf internasional di Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura
  4. Pembangunan Institut Teknologi Kesehatan di Kota Jayapura
  5. Pembangunan Jalan Trans Merauke-Sorong



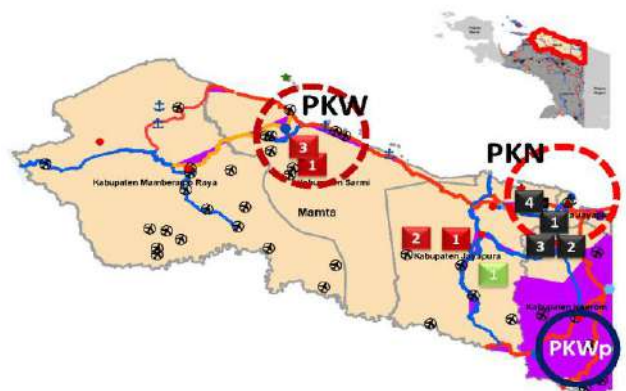
6. Pengembangan Jalan Perbatasan Papua di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura
7. Penyediaan moda kapal ternak di Kota Jayapura
8. Pengembangan Bandara Hub Primer (Bandara Sentani) di Jayapura
9. Penyediaan dan pengelolaan air baku di Wilayah Strategis KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) di Jayapura
10. Pengembangan terminal Skouw
11. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) di Kota Jayapura
12. Revitalisasi Danau Sentani di Kabupaten Jayapura
13. Pembangunan istana kepresidenan di Kabupten Jayapura

**Gambar 5.5.**  
**Arah Pengembangan Konektivitas MAMTA**

#### GENERASI EMAS PAPUA

**KETERANGAN :**

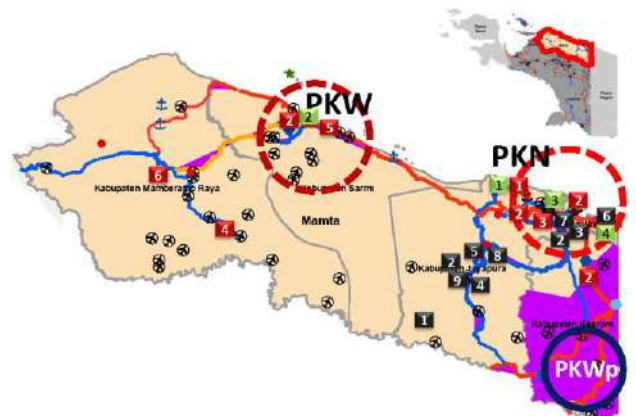
- Program/lokasi dalam **inpres/RPJM** sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD
- Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (Inpres/RPJM)**
- Program/lokasi ada dalam rencana Nasional (Inpres/RPJM) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**



#### INFRADAS PAPUA

**KETERANGAN :**

- Program/lokasi dalam **inpres/RPJM** sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD
- Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (Inpres/RPJM)**
- Program/lokasi ada dalam rencana Nasional (Inpres/RPJM), **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**



## 2. Wilayah Adat MEE PAGO

- a. Program/lokasi dalam **Inpres/RPJM** sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD;



1. Pembangunan dan optimalisasi BLK VTC (Vocational Training Council) berbasis komoditas lokal di Kabupaten Nabire
- b. Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (inpres/ RPJMN);**
  1. Pembangunan dan optimalisasi BLK VTC (Vocational Training Council) berbasis komoditas lokal di Kabupaten Mimika
  2. Pembangunan/revitalisasi SMK di Kabupaten Nabire
  3. Pembangunan/revitalisasi SMK di Kabupaten Mimika
  4. Pembangunan Pelabuhan Perintis Pulau Mambor di Kabupaten Nabire
  5. Pembangunan Bandara Wanggar di Kabupaten Nabire
  6. Pembangunan Dermaga Sungai Sipu-sipu di Kabupaten Mimika
  7. Rehabilitasi dan peningkatan Dermaga Samabusa di Kabupaten Nabire
  8. Penyediaan dan pengelolaan air baku di kawasan perkotaan Kabupaten Mimika
  9. Pembangunan pembangkit listrik hydropower PLTA Urumuka Kabupaten Paniai
- c. Program/lokasi ada dalam rencana nasional (inpres/RPJMN) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD;**
  1. Penguatan puskesmas di Kabupaten Paniai
  2. Pembangunan sentra olahraga di Kabupaten Paniai
  3. Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Nabire di Kabupaten Nabire
  4. Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pomako di Kabupaten Mimika
  5. Pembangunan Bandara Nabire Baru di Kabupaten Nabire
  6. Pengembangan Bandara Enarotali di Kabupaten Paniai
  7. Peningkatan kapasitas Bandara Mozes Kolangin di Kabupaten Mimika
  8. sebagai bandara pendukung jembatan udara
  9. Penyediaan dan pengelolaan air baku di wilayah strategis KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Kabupaten Mimika (Distrik Sentani)
  10. Penyediaan dan pengelolaan air baku di wilayah strategis KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Kabupaten Paniai
  11. Penyediaan dan pengelolaan air baku di wilayah strategis KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Kabupaten Intan Jaya
  12. Revitalisasi Danau Paniai di Kabupaten Paniai






Gambar 5.6.

### Arah Pengembangan Konektivitas MEE PAGO

#### GENERASI EMAS PAPUA




**KETERANGAN :**

-  Program/lokasi dalam **inpres/RPJMN sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD**
-  Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (Inpres/RPJMN)**
-  Program/lokasi ada dalam rencana Nasional (Inpres/RPJMN) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**



#### INFRADAS PAPUA

**KETERANGAN :**

-  Program/lokasi dalam **inpres/RPJMN sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD**
-  Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (Inpres/RPJMN)**
-  Program/lokasi ada dalam rencana Nasional (Inpres/RPJMN) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**



### 3. Wilayah Adat LA PAGO

a. Program/lokasi dalam **Inpres/RPJMN sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD;**

1. Pembangunan Politeknik di Jayawijaya
2. Pembangunan BLK VTC berbasis komoditas lokal di Jayawijaya
3. Pembangunan / Revitalisasi SMK di Jayawijaya
4. Beasiswa pendidikan anak unggul Papua di seluruh kabupaten
5. Penambahan kuota guru, pemberian insentif dan peningkatan kualitas tenaga pendidik di seluruh kabupaten
6. Penguatan dan Peningkatan RSUD di Jayawijaya
7. Penguatan Puskesmas di seluruh kabupaten
8. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular (malaria, filariasis, kusta, HIV/AIDS, TB) di seluruh kabupaten
9. Penyediaan tenaga kesehatan melalui: (1) beasiswa program pendidikan dokter spesialis/ PPDS (2) penempatan wajib kerja dokter spesialis (3)



- penyediaan tenaga kesehatan individu (4) penugasan tim Nusantara Sehat di seluruh kabupaten
10. Optimalisasi jaringan internet di seluruh kabupaten
  11. Perluasan elektrifikasi di seluruh kabupaten
- b. Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (inpres/ RPJMN);**
1. Pembangunan BLK VTC berbasis komoditas lokal di Yahukimo
  2. Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Tolikara
  3. Pengembangan telemedicine di seluruh kabupate
  4. Pelayanan kesehatan bergerak di seluruh kabupaten
  5. Pembangunan Bandara Mamit di Tolikara
  6. Pembangunan Bandara Fawi di Puncak Jaya
  7. Pembangunan Bandara Wamena
  8. Pembangunan Bandara Panggema & Ninia di Yahukimo
  9. Pembangunan Bandara Saminage di Yahukimo
  10. Pembangunan Terminal Tipe B di Jayawijaya
  11. Pembangunan Bandara Kobakma di Mamberamo Tengah
  12. Pambangunan Bandara Kuyawge di Lanny Jaya
  13. Pembangunan Bandara Taria Mamberamo Tengah
  14. Pembangunan Dermaga Sungai Taria di Mamberamo Tengah
  15. Pembangunan Bandara Nop Goliat di Yahukimo
  16. Pembangunan terminal tipe B di Jayawijaya
  17. Pembangunan ringroad di Jayawijaya
  18. Penyediaan dan pengelolaan air di Puncak Jaya
- c. Program/ lokasi ada dalam rencana nasional (inpres/ RPJMN), **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD;**
1. Pembangunan/ pengembangan sekolah terintegrasi satu atap berpola asrama di Nduga, Yalimo, Jayawijaya, Puncak
  2. Pembangunan Bandara Elelim di Yalimo
  3. Pembangunan Bandara Wamena di Yalimo
  4. Pembangunan Bandara Nop Goliat di Jayawijaya
  5. Pembangunan Bandara Korupun di Yahukimo
  6. Pembangunan Bandara Oksibil di Peg. Bintang
  7. Pembangunan Bandara Ilaga di Puncak
  8. Pembangunan Bandara Mulia di Puncak Jaya








9. Penyediaan air baku di Jayawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Yahukimo & Nduga

**Gambar 5.7.**  
**Arah Pengembangan Konektivitas LA PAGO**

**GENERASI EMAS PAPUA**




**KETERANGAN :**

-  Program/lokasi dalam **inpres/RPJM** sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD
-  Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (Inpres/RPJM)**
-  Program/lokasi ada dalam rencana Nasional (Inpres/RPJM) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**



**INFRADAS PAPUA**

**KETERANGAN :**

-  Program/lokasi dalam **inpres/RPJM** sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD
-  Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (Inpres/RPJM)**
-  Program/lokasi ada dalam rencana Nasional (Inpres/RPJM) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**



**4. Wilayah Adat SAERERI**

- a. Program/lokasi dalam **Inpres/RPJM** sesuai dengan arahan kewilayahan **RPJMD;**

1. Pembangunan dan Optimalisasi BLK VTC berbasis komoditas lokal di Biak Numfor
2. Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Waren di Waropen

- b. Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (inpres/ RPJM);**

1. Pembangunan / Revitalisasi SMK di Biak Numfor
2. Penguatan dan Peningkatan RSUD di Biak Numfor
3. Pengembangan Rumah Sakit Pratama di Supiori
4. Pembangunan Pelabuhan Waren di Waropen
5. Pembangunan Pelabuhan Miosbepondi di Supiori
6. Pembangunan Bandara Botawa di Waropen



7. Peningkatan Bandara Kamanap di Kep. Yapen
  8. Pembangunan Pelabuhan Ampimoi di Kep. Yapen
  9. Penyediaan dan pengelolaan air baku di Kawasan Perkotaan Biak Numfor
- c. Program/lokasi ada dalam rencana nasional (inpres/RPJM) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD;**
1. Pembangunan Politeknik di Biak Numfor
  2. Pembangunan dan pengembangan Universitas Negeri Kamasa di Biak Numfor
  3. Pembangunan Jalan Trans Pulau Biak di Biak Numfor
  4. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Samudera di Biak Numfor
  5. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Seuir di Kepulauan Yapen
  6. Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Bandara Frans Kaisepo di Biak Numfor
  7. Penyediaan dan pengelolaan air baku di Kawasan Strategis DPP Baru di Biak-Teluk Cendrawasih (Biak Numfor)

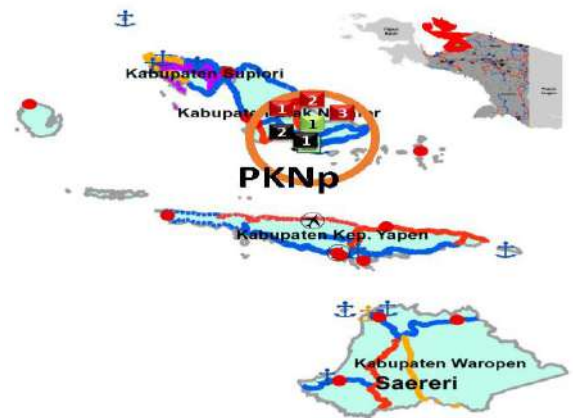
**Gambar 5.8.**

**Arah Pengembangan Konektivitas SAERERI**

**GENERASI EMAS PAPUA**

**KETERANGAN :**

- Program/lokasi dalam **inpres/RPJM** sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD
- Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (Inpres/RPJM)**
- Program/lokasi ada dalam rencana Nasional (Inpres/RPJM) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**



**INFRADAS PAPUA**

**KETERANGAN :**

- Program/lokasi dalam **inpres/RPJM** sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD
- Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (Inpres/RPJM)**
- Program/lokasi ada dalam rencana Nasional (Inpres/RPJM) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**





## 5. Wilayah Adat ANIM HA

- a. Program/lokasi dalam **Inpres/RPJMN sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD;**
  1. Pembangunan Politeknik di Kab. Merauke
  2. Pembangunan dan optimalisasi BLK VTC berbasis komoditas lokal di Kabupaten Merauke
  3. Penguatan dan peningkatan RSUD di Kab. Mappi
- b. Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (inpres/ RPJMN);**
  1. Pembangunan dan optimalisasi BLK VTC (Vocational Training Council) berbasis komoditas lokal di Kab. Boven Digoel
  2. Pembangunan dan optimalisasi BLK VTC berbasis komoditas lokal di Kabupaten Mappi (Distrik Kepi)
  3. Pembangunan/revitalisasi SMK di Kabupaten Merauke
  4. Pembangunan Pelabuhan Perintis Bomakia di Kabupaten Boven Digoel
  5. Pengembangan Pelabuhan Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel
  6. Pembangunan Pelabuhan Kepi di Kabupaten Mappi
  7. Pembangunan Pelabuhan Kimam di Kabupaten Merauke
  8. Pembangunan Pelabuhan Bade di Kabupaten Mappi
  9. Pembangunan Bandara Kepi di Kabupaten Mappi
  10. Pembangunan Bandara Ewer di Kabupaten Asmat
  11. Penyediaan dan pengelolaan air baku di kawasan perkotaan Kabupaten Merauke
  12. Pembangunan Terminal Tipe B di Kabupaten Merauke
- c. Program/ lokasi ada dalam rencana nasional (inpres/ RPJMN) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD;**
  1. Penguatan puskesmas di Kab. Mappi
  2. Pembangunan Jalan Trans Merauke – Sorong di Kab. Merauke
  3. Pembangunan Jembatan Bian di Kab. Merauke
  4. Pembangunan Pelabuhan Merauke di Kab. Merauke
  5. Pembangunan Pelabuhan Moor di Kab. Mappi
  6. Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Merauke di Kab. Merauke
  7. Pembangunan Pelabuhan Penyebaran Bade di Kab. Mappi
  8. Penyediaan moda kapal ternak di Kab. Merauke
  9. Pembangunan Bandara Mindiptana di Kab. Boven Digoel



10. Peningkatan kapasitas pendukung jembatan udara di Bandara Tanah Merah, Boven Digoel
11. Peningkatan kapasitas pendukung jembatan udara di Bandara Manggelum, Boven Digoel
12. Peningkatan kapasitas pendukung jembatan udara di Bandara Korowai Batu, Boven Digoel
13. Pembangunan dan peningkatan kapasitas Bandara Mopah, Merauke
14. Penyediaan dan pengelolaan air baku di wilayah strategis KSPN Kab. Asmat
15. Penyediaan dan pengelolaan air baku di wilayah strategis KSPN Kab. Merauke
16. Pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) perpipaan dan non-perpipaan di Kab. Merauke

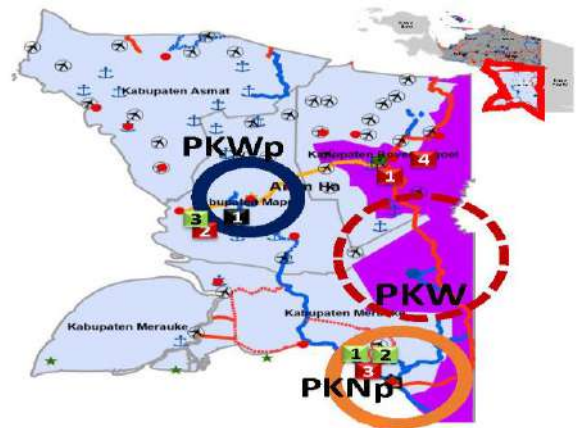
**Gambar 5.9.**

**Arah Pengembangan Konektivitas ANIM HA**

**GENERASI EMAS PAPUA**

**KETERANGAN :**

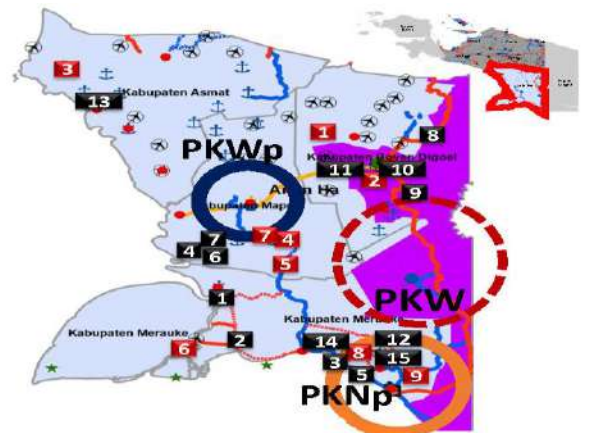
- Program/lokasi dalam **inpres/RPJMN** sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD
- Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (Inpres/RPJMN)**
- Program/lokasi ada dalam rencana Nasional (Inpres/RPJMN) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**



**INFRADAS PAPUA**

**KETERANGAN :**

- Program/lokasi dalam **inpres/RPJMN** sesuai dengan arahan kewilayahan RPJMD
- Program/lokasi diusulkan Pemda/ada dalam RPJMD, **namun tidak ada dalam rencana nasional (Inpres/RPJMN)**
- Program/lokasi ada dalam rencana Nasional (Inpres/RPJMN) **namun tidak ada dalam arahan kewilayahan RPJMD**



## BAB VI

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adalah bagian yang tidak terpisahkan yang penyusunannya memperhatikan batasan urusan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan perubahan paradigm penganggaran "**money follow function kepada money follow program**", maka perlu dilakukan penjabaran secara rasional tentang program prioritas. Hal penting yang menjadi penekanan dalam perubahan paradigm tersebut, bahwa program prioritas wajib mendapat penguatan penganggaran, sehingga penganggaran untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 merupakan rumusan penganggaran yang memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah yang dimana penganggaran lebih fokus dan terarah kepada target capaian pembangunan daerah. Adapun penentuan program prioritas disusun berdasarkan : (1). Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2020 sesuai dengan pentaha pantema RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, (2). Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020 serta indikatornya. (3). Merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan layanandasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1). Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan. (2). Menentukan keluaran/output setiap kegiatan. (3). Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. (4). Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.

Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya yang



dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

### **6.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaannya**

Rencana Program Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel 6.1 (terlampir).



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran prioritas pembangunan.

#### 7.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran pembangunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Papua Tahun 2018-2023. Berikut ini masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :



**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategik	No	Indikator	Satuan	TARGET 2022
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.8
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.7
		1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	78.9
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.8
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	3.1	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	95
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	73.8
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	5.1	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	7.0
		5.2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	7495.8
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	6.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	indeks	78.2
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	7.1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	skor	94.5
		7.2	Nilai skor aspek hak-hak politik	skor	48.4
		7.3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	skor	58.9
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	8.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	98.0
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggara publik	9.1	Capaian Nilai SAKIP	predikat	BB
		9.2	Capaian implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	persen	90
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	10.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	persen	95.0
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan	11.1	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP
		11.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	persen	12.70
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	12.1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	persen	4.4
		12.2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	persen	3.7
		12.3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	3.7





No.	Sasaran Strategik	No	Indikator	Satuan	TARGET 2022
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	13.1	Indeks Kualitas Udara	indeks	94.3
		13.2	Indeks Kualitas Air	indeks	79.5
		13.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	83.8
		13.4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupiah	55265.4
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	14.1	Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	persen	10.20
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	15.1	Tingkat Kesempatan Kerja	persen	98.09
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	16.1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	62.67
		16.2	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp. Triliun	90.63
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	17.1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	50.00
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	18.1	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	persen	45.00
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	19.1	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen	75.00
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	20.1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	38.75
		20.2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	44.04
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	21.1	Indeks Desa Membangun	indeks	50.16
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	70.19
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	23.1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	11.09



No.	Sasaran Strategik	No	Indikator	Satuan	TARGET 2022
		23.2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	67.50
		23.3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	13.12
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	24.1	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	40
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	25.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Sedang
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	26.1	Indeks Pembangunan Gender	indeks	79.90
		26.2	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	64.47

**Tabel 7.2.**  
**Sasaran Makro Pembangunan Daerah**

No	Indikator	Satuan	Kondisi 2019	Tahun 2020			Proyeksi		Target 2023
				Target	Realisasi	Capaian	2021	2022	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	60.84	62.27	60.44	97.06	61.20	62.27	65.00
2	Angka Kemiskinan	%	27.53	26.28	26.64	98.65	26.21	25.00	20.00
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	(15.75)	5.56	2.32	41.73	4.74	5.64	6.50
4	PDRB Perkapita Tanpa Tambang	Juta Rp	42.87	30.27	41.53	137.20	45.35	48.23	50.00
5	Gini Rasio	%	0.394	0.390	0.392	99.49	0.380	0.380	0.385
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.51	3.60	4.28	84.11	3.85	3.60	2.00



7	Konektivitas Wilayah	%						70	100
8	Intensitas Emisi GRK	Ton CO2/Juta Rupiah						0.311	0.282

Sumber data : BPS 2021, diolah

Secara agregat, prospek perekonomian Papua pada tahun 2022 diproyeksikan tumbuh positif, lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun 2021. Secara umum peningkatan kinerja ekonomi Papua pada tahun 2022 didorong oleh perbaikan kinerja pertambangan terbesar di Papua dimana produksi tambang berasal dari tambang bawah tanah yang mengalami peningkatan produktivitas sejalan dengan kadar tembaga dan emas yang lebih tinggi dibandingkan tambang terbuka. Penanganan pandemic COVID-19 di tahun 2021 yang menjadi penentu pemulihan aktivitas perekonomian sepanjang tahun 2022. Pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas pada semester I tahun 2022 diperkirakan akan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tumbuh meskipun terbatas. Efektivitas dan penyebaran vaksin COVID-19 yang diperkirakan dapat didistribusikan pada triwulan II atau III 2021 menjadi penentu pemulihan perekonomian sepanjang tahun 2022.

## 7.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman Outcome Level OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. IKK merupakan salah satu bagian yang menjadi rujukan penilaian kinerja OPD dalam merealisasikan setiap target indikator pada masing-masing urusan yang ditargetkan pada tahun 2022 mendatang adalah sebagai berikut.

**Tabel. 7.3.**  
**Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2022**

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	TARGET 2022
1.1 Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	Rp. juta	22.48



1.2	Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	persen	83.13
1.3	Capaian Implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	persen	90
1.4	Cakupan inovasi pelayanan publik yang masuk dalam List Outstanding (terpuji)	persen	1
1.5	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	persen	70.00
1.6	Rasio belanja langsung dalam komposisi APBD	persen	47.00
1.7	Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	persen	65.44
1.8	Ketepatan waktu Penetapan APBD	kategori	tepat waktu
1.9	Cakupan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus	jumlah kabupaten/kota	6
1.10	Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua	Indeks	5.96
1.11	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	13.12
1.12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	B
1.13	Indeks Pelayanan Publik	Nilai indeks	B-
1.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	B
1.15	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	orang per hari	250
1.16	Rata-rata Nilai Skor Peduli HAM	nilai	70
1.17	Tingkat Kerentanan Sosial	kategori	Sedang
1.1	Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3	Persen	56.08
1.2	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	11.09
1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	98.01
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	83.94
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat	persen	59.34
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 klh	4.39



2.2	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	persen	6.20
3.1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks	47.85
3.2	Persentase kenaikan cadangan pangan	persen	29.47
3.3	Persentase penduduk tahan pangan	persen	56.09
4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2.16
4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	79.48
5.1	Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status kampung berkembang	persen	19.35
5.2	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	52.23
5.3	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0.47
6.1	Persentase potensi budaya lokal yang dilestarikan	persen	55.00
6.2	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0
6.3	Cakupan kurikulum muatan lokal	persen	2.5
6.4	Indeks Pembangunan Olah Raga	Tingkatan Status	Sedang
1.1	NTP perikanan tangkap	Skor	104.79
1.2	NTP perikanan budidaya	Skor	96.99
1.3	Tingkat konsumsi ikan per kapita	kg/kapita/bulan	1.65
1.4	Pendapatan Per Kapita Petani	Rp juta per kapita	12.24
1.5	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	89.60
1.6	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	60
1.7	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	3.19
1.8	Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	persen	2.61
1.9	Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan	Jumlah	2
1.10	Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	58.68
1.11	Jumlah UMKM yang berkembang	Jumlah	3898



1.1	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan	persen	79.31
2.1	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	unit	44.23
2.2	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	38.75
2.3	Backlog perumahan layak huni dan sehat	ribu ruta	106.74
3.1	Laju Deforestasi	ribu hektar	27.93
3.2	Tingkat Emisi Karbon	Ton CO2	0.298
3.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai indeks	84.44
3.4	Persentase penerapan green economy	persen	65.00
3.5	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/Rp	55265.43
3.6	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen	75.00
3.7	Persentase pengendalian daya rusak air	persen	55.00
4.1	Kepuasan Pelayanan Informasi & Komunikasi	Kategori	B
4.2	Cakupan layanan telekomunikasi	persen	55
4.3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen	8
5.1	Angka Kriminalitas	per 100.000 penduduk	159
5.2	Indeks Demokrasi	Nilai Indeks	62.73
5.3	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM)	Jumlah	3
5.4	Lama hari pengurusan ijin investasi	hari	30
5.5	ICOR	nilai	3.48
5.6	Indeks Kemahalan Konstruksi	persen	204.69
1.	Layanan Urusan Wajib Dasar		
1.1.	Pendidikan		
1.1.1	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	0.29
1.1.2	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/ sederajat	persen	1.03



1.1.3	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	persen	28.59
1.1.4	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik	persen	28.57
1.1.5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	murid per guru	24.86
1.1.6	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	murid per guru	23.39
1.1.7	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	murid per sekolah	196.70
1.1.8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama	murid per sekolah	199.34
1.1.9	Persentase siswa kelas 1, 2 dan 3 yang naik kelas	persen	100.00
1.1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat (SPM Provinsi)	persen	85.00
1.1.11	Angka Putus Sekolah (APTS SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat)	persen	0.55
1.1.12	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dengan kondisi bangunan baik	persen	38.90
1.1.13	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per guru	22.46
1.1.14	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per sekolah	209.21
1.1.15	Persentase angka melek aksara penduduk umur $\geq 15$ tahun	persen	78.96
1.1.16	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15- 59 tahun	persen	94.03
1.1.17	Jumlah PKBM aktif	unit	443.00
1.1.18	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	74.27
1.1.19	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	persen	76.25
1.1.20	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	persen	84.15





1.1.21	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen	81.61
1.1.22	Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik	persen	82.43
1.1.23	Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik	persen	68.22
1.1.24	Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus	persen	54.00
1.1.25	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan dalam proses pembelajaran	persen	15.00
1.1.26	Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan	unit per tahun	4.00
1.1.27	Jumlah kemitraan pendidikan yang dikembangkan dengan lembaga sosial dan agama	unit	44.96
1.1.28	Cakupan PBM Sekolah yang di Supervisi dan di Monitoring	persen	59.43
1.1.29	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S1 yang lulus tepat waktu	persen	93.26
1.1.30	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S2 yang lulus tepat waktu	persen	68.22
1.1.31	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S3 yang lulus tepat waktu	persen	62.22
1.1.32	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	persen	24.17
1.1.33	Capaian peserta program afirmasi pendidikan yang difasilitasi	orang per tahun	250.00
1.1.34	Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi	orang	1322.00
1.1.35	Capaian Sekolah Program Khusus yang terbina	unit	10.00
1.1.36	Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa	persen	8.15
1.1.37	Rasio kecukupan rombel terhadap siswa SLB	rasio siswa SLB per rombel	17.99
1.1.38	APM pendidikan khusus (SPM Provinsi)	persen	100
1.2.	Kesehatan		
1.2.1	Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	persen	23.88



1.2.2	Cakupan puskesmas terakreditasi	persen	9.61
1.2.3	Cakupan puskesmas pembantu	per 100.000 penduduk	138.88
1.2.4	Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan	persen	65.00
1.2.5	Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	persen	35.00
1.2.6	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	persen	70.83
1.2.7	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas	persen	70.00
1.2.9	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	43.20
1.2.10	Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS	persen	34.48
1.2.11	Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	persen	90
1.2.12	Persentase PAK yang diawasi	persen	88
1.2.13	Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat	jumlah	20.00
1.2.14	API Malaria	persen	29.46
1.2.15	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	36.40
1.2.16	Tingkat prevalensi DBD	persen	65.17
1.2.17	Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	per 100.000 penduduk	32.23
1.2.18	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1.000 penduduk	9.48
1.2.19	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 1.000 penduduk	36.17
1.2.20	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	persen	25.00
1.2.21	Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa	persen	95.00
1.2.22	Cakupan pelayanan keehatan lembaga mitra di 5 wilayah adat	kabupaten/kota	14.00
1.2.23	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	10.00
1.2.24	Unmet need pelayanan kesehatan	persen	4.49



1.2.26	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	kasus	167.32
1.2.27	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	56.29
1.2.28	Cakupan pelayanan nifas	persen	43.32
1.2.29	Cakupan Kelurahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI)	persen	64.42
1.2.31	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	persen	26.16
1.2.32	Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	persen	0.76
1.2.33	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	persen	25.00
1.2.34	Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 klh	4.49
1.2.35	Rasio posyandu yang aktif	persen	68.88
1.2.36	Cakupan kunjungan bayi (KN1)	persen	51.47
1.2.37	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi		50.95
1.2.38	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	persen	2268.10
1.2.39	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi	persen	42.92
1.2.40	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	65.03
1.2.41	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit	jumlah per tahun	25.00
1.2.42	Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat	unit	6.00
1.2.43	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 30.000 penduduk	28.23
1.2.44	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	3.57
1.2.45	Rasio Dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	29.13
1.2.46	Rasio Tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1.17



1.2.47	Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan	persen	90.00
1.2.48	Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel	persen	95.00
1.2.49	Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani	persen	55.00
1.2.50	Cakupan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	kabupaten per tahun	-
1.2.51	Cakupan jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi	persen	59.36
1.2.52	Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	persen	31.75
1.2.53	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	75,00
1.2.54	Bed Occupancy Ratio (BOR)	rasio	-
1.2.55	Cakupan rumah sakit kelas C	persen	55,17
1.2.56	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional	persen	80.00
1.2.57	Bed Occupancy Ratio (BOR)	rasio	44.46
1.2.58	Cakupan rumah sakit kelas C	persen	55.17
1.2.59	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	75.00
1.2.60	Tingkat kecukupan tenaga medis sesuai dengan standar rumah sakit	persen	72.50
1.2.61	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar	persen	78
1.2.62	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	persen	86
1.2.63	Cakupan masyarakat yang terakses pelayanan sanitasi baik	persen	38.75
1.2.64	Cakupan keluarga terakses air bersih	persen	44.04
1.2.65	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk PON	orang	-
1.2.66	Jumlah Pos dan Peralatan kesehatan yang memenuhi standar nasional untuk pelaksanaan PON	unit	-



1.2.67	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak bencana (SPM Provinsi)		100
1.2.68	Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB (SPM Provinsi)		100
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.3.1.	Pekerjaan Umum		
1.3.1.1	Daerah irigasi provinsi yang berfungsi	hektar	4000
1.3.1.2	Persentas luas lahan yang terlayanii irigasi	persen	90
1.3.1.3	Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi	ton per hektar	57.10
1.3.1.4	Cakupan layanan air minum (SPM Provinsi)	persen	100
1.3.1.5	Terpeliharanya sempadan sumber air	sungai/lokasi	20
1.3.1.6	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	m	70
1.3.1.7	Panjang jalan provinsi yang fungsional	km	20
1.3.1.8	Panjang jembatan yang fungsional	m'	500
1.3.1.9	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	45
1.3.1.10	Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi matap	persen	55
1.3.1.11	Panjang jalan dalam kondisi mantap	km	20
1.3.1.12	Panjang jembatan dalam kondisi mantap	meq	30
1.3.1.13	Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan	persen	75
1.3.1.14	Cakupan keterlayanan air baku	persen	45
1.3.1.15	Cakupan keterlayanan air bersih	persen	47.86
1.3.1.16	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besa	persen	78.08
1.3.1.17	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani	persen	45
1.3.1.18	Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	persen	65
1.3.1.19	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah (SPM Provinsi)	persen	100
1.3.2.	Penataan Ruang		



1.3.2.1	Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	persen	95
1.3.2.2	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen	100
1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
1.4.1	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	persen	75
1.4.2	Cakupan rumah layak huni yang terbangun	unit	3000
1.4.3	Persentase lingkungan permukiman yang sehat	persen	45
1.4.4	Cakupan rumahtangga yang menggunakan air ledeng	per 1000 kk	300
1.4.5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)	persen	100
1.4.6	Persentase penduduk realokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)	persen	100
1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
1.5.1	Jumlah konflik horisontal	kasus	2.00
1.5.2	Cakupan penegakan Perda	persen	100.00
1.5.3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	17.41
1.5.4	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	kasus	1.40
1.5.5	Jumlah konflik horisontal	kasus	2.00
1.5.6	Cakupan penegakan Perda	persen	100.00
1.5.7	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	17.41
1.5.8	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	kasus	1.40
1.5.9	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	persen	60.00
1.5.10	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	rasio	75.36
1.5.11	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	persen	85.00



1.5.12	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	persen	45.00
1.5.13	Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	persen	60.00
1.5.14	Jumlah Pertemuan FKUB per tahun	kali	2.00
1.5.15	Cakupan peserta yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan	orang	250.00
1.5.16	Cakupan fasilitasi Forkompimda	kali	5.00
1.5.17	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	persen	2.50
1.5.18	Persentase penanganan kasus pelanggaran HAM	persen	40.00
1.5.19	Cakupan muatan pendidikan politik dan demokrasi dalam pendidikan menengah	persen	5.00
1.5.20	Persentase lembaga dan partai politik yang dibina	persen	85.00
1.5.21	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	persen	-
1.5.22	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	persen	85.00
1.5.23	Cakupan pertemuan dengan lembaga adat untuk harmonisasi regulasi dan mitra strategis pembangunan	kali	2.00
1.5.24	Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	persen	75
1.5.25	Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi	2
1.5.26	Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	persen	95
1.5.27	Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	persen	90
1.5.28	Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	persen	35
1.5.29	Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana	persen	95
1.5.30	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda (SPM Provinsi)	persen	100
1.6.	Sosial		





1.6.1	Persentase KAT yang memperoleh bantuan sosial	persen	55
1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	persen	45
1.6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	48.23
1.6.4	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan usaha	KK	200
1.6.5	Persentase panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama	persen	85
1.6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	80
1.6.7	Cakupan ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	persen	95
1.6.8	Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan	persen	45
1.6.9	Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	persen	30
1.6.10	Cakupan Kabupaten/Kota yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	kab/kota	21
1.6.11	Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	50
1.6.12	Persentase anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (SPM Provinsi)	persen	100
1.6.13	Cakupan penyandang cacat netra yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (SPM Provinsi)	persen	100
1.6.14	Cakupan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen	75
1.6.15	Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial	dokumen	2
2.	Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
2.1.	Tenaga Kerja		



2.1.1	Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap	persen	95
2.1.2	Frekuensi promosi bursa tenaga kerja	kali	2
2.1.3	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	persen	85
2.1.4	Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	40
2.1.5	Persentase kenaikan UMP	persen	3.5
2.1.6	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	persen	50
2.1.7	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	79.48
2.1.8	Tingkat pengangguran terbuka	persen	2.16
2.1.9	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial	persen	55
2.1.10	Cakupan perusahaan yang menerapkan norma K3	persen	75
2.2.	Pangan		
2.2.1	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	20.00
2.2.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	persen	42.80
2.2.3	Skor PPH	skor	91.81
2.3.	Pertanahan		
2.3.1	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	persen	75
2.3.2	Cakupan tanah adat yang terpetakan	persen	50
2.4.	Lingkungan Hidup		
2.4.1	Cakupan pemantauan dan pengendalian kualitas air	titik sungai	20
2.4.2	Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara	lokasi per kab/kota	50/10
2.4.3	Proporsi degradasi lahan yang tercemar	persen	2.45
2.4.4	Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan	persen	75.00
2.4.5	Cakupan akses informasi LH yang berkualitas	kali	12



2.4.6	Cakupan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan	lokasi	1
2.4.7	Persentase kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi	persen	75
2.4.8	Persentase kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi	persen	35
2.4.9	Persentase kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi	persen	45
2.4.10	Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi	orang	16
2.4.11	Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina	orang	2
2.5.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.5.1	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak	Ada
2.5.2	Cakupan penduduk ber KTP elektronik	persen	81.75
2.5.3	Persentase kepemilikan KK elektronik	persen	42.51
2.5.4	Persentase kepemilikan akta kelahiran	persen	53.28
2.5.5	Persentase pasangan berakte nikah	persen	60
2.6.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.6.1	Cakupan kampung yang diberdayakan dalam bidang TTG	persen	40
2.6.2	Jumlah BUMKAM yang kelola Komoditas Unggulan	unit	10
2.6.3	Persentase kampung tertinggal	persen	77.28
2.6.4	Cakupan kampung mandiri	kampung	4
2.6.5	Cakupan jumlah kampung yang mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat	kampung	10
2.6.6	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi	persen	25
2.7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.7.1	Cakupan sasaran Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina	kelompok per tahun	100
2.7.2	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	persen	2.5
2.7.3	Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	persen	75
2.7.4	Cakupan kampung KB	persen	35



2.7.5	Cakupan tenaga penyuluh KB yang terlatih	orang per tahun	30
2.8.	Perhubungan		
2.8.1	Cakupan terintegrasinya antarmoda angkutan antarwilayah adat	wilayah adat	3
2.8.2	Cakupan pelayanan moda angkutan	persen	35
2.8.3	Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor	jiwa	120
2.8.4	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer	unit	1
2.8.5	Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II	unit	1
2.8.6	Jumlah pelabuhan strategis provinsi	unit	-
2.8.7	Jumlah terminal Tipe B yang fungsional	unit	2
2.8.8	Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara	persen	7.0
2.8.9	Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut	persen	4.0
2.8.10	Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan	persen	75
2.9.	Komunikasi dan Informatika		
2.9.1	Cakupan pemenuhan kebutuhan akses internet dalam pelaksanaan PON	mbps	
2.9.2	Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil hasil pembangunan	kerjasama	2
2.9.3	Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi	persen	20
2.9.4	Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	persen	35
2.9.5	Persentase penduduk yang mengakses internet	persen	19.37
2.9.6	Cakupan SDM Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi	persen	75
2.10.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah		
2.10.1	Cakupan UMKM lokal yang bermitra dalam pelaksanaan PON	unit	
2.10.2	Persentase peningkatan pengembangan UMKM keolahragaan	persen	2.00
2.10.3	Cakupan usaha mikro dan kecil yang mandiri dikelola pengusaha muda	unit	9507.00



2.10.4	Jumlah UMKM yang mandiri dalam kompetisi usaha	unit	30
2.10.5	Tingkat Partisipasi dalam pameran gelar produk KUMKM dalam negeri	kali	8
2.10.6	Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah	kelompok	10
2.10.7	Penyaluran kredit UMKM dari sektor perbankan	Rp milyar	14,056
2.10.8	Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	70
2.11.	Penanaman Modal		
2.11.1	Persentase realisasi investasi	persen	95
2.11.2	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	persen	7.5
2.11.3	Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/ PMDN	persen	30
2.11.4	Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran tingkat nasional/internasional	kali	5
2.11.5	Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasional	persen	70
2.11.6	Lama waktu penerbitan izin investasi	hari	10
2.11.7	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Skor	71.98
2.11.8	Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti	persen	80
2.12.	Kepemudaan dan Olah Raga		
2.12.1	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	organisasi	50.00
2.12.2	Cakupan monitoring atlet berprestasi	persen	95.00
2.12.3	Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun internasional	orang	30.00
2.12.4	Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun	unit	-
2.12.5	Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun	unit	-
2.12.6	Cakupan penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua	persen	-
2.12.7	Cakupan venue berstandar internasional	persen	-



2.12.8	Cakupan penyelesaian Stadion utama untuk mendukung penyelenggaraan PON XX	persen	
2.12.9	Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang	250.00
2.12.10	Jumlah organisasi kepemudaan	organisasi	57.00
2.13.	Statistik		
2.13.1	Cakupan ketersediaan data SIPD	persen	90.00
2.13.2	Jumlah dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	dokumen	5
2.14.	Persandian		
2.14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen	95
2.15.	Kebudayaan		
2.15.1	Jumlah Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu di 5 Wilayah Adat	kurikulum	1.00
2.15.2	Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional	kali	2.00
2.15.3	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	1.00
2.15.4	Frekwensi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional	kali	7.00
2.15.5	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0.00
2.15.6	Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina	persen	50.00
2.15.7	Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua	jumlah	5.00
2.16.	Perpustakaan		
2.16.1	Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	persen	50.00
2.16.2	Persentase pemustaka yang puas terhadap layanan perpustakaan	persen	85.00
2.17.	Kearsipan		
2.17.1	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	persen	90.00



2.17.2	Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan dan kepustakaan	persen	3.00
3.	Layanan Urusan Pilihan		
3.1.	Pariwisata		
3.1.1	Jumlah kunjungan wisatawan PON yang terlayani	ribu orang	-
3.1.2	Destinasi wisata unggulan yang berkembang	destinasi	15
3.1.3	Kawasan wisata yang berstandar internasional	kawasan	1
3.1.4	Cakupan mitra pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif	perusahaan	10
3.1.5	Tingkat partisipasi Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional	orang	50
3.1.6	Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina	pengusaha	10
3.2.	Pertanian		
3.2.1	Cakupan bina kelompok tani	persen	20
3.2.2	NTP peternakan	persen	99.98
3.2.3	NTP tanaman pangan	persen	97.58
3.2.4	Cakupan bina kelompok tani	persen	20
3.2.5	NTP perkebunan	persen	99.98
3.2.6	NTP tanaman pangan	persen	97.58
3.2.7	Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama	ton per hektar	9.50
3.2.8	Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas	persen	-
3.2.9	Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	juta hektar	3.74
3.2.10	Tingkat swasembada pangan	persen	40
3.2.11	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	persen	80
3.2.12	Persentase lahan yang dikembangkan sebagai kawasan agribisnis	persen	45
3.2.13	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui Diklat	persen	2.5
3.2.14	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	kawasan	2





3.2.15	Cakupan teknologi pertanian/perkebunan rakyat tepat guna yang diterapkan	jenis	12
3.2.16	Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	kg per hektar	505.78
3.2.17	Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	40
3.2.18	Frekwensi promosi produk perkebunan	kali	2
3.2.19	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persen	65
3.2.20	Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	Ton	36,240,603
3.2.21	Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	38
3.2.22	Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan	persen	15
3.3.	Kehutanan		
3.3.1	Nilai produksi sumber daya kehutanan	Rp triliun	2,42
3.3.2	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	persen	29.24
3.3.3	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ribu Ha	5,14
3.3.4	Rasio pencapaian restorasi lahan gambut	persen	25
3.3.5	Luasan tutupan kawasan konservasi	Ha	7,755,284
3.3.6	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	persen	45
3.4.	Energi dan Sumber Daya Mineral		
3.4.1	Cakupan pemenuhan air bersih dalam pelaksanaan PON	m3/jam	
3.4.2	Cakupan pemenuhan listrik dalam pelaksanaan PON	persen	
3.4.3	Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan	persen	95
3.4.4	Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina	persen	55
3.4.5	Persentase penambangan ilegal yang ditertibkan	persen	95



3.4.6	Persentase pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	persen	100
3.4.7	Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	persen	60
3.4.8	Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	persen	100
3.4.9	Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi	persen	70
3.4.10	Harga BBM premium dan pertalite yang terkendali	rp per liter	9,500
3.4.11	Tingkat elektrifikasi	persen	58.81
3.4.12	Persentase kampung terakses listrik	persen	56.76
3.4.13	Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	rumahtangga	250.00
3.4.14	Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)	rumahtangga	500
3.4.15	Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	kampung	100
3.5.	Perdagangan		
3.5.1	Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap ibu kota provinsi	persen rata-rata kab/kota	189.26
3.5.2	Cakupan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	persen	85
3.5.3	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	persen	100
3.5.4	Nilai ekspor Non Migas Papua	Rp milyar	2,805.86
3.5.5	Cakupan pasar rakyat yang fungsional	unit	20
3.5.6	Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	persen	3.50
3.5.7	Rata-rata margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok	persen	175
3.5.8	Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumahtangga	persen	14.76
3.6.	Perindustrian		
3.6.1	Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat	unit per tahun	10
3.6.2	Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina	unit usaha	50



3.6.3	Kawasan sentra industri rakyat yang berfungsi	kawasan	1
3.7.	Kelautan dan Perikanan		
3.7.1	Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	persen	1.80
3.7.2	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi	kab/kota	13
3.7.3	Produksi perikanan budidaya	ton	143.08
3.7.4	Produksi perikanan tangkap	ton	7,897.26
3.7.5	Nilai ekspor produk perikanan	Rp. juta	47,724.97
3.7.6	Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan	Rp. juta	7783.86
3.7.7	Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi	persen	4
3.7.8	Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	persen	2.25
3.7.9	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	75
4.	Layanan Penunjang Urusan		
4.1.	Perencanaan Pembangunan		
4.1.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	
4.1.2	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	jumlah kab/kota	18
4.1.3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	95.00
4.1.4	Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	95
4.1.5	Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten	persen	100
4.1.6	Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	persen	100.00
4.1.7	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu	tepat/tidak tepat	Ya
4.1.8	Penyusunan LKPJ tepat Waktu	tepat/tidak tepat	Ya
4.1.9	Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua	persen	100



4.1.10	Cakupan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se Papua	persen	100
4.1.11	Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	persen	95
4.1.12	Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	persen	90
4.1.13	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	persen	70.71
4.1.14	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	persen	70.71
4.1.15	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	persen	70.71
4.1.16	Jumlah kemitraan yang dilaksanakan untuk peningkatan perencanaan pembangunan daerah	jumlah	4
4.1.17	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	persen	90
4.1.18	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen	100
4.2.	Keuangan		
4.2.1	Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus	persen	100
4.2.2	Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik	dokumen	-
4.2.3	Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus	persen	100
4.2.4	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya
4.2.5	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	100
4.2.6	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	40
4.2.7	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	tepat/tidak tepat	Ya
4.2.8	Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya



4.2.9	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas	persen	100
4.2.10	Cakupan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua	persen	100
4.2.11	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya
4.2.12	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	100
4.2.13	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	40
4.2.14	Opini Pemeriksaan BPK	Opini	WTP
4.2.15	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	ya/tidak	Ya
4.2.16	Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya
4.2.17	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	persen	3.71
4.2.18	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah	persen	12.70
4.2.19	Efektifitas pendapatan asli daerah	persen	2.79
4.2.20	Prosentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah	jenis	3
4.2.21	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persen	26
4.3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan		
4.3.1	Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	orang	100.00
4.3.2	Jenis Diklat yang terakreditasi A	jumlah	5
4.3.3	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	87
4.3.4	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	85
4.3.5	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	80
4.3.6	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	orang	100



4.4.	Penelitian dan pengembangan		
4.4.1	Jumlah hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	jenis per tahun	8
4.4.2	Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	persen	55
4.5	Penerapan SIDA		
4.5.1	Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	jenis	1
4.6.	Pengawasan		
4.6.1	Persentase kasus pelanggaran administrasi yang tertangani	persen	90.00
4.6.2	Cakupan pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	30
4.6.3	Cakupan tenaga pemeriksa yang telah memiliki sertifikat kompetensi	orang per tahun	2
4.6.4	Cakupan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	persen	100
4.6.5	Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	persen	45
4.6.6	Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	persen	35
4.6.7	Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua	persen	50
4.7.	Sekretariat Dewan		
4.7.1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	Ada
4.7.2	Terintegrasi program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	Ada
1.	Layanan Urusan Wajib Dasar		
1.1.	Pendidikan		



1.1.1	Persentase OAP usia dini yang mengikuti PAUD	persen	51.48
1.1.2	Rasio OAP yang mengikuti kelas kecil	persen	96.02
1.1.3	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SD	persen	1.07
1.1.4	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SMP	persen	0.37
1.1.5	Persentase siswa SMA/SMK OAP yang lulus dengan nilai UAN di atas rata-rata	persen	52.44
1.1.6	Cakupan siswa lulusan OAP yang diterima di PTN	per 1000 siswa OAP	200
1.1.7	Angka Melek Huruf penduduk OAP	persen	55.84
1.1.8	Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan beasiswa lulus dengan IPK memuaskan	persen	80.00
1.1.9	Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	persen	45.92
1.1.10	Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat	sekolah per tahun	2.00
1.1.11	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	70.19
1.2.	Kesehatan		
1.2.1	Persentase ibu hamil (OAP) yang rutin melakukan pemeriksaan K3	persen	35.57
1.2.2	Persentase bayi OAP baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan	persen	70.93
1.2.3	Cakupan balita OAP yang bergizi baik	persen	60.86
1.2.4	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	persen	90.00
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.3.1	Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni	persen	37.22
1.4.	Sosial		
1.4.1	Cakupan keluarga OAP yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	per 1000 keluarga	250
1.5.	Pangan		
1.5.1	Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang	persen	7.07
1.6.	Kepemudaan dan Olah Raga		





1.6.1	Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	35.00
1.6.2	Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	35
1.7.	Kebudayaan		
1.7.1	Cakupan partisipasi Papua dalam festival seni dan budaya tingkat nasional maupun internasional	kali	1.00
1.8.	Kelautan dan Perikanan		
1.8.1	Persentase nelayan OAP yang memiliki Kartu Nelayan	persen	588.95



## BAB VIII

### PENUTUP

Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Ranwal RKPD tahun 2022 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2022, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2022. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2022, mengacu pada isu-isu strategis serta melalui pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Papua dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2022, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2022, Ranwal RKPD Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, hasil kesepakatan Bersama dengan DPRD Provinsi Papua;
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat RENJA- Perangkat Daerah masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2022;
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Perangkat Daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik;



5. Secara proaktif, BAPPEDA Provinsi Papua wajib melakukan monitoring pengkajian pelaksanaan Ranwal RKPD Tahun 2022 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing PD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur;
6. Pada akhir tahun anggaran 2022, setiap kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Ranwal RKPD Tahun 2022, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan BAPPEDA Provinsi Papua;
7. RKPD Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RKPD Provinsi Papua Tahun 2022 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Provinsi Papua Tahun 2022 ini dengan sebaik- baiknya.

Jayapura, \_\_\_\_\_ 2021

**GUBERNUR PAPUA**  
**TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

linan sesuai dengan aslinya  
PALA BIRO HUKUM,  
  
**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH**  
NIP. 19661202 198603 1 002



**LAMP IRAN**

**Tabel 4.3.**  
**Telaah POKIR DPRP Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022**

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Kerja Perangkat Daerah Dan Pendanaannya**  
**Tahun Anggaran 2022**

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1																
1	01						1,367,944,659,599							0		
1	01	01					1,197,702,659,649							0		
1	01	01	1.01				8,244,607,535							0		
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aplikasi Informasi Pendidikan Online yang terfasilitasi Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dokumen Laporan Bulanan Dokumen Matrik Cascading Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dokumen Rencana Kerja (Renja) DPPAD Dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPAD Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Peserta Kab/Kota yang terfasilitasi Perencanaan Terpadu (Rendu)				5 Modul 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 58 orang	3,466,555,595	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		5 Modul 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 58 orang		Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Dokumen DPA Perubahan				1 Dokumen 1 Dokumen	312,532,840			1 Dokumen 1 Dokumen		Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Kinerja (LKj) DPPAD Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DPPAD				1 Dokumen 1 Dokumen	195,000,000			1 Dokumen 1 Dokumen		Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Pengendali Kegiatan Dokumen Grand Design Pendidikan Dokumen Pengadaan Langsung Barang dan Jasa Dokumen Profil Pendidikan Dokumen Statistik Pendidikan				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	4,270,519,100					1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
<b>1 01 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>1,138,082,552,114</b>							<b>0</b>	
1 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN DPPAD yang terbayar				12 Bulan	1,137,532,552,114		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama			1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ASN yang terfasilitasi				12 Bulan	200,000,000		Dana Otonomi Khusus			1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan dokumen keuangan yang diverifikasi				12 Bulan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Dokumen	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
<b>1 01 01 1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>1,000,000,000</b>							<b>0</b>	
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah asset yang terdata				12 Bulan	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
<b>1 01 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>1,254,000,000</b>							<b>0</b>	
1 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang terfasilitasi				370 orang	444,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	370 orang	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang terdata				270 orang	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	270 orang	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	kinerja pegawai yang dievaluasi				12 Bulan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan				15 orang	260,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		15 orang	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>5,502,500,000</b>							<b>0</b>	
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				30 buah	179,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		30 buah	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia				50 Jenis	355,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		50 Jenis	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan dokumen				10 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		10 Dokumen	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang diselenggarakan				12 Bulan	320,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 Bulan	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Pendidikan bagi anak-anak dampak zat aditif (anak aibon) Jumlah Rapat Koordinasi SKPD yang diselenggarakan				500 orang 12 Bulan	2,498,500,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		500 orang 12 Bulan	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kerjasama Media yang terfasilitasi				12 Bulan	2,000,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 Bulan	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
<b>1.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>35,450,000,000</b>							<b>0</b>	
1.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	terfasilitanya ganti rugi lahan sekolah kepada pemilik hak ulayat				20 sekolah	35,000,000,000						20 sekolah	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rumah Dinas Jabatan yang terbayar				1 Tahun	450,000,000						1 Tahun	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
<b>1.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>2,200,000,000</b>							<b>0</b>	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jaringan telekomunikasi yang terpenuhi Kebutuhan Air yang terpenuhi Kebutuhan Listrik yang terpenuhi				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	700,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor (Cleanning Service) yang terfasilitasi jasa Pengamanan Kantor (Satpam) yang terfasilitasi				12 Bulan 12 Bulan	1,500,000,000					1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 Bulan 12 Bulan	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
<b>1 01 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>5,469,000,000</b>								<b>0</b>	
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas yang terfasilitasi				12 Bulan	269,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 Bulan	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang mendapatkan perawatan				50 Unit	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		50 Unit	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana gedung kantor yang menadapatkan pemeliharaan				12 Bulan	5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 Bulan	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
<b>1 01 01 1.13</b>	<b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>						<b>500,000,000</b>								<b>0</b>	
1 01 01 1.13 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						500,000,000								0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
<b>1 01 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>						<b>167,641,999,950</b>								<b>0</b>	
<b>1 01 02 1.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>						<b>102,078,480,000</b>								<b>0</b>	
1 01 02 1.01 01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Gedung Sekolah Baru yang terbangun Jumlah Sekolah berpola arsama SD-SMK				4 Sekolah 1 Sekolah			Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nduga, Mbuwa, Mbuwa					4 Sekolah 1 Sekolah	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 02 1.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	<p>JUmlah ruang kelas yang terbangun di Asmat</p> <p>JUmlah ruang kelas yang terbangun di Borme</p> <p>JUmlah ruang kelas yang terbangun di Kep. Yapen</p> <p>JUmlah ruang kelas yang terbangun di Kiwirok</p> <p>JUmlah ruang kelas yang terbangun di Nduga</p>				<p>20 Ruang</p> <p>3 Ruang</p> <p>19 Ruang</p> <p>3 Ruang</p> <p>3 Ruang</p>	9,000,000,000	<p>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p> <p>Kab. Pegunungan Bintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p> <p>Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p> <p>Kab. Nduga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p>	Dana Otonomi Khusus	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		<p>20 Ruang</p> <p>3 Ruang</p> <p>19 Ruang</p> <p>3 Ruang</p> <p>3 Ruang</p>	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rumah Guru yang terbangun di Agats Jumlah Rumah Guru yang terbangun di Mappi Jumlah Rumah Guru yang terbangun di Nduga Jumlah Rumah Guru yang terbangun di Tolikara Jumlah Rumah Guru yang terbangun di Yahukimo Jumlah Rumah Guru yang terbangun di Yalimo				3 Unit 5 Unit 3 Unit 4 Unit 2 Unit 2 Unit	22,500,000,000	Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Yahukimo, Anggruk, Semua Kelurahan Kab. Tolikara, Karubaga, Semua Kelurahan Kab. Tolikara, Nelawi, Semua Kelurahan Kab. Tolikara, Kuari, Semua Kelurahan Kab. Tolikara, Kai, Semua Kelurahan Kab. Asmat, Agats, Semua Kelurahan Kab. Nduga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Yalimo, Elelim, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		3 Unit 5 Unit 3 Unit 4 Unit 2 Unit 2 Unit		Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.01.09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Laboratorium IPA yang terbangun				5 Sekolah	2,000,000,000	Kab. Tolikara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		5 Sekolah		Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang terbangun				5 Sekolah		Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		5 Sekolah		Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.01.13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah asrama putri yang terbangun				2 Sekolah		Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		2 Sekolah		Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.01 14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Lapangan Upaca 50 x 50m2 yang terbangun Jumlah sarana, prasarana dan utiliti yang terbangun Terbangunan Toilet/Jamban SIsua dan Guru Terbangunnya Pagar SMA Unggulan Dawai				2 Sekolah 7 paket 16 Unit 700 meter	14,490,000,000	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Yahukimo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tolikara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mappi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nduga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	2 Sekolah 7 paket 16 Unit 700 meter	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah		





**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
																				Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
																								Nasional					Daerah
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas SMA di Kepulauan Yapen yang direhab Jumlah ruang kelas SMAN 1 Atsy yang direhab Jumlah ruang kelas yang direhab Jumlah ruang kelas yang direhab					9 Ruang 3 Ruang 4 Ruang 7 ruang	0	Kab. Paniai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pegunungan Bintang, Oksibil, Semua Kelurahan Kab. Mappi, Citak-Mitak, Semua Kelurahan Kab. Asmat, Agats, Semua Kelurahan Kab. Asmat, Atsj, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		9 Ruang 3 Ruang 4 Ruang 7 ruang	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah									
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru SMA Dawai yang direhab					1 Ruang	0	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah									
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Lapangan Upacara yang direhab					2 Sekolah	0	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		2 Sekolah	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah									
1	01	02	1.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru SMA Dawai yang direhab					3 rumah	0	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		3 rumah	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah									
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Buku Kitab yang terfasilitasi di Sekolah Jumlah Buku Pelajaran yang terfasilitasi di perpustakaan					200 Buku 1 paket		Kab. Tolikara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		200 Buku 1 paket	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah									

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.1.01.40	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah laptop yang diadakan				170 unit	8,300,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tolikara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		170 unit		Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pendataan calon Peserta AKM SMA/MA/SMTK/SMAK Penulisan Ijazah SMA Peserta Rakor dan Sosialisasi AN/AKM yang terfasilitasi Proktor dan Teknisi Sekolah yang dilatih				21545 Siswa 20468 Lembar 280 orang 250 Sekolah	1,500,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		21545 Siswa 20468 Lembar 280 orang 250 Sekolah		Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Sekolah yang terfasilitasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) Persentase siswa SMP/ sederajat yang melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK/ Sederajat di Kepulauan Yapen				150 Sekolah 90 persen	1,000,000,000	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		150 Sekolah 90 persen		Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah sekolah di Kep.Yapen yang menerapkan kebijakan Merdeka Belajar Jumlah Siswa SMA mengikuti Kemah Penguatan Pendidikan Karakter Siswa SMA melalui Kepramukaan Jumlah Siswa SMA mengikuti Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tk Provinsi dan Nasional Jumlah Siswa SMA mengikuti Lomba Debat Bahasa Inggris dan Indonesia Tk Provinsi dan Nasional Jumlah Siswa SMA mengikuti Lomba FL2SN Tk Provinsi dan Nasional Jumlah Siswa SMA mengikuti Lomba Karya Ilmiah Tk Provinsi dan Nasional Jumlah Siswa SMA mengikuti Lomba Kompetisi Sains (KSN) Tk Provinsi dan Nasional Jumlah Siswa SMA mengikuti Lomba O2SN Tk Provinsi dan Nasional				9 Sekolah 100 Siswa 100 Siswa 200 Siswa 100 Siswa 100 Siswa 269 Siswa 200 Siswa	2,000,000,000	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus			9 Sekolah 100 Siswa 100 Siswa 200 Siswa 100 Siswa 100 Siswa 269 Siswa 200 Siswa		Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	
1 01 02 1.01 50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	JUmlah guru kontrak SMA yang terfasilitasi pembayaran				279 orang	12,588,480,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		279 orang		Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penerapan merdeka belajar bagi guru di Keputalan Yapen				9 Sekolah	0	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		9 Sekolah		Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menyusun RKAS Jumlah SMA mengembangkan Media Pembelajaran TIK				150 Sekolah 150 Sekolah	1,200,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		150 Sekolah 150 Sekolah		Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Dana Bos Afirmasi yang tersalurkan ke Sekolah Jumlah Dana Bos Kinerja yang tersalurkan ke Sekolah Jumlah Dana Bos Regular yang tersalurkan ke Sekolah				50 Sekolah 50 Sekolah 229 Sekolah	0		DAK Non Fisik - BOS Regular DAK Non Fisik - BOS Afirmasi DAK Non Fisik - BOS Kinerja		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		50 Sekolah 50 Sekolah 229 Sekolah	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>							<b>28,645,440,000</b>						<b>0</b>	
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Gedung Sekolah Baru yang terbangun				4 Sekolah	0		Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		4 Sekolah	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah RUang Sekolah SMK yang terbangun Jumlah RUang Sekolah SMK yang terbangun di Asmat				5 Unit 12 Unit		5,700,000,000	Kab. Tolikara, Kai, Semua Kelurahan Kab. Mappi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		5 Unit 12 Unit	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Terbangunnya Ruang Prakter Siswa (RPS) Otomotif SMKN 1 Mappi Terbangunnya Ruang Prakter Siswa (RPS) Pertukangan SMKN 1 Mappi				1 Ruang 1 Ruang	0		Kab. Mappi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Ruang 1 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang terbangun				1 Sekolah	0		Kab. Tolikara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Sekolah	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.02.09	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah asrama putri yang terbangun				2 Sekolah	0		Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		2 Sekolah	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah bantuan sarpras yang diadakan Jumlah Lapangan Upaca 50 x 50m2 yang terbangun Terbangunnya Toilet/Jamban Siswa dan Guru di Kenyam				1 paket 2500 m2 4 unit	1,000,000,000	Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Asmat, Agats, Semua Kelurahan Kab. Nduga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 paket 2500 m2 4 unit	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.02.13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Guru yang terbangun di Asmat				10 Unit	0	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		10 Unit	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas SMK di Kep. Yapen yang direhab Jumlah Ruang Kelas SMK yang direhab				7 Ruang 1 Ruang	0	Kab. Merauke, Tanah Miring, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		7 Ruang 1 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.02.20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang terbangun				1 Sekolah	0	Kab. Asmat, Agats, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Sekolah	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.02.22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Asrama SMK Kainui yang direhab				2 Ruang	0	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		2 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	JUmlah Buku Pelajaran yang terfasilitasi di perpustakaan				300 buku	1,000,000,000	Kab. Tolikara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		300 buku	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.1.02.32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah perangkat komputer yang diadakan				50 unit	3,000,000,000	Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Puncak Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		50 unit	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pendataan calon Peserta AKM SMK Penulisan Ijazah SMK Peserta Rakor dan Sosialisasi AKM yang terfasilitasi Proktor dan Teknisi Sekolah yang dilatih				925 Siswa 925 Lembar 150 orang 140 Sekolah	1,500,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		925 Siswa 925 Lembar 150 orang 140 Sekolah	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa mengikuti Lomba Debat Bahasa (Indonesia, Inggris, Mandarin dan Jerman) Tk Provinsi Jumlah siswa mengikuti Lomba FLS2N Tk Provinsi Jumlah siswa mengikuti Lomba Ketrampilan Siswa (LKS) Tk Provinsi Jumlah siswa mengikuti Lomba O2SN Tk Provinsi				50 Siswa 50 Siswa 100 Siswa 50 Siswa	2,000,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		50 Siswa 50 Siswa 100 Siswa 50 Siswa	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru Kontrak SMK yang terfasilitasi Pembayaran				212 orang	9,565,440,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		212 orang	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru SMK mengikuti pelatihan penyusunan RPP Jumlah Sekolah terfasilitasi penyusunan RKAS Jumlah Siswa pada Bidang Ketrampilan Industri Pendidikan Vokasi SMK				65 orang 138 sekolah 30 Siswa 138 Sekolah	4,880,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		65 orang 138 sekolah 30 Siswa 138 Sekolah	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dana Bos Regular yang tersalurkan ke Sekolah				137 Sekolah	0		DAK Non Fisik - BOS Regular		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		137 Sekolah	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
<b>1.01.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>						<b>36,918,079,950</b>							<b>0</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
																					Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
																					Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif						
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas SLB di Kepulauan Yapen yang direhab				1 Ruang	0	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah											
1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah buku bahasa Yali yang terfasilitasi Jumlah buku sekolah Alam Literasi Byek yang terfasilitasi			1 paket 1 paket	2,000,000,000		Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Yalimo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 paket 1 paket	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah											
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Binaan PKK Provinsi Papua yang terfasilitasi			5 Lembaga	2,500,000,000							5 Lembaga	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah											
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa ADEM OAP melanjutkan SMA/SMK di Pulau Jawa dan Bali Jumlah Siswa ADIK OAP melanjutkan ke Perguruan Tinggi di 32 Provinsi Jumlah siswa Asrama SMAN 3 Jayapura yang terfasilitasi kebutuhan makanan dan minuman Jumlah siswa Asrama SMANKOR Jayapura yang terfasilitasi kebutuhan makanan dan minuman			350 siswa 650 siswa 400 siswa 200 siswa	8,000,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus				350 siswa 650 siswa 400 siswa 200 siswa	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah											
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Ijazah SLB dan Paket A, B dan C Pelatihan Help Desk AN/AKM Pendataan Calon Siswa AKM yang terfasilitasi Peserta Rakor dan Sosialisasi AKM yang terfasilitasi			15 Lembar 195 Orang 65 Siswa 135 Orang	2,000,000,000			Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		15 Lembar 195 Orang 65 Siswa 135 Orang	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah											



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) mengikuti lomba FLS2N Tingkat Provinsi Papua dan Nasional Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) mengikuti lomba Gebyar Tingkat Provinsi Papua dan Nasional Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) mengikuti lomba LKS Tingkat Provinsi Papua dan Nasional Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) mengikuti lomba O2SN Tingkat Provinsi Papua dan Nasional				100 Siswa 56 Siswa 100 Siswa 85 Siswa	1,000,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		100 Siswa 56 Siswa 100 Siswa 85 Siswa	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 01 02 1.03 49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah guru Kontrak SLB yang terfasilitasi pembayaran				109 orang	4,918,079,950		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		109 orang	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Tutor/Mentor PBA yang mendapatkan pelatihan				150	13,500,000,000	Kab. Yahukimo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Yalimo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		150	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Dukungan Penuntasan Buta Aksara				12 Lembaga	3,000,000,000						12 Lembaga	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 01 02 1.03 52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Dana Bos yang tersalurkan ke Sekolah				13 Sekolah	0		DAK Non Fisik - BOS Reguler		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		13 Sekolah	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 01 03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>0</b>	
1 01 03 1.01	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>0</b>	
1 01 03 1.01 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah yang mendapat pelatihan kurikulum guru dan kepala sekolah				150 sekolah	500,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		150 sekolah	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 03 1.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah orang yang terfasilitasi kurikulum praktek kerja industri				86 orang	700,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		86 orang	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 01 04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>0</b>	
1 01 04 1.01	<b>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>0</b>	
1 01 04 1.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah kepala sekolah wilayah adat yang mengikuti MKKS				58 orang	1,200,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		58 orang	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
1 01 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>						<b>200,000,000</b>							<b>0</b>	
1 01 05 1.01	<b>Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>						<b>200,000,000</b>							<b>0</b>	
1 01 05 1.01 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah mendapatkan evaluasi dan perizinan				20 sekolah	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		20 sekolah	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 23	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>							<b>2,300,000,000</b>						<b>0</b>	
2 23 02	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>						<b>2,300,000,000</b>							<b>0</b>	
2 23 02 1.01	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>						<b>1,700,000,000</b>							<b>0</b>	
2 23 02 1.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Koleksi Pustaka Digital yang disediakan Perpustakaan Umum Daerah Provinsi Papua				2000 buku	500,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		2000 buku	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2 23 02 1.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sarana Perpustakaan yang diadakan (DAK)				118 unit	500,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				118 unit	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 02 1.01 08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah buku yang terseleksi Jumlah layanan keliling yang diselenggarakan umlah layanan Sirkulasi Taman Baca				3500 buku 192 kali 96 kali	700,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		3500 buku 192 kali 96 kali	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2 23 02 1.02	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>						<b>600,000,000</b>							<b>0</b>	
2 23 02 1.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah buku yang disediakan				7000 buku	300,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		7000 buku	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2 23 02 1.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	umlah Kelompok Masyarakat yang terfasilitasi				5 Kelompok	300,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		5 Kelompok	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2 24	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>							<b>1,645,000,000</b>						<b>270,000,000</b>	
2 24 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>						<b>1,420,000,000</b>							<b>270,000,000</b>	
2 24 02 1.01	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>						<b>150,000,000</b>							<b>0</b>	
2 24 02 1.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip yang dikelola dan diberi penilaian				1500 boks	150,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1500 boks	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2 24 02 1.02	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>						<b>270,000,000</b>							<b>270,000,000</b>	
2 24 02 1.02 02	Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah dokumen yang dilakukan penyelamatan				100 Dokumen	270,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		100 Dokumen	270,000,000	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2 24 02 1.03	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b>						<b>1,000,000,000</b>							<b>0</b>	
2 24 02 1.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah orang yang tefasilitasi sistem aplikasi kearsipan daerah				10 orang	100,000,000		Dana Otonomi Khusus				10 orang	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2 24 02 1.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang terfasilitasi unit kearsipan umlah lembaga yang mendapat pembinaan kearsipan				35 Orang 61 Lembaga	900,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		35 Orang 61 Lembaga	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						225,000,000						0		
2 24 03 1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						225,000,000						0		
2 24 03 1.01 02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	umlah arsip inaktif yang dilakukan penilaian dan penyusutan				5000 Dokumen	225,000,000		Dana Otonomi Khusus			5000 Dokumen	0	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>273,844,141,104</b>						<b>313,335,021,519</b>		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						63,337,491,892						64,386,241,420		
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						54,516,241,420						54,536,241,420		
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji pegawai yang di bayar				374 Orang	54,416,241,420	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	374 Orang	54,416,241,420	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun				4 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	4 Dokumen	120,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						541,500,000						600,000,000		
1 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan				364 Stell	541,500,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	364 Stell	600,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2,441,436,072						3,200,000,000		
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik kantor yang disediakan				1 Tahun	90,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Tahun	100,000,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan				1 Tahun	292,800,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Tahun	300,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah alat tulis kantor Jumlah dokumen cetakan yang diadakan Jumlah dokumen yang disediakan				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	700,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1,200,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang di sediakan Jumlah bahan bacaan surat kabar yang di adakan Jumlah jasa yang di publikasikan				10 Jenis 30 buah 35 buah	344,150,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		10 Jenis 30 buah 35 buah	400,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jasa angkut sampah yang di bayar				1 Tahun	14,486,072	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun	200,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan				1 Tahun	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>5,507,094,400</b>							<b>5,680,000,000</b>	
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						70,001,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			80,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Airs, listrik telepon yang di bayar				12 Bulan	2,105,390,500	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 Bulan	2,200,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang di service				1 Tahun	340,190,900	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Tahun	400,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor Non PNS cleaning service, satpam yang dibayar Jumlah jumlah makan minum Jumlah relawan kesehatan yang dibayar Jumlah solar yang diadakan				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	2,991,512,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	3,000,000,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						331,220,000						370,000,000		
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang diperbaiki				40 Unit	231,220,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		40 Unit	250,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pendataan dan pelaporan aset				1 Tahun	100,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun	120,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						176,592,849,212						214,552,380,099		
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						89,297,444,914						115,405,894,787		
1 02 02 1.01 01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah rumah sakit milik fakultas kedokteran yang di bangun dan di kembangkan Jumlah rumah sakit pratama yang dibangun dan dikembangkan Jumlah Rumah Sakit Preventif Yang di Bangun Jumlah Rumah Sakit Rujukan Regional Yang di Bangun Jumlah rumah sakit vertikal yang dibangun				1 Unit 2 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Unit	30,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Unit 2 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Unit	30,000,000,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah balai laboratorium kesehatan daerah yang di bangun di lima wilayah adat Jumlah fakultas kedokteran, fkm uncen yang dibangun Jumlah fasilitas balai pelatihan tenaga kesehatan yang di bangun di lima wilayah adat Jumlah fasilitas sarana prasarana sekolah anlis kesehatan jayapura yang dibangun Jumlah rumah sakit milik fakultas kedokteran yang dibangun Jumlah rumah sakit rujukan regional yang dibangun Jumlah sarana prasarana D3 Analis Kesehata, Farmasi dan kebidanana yang dibangun				5 Unit 1 Tahun 5 Unit 1 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Tahun	40,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		5 Unit 1 Tahun 5 Unit 1 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Tahun	40,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.01.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah balai fasilitas balai pelatihan tenaga kesehatan yang dibangun di lima regional Jumlah Gedung Kantor yang di bangun (BALATKES) Jumlah Laboratorium kesehatan Daerah yang di bangun di lima wilayah adat Jumlah sekolah menengah analis kesehatan Jayapura Yang di Bangun dan di tingkatkan				5 Regional 1 M2 5 Unit 1 Unit	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		5 Regional 1 M2 5 Unit 1 Unit	25,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.01.05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah jabatan yang disewa				1 Unit	100,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Unit	200,000,000	Dinas Kesehatan	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kedokteran yang diadakan				1 Set	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Set	1,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah bahan kimia reagensia yang di adakan labkesda Jumlah bahan lab habis pakai yang diadakan (labkesda ) Jumlah bahan pemantapan mutu yang diadakan Jumlah bahan pemeriksaan hematologi yang diadakan Labkesda Jumlah bahan pemeriksaan kimia klinik yang diadakan Jumlah bahan pemeriksaan mikrobiologi yang diadakan Jumlah bahan pemeriksaan viraload yang diadakan labkesda Jumlah bahan reagensia dan alat laboratorium praktek smk kesehatan yang diadakan Jumlah pemeriksaan TBC yang diadakan				1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set	4,450,304,199	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set	5,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.01.20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasyankes Lokus Telemedicine				29 kabupaten/kota	275,540,715	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	29 kabupaten/kota	303,094,787	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	alkes dan PKRT di sarana apotik toko alkes dan tempat perbelanjaan yang memenuhi syarat				12 lokasi	159,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	12 lokasi	359,600,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat dan Vaksin yang distribusi ke sarana fasilitas kesehatan lainnya Jumlah Paket Obat yang diadakan Jumlah Pemeliharaan Gudang Obat serta monev Jumlah Petugas yang mendapatkan bimbingan teknis				29 kabupaten/kota 4 Pkt 1 Tahun 26 Orang	12,312,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		29 kabupaten/kota 4 Pkt 1 Tahun 26 Orang	13,543,200,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>						<b>84,693,851,038</b>							<b>96,250,811,150</b>	
1 02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Daerah krisis masalah kesehatan yang di tangulangi Jumlah pengiriman barang atau dokumen Jumlah tenaga kontrak atau relawan krisis kesehatan yang dibayar				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	5,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	6,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Tertanggulangnya Kejadian luarbiasa di Daerah Bermasalah/Bencana				1 Tahun	1,000,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Tahun	1,100,000,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	<p>Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan</p> <p>Jumlah Alat, Bahan dan Obat-obatan KIA yang diadakan</p> <p>Jumlah Balita OAP yang diberikan pelayanan</p> <p>Jumlah ibu hamil keluarga kurang mampu yang dirawat</p> <p>Jumlah Kab/Kota Yang Disupervisi Fasilitatif KIA</p> <p>jumlah kabupaten/kota yang dilakukan monev program ibu</p> <p>Jumlah Kartu Ibu , Buku KIA, Buku Kohort/register yang diadakan</p> <p>Jumlah Laporan Monev</p> <p>Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Pengelola KIA</p> <p>Jumlah Petolongan Persalinan</p> <p>Jumlah Tenaga Terlatih Penerapan MTBS</p> <p>Jumlah Tenaga Yang Dilatih</p> <p>Kegawatdaruratan Maternal Neonatal</p> <p>Monitoring Evaluasi Bimbingan Teknis dan Validasi Data dari Pengelola Program Provinsi ke Kab/Kota</p> <p>Petugas Terlatih SDIDTK dan Jumlah APE</p>				65 persen 10 alat 100 orang 29 orang kali 10 kab 5 kab 300 buku 29 laporan 60 orang 50 orang kali 20 orang 20 orang 5 laporan 20 orang paket	846,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		65 persen 10 alat 100 orang 29 orang kali 10 kab 5 kab 300 buku 29 laporan 60 orang 50 orang kali 20 orang 20 orang 5 laporan 20 orang paket	1,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	<p>Jumlah Lansia KIT Yang Diadakan</p> <p>Jumlah Laporan Monev</p>				56 unit 29 laporan	149,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		56 unit 29 laporan	200,000,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balita Stunting Jumlah Balita Yang Mendapatkan PMT Jumlah Ibu Yang Mendapat PMT Jumlah Kabupaten Yang Ikut Pertemuan Pencatatan dan Pelaporan Program GiziGizi Jumlah Laporan Perbaikan Gizi Masyarakat Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Surveilans Kewaspadaan Pangan Gizi Terlaksananya Sosialisasi Program 1000 HAri Pertama Kehidupan				27 persen 1000 orang 710000 orang 29 Kab/Kota 29 laporan 80 orang kali 15 Kabupaten	31,477,579,303	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		27 persen 1000 orang 710000 orang 29 Kab/Kota 29 laporan 80 orang kali 15 Kabupaten	35,000,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dibina Upaya Kesehatan Kerja Jumlah Petugas Dilatih Kesehatan Kerja Jumlah Petugas Dilatih Pembinaan Kebugaran Jasmani Jumlah Pos UKK Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pembinaan Kebugaran Jasmani bagi Kelompok Masyarakat Tersedia Peralatan Penunjang Kesehatan Kerja dan Olahraga				29 Kabupaten/Kota 30 Orang 29 Orang 40 Pos 100 Puskesmas 10 Unit	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		29 Kabupaten/Kota 30 Orang 29 Orang 40 Pos 100 Puskesmas 10 Unit	2,200,000,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan TPM yang Diawasi dan Memenuhi Syarat												
						Cakupan TTU yang Diawasi dan Memenuhi Syarat												
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan KKS												
						Jumlah Kampung STBM dan SBS												
						Jumlah Paket Kesling Kit	60 Persen							60 Persen				
						Jumlah Paket Peralatan Pemeriksaan Makanan dan Air Minum	40 Persen							40 Persen				
						Jumlah Paket Reagensia	5 Kabupaten/Kota							5 Kabupaten/Kota				
						Jumlah Pengelola Limbah Rumah Sakit	50 Kampung							50 Kampung				
						Jumlah Penjamah Makanan Dilatih	5 Paket							5 Paket				
						Jumlah Petugas Dilatih Pengawasan TPM	10 Paket							10 Paket				
						Jumlah Rumah Sakit Mengelola Limbah	8 Paket							8 Paket				
						Jumlah Rumah Sakit yang Mengelola Limbah Sesuai Standar	20 Orang							20 Orang				
						Jumlah Sarana TTU Memenuhi Syarat	50 Orang	1,700,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		50 Orang	6,000,000,000		Dinas Kesehatan	
						Jumlah Tim Penilai dalam Verifikasi KKS	30 Orang							30 Orang				
						Jumlah TPM yang Memenuhi Syarat	30 Orang							30 Orang				
						Prosentase Kualitas Air yang Memenuhi Syarat Kesehatan	25 RS							25 RS				
							40 RS							40 RS				
							50 Sarana							50 Sarana				
							5 Orang							5 Orang				
							100 TPM							100 TPM				
							40 Persen							40 Persen				

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokter yang mengikuti pelatihan akupresur (Yankestrad) Jumlah dokumen penilaian TOGA (Yankestrad) Jumlah laporan kegiatan sentra P3T (Yankestrad) Jumlah Laporan SP3T (Yankestrad) jumlah orang yang mengikuti pertemuan (Yankestrad) jumlah orang yang mengikuti pertemuan (Yankestrad) Jumlah penggunaan obat tradisional yang dikembangkan di masyarakat (Yankestrad) Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Data Jaringan Informasi dan Dokumentasi SP3T (Yankestrad) Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan (Yankestrad) Jumlah peserta yang mengikuti workshop (Yankestrad) Jumlah PKM dan Kampung yang melaksanakan dan menggunakan TOGA sesuai SOP (Yankestrad) Jumlah tanaman obat tradisional yang dikembangkan di masyarakat (Yankestrad) Jumlah Tanaman Obat yang dikembangkan (Sie yanKestrads) Terlaksananya rapat SP3T (Yankestrad) Tersedianya Klinik Griya Sehat Pengobatan dan terapi Tradisional (Yankestrad)																
						25 Orang 3 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan 29 Kabupaten	1,499,370,160	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		25 Orang 3 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan 29 Kabupaten	1,550,000,000	Dinas Kesehatan							
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka API di Kabupaten Kota Jumlah Kab/kota yang							29 Kab/Kota 29 Kab/kota 17 Kab/kota	12,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		29 Kab/Kota 29 Kab/kota 17 Kab/kota	12,100,000,000	Dinas Kesehatan









Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																	
Provinsi Papua																	
Tahun 2022																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	kesehatan daerah yang dilaksanakan Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan akreditasi puskesmas Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan teknis program pelayanan primer Jumlah Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi ke Kab/kota (BOK Provinsi) (DAK NF) Jumlah orang yang mengikuti pertemuan akreditasi puskesmas Jumlah Workshop Analisis Hasil PIS-PK terintegrasi di tingkat Provinsi (DAK NF) Pertemuan Koordinasi Terintegrasi Program Indonesia Sehat dgn Pendekatan Keluarga (PIS-PK) BOK Provinsi (DAK NF)				9 Kabupaten 10 Kabupaten 1 Kegiatan 40 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan	2,399,893,000	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	9 Kabupaten 10 Kabupaten 1 Kegiatan 40 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan	2,499,893,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah bimtek sistem rujukan Jumlah pelatihan sistem rujukan Jumlah pengelolaan kegiatan sistem rujukan				47 RSUD 1 Tahun 1 Tahun	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	47 RSUD 1 Tahun 1 Tahun	700,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah laporan wabah dan krisis masalah kesehatan yang dilaporkan Jumlah monitoring dan evaluasi ke daerah krisis masalah kesehatan Jumlah tenaga ahli atau pendamping krisis masalah kesehatan yang melakukan proactive health care				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dukungan pelaksanaan kegiatan penelitian bidang kesehatan yang dilaksanakan				1 Tahun	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Tahun	250,000,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						771,610,000						848,771,000		
1 02 02 1.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Koordinasi Konsultasi Pusat Monev Kualitas Data Pelaporan Capaian Kerja Instansi Pembinaan Profilkes Kabupaten Peningkatan Kapasitas Manajemen Pemetaan Masalah Kesehatan Profil Kesehatan				4 Kali 10 Lokasi 7 Dokumen 2 Kabupaten 4 Orang 1 Dokumen	771,610,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		4 Kali 10 Lokasi 7 Dokumen 2 Kabupaten 4 Orang 1 Dokumen	848,771,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						1,829,943,260						2,046,903,162		
1 02 02 1.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Peserta Penyusunan Perijinan Dan Tatakelola Jumlah Peserta Pertemuan Implementasi Aspak Jumlah Peserta Workshop Standar Akreditasi RS KARS Edisi I				35 Orang 45 Orang 65 Orang	1,224,457,420	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		35 Orang 45 Orang 65 Orang	1,346,903,162	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah akreditasi balatkes Jumlah aksesor yang melakukan asesment akreditasi labkesda Jumlah honor pemantapan mutu labkesda Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan bimbingan teknis mutu laboratorium Jumlah makan minum penambah daya tahan tubuh labkesda Jumlah pengelolaan kegiatan balatkes Jumlah pengelolaan kegiatan labkesda Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan				1 Tahun 8 Orang 1 Tahun 15 kabupaten 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 5 Orang	605,485,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Tahun 8 Orang 1 Tahun 15 kabupaten 1 Tahun 1 Tahun 5 Orang	700,000,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						31,150,000,000							31,215,000,000	
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						25,000,000,000							25,000,000,000	
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK Kabupaten/kota Jumlah dokumen profil tenaga kesehatan (SDK) Kab/Kota Jumlah dokumen SKP yang disetujui Jumlah Kab/Kota dalam perhitungan kebutuhan sesuai aplikasi E- Formasi di Provinsi lain (Bimtek SDK) Jumlah kegiatan koordinasi teknis program SDMK Kesehatan Jumlah kegiatan proactive health care yang dilaksanakan Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan Jumlah operasional program pendidikan D3 Analis kesehata, farmasi dan kebidanan yang dilaksanakan Jumlah operasional smk kesehatan kelas nabire Jumlah orang asli papua yang mengikuti pendidikan dokter spesialis Jumlah organisasi profesi bidang kesehatan yang dibina Jumlah peningkatan sekolah menengah analisis kesehatan jayapura dari SMK				29 Dokumen 29 kab/kota 200 Orang 20 orang 1 Tahun 1 Tahun 29 Laporan 1 Tahun 1 Tahun 60 Orang 16 OP 1 Tahun 30 Orang 12 Orang 500 Orang 1 Tahun 1 Tahun 5 Regional 90 Orang 6 Orang 12 orang	25,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	29 Dokumen 29 kab/kota 200 Orang 20 orang 1 Tahun 1 Tahun 29 Laporan 1 Tahun 1 Tahun 60 Orang 16 OP 1 Tahun 30 Orang 12 Orang 500 Orang 1 Tahun 1 Tahun 5 Regional 90 Orang 6 Orang 12 orang	25,000,000,000	Dinas Kesehatan	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Analisis kebutuhan diklat di 5 regional (BALATKES) Jumlah D3 Analis Kesehatan yang di Bangun Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM di kab/kota Jumlah kab/kota yang di lakukan validasi data SDM Jumlah kabupaten yang di monev perencanaan SDM jumlah nakes yang mendapatkan uji kompetensi sesuai dengan profesi masing-masing Jumlah pegawai yang di latih melakukan penghitungan angka kredit Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi SKP Jumlah peningkatan kepemimpinan dinas kesehatan di kabupaten/kota yang dilaksanakan Jumlah peningkatan kepemimpinan Rumah Sakit di kabupaten/kota yang dilaksanakan Jumlah peserta bimbingan/tryout uji kompetensi Jumlah Sekolah Analis Kesehatan di Lima Regional Yang di Buka Jumlah tenaga-tenaga kesehatan yang dilatih revolusi mental kepemimpinan				29 orang 5 Unit 29 kab/kota 29 Kab/kota 29 Kab/kota 500 orang 100 Orang 200 Orang 29 Kab/kota 45 RSUD 250 orang 5 Regional 70 orang	5,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	29 orang 5 Unit 29 kab/kota 29 Kab/kota 29 Kab/kota 500 orang 100 Orang 200 Orang 29 Kab/kota 45 RSUD 250 orang 5 Regional 70 orang	5,500,000,000	Dinas Kesehatan		
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kabupaten/Kota yang terkoordinier program sumber daya manusia kesehatan				29 kab/kota	650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	29 kab/kota	715,000,000	Dinas Kesehatan		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 04	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>						663,800,000						821,400,000		
1 02 04 1.01	<b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>						663,800,000						821,400,000		
1 02 04 1.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah alat tulis kantor Jumlah Distributor Alkes yang mendapatkan ijin Jumlah Distributor cabang alkes di Kabupaten/Kota yang diawasi Jumlah sarana distribusin obat dan alkes yang dibina dan diawasi Jumlah sarana penunjang kegiatan kantor				1 Pkt 15 perusahaan 12 perusahaan 13 distributor 2 Unit	516,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Pkt 15 perusahaan 12 perusahaan 13 distributor 2 Unit	600,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 04 1.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	alkes di fasyankes yang memenuhi standar				18 lokasi	147,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		18 lokasi	221,400,000	Dinas Kesehatan	
1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>						2,100,000,000						2,360,000,000		
1 02 05 1.01	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>						500,000,000						600,000,000		
1 02 05 1.01 01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah advokasi kemitraan yang dilaksanakan				1 Tahun	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Tahun	600,000,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 05 1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi						1,200,000,000						1,320,000,000		
1 02 05 1.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Germas Jumlah Media KIE Yang Digunakan Jumlah Media Promosi Kesehatan Jumlah Pesan Yang Disampaikan Jumlah Siswa SBH Yang Diorientasi Jumlah Tenaga Promkes Yang Dilatih Tersedianya Kendaraan Operasional Promkes				29 kab/kota 15 Jenis 6 Kegiatan 15 Jenis 60 Orang 29 Orang 1 Unit	1,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		29 kab/kota 15 Jenis 6 Kegiatan 15 Jenis 60 Orang 29 Orang 1 Unit	1,320,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 05 1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi						400,000,000						440,000,000		
1 02 05 1.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Laporan Tersedianya Data UKBM Tingkat Provinsi				29 Laporan 29 Dokumen	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		29 Laporan 29 Dokumen	440,000,000	Dinas Kesehatan	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>472,889,579,699</b>							<b>626,140,000,000</b>	
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>148,726,561,610</b>						<b>153,640,000,000</b>		
1 02 01 1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>100,000,000</b>						<b>100,000,000</b>		
1 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan / dokumen				3 dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		3 dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>117,576,721,610</b>						<b>121,170,000,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar				12 Bulan	116,406,721,610	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Bulan	120,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang disediakan Jumlah Komputer Desktop yang diadakan				1 Tahun 1 Paket	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Tahun 1 Paket	1,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan / dokumen				1 dokumen	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 dokumen	40,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan / dokumen				2 dokumen	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2 dokumen	40,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan / dokumen				3 dokumen	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	3 dokumen	90,000,000	Dinas Kesehatan	
<b>1.02.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>1,500,000,000</b>						<b>1,500,000,000</b>		
1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan				800 Stell	1,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	800 Stell	1,200,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM				5 Orang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	5 Orang	200,000,000	Dinas Kesehatan	
1.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi				50 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	50 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan	
<b>1.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>6,683,800,000</b>						<b>6,950,000,000</b>		
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang diadakan				1 Tahun	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Tahun	250,000,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik Rumah Sakit				17 jenis	4,358,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		17 jenis	4,500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang diadakan				3 jenis	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		3 jenis	200,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melakukan Koordinasi dan Konsultasi SKPD				96 Kali	1,975,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		96 Kali	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>2,745,000,000</b>							<b>2,870,000,000</b>	
1 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan / mobil operasional yang di adakan				10 Unit	2,745,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		10 Unit	2,870,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>12,450,000,000</b>							<b>12,950,000,000</b>	
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah orang dan paket pengiriman				1 Tahun	950,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Tahun	950,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan yang dibayarkan tiap bulan				12 Bulan	8,300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama				12 Bulan	8,500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan keamanan yang dibayarkan tiap bulan				12 Bulan	3,200,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 Bulan	3,500,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>6,581,200,000</b>							<b>7,000,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara dan terfasilitas perijinannya				12 Bulan	2,631,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 Bulan	2,700,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara				3 jenis	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		3 jenis	300,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang dipelihara				1 Tahun	3,750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Tahun	4,000,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 1.14</b>	<b>Fasilitas Keprotokolan</b>						<b>1,089,840,000</b>							<b>1,100,000,000</b>	
1 02 01 1.14 01	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah makan dan minum rapat / kegiatan				12 Bulan	1,089,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 Bulan	1,100,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>301,638,854,889</b>							<b>447,800,000,000</b>	
<b>1 02 02 1.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>						<b>247,191,869,669</b>							<b>391,000,000,000</b>	
1 02 02 1.01 02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah bangunan yang dibangun				8 bangunan	146,226,588,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		8 bangunan	250,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan				1 Tahun	30,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Tahun	65,000,000,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 1.01 12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah peralatan dan perlengkapan fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan				1 Tahun	12,264,826,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Tahun	13,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai yang di adakan				26 jenis	25,350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		26 jenis	26,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah barang penunjang operasional RS				1 Tahun	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Tahun	5,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan perlengkapan penunjang RS				13 Paket	4,850,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		13 Paket	5,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat-obatan dan Bahan Makanan Pasien yang diadakan				1 Tahun	25,500,454,869	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Tahun	27,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>						<b>51,700,000,000</b>							<b>54,000,000,000</b>	
1 02 02 1.02 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah jenis Layanan Promosi Kesehatan yang dibuat				4 Jenis	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		4 Jenis	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pasien yang dilayani				80000 Orang	41,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		80000 Orang	41,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Jasa Kebersihan Fasilitas RS				12 Bulan	10,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 Bulan	12,000,000,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					2,746,985,220						2,800,000,000			
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah kegiatan menunjang Akreditasi RS				3 Kegiatan	2,000,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	3 Kegiatan	2,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen dalam Penyusunan Remunirasi Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Evaluasi Program Akhir Tahun Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Lokakarya Penyusunan Program				1 Kegiatan 150 Orang 150 Orang	746,985,220	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Kegiatan 150 Orang 150 Orang	800,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>						<b>22,524,163,200</b>						<b>24,700,000,000</b>		
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						<b>19,039,163,200</b>						<b>21,000,000,000</b>		
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dibayar				380 Orang	19,039,163,200		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	380 Orang	21,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	03	1.02		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>						<b>3,485,000,000</b>						<b>3,700,000,000</b>		
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan bimtek				100 Orang	3,485,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	100 Orang	3,700,000,000	Dinas Kesehatan	
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>88,455,944,200</b>							<b>94,242,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>2,436,500,000</b>						<b>2,942,000,000</b>		
1 02 01 1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>500,000,000</b>						<b>500,000,000</b>		
1 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah peralatan penunjang administrasi				12 Tahun	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 Tahun	500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>1,736,500,000</b>						<b>2,042,000,000</b>		
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang diadakan				1 Tahun	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Tahun	400,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan Rumah Tangga yang diadakan				1 Tahun	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Tahun	300,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang logistik yang diadakan				2 jenis	1,025,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD				2 jenis	1,030,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan				12 Tahun	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 Tahun	300,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material						11,500,000		Pendapatan dari BLUD		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			12,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>100,000,000</b>						<b>200,000,000</b>		
1 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan				1 Tahun	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Tahun	200,000,000	Dinas Kesehatan



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100,000,000						200,000,000		
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				1 Tahun	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Tahun	200,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>78,111,344,200</b>						<b>83,000,000,000</b>		
1 02 02 1.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>						<b>49,734,736,245</b>						<b>53,000,000,000</b>		
1 02 02 1.01 01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah bangunan yang dibangun				1 Paket	5,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	1 Paket	5,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan / ruangan RS yang dipelihara				1 Tahun	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Tahun	1,500,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan penunjang yang diadakan				1 Tahun	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Tahun	3,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah jenis bahan habis pakai RS				1 Tahun	32,234,736,245	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Tahun	33,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan penunjang yang dipelihara				1 Tahun	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Tahun	500,000,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis obat dan bahan makanan pasien yang di adakan				2 Jenis	9,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		2 Jenis	10,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>						<b>28,376,607,955</b>							<b>30,000,000,000</b>		
1 02 02 1.02 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah jasa pelayanan yang dibayarkan				3 Layanan	28,376,607,955	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		3 Layanan	30,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>						<b>7,908,100,000</b>							<b>8,300,000,000</b>		
1 02 03 1.01	<b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>						<b>7,158,100,000</b>							<b>7,500,000,000</b>		
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah orang yang dibayar				12 Bulan	7,158,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 Bulan	7,500,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 03 1.02	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>						<b>750,000,000</b>							<b>800,000,000</b>		
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan				1 Tahun	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Tahun	800,000,000	Dinas Kesehatan	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>70,162,363,990</b>							<b>70,162,363,990</b>	
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>27,890,330,330</b>							<b>27,890,330,330</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Papua**  
**Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
<b>1 02 01 1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>123,000,000</b>						<b>123,000,000</b>		
1 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen				3 dokumen	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		3 dokumen	45,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun				2 laporan	78,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		2 laporan	78,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>19,810,877,330</b>						<b>19,810,877,330</b>		
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN				1 tahun	19,765,877,330	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 tahun	19,765,877,330	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun				1 laporan	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 laporan	30,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu				1 laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 laporan	15,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>745,000,000</b>						<b>745,000,000</b>		
1 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan				400 stell	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		400 stell	250,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan				12 orang	495,000,000				1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 orang	495,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>3,376,883,000</b>						<b>3,376,883,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan				30 buah	204,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		30 buah	204,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan				50 unit	1,000,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		50 unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan				3 jenis	149,200,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		3 jenis	149,200,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan				50 jenis	225,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		50 jenis	225,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				3 jenis	78,683,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		3 jenis	78,683,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan Pelaksanaan makan minum tamu dan rapat				100 jenis 12 bulan	720,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		100 jenis 12 bulan	720,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan				25 kali	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		25 kali	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>3,260,000,000</b>							<b>3,260,000,000</b>	
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim				1000 surat	15,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1000 surat	15,000,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan berlangganan listrik, air, telepon, transponder				12 layanan	712,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 layanan	712,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas pendukung kebersihan kantor				38 orang	2,533,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		38 orang	2,533,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>574,570,000</b>							<b>574,570,000</b>	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				20 unit	542,820,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		20 unit	542,820,000	Dinas Kesehatan
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit mobil dinas/operasional yang terpelihara dan terfasilitasi perijinannya				20 unit	31,750,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		20 unit	31,750,000	Dinas Kesehatan
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>42,272,033,660</b>							<b>42,272,033,660</b>	
1.02.02.1.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>						<b>24,611,800,000</b>							<b>24,611,800,000</b>	
1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah bangunan				3 unit	4,000,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		3 unit	4,000,000,000	Dinas Kesehatan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Ruang/bangsai RS yang direhab				13 unit	6,420,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		13 unit	6,420,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan				10 unit	3,071,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		10 unit	3,071,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah bahan yang diadakan				10 jenis	920,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		10 jenis	920,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara				72 unit	200,800,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		72 unit	200,800,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Bahan makanan basah dan kering untuk pasien Jumlah Obat dan bahan kesehatan habis pakai				138 jenis 100 jenis	10,000,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		138 jenis 100 jenis	10,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>						<b>15,960,233,660</b>						<b>15,960,233,660</b>		
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Pasien gangguan jiwa baru yang ditemukan Pasien rujukan, home visite/antar jemput pasien gangguan jiwa terlayani Penyuluhan dan pengobatan kesehatan jiwa di kabupaten				100 orang 100 orang 29 kabupaten	5,960,233,660	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		100 orang 100 orang 29 kabupaten	5,960,233,660	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah OAP yang terlayani KPS				2000 orang	9,400,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		2000 orang	9,400,000,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
																							Nasional					Daerah	
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peserta JKN/BPJS terlayani						2500 orang	600,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar					2500 orang	600,000,000	Dinas Kesehatan					
1	02	02	1.04		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>								<b>1,700,000,000</b>										<b>1,700,000,000</b>						
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Capaian Pelayanan RS Kelas tipe B Jumlah SDM yang berikan pelatihan sesuai Akreditasi RS						100 persen 100 orang	1,700,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar					100 persen 100 orang	1,700,000,000	Dinas Kesehatan					
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																								
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>												<b>220,621,784,731</b>											<b>245,391,060,200</b>	
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>								<b>116,705,547,940</b>											<b>129,615,004,200</b>					
1	02	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								<b>200,000,000</b>											<b>200,000,000</b>					
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen						1 dokumen	50,000,000					1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar				1 dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan					
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen						1 dokumen	50,000,000					1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar				1 dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan					
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen						1 dokumen	50,000,000					1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar				1 dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan					
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen						1 dokumen	50,000,000					1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar				1 dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan					
1	02	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>86,590,543,740</b>											<b>96,150,000,000</b>					
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								86,440,543,740		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar							96,000,000,000	Dinas Kesehatan				

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen				1 dokumen	50,000,000				1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen				4 dokumen	50,000,000						4 dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen				2 dokumen	50,000,000						2 dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>6,965,004,200</b>							<b>6,965,004,200</b>	
1 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			200,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						6,765,004,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			6,765,004,200	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>6,200,000,000</b>							<b>6,350,000,000</b>	
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						500,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			550,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						500,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			600,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1,000,000,000		Dana Otonomi Khusus - Provinsi Papua Barat		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						1,000,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3,200,000,000				1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			3,200,000,000	Dinas Kesehatan
<b>1 02 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>1,500,000,000</b>							<b>1,500,000,000</b>	
1 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1,500,000,000				1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			1,500,000,000	Dinas Kesehatan



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
<b>1 02 01</b>	<b>1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>5,950,000,000</b>						<b>6,650,000,000</b>		
1 02 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					250,000,000				1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		350,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3,100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		3,500,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01	1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat			1 tahun	300,000,000				1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 tahun	300,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2,300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		2,500,000,000	Dinas Kesehatan	
<b>1 02 01</b>	<b>1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>7,300,000,000</b>						<b>9,800,000,000</b>		
1 02 01	1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang di servis			1 tahun	800,000,000				1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 tahun	800,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01	1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perbaikan gedung			1 tahun	1,500,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 tahun	3,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01	1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5,000,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		6,000,000,000	Dinas Kesehatan	
<b>1 02 01</b>	<b>1.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>					<b>2,000,000,000</b>						<b>2,000,000,000</b>		
1 02 01	1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2,000,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		2,000,000,000	Dinas Kesehatan	
<b>1 02 02</b>		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					<b>92,040,180,791</b>						<b>103,900,000,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 1.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>						31,400,000,000						34,500,000,000		
1 02 02 1.01 01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						4,000,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		4,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan				50 unit	5,000,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	50 unit	5,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan						0		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah peralatan penunjang				1 tahun	4,000,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 tahun	4,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan alat kesehatan/ alat penunjang				500 unit	400,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	500 unit	500,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						2,000,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		2,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat, BMHP, reagen, cairan				1 tahun	16,000,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 tahun	19,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>						51,743,340,991						60,000,000,000		
1 02 02 1.02 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						51,743,340,991		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		60,000,000,000	Dinas Kesehatan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						1,200,100,000							1,400,000,000	
1 02 02 1.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	jumlah barang jumlah jasa				60 unit 9 orang	700,100,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		60 unit 9 orang	800,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet						500,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			600,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						7,696,739,800							8,000,000,000	
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kegiatan akreditasi				1 tahun	7,696,739,800				1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 tahun	8,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						11,676,056,000							11,676,056,000	
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						11,022,056,000							11,022,056,000	
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan				220 orang	11,022,056,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama				220 orang	11,022,056,000	Dinas Kesehatan
1 02 03 1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						654,000,000							654,000,000	
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						654,000,000				1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			654,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						200,000,000							200,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 05 1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						200,000,000						200,000,000		
1 02 05 1.01 01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		200,000,000	Dinas Kesehatan	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						15,954,840,350,449						5,121,424,559,505		
1 03 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						235,519,184,954						0		
1 03 01 1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25,125,000,000						0		
1 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan master program Infrastruktur Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis dan Anggaran Bidang ke-PU an Jumlah dokumen sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang ke-PU an				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	21,400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 03 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Renja dan RKA Dinas PUPR- PKP Jumlah Laporan Survey dan Identifikasi Usulan- usulan Pekerjaan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan PAHS				2 Dokumen 1 Laporan 85 Orang	1,725,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan 5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	2 Dokumen 1 Laporan 85 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Renja Perubahan dan RKA Perubahan SKPD				2 Dokumen	300,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan			0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD				2 Dokumen	150,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lkj SKPD				3 Laporan	500,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		3 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Data dan informasi melalui media cetak dan elektronik				1 Laporan	900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>73,293,288,920</b>							<b>0</b>	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi Gaji dan Tunjangan				425 Orang	72,093,288,920		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		425 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan				1 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Hasil Tanggapan Pemeriksaan Dinas PUPR-PKPn				1 Dokumen	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dinas PUPR-PKP	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dinas PUPR-PKP				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>1.03.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>200,000,000</b>							<b>0</b>	
1.03.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan BMD di Dinas PUPR-PKP				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD pada Dinas PUPR-PKP				1 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>1.03.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>3,722,500,000</b>							<b>0</b>	
1.03.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Mesin/Kartu Absensi Di Dinas PUPR PKP				8 Unit	16,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		8 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah pakaian KORPRI PNS Jumlah pakaian PNS Jumlah pakaian Sekuriti dan Cleaning Service				640 Stell 640 Stell 500 Stell 80 Stell	1,894,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		640 Stell 640 Stell 500 Stell 80 Stell	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Pegawai				1 Dokumen	700,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan PPID Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan diklat PIM dan Fungsional				1 Laporan 13 Orang	755,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Laporan 13 Orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Peraturan Perundang-undangan				143 Orang	357,500,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		143 Orang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
<b>1.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>19,653,140,634</b>						<b>0</b>		
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah Komponen Kelistrikan pada SKPD				1 Tahun	1,000,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Tahun	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor				100 Jenis 100 Unit	3,000,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		100 Jenis 100 Unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				150.48 Liter	79,200,634	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		150.48 Liter	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang pencetakan dan pengadaan				8 Jenis	700,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		8 Jenis	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10 Jenis	300,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		10 Jenis	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan bakar Peralite, Dextlite				120000 Liter	1,013,940,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		120000 Liter	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				904 Kali	13,560,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		904 Kali	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>1 03 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>36,033,305,400</b>							<b>0</b>	
1 03 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Baik				17 Unit	8,500,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		17 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional kantor				5 Unit	2,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		5 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 01 1.07 03	Pengadaan Alat Besar						4,550,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan			0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas PUPR-PKP Jumlah Peralatan Mesin Penunjang Jalan dan Jembatan Jumlah Peralatan UPTD Lab Penunjang Jalan dan Jembatan				1 Set 27 Unit 7 Set	20,483,305,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Set 27 Unit 7 Set	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>1 03 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>25,323,450,000</b>							<b>0</b>	
1 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				1500 Buah	22,500,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1500 Buah	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan listrik, telepon, internet dan air Jumlah Layanan Jasa Situs Web dan Informasi Publik				12 Bulan 12 Bulan	4,000,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		12 Bulan 12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang diservice				100 Unit	200,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		100 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa keamanan kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa pelayanan perkantoran Jumlah makan minum rapat dan makan minum tamu Tersedianya Biaya untuk sewa gedung kantor				25 Orang 12 Bulan 140 Orang 12 Bulan 12 Bulan	21,100,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		25 Orang 12 Bulan 140 Orang 12 Bulan 12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>1 03 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>52,168,500,000</b>							<b>0</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala dan perizinan kendaraan perorangan dinas Jabatan				62 Unit	310,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		62 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				64 Unit	71,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		64 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kegiatan UPTD Pengujian Dinas PU Provinsi Papua Jumlah Peralatan UPTD Balai Pengujian PU yang telah di kalibrasi				100 Unit 60 Unit	987,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		100 Unit 60 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luasan Gedung UPTD Lab yg di rehab Jumlah Luasan Terpeliharanya Rumah Dinas secara rutin/berkala				3100 m2 100 m2	50,800,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		3100 m2 100 m2	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>						<b>727,697,175,000</b>							<b>0</b>	
1.03.02.1.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>692,377,175,000</b>							<b>0</b>	
1.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen TataPerencanaan Ketahanan Tata Guna Air Provinsi Papua Jumlah Dokumen Yang Diselesaikan				1 Dokumen 14 Dokumen	7,350,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Dokumen 14 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai						2,347,500,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan			0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 02 1.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Master Plan Wlayah Sungai				1 Dokumen	1,000,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 02 1.01 08	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah air baku yang dibangun				70 Ltr/dtk	163,005,500,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		70 Ltr/dtk	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 02 1.01 18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						217,500,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan			0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 02 1.01 33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						10,000,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan			0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 02 1.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai/kali yang dinormalisasi				6958397 M3	261,174,175,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		6958397 M3	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 02 1.01 65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Op Sungai yang dipelihara				400000 M3	30,000,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		400000 M3	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 02 1.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>35,320,000,000</b>							<b>0</b>	
1 03 02 1.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa						27,320,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan			0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 02 1.02 23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Laporan OP irigasi				9 Laporan	8,000,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		9 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>						<b>582,775,000,000</b>							<b>0</b>	
1 03 06 1.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi</b>						<b>582,775,000,000</b>							<b>0</b>	
1 03 06 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan drainase				39 Dokumen	25,700,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		39 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 06 1.01 05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah panjang drainase yang dibangun				79802 M2	547,825,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		79802 M2	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 06 1.01 06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah panjang drainase yang dipelihara				1550 M	9,250,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1550 M	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>						<b>16,200,000,000</b>							<b>0</b>	
1 03 08 1.01	<b>Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>						<b>16,200,000,000</b>							<b>0</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Site dan DED Gedung Kantor UPTD Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup se Provinsi Papua (28 Kab./1 Kota) Jumlah Dokumen Survey Lokasi Gedung Kantor PPI di Kab. Mimika/Kab. Biak Numfor/Kab. Asmat/Kab. Merauke dan Kab. Nabire Jumlah Dokumen Survey Lokasi Gedung Kantor UPTD Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup se Provinsi Papua (28 Kab./1 Kota) Perencanaan Site Plan / DED Renovasi Gedung PPI ( Pangkalan Pendataan Ikan ) Jumlah Dokumen Perencanaan Site Plan dan DED Gedung Kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen	4,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.08.1.01.02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Unit Rehab Kantor PPI di Kabupaten Nabire "Jumlah Unit Rehab Kantor PPI Lampu I di Kabupaten Merauke Jumlah Unit Rehab Kantor PPI Omor di Kabupaten Asmat Jumlah Unit Rehab Kantor PPI Pomako di Kabupaten Mimika Jumlah Unit Rehab Kantor PPI Reindoi di Kabupaten Biak Numfor				1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	7,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.08.1.01.03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Unit Bangunan Gedung Negara DOK V dan Peristirahatan Gubernur Papua di Skyline yang terpelihara				1 Unit	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 08 1.01 07	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya	Jumlah Kepala Keluarga yang diberikan Kompensasi Anjungan Expo Waena (Cagar Budaya)				5 KK	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		5 KK		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>1 03 10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>						<b>14,379,613,940,495</b>							<b>5,121,424,559,505</b>	
<b>1 03 10 1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>						<b>14,379,613,940,495</b>							<b>5,121,424,559,505</b>	
1 03 10 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan Jumlah laporan survey yang dihasilkan				150 Dokumen 2 Laporan	118,100,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		150 Dokumen 2 Laporan		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 10 1.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah luas lahan yang dibayarkan				202 Ha	52,000,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		202 Ha		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 10 1.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Survei Kondisi Jalan/Jembatan				1 Dokumen	8,263,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Dokumen		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Jumlah panjang jalan yang dibangun				1218 Km	7,010,430,440,495		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1218 Km	3,330,824,559,505	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 10 1.01 08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah panjang jalan yang mendapatkan rekonstruksi				1155 Km	5,791,820,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1155 Km	1,790,600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Provinsi Papua**  
**Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 1.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang mendapatkan rehabilitasi				183 Km	699,000,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		183 Km	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 10 1.01 12	Pembangunan Jembatan	Jumlah panjang jembatan yang di bangun				3110 M	699,000,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		3110 M	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan				1 Laporan	1,000,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>1 03 11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>						<b>13,035,050,000</b>							<b>0</b>	
<b>1 03 11 1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>						<b>12,310,050,000</b>							<b>0</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 11 1.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	<p>Jumlah Peserta Orang Asli Papua yang mengikuti Bimtek dan sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)</p> <p>Jumlah Peserta Orang Asli Papua yang mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Ketrampilan Tenaga Kerja Konstruksi dengan Mobile Training Unit (MTU)</p> <p>Jumlah Peserta Pelatihan dan Sertifikasi Mandor Konstruksi Orang Asli Papua</p> <p>Jumlah Peserta Sertifikasi Keahlian (SKA) Tenaga Kerja Konstruksi Orang Asli Papua</p> <p>Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Tenaga Trampil (SKT) Tenaga Konstruksi Orang Asli Papua</p>				120 Orang 150 Orang 120 Orang 80 Orang 150 Orang	3,675,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayawijaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paniai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boven Digoel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan 5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan 5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan 5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		120 Orang 150 Orang 120 Orang 80 Orang 150 Orang		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 11 1.01 05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Material Infrastruktur Bidang Ke-Pu an Jumlah Dokumen Persiapan Akreditasi Jumlah Dokumen Survey dan Pemetaan Quarry di 15 Kabupaten Jumlah Laporan Pengujian Kualitas Pekerjaan Konstruksi Bidang ke-Pu-an Jumlah Peserta Sosialisasi Pemanfaatan Laboratorium UPTD Bidang Ke-PU-an				1 Dokumen 1 Dokumen 15 Dokumen 1 Laporan 200 Orang	2,766,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur			1 Dokumen 1 Dokumen 15 Dokumen 1 Laporan 200 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 03 11 1.01 07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Laporan Monitoring dan Pengendalian Teknis Bidang Ke-PU an Jumlah Laporan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi Jumlah Laporan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kegiatan Penunjang UPTD Pengujian dan Laboratorium Jumlah laporan Pengelolaan Sarana dan Prasarana bidang ke-Pu an Jumlah Peserta Diklat Teknis Manajemen Proyek Jumlah Peserta Pelatihan Teknisi Dampak Lingkungan UPTD Laboratorium Jumlah Peserta Pelatihan Teknisi Pengujian Bahan Bangunan UPTD Laboratorium Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa				1 Laporan 1 Laporan 1 Tahun 1 Laporan 40 Orang 3 Orang 3 Orang 140 Orang	5,619,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur			1 Laporan 1 Laporan 1 Tahun 1 Laporan 40 Orang 3 Orang 3 Orang 140 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 11 1.01 08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Peserta Sosialisai dan Forum Perundang-undangan dan Jasa Konstruksi				100 Orang	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		100 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 11 1.02	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>						<b>725,000,000</b>							<b>0</b>	
1 03 11 1.02 05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Basic dan Unit Price di Provinsi Papua				1 Dokumen	725,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>1 04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						<b>994,078,840,000</b>						<b>0</b>		
<b>1 04 02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>						<b>132,000,000,000</b>						<b>0</b>		
1 04 02 1.03	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>						<b>132,000,000,000</b>							<b>0</b>	
1 04 02 1.03 02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen PerencanaanTeknis Rumah Korban Bencana Alam Sentani				1 Dokumen	2,000,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur				1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 02 1.03 03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Luas Lahan				77 Hektar	60,000,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		77 Hektar	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 02 1.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Banjir Bandang Sentani Yang Di Bangun				100 Unit	70,000,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		100 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>1 04 03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>						<b>542,523,840,000</b>						<b>0</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 03 1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						1,000,000,000						0		
1 04 03 1.01 09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Rumah Layak Huni Beserta Sarana dan Prasarana Di Provinsi Papua				1 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 03 1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						541,523,840,000						0		
1 04 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemukiran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Rumah Layak Huni Huni				29 Dokumen	5,800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayawijaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paniai, Semua Kecamatan,	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		29 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
									Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dogiyai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamberamo Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lanny Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	04	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni				17 Dokumen	3,900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayawijaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Puncak Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		17 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
									Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Yahukimo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boven Digoel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Yalimo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lanny Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Intan Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Deiyai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Yang di Rehab			290 Unit	174,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Biak Numfor, Semua	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	290 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayawijaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paniai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Puncak Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,						



Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Semua Kelurahan Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Yahukimo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pegunungan Bintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tolikara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boven Digoel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mappi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	04	03	1.02	05			10 Hektar 10 Hektar 10 Hektar	100,000,000,000	Kab. Nduga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamberamo Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Puncak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		10 Hektar 10 Hektar 10 Hektar		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.02	07			276 Unit	257,323,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		276 Unit		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>						<b>319,555,000,000</b>						<b>0</b>		
1 04 05 1.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>						<b>319,555,000,000</b>						<b>0</b>		
1 04 05 1.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan				46 Dokumen	21,100,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		46 Dokumen	0 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 04 05 1.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah monitoring dan pelaporan Jumlah panjang talud dan pagar yang dibangun				1 Laporan 41500 M2	298,455,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Laporan 41500 M2	0 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						<b>60,472,678,949</b>							<b>59,846,299,744</b>	
1 05 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>54,967,874,744</b>							<b>54,557,495,539</b>	
1 05 01 1.01	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>163,846,164</b>							<b>164,375,959</b>	
1 05 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				7 laporan	90,479,760	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		7 laporan	90,479,760 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 dokumen	14,993,209	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		1 dokumen	14,993,209 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 dokumen	12,470,205	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		1 dokumen	13,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				3 dokumen	45,902,990	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		3 dokumen	45,902,990	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1 05 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>22,696,821,300</b>							<b>22,696,821,300</b>	
1 05 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan				14 bulan	22,669,937,140	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		14 bulan	22,669,937,140	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 dokumen	16,354,580	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		1 dokumen	16,354,580	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				2 dokumen	10,529,580	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		2 dokumen	10,529,580	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1 05 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>351,000,000</b>							<b>351,000,000</b>	
1 05 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan				7 orang	351,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		7 orang	351,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1 05 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>8,504,528,930</b>							<b>8,504,528,930</b>	
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis alat kelengkapan listrik yang disediakan				3 jenis	5,591,855	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		3 jenis	5,591,855	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan kantor yang diadakan				3 jenis	50,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		3 jenis	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan				4 layanan	421,099,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		4 layanan	421,099,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				37 unit	105,620,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		37 unit	105,620,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa keamanan/security yang dibayarkan Jumlah tenaga kebersihan				470 orang 9 orang	18,393,600,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		470 orang 9 orang	18,393,600,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1 05 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>2,087,996,350</b>							<b>1,677,087,350</b>	
1 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah mobil pejabat yang terpelihara Jumlah motor yg terpelihara				14 unit 26 unit	529,137,350		Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		14 unit 26 unit	529,137,350	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional roda 4 yang terpelihara Jumlah kendaraan operasional roda 6 yang terpelihara Jumlah speedboat yang terpelihara				11 unit 10 unit 1 unit	1,067,950,000		Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		11 unit 10 unit 1 unit	1,067,950,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				2 kantor	80,000,000		Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		2 kantor	80,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang direhab				1 unit	410,909,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		1 unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1 05 01 1.14</b>	<b>Fasilitas Keprotokolan</b>						<b>1,819,063,000</b>							<b>1,819,063,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 1.14 01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Keg Gelar pasukan yang diselenggarakan Jumlah peserta bulan bhakti PRB Jumlah peserta HUT Satpol PP Jumlah Peserta rakernis Satpol PP dan PBD Jumlah PTI yang difasilitasi				2 kegiatan 6 orang 13 orang 150 orang 20 orang	1,819,063,000		Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		2 kegiatan 6 orang 13 orang 150 orang 20 orang	1,819,063,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>						<b>1,888,525,000</b>							<b>1,672,525,000</b>	
1 05 02 1.01	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						<b>1,538,525,000</b>							<b>1,322,525,000</b>	
1 05 02 1.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Patroli Wilayah yang dilakukan Jumlah penegakan trantibum yang dilakukan Jumlah Pengamanan Protokol KDH/Pejabat Penting yang Dilakukan Jumlah Publikasi dan Informasi yang dilakukan				32 kali 1 tahun 1 tahun 1 tahun	256,525,000		Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi 2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		32 kali 1 tahun 1 tahun 1 tahun	256,525,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 02 1.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah operasi penertiban PKL, PSK, dan anak sekolah Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa yang Dilakukan				35 kali 15 kali	216,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		35 kali 15 kali	216,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 02 1.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	jumlah data monitoring, evaluasi dan pelaporan satpol pp dan satlinmas se provinsi papua Jumlah Pengaduan yang masuk untuk penertiban aset Pemrov Jumlah Pengendalian Disiplin ASN Pemrov yang dilakukan				1 dokumen 1 tahun 1 tahun	216,000,000		Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		1 dokumen 1 tahun 1 tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 02 1.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah peserta yang mengikuti BIMTEK jumlah satlinmas dan masyarakat yang diberdayakan dalam pengamanan lingkungan jumlah yang difasilitasi dalam forum				75 orang 100 orang 500 orang	500,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		75 orang 100 orang 500 orang	500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 02 1.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	jumlah peserta yang mengikuti BIMTEK jumlah Peserta yang mengikuti Magang jumlah yang mengikuti latihan				100 orang 45 orang 100 orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		100 orang 45 orang 100 orang	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 02 1.01 06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	jumlah Perda/Perkada yang disusun				1 buah	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi 2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		1 buah	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>1 05 02 1.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>						<b>350,000,000</b>							<b>350,000,000</b>	
1 05 02 1.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah peserta sosialisasi penegakan Perda dan Perkada				100 orang	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi 2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		100 orang	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 02 1.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pelanggaran Perdasi di Kab/Kota				6 Kabupaten	0	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		6 Kabupaten	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 02 1.03	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>						0						0		
1 05 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah anggota PTI yang mengikuti Pelatihan Dasar Jumlah Anggota yang mengikuti Seleksi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan pembinaan bagi PPNS				30 Orang 5 Orang 7 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		30 Orang 5 Orang 7 Orang	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>						3,126,279,205						3,126,279,205		
1 05 03 1.01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>						0						0		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
1 05 03 1.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah pendampingan penyusunan kajian resiko bencana yang dilakukan Jumlah RPB yang disusun				2 kegiatan 1 dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		2 kegiatan 1 dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 1.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Bulan Operasional Pusdalops Jumlah Kegiatan Gladi Lapangan Yang Dilakukan Jumlah Peserta Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Jumlah Sekolah Aman Bencana Yang Terbentuk .				12 Bulan 1 Kegiatan 100 Orang 5 Unit	0	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		12 Bulan 1 Kegiatan 100 Orang 5 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 1.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>						<b>620,000,000</b>							<b>620,000,000</b>		
1 05 03 1.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek TOT Penanggulangan Bencana Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemen pergudangan Jumlah peserta Yang Mengikuti Simulasi Jumlah Tenaga Pendamping Desa Tangguh Bencana Yang Terlatih				30 Orang 50 orang 50 Orang 30 Orang	0	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		30 Orang 50 orang 50 Orang 30 Orang	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 1.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Jenis Peralatan yang diadakan Jumlah Kab/Kota yang di monev Jumlah pendorongan Peralatan yang dilakukan Jumlah Pertemuan Inventarisasi Peralatan yang dilakukan				10 jenis 5 kabupaten 6 kali 2 kali	270,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		10 jenis 5 kabupaten 6 kali 2 kali	270,000,000	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Kegiatan PRB Yang Akan Dilaksanakan				1 Kegiatan	0	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		1 Kegiatan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 05 03 1.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa/Kampung Tangguh Yang Terbentuk				2 Kampung	0					2. Pemantapan Rasa Aman, Tentram dan Kedewasaan Berdemokrasi		2 Kampung	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.02 07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Bantuan Sektor Ekonomi yang disalurkan Jumlah bantuan sektor perumahan yang disalurkan Jumlah bantuan sektor sosial yang disalurkan Jumlah jembatan yang dibangun Jumlah Lokasi Jalan yang akan dibangun Jumlah Lokasi Pembangunan kanal banjir yang akan dibangun Jumlah Lokasi Pembangunan Tanggul Sungai di daerah Rawan Bencana Jumlah pendampingan penyusunan jitu pasna yang dilakukan Jumlah Pendampingan Penyusunan R3P yang dilakukan Jumlah pendamping psikologis yang difasilitasi Jumlah peserta pelatihan jitu pasna Jumlah peserta pelatihan pendampingan psikologis				10 paket 10 paket 10 paket 2 unit 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 kabupaten 2 kabupaten 10 orang 50 orang 50 orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2. Pemantapan Rasa Aman, Tentram dan Kedewasaan Berdemokrasi		10 paket 10 paket 10 paket 2 unit 2 lokasi 2 lokasi 2 kabupaten 2 kabupaten 10 orang 50 orang 50 orang	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 1.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Laporan Jumlah Orang Yang Mengikuti BIMTEK				2 Dokumen 75 Orang	0	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil			2. Pemantapan Rasa Aman, Tentram dan Kedewasaan Berdemokrasi		2 Dokumen 75 Orang	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.02 10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah kegiatan gladi yang dilakukan				2 kegiatan	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2. Pemantapan Rasa Aman, Tentram dan Kedewasaan Berdemokrasi		2 kegiatan	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.03	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>						<b>1,435,000,000</b>								<b>1,435,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	05	03	1.03	02		Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana						435,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi 2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		435,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	1.03	04		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah jenis logistik yang disediakan Jumlah pendorongan logistik jumlah pertemuan yang dilakukan Jumlah Peserta Pelatihan ManajemenLogistik dan Peralatan PB					15 jenis 6 kali 2 kali 29 orang	1,000,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	15 jenis 6 kali 2 kali 29 orang	1,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04			<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>						<b>1,071,279,205</b>						<b>1,071,279,205</b>		
1	05	03	1.04	01		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Raperda Yang Dilegislasikan Jumlah Regulasi Bidang Kebencanaan Yang Tersusun					1 Dokumen 2 Dokumen	0	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		1 Dokumen 2 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	03		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Kabupaten Yang Dapat Difasilitasi Forum PRB nya Jumlah Kerja Sama Dengan Pihak Swasta					1 Kabupaten 2 Kelompok	0	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	1 Kabupaten 2 Kelompok	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	04		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah aplikasi yang disediakan Jumlah pelatihan intern yang dilaksanakan Jumlah pelatihan pusdalops yang diikuti operasional pusdalops					1 unit 4 kali 4 kali 1 tahun	264,900,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	1 unit 4 kali 4 kali 1 tahun	264,900,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	05		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Kabupaten/kota yang di monev					4 kabupaten	806,379,205		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	4 kabupaten	806,379,205	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>						490,000,000						490,000,000		
1 05 04 1.01	<b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>						490,000,000						490,000,000		
1 05 04 1.01 02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah laporan pemetaan wilayah rawan kebakaran Jumlah Pos WMK di Kab/Kota Jumlah Raperdasi manajemen pencegahan penanganan kebakaran yang dihasilkan				4 laporan 4 kabupaten 1 buah	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		4 laporan 4 kabupaten 1 buah	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 04 1.01 03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Damkar yang dilatih Jumlah Relawan Damkar yang dilatih				60 orang 100 orang	490,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		60 orang 100 orang	490,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 04 1.01 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah anggota Damkar yang diperengkapi Jumlah peralatan dan perlengkapan Damkar				48 orang 2 unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		48 orang 2 unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 06	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>						<b>49,180,612,193</b>							<b>50,310,000,000</b>	
1 06 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>43,832,354,110</b>							<b>45,660,000,000</b>	
1 06 01 1.01	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>110,000,000</b>							<b>105,000,000</b>	
1 06 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	30,000,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Dokumen	35,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	30,000,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				1 Dokumen	20,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja SKPD				5 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	50,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>1 06 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>39,789,060,710</b>							<b>40,000,000,000</b>	
1 06 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan				260 Orang	39,789,060,710		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		260 Orang	40,000,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>1 06 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>150,000,000</b>							<b>350,000,000</b>	
1 06 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				10 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Orang	350,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>1 06 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>1,284,980,000</b>							<b>1,795,000,000</b>	
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan di gandakan				150000 Lembar	35,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		150000 Lembar	40,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah komponen ATK yang akan dimanfaatkan semua unit kerja				12 Bulan	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	350,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang disediakan				12 Bulan	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	55,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan				48 OT 24 Kali	1,049,980,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				48 OT 24 Kali	1,350,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>1 06 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>150,000,000</b>							<b>500,000,000</b>	
1 06 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya jumlah peralatan dan mesin yang diadakan				25 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 Unit	500,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
<b>1 06 01</b>	<b>1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>1,111,159,000</b>						<b>1,410,000,000</b>		
1 06 01	1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim			1000 Surat	7,500,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1000 Surat	10,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1 06 01	1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					757,472,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			850,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1 06 01	1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas pendukung kebersihan kantor Jumlah tenaga pengamanan yang disediakan			18 Orang 18 Orang	346,187,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			18 Orang 18 Orang	550,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
<b>1 06 01</b>	<b>1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>1,237,154,400</b>						<b>1,500,000,000</b>		
1 06 01	1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan			5 Unit	312,929,400		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		5 Unit	350,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1 06 01	1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					35,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1 06 01	1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang direhab			2 Unit	889,225,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			2 Unit	1,150,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
<b>1 06 02</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>					<b>300,000,000</b>						<b>900,000,000</b>		
<b>1 06 02</b>	<b>1.02</b>	<b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>					<b>300,000,000</b>						<b>900,000,000</b>		
1 06 02	1.02 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi					200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			400,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 02 1.02 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah TKSK yang mendapat peningkatan kapasitas				50 orang	100,000,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	50 orang	500,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
<b>1 06 04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>						<b>2,212,999,484</b>						<b>1,200,000,000</b>		
<b>1 06 04 1.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>						<b>500,000,000</b>						<b>550,000,000</b>		
1 06 04 1.01 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelayanan di dalam panti				18 Orang	350,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	18 Orang	350,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1 06 04 1.01 12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar						150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		200,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
<b>1 06 04 1.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti</b>						<b>250,000,000</b>						<b>350,000,000</b>		
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan di dalam panti				80 Orang	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	80 Orang	350,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
<b>1 06 04 1.03</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>						<b>1,112,999,484</b>						<b>0</b>		
1 06 04 1.03 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial				70 Orang	1,112,999,484		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua			70 Orang	0	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
<b>1 06 04 1.04</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti</b>						<b>250,000,000</b>						<b>0</b>		
1 06 04 1.04 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah WRSE yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial				60 Orang	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	60 Orang	0	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
<b>1 06 04 1.05</b>	<b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b>						<b>100,000,000</b>						<b>300,000,000</b>		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 04 1.05 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			300,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>						<b>1,150,000,000</b>							<b>350,000,000</b>	
1 06 05 1.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>						<b>1,150,000,000</b>							<b>350,000,000</b>	
1 06 05 1.02 01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						150,000,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			350,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 05 1.02 02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1,000,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>						<b>1,685,258,599</b>							<b>2,200,000,000</b>	
1 06 06 1.01	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>						<b>1,685,258,599</b>							<b>2,200,000,000</b>	
1 06 06 1.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan				50 Orang	685,258,599		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		50 Orang	700,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 06 06 1.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan				50 Orang	1,000,000,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				50 Orang	1,500,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 08	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							<b>1,880,000,000</b>						<b>2,370,000,000</b>	
2 08 02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>						<b>600,000,000</b>							<b>690,000,000</b>	
2 08 02 1.01	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>						<b>300,000,000</b>							<b>345,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 02 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG bagi focal point gender				1 kegiatan	150,000,000		Pendapatan Pajak Daerah		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 kegiatan	345,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 1.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	jumlah SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pendampingan penyusunan PPRG				1 kegiatan	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 kegiatan	0	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 1.02	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>						<b>300,000,000</b>							<b>345,000,000</b>	
2 08 02 1.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah partisipasi perempuan dalam politik				1 kegiatan	300,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 kegiatan	345,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>						<b>730,000,000</b>							<b>985,000,000</b>	
2 08 03 1.01	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>150,000,000</b>							<b>250,000,000</b>	
2 08 03 1.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						150,000,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					250,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03 1.02	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>430,000,000</b>							<b>550,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 03 1.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan yang tertangani				91 orang	250,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi 2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		91 orang	300,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 03 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah korban kekerasan yang tertangani				91 orang	180,000,000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi 2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		91 orang	250,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 03 1.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>						<b>150,000,000</b>						<b>185,000,000</b>		
2 08 03 1.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya kapasitas sumber daya lembaga pelayanan perempuan dan anak				30 orang	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		30 orang	185,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>						<b>250,000,000</b>						<b>345,000,000</b>		
2 08 04 1.01	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>						<b>250,000,000</b>						<b>345,000,000</b>		
2 08 04 1.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						250,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			345,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>						<b>300,000,000</b>						<b>350,000,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 07 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						300,000,000						350,000,000		
2 08 07 1.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah jejaring/mitra kerja perlindungan perempuan dan anak di kab/kota yang terkoordinasi				7 Kabupaten	300,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		7 Kabupaten	350,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						<b>2,789,000,000</b>						<b>3,150,000,000</b>		
2 12 03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>						<b>1,350,000,000</b>						<b>1,500,000,000</b>		
2 12 03 1.01	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>						<b>600,000,000</b>						<b>700,000,000</b>		
2 12 03 1.01 01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil						250,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			300,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 12 03 1.01 02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi						100,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			150,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 12 03 1.01 05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil						250,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				250,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 12 03 1.02	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>						<b>450,000,000</b>						<b>500,000,000</b>		
2 12 03 1.02 04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil						450,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			500,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 12 03 1.03	<b>Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>						<b>300,000,000</b>						<b>300,000,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 03 1.03 02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil						300,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		300,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 12 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>						<b>1,310,000,000</b>						<b>1,515,000,000</b>		
2 12 04 1.01	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>						<b>260,000,000</b>						<b>465,000,000</b>		
2 12 04 1.01 01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kabupaten/Kota				29 Lokasi	200,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	29 Lokasi	400,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 12 04 1.01 02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota						60,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		65,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 12 04 1.02	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>						<b>750,000,000</b>						<b>750,000,000</b>		
2 12 04 1.02 04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi				10 Orang	450,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	10 Orang	450,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 12 04 1.02 05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						300,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		300,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 04 1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						300,000,000							300,000,000	
2 12 04 1.03 02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek				5 Orang	300,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		5 Orang	300,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 12 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>						129,000,000							135,000,000	
2 12 05 1.01	Penyediaan Profil Kependudukan						129,000,000							135,000,000	
2 12 05 1.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain						129,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			135,000,000	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 07	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>							2,407,369,322						8,850,000,000	
2 07 03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>						1,249,991,047							3,750,000,000	
2 07 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						999,995,887							2,000,000,000	
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pendidikan dan latihan				100 orang	999,995,887		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		100 orang	2,000,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
2 07 03 1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja						83,331,720							750,000,000	
2 07 03 1.02 01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah akreditasi lembaga pelatihan kerja				8 BLK/LPK	83,331,720		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		8 BLK/LPK	750,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
2 07 03 1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah						83,331,720							500,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 03 1.03 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah konsultasi produktivitas perusahaan menengah				5 perusahaan	83,331,720		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5 perusahaan	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
<b>2 07 03 1.04</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>						<b>83,331,720</b>							<b>500,000,000</b>	
2 07 03 1.04 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pengukuran kompetensi produktivitas tenaga kerja				10 perusahaan	83,331,720		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		10 perusahaan	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
<b>2 07 04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>						<b>249,995,160</b>							<b>2,500,000,000</b>	
<b>2 07 04 1.01</b>	<b>Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>166,663,440</b>							<b>2,000,000,000</b>	
2 07 04 1.01 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sumber daya pelayanan antar kerja				58 kab/kota	83,331,720		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		58 kab/kota	1,500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 07 04 1.01 02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pelayanan antar kerja di kab				29 kab/kota	83,331,720		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi. 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		29 kab/kota	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
<b>2 07 04 1.05</b>	<b>Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						<b>83,331,720</b>							<b>500,000,000</b>	
2 07 04 1.05 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						83,331,720		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
<b>2 07 05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>						<b>500,730,981</b>							<b>1,600,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 05 1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota						149,995,780						500,000,000		
2 07 05 1.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah pengesahan peraturan perusahaan				8 perusahaan	149,995,780		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		8 perusahaan	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 07 05 1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						165,395,871						500,000,000		
2 07 05 1.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian perselisihan, mogok kerja				10 kasus	165,395,871		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		10 kasus	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 07 05 1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)						185,339,330						600,000,000		
2 07 05 1.03 01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah penetapan UMP tahun 2022				1 dokumen	185,339,330		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 dokumen	600,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						406,652,134						1,000,000,000		
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						406,652,134						1,000,000,000		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah pelaksanaan norma kerja di perusahaan				8 kab/kota	205,153,335		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		8 kab/kota	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah pelayanan K3 di perusahaan				8 kab/kota	201,498,799		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		8 kab/kota	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2 17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>						<b>2,499,897,195</b>							<b>4,900,000,000</b>	
2 17 03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>						<b>449,998,783</b>							<b>850,000,000</b>	
2 17 03 1.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						<b>449,998,783</b>							<b>850,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 03 1.01 01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa				75 Koperasi	249,999,188	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayawijaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pegunungan Bintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		75 Koperasi	350,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 03 1.01 02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Tersedianya Data Koperasi				125 Koperasi	199,999,595	Kab. Jayawijaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus			125 Koperasi	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
2 17 04	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>						<b>299,999,500</b>						<b>500,000,000</b>		
2 17 04 1.01	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						<b>299,999,500</b>						<b>500,000,000</b>		
2 17 04 1.01 02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi						299,999,500		Lain-lain PAD Yang Sah		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
2 17 06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>						<b>249,999,187</b>						<b>350,000,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 06 1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						249,999,187						350,000,000		
2 17 06 1.01 02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan				100 Koperasi	249,999,187	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayawijaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	100 Koperasi	350,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						499,900,000						1,200,000,000		
2 17 07 1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						499,900,000						1,200,000,000		
2 17 07 1.01 01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UMKM yang didata Pengembangan Sistem Informasi / Website Pendataan				19 Kabupaten/Kota 1 Aplikasi	499,900,000	Kab. Paniai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Puncak Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Yahukimo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pegunungan Bintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tolikara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boven Digoel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mappi, Semua	Dana Otonomi Khusus			19 Kabupaten/Kota 1 Aplikasi	1,200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
										Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dogiyai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nduga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Yalimo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamberamo Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lanny Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Puncak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Intan Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																
Provinsi Papua																
Tahun 2022																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
										Kab. Deiyai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
2	17 08								999,999,725							2,000,000,000
2	17 08	1.01							999,999,725							2,000,000,000
2	17 08	1.01 01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang Bermitra dan diberi penguatan				50 UMKM	999,999,725	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayawijaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tolikara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boven Digoel, Semua	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi. 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	50 UMKM	2,000,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																	
Provinsi Papua																	
Tahun 2022																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3																	
3	30							82,936,896,008								88,575,000,000	
3	30	01						81,040,375,973								83,375,000,000	
3	30	01	1.01					92,976,300								115,000,000	
3	30	01	1.01	02				57,409,825		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			65,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
3	30	01	1.01	06				35,566,475		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			50,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
3	30	01	1.02					73,286,505,880							74,590,000,000		
3	30	01	1.02	01				73,201,815,210		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			74,500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
3	30	01	1.02	05				56,395,010		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
3	30	01	1.02	07				28,295,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			30,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						967,350,000						900,000,000		
3 30 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						547,350,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		600,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
3 30 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						420,000,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		300,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
3 30 01 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						2,732,572,491						2,870,000,000		
3 30 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						45,569,516		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		50,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
3 30 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						162,223,730		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		300,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
3 30 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						52,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		70,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
3 30 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						65,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		70,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
3 30 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						372,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		380,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
3 30 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2,034,879,245		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2,000,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
3 30 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						593,839,710						1,700,000,000		
3 30 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						180,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						413,839,710		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			1,500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
<b>3 30 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1,283,361,592</b>							<b>1,350,000,000</b>	
3 30 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						347,847,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			375,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3 30 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						638,594,592		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			675,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3 30 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						296,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			300,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
<b>3 30 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>2,083,770,000</b>							<b>1,850,000,000</b>	
3 30 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						414,970,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3 30 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						269,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			350,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3 30 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1,399,800,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			1,000,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
<b>3 30 04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>						<b>896,520,025</b>							<b>2,700,000,000</b>	
3 30 04 1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi						96,520,025							900,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 04 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Ketersediaan Bapokting				2000 Ton	96,520,025	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayawijaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2000 Ton	900,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
3 30 04 1.02	<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>						<b>800,000,000</b>						<b>1,800,000,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
3	30	04	1.02	01		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas yang di awasi harganya				10 komonditi	300,000,000	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayawijaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus			10 komonditi	800,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
3	30	04	1.02	02		Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan operasi pasar				2 kali/Tahun	500,000,000	Kab. Paniai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dogiyai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	2 kali/Tahun	1,000,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja		
3	30	05				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>						<b>803,085,635</b>						<b>2,000,000,000</b>		
3	30	05	1.01			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						<b>803,085,635</b>						<b>2,000,000,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 05 1.01 01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah UKM/IKM Yang Mengikuti Pameran Perdagangan				20 Orang/UKM,IKM	399,995,775	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		20 Orang/UKM,IKM	1,000,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3 30 05 1.01 03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah UKM dan IKM yang mengikuti Misi Dagang				2 kali/Tahun	300,000,000	Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 kali/Tahun	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3 30 05 1.01 05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah UKM dan IKM Pelaku Ekspor yang mengikuti pembinaan				10 UKM/IKM	103,089,860	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		10 UKM/IKM	1,000,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3 30 06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>						<b>196,914,375</b>							<b>500,000,000</b>	
3 30 06 1.01	<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>196,914,375</b>							<b>500,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
3	30	06	1.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Sengketa masalah konsumen yang diselesaikan				10 Kasus	196,914,375	Kab. Jayawijaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Puncak Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pegunungan Bintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tolikara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		10 Kasus	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
<b>3</b>	<b>31</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						<b>2,399,904,030</b>					<b>0</b>			
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>02</b>				<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>						<b>1,966,904,805</b>							<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>02</b>	<b>1.01</b>			<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>						<b>1,966,904,805</b>							<b>0</b>	
3	31	02	1.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	jumlah				1 set	1,500,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 set		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3	31	02	1.01	04		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah				1 kegiatan	266,904,805		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 kegiatan		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3	31	02	1.01	05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah				1 kegiatan	200,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 kegiatan		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>03</b>				<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>						<b>100,000,000</b>							<b>0</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 03 1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi						100,000,000							0	
3 31 03 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi						100,000,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3 31 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>						332,999,225							0	
3 31 04 1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						332,999,225							0	
3 31 04 1.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						200,000,000		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3 31 04 1.01 02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas						132,999,225		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						499,999,840							800,000,000	
3 30 06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>						499,999,840							800,000,000	
3 30 06 1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						499,999,840							800,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 06 1.02 02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Sampel Pengujian/Layanan Pengujian				10 Sampel	499,999,840	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					10 Sampel	800,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						499,999,825							500,000,000	
3 30 06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>														
3 30 06 1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						499,999,825							500,000,000	
3 30 06 1.02 04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah alata kalibrasi yang dilakukan kalibrasi				10 Alat	499,999,825	Kab. Jayawijaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					10 Alat	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>						2,755,688,614							3,100,000,000	
2 17 05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>														
2 17 05 1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1,980,688,614							2,250,000,000	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 05 1.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pendamping yang dilatih Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bidang manajemen pemasaran bisnis retail Jumlah peserta pelatihan kompetensi manager/pengelola koperasi Jumlah peserta pelatihan pengembangan bisnis koperasi Jumlah peserta pelatihan penilaian kesehatan koperasi Jumlah peserta pelatihan penyusunan bisnis plan KUKM Jumlah peserta penyusunan laporan keuangan koperasi berbasis komputerisasi				8 Orang 60 Orang 40 orang 60 orang 40 orang 60 Orang 40 orang	1,980,688,614	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi. 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi. 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi. 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		8 Orang 60 Orang 40 orang 40 orang 60 Orang 40 orang	2,250,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
2 17 05 1.02	<b>Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						<b>775,000,000</b>						<b>850,000,000</b>		
2 17 05 1.02 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah peserta pelatihan keterampilan teknis berbasis potensi lokal Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bidang manajemen desain produk Jumlah peserta pelatihan teknologi infoemasi digital marketing				40 Orang 40 Orang 40 Orang	775,000,000	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi. 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi. 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		40 Orang 40 Orang 40 Orang	850,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 09	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>							<b>5,160,000,000</b>						<b>1,300,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						1,000,000,000							0	
2 09 02 1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi						1,000,000,000							0	
2 09 02 1.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						1,000,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			0	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						1,800,000,000							300,000,000	
2 09 03 1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						1,200,000,000							0	
2 09 03 1.01 02	Penyediaan Pangan Berdasarkan Sumber Daya Lokal	tersedianya pangan lokal				29 Kab/Kota	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		29 Kab/Kota	0	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 03 1.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	terdistribusinya pangan dengan cukup				1 kegiatan	300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 kegiatan	0	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 03 1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi						300,000,000							300,000,000	
2 09 03 1.02 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah cadangan pangan daerah yang tersedia				1 paket	300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 paket	300,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 03 1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi						300,000,000						0		
2 09 03 1.04 01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	terlaksananya lomba cipta menu tersedianya informasi berbagai jenis pangan lokal				2 kali 10 jenis	300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 kali 10 jenis	0	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>						2,360,000,000						1,000,000,000		
2 09 05 1.01	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>						2,360,000,000						1,000,000,000		
2 09 05 1.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi pangan yang diperiksa				22 sampel	1,360,000,000			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		22 sampel	0	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 05 1.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan						1,000,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			1,000,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 27	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						122,736,953,154							0	
3 27 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						98,736,953,154						0		
3 27 01 1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						1,600,000,000						0		
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan				1 tahun	1,500,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 tahun	0	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kkinerja SKPD yang disusun				1 laporan	100,000,000			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 laporan	0	Dinas Pertanian dan Pangan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>88,764,770,000</b>						<b>0</b>		
3 27 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan gaji yang dibauarkan				14 bulan	88,614,770,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		14 bulan	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun				2 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 Laporan	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD						100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>250,000,000</b>							<b>0</b>	
3 27 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	pengelolaan adminitrasi kepegawaian semakin baik				1 kegiatan	250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 kegiatan	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>2,472,183,154</b>							<b>0</b>	
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan				20 unit	250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		20 unit	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang diadakan Jumlah bulan bahan logistik yang diadakan dan diangkut				30 jenis 12 bulan	172,183,154		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		30 jenis 12 bulan	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan jumlah penggandaan				200 buku 10000 lembar	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		200 buku 10000 lembar	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material						350,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi				25 kali	1,600,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		25 kali	0	Dinas Pertanian dan Pangan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1,000,000,000</b>							<b>0</b>	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						950,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>4,650,000,000</b>							<b>0</b>	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang dibangun dan direhab				4 unit	1,000,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	4 unit		0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang dibangun dan direhab				8 Unit	1,500,000,000	Kab. Jayapura, Nimboran, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Heram, Waena	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	8 Unit		0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang dibangun dan direhab				3 unit	1,000,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	3 unit		0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>						<b>8,500,000,000</b>							<b>0</b>	
3 27 02 1.01	<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>						<b>300,000,000</b>							<b>0</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya penagwasan pupuk bersubsidi				1 kegiatan	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 kegiatan	0	Dinas Pertanian dan Pangan	
<b>3 27 02 1.02</b>	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>						<b>4,850,000,000</b>						<b>0</b>		
3 27 02 1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikasi benih yang diterbitkan				25 sertifikat	750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	25 sertifikat	0	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah penyediaan benih unggul tanaman hortikultura				5 jenis	1,200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	5 jenis	0	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan						1,700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		0	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah penggunaan benih unggul yang beredar				5 Jenis	1,200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	5 Jenis	0	Dinas Pertanian dan Pangan	
<b>3 27 02 1.04</b>	<b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>						<b>600,000,000</b>						<b>0</b>		
3 27 02 1.04 01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	jumlah hewan yang tertangani				1000 ekor	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1000 ekor	0	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 02 1.04 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah bibit ternak yang tersedia				750 ekor	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			750 ekor	0	Dinas Pertanian dan Pangan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02 1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi						2,750,000,000						0		
3 27 02 1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit ternak yang tersedia				500 ekor	2,750,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		500 ekor	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 03	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>						1,300,000,000						0		
3 27 03 1.01	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>						1,300,000,000						0		
3 27 03 1.01 02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah kawasan pertanian yang dikembangkan				5 Kawasan	300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5 Kawasan	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah bangunan yang dibangun dan direhab				5 Unit	1,000,000,000	Kab. Jayapura, Nimboran, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Kurik, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Kurik, Kurik	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi. 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5 Unit	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 04	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>						1,200,000,000						0		
3 27 04 1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						300,000,000						0		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 04 1.01 02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah hewan ternak yang dilayani				750 ekor	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		750 ekor	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 04 1.03	<b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>						<b>900,000,000</b>							<b>0</b>	
3 27 04 1.03 03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel yang diperiksa				200 sampel	900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		200 sampel	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>						<b>2,200,000,000</b>							<b>0</b>	
3 27 05 1.01	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>						<b>2,200,000,000</b>							<b>0</b>	
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	luas pengendalian OPT Perkebunan				25 Ha	1,300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		25 Ha	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 05 1.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	luas penanganan Dampak perubahan iklim tanaman perkebunan				25 Ha	900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		25 Ha	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 06	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>						<b>300,000,000</b>							<b>0</b>	
3 27 06 1.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>300,000,000</b>							<b>0</b>	
3 27 06 1.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah penerbitan izin usaha				20 unit	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		20 unit	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>						<b>10,500,000,000</b>							<b>0</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 07 1.01	<b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>						<b>1,100,000,000</b>							<b>0</b>	
3 27 07 1.01 02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah penyuluh pertanian yang dilatih				100 orang	1,100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		100 orang	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 07 1.02	<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>						<b>6,800,000,000</b>							<b>0</b>	
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi dan informasi yang tersebar				5000 lembar	300,000,000				4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5000 lembar	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah penyuluh pertanian yang dilatih Jumlah peserta didik lulus				350 orang 150 orang	6,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		350 orang 150 orang	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 07 1.03	<b>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</b>						<b>2,600,000,000</b>							<b>0</b>	
3 27 07 1.03 01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelembagaan korporasi petani yang dibentuk Terlaksananya iven Penas				5 kelompok 1 kegiatan	2,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5 kelompok 1 kegiatan	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 07 1.03 02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			0	Dinas Pertanian dan Pangan
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>7,000,000,000</b>						<b>4,900,000,000</b>		
2 11 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>1,250,000,000</b>						<b>300,000,000</b>		
2 11 02 1.01	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>						<b>800,000,000</b>						<b>300,000,000</b>		
2 11 02 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	jumlah Pertemuan pembahasan Draf PERDASI jumlah Rancangan PERDASI dan Naskah Akademiknya				10 Kali 2 Dokumen	200,000,000				4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		10 Kali 2 Dokumen	300,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 11 02 1.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup				5 Dokumen	600,000,000	Kab. Jayapura, Sentani, Hinekombe Kab. Merauke, Merauke, Mandala Kab. Mimika, Mimika Baru, Kwamki Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop Kab. Boven Digoel, Mandobo, Persatuan					5 Dokumen	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2 11 02 1.02	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>						<b>450,000,000</b>								<b>0</b>	
2 11 02 1.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen yang dipantau dan dievaluasi Jumlah dokumen yang divalidasi				3 Dokumen 3 Dokumen	450,000,000				5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		3 Dokumen 3 Dokumen	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2 11 03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>450,000,000</b>								<b>650,000,000</b>	
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						<b>250,000,000</b>								<b>350,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 03 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	jumlah Kabupaten yang dievaluasi pelaksanaan Penurunan Emisi GRK sektor Limbah				5 Kabuapten	250,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5 Kabuapten	350,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2 11 03 1.02	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>						<b>200,000,000</b>							<b>300,000,000</b>	
2 11 03 1.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Danau yang diukur kualitas airnya				2 Danau	200,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paniai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 Danau	300,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2 11 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>						<b>1,250,000,000</b>							<b>1,500,000,000</b>	
2 11 04 1.01	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>						<b>1,250,000,000</b>							<b>1,500,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 04 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati						250,000,000								Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2 11 04 1.01 05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Pengembangan data dan informasi Cycloop Center				1 Dokumen	1,000,000,000					1 Dokumen	1,500,000,000		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2 11 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>0</b>	
2 11 05 1.01	<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>0</b>	
2 11 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Kab/Kota yang dibina Jumlah usaha kegiatan yang awasi Luas lahan yang dibebaskan Pematangan lahan				3 Kab/Kota 10 Usaha/Kegiatan 15000 M2 15000 M2	1,200,000,000	Kab. Jayapura, Sentani, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Muara Tami, Koya Timur Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Keerom, Arso, Arso Kota				3 Kab/Kota 10 Usaha/Kegiatan 15000 M2 15000 M2			Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2 11 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>						<b>500,000,000</b>							<b>0</b>	
2 11 06 1.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>						<b>500,000,000</b>							<b>0</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
2	11	06	1.01	03		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha kegiatan yang diawasi/dibina				10 Usaha/Kegiatan	500,000,000	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boven Digoel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	10 Usaha/Kegiatan	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2	11	08				<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>						<b>950,000,000</b>					<b>1,050,000,000</b>			
2	11	08	1.01			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi						<b>950,000,000</b>					<b>1,050,000,000</b>			

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 08 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	jumlah peserta yang diklat PPNS di Luar papua Jumlah Peserta yang ikut BIMTEK KLHS RPJMD dan RTRW kelas Papua Jumlah peserta yang ikut BIMTEK penyusunan IKPLHD Kelas Papua Jumlah Peserta yang ikut diklat PPLHD di Luar papua				4 Org 30 org 30 Org 4 Orang	350,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		4 Org 30 org 30 Org 4 Orang	350,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2 11 08 1.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Baliho yang terpasang Jumlah Media yang meliput kegiatan jumlah peserta yang mengikuti Peringatan Hari Lingkungan Hidup Jumlah peserta yang Mengikuti Peringatan HCP jumlah peserta yang mengikuti Peringatan HPSN				3 buah 3 media 100 Orang 50 Orang 100 Orang	600,000,000	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 buah 3 media 100 Orang 50 Orang 100 Orang	700,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2 11 09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>						<b>700,000,000</b>						<b>700,000,000</b>		
2 11 09 1.01	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>						<b>700,000,000</b>						<b>700,000,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 09 1.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Jumlah Kabupaten yang dibina dan menerima Adipura 2. Jumlah Sekolah yang dibina dan menerima Penghargaan Adiwiyata 3. Jumlah Individu dan Kelompok yang dibina dan menerima Kalpataru 4. Jumlah Kampung Iklim yang dibentuk 5. Jumlah Kabupaten yang dibina dalam Penyusun IKPLHD				6 Kabupaten 6 Sekolah 2 Kelompok 2 kampung 6 Kabupaten	700,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	6 Kabupaten 6 Sekolah 2 Kelompok 2 kampung 6 Kabupaten	700,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2 11 11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>						<b>700,000,000</b>						<b>700,000,000</b>		
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						<b>700,000,000</b>						<b>700,000,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 11 11 1.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1. Jumlah Kab/Kota yang menerima sarana dan Prasarana sampah 2. Jumlah sarana dan Prasarana Sampah				6 Kabupaten 6 Unit	700,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		6 Kabupaten 6 Unit	700,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3	28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>178,192,978,440</b>						<b>178,412,082,940</b>		
3	28	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>					<b>155,150,278,440</b>						<b>154,962,082,940</b>		
3	28	01	1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>2,407,195,500</b>					<b>1,350,000,000</b>		
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Kehutanan			1 judul dokumen	250,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 judul dokumen	250,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun			100 Dokumen	150,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	100 Dokumen	150,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun				100 Dokumen	150,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		100 Dokumen	150,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun				100 dokumen	150,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		100 dokumen	150,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun				100 Dokumen	150,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		100 Dokumen	150,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang dibuat				4 judul laporan	500,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		4 judul laporan	500,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya rapat kerja teknis Tersusunnya Buku Statistik DKLH Provinsi Papua Tahun 2021 Tersusunnya Buletin Teropong Kehutanan				1 kali 1 Buku 2 Edisi	1,057,195,500				4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 kali 1 Buku 2 Edisi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
<b>3 28 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>134,146,398,940</b>							<b>134,146,398,940</b>	
3 28 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji pokok dan tunjangan lainnya				687 Orang	133,296,398,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		687 Orang	133,296,398,940	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan akuntansi SKPD yang dibuat				3 judul laporan	150,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 judul laporan	150,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun SKPD				1 judul Laporan	200,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 judul Laporan	200,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dibuat				4 judul	100,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		4 judul	100,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan DBH-DR, DBH PSDH yang dibuat				3 judul	400,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 judul	400,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
<b>3 28 01 1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>100,000,000</b>							<b>100,000,000</b>	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen barang milik daerah (SKPD)				3 dokumen	100,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 dokumen	100,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
<b>3 28 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>850,000,000</b>							<b>900,000,000</b>	
3 28 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen kepegawaian yang terdata				20 eksemplar	200,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		20 eksemplar	200,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan informasi kepegawaian				10 kali	150,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		10 kali	200,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah yang mengikuti Diklat Penjurangan, Bintek, Diklat teknis kehutanan, dan pelatihan				15 orang	300,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		15 orang	300,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM kehutanan yang mengikuti sosialisasi peraturan				20 orang	50,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		20 orang	50,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM Kehutanan Dalam Pendidikan dan Pelatihan				17 orang	150,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		17 orang	150,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
<b>3 28 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>8,361,000,000</b>							<b>8,450,000,000</b>	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan genset, pemeliharaan genset, pemeliharaan instalasi listrik				2 kegiatan	130,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 kegiatan	130,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja di semua bidang yang diadakan (komputer dan printer)				40 unit	1,300,000,000				3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		40 unit	1,300,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan				30 Unit	600,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		30 Unit	600,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan alat tulis kantor				50 bahan	700,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		50 bahan	700,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan blangko administrasi dan dokumen, materi dinas				50 eksemplar	500,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		50 eksemplar	500,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tabloid, media cetak dan buku yang di adakan				2500 eksmlar	30,000,000				4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2500 eksmlar	70,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat dinas dan makan minum tamu				60 kali	700,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		60 kali	700,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi konsultasi di dalam provinsi dan luar provinsi				7 Kegiatan	4,151,000,000	Kab. Biak Numfor, Biak Kota, Semua Kelurahan Kab. Jayapura, Sentani, Semua Kelurahan Kab. Jayawijaya, Wamena, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Merauke, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Mimika Baru, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Nabire, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	7 Kegiatan	4,200,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
3 28 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						250,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		250,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
3 28 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>2,265,684,000</b>						<b>2,615,684,000</b>		
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya sarana kendaraan operasional kegiatan				2 Unit	500,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	2 Unit	550,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang di adakan				40 unit	365,684,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		40 unit	365,684,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terbangun				3 unit	1,400,000,000	Kab. Jayapura, Sentani, Sentani Kota Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria Kota Jayapura, Muara Tami, Koya Timur			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 unit	1,500,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung gedung kantor yang terbangun				0 unit	0	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		0 unit	200,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
<b>3 28 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>4,550,000,000</b>							<b>4,800,000,000</b>	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat dinas				650 surat	320,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		650 surat	350,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sarana Komunikasi Telepon, internet, air dan Listrik Penunjang Pelayanan Kantor				40 unit	880,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		40 unit	880,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perbaikan peralatan kantor (AC)				48 unit	50,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		48 unit	70,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung kantor yang disewa Jumlah Operator Komputer yang dibayarkan Jumlah tenaga keamanan yang dibayarkan Jumlah Tenaga Kebersihan yang dibayarkan				13 Unit 15 Orang 10 Orang 15 Orang	3,300,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		13 Unit 15 Orang 10 Orang 15 Orang	3,500,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perbaikan sarana prasarana kantor Lingkup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup				1 unit kegiatan	500,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 unit kegiatan	500,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>18,292,700,000</b>							<b>17,200,000,000</b>	
3 28 03 1.01	<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>						<b>250,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan				5 laporan	250,000,000	Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boven Digoel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5 laporan	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.02	<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>						<b>642,700,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersedianya data dan informasi flora/ fauna, HHBK dan Jasling sebagai bahan penyusunan bisnis model KPH				14 KPH	642,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		14 KPH	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
3	28	03	1.03			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						6,900,000,000					5,500,000,000			
3	28	03	1.03	01		Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya Data dan informasih Potensi Hasil Hutan Kayu				2 lokasi	1,300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 lokasi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	28	03	1.03	02		Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersediaannya data Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tersediaannya data Potensi Hasil Hutan Kayu				1 dokumen 1 dokumen	300,000,000	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boven Digoel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 dokumen 1 dokumen		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
3	28	03	1.03	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Usaha Yang Dimonitor				15 Unit	3,400,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boven Digoel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			15 Unit	3,500,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	28	03	1.03	06		Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya Data Potensi Jasa lingkungan				2 lokasi	900,000,000	Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boven Digoel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			2 lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	03	1.03	09		Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	jumlah produk HHBK yang diadakan				3 produk	1,000,000,000		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			3 produk	2,000,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
															Nasional	Daerah										
3	28	03	1.04			<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>													<b>3,500,000,000</b>						<b>3,500,000,000</b>	
3	28	03	1.04	02		Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbinanya KTH Tertanamnya Hutan Rakyat				5 Kelompok 10 Ha	3,000,000,000	Kab. Biak Numfor, Biak Timur, Kajasbo Kab. Jayapura, Sentani Barat, Dosay Kab. Jayapura, Ebungfao, Bobrongko Kab. Nabire, Uwapa, Topo Kab. Yahukimo, Anggruk, Yaholikma		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5 Kelompok 10 Ha	3,000,000,000		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup						
3	28	03	1.04	06		Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya Bibit RHL				25000 batang	500,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		25000 batang	500,000,000		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup						
3	28	03	1.05			<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>3,400,000,000</b>												<b>4,500,000,000</b>		
3	28	03	1.05	01		Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terselenggaranya pembinaan masyarakat				6 kelompok	1,000,000,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		6 kelompok	1,500,000,000		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup						
3	28	03	1.05	04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	terlaksananya operasi pengamanan hutan terlaksananya peningkatan sarpras pengamanan hutan				2 kegiatan 1 kegiatan	1,700,000,000			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 kegiatan 1 kegiatan	2,000,000,000		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup						
3	28	03	1.05	05		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangu langan Kebakaran Hutan dan Lahan	terlaksananya bimtek Dalkarhutla				1 kegiatan	700,000,000					1 kegiatan	1,000,000,000		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup						
3	28	03	1.06			<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>						<b>2,600,000,000</b>												<b>2,700,000,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Tertanamnya HHBK				10 Ha	2,000,000,000	Kab. Biak Numfor, Yendidori, Suneri Kab. Jayapura, Depapre, Wambena Kab. Merauke, Merauke, Wasur Kab. Nabire, Uwapa, Semua Kelurahan			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		10 Ha	2,000,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.06 04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Izin Yang Diawasi				10 izin	600,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mappi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		10 izin	700,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
													Nasional					Daerah
3	28	03	1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun					1,000,000,000						1,000,000,000			
3	28	03	1.07	02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu Yang di Bina			25 Unit	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	25 Unit	1,000,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
3	28	04		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					3,250,000,000						4,250,000,000			

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam						3,250,000,000						4,250,000,000		
3 28 04 1.03 01	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah dokumen dan peta potensi karst				1 Dokumen dan Peta	250,000,000	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Dokumen dan Peta	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 04 1.03 04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luasan tertanam dan terpelihara				10 Ha	1,000,000,000	Kab. Biak Numfor, Numfor Timur, Kornasoren Kab. Jayapura, Demta, Demta Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Bonggo, Armopa		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		10 Ha	1,250,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 04 1.03 05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun				20 unit	2,000,000,000		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		20 unit	3,000,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>						1,500,000,000						2,000,000,000		
3 28 05 1.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>						1,500,000,000						2,000,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terbinanya KTH				5 Kelompok	1,000,000,000	Kab. Biak Numfor, Samofa, Darmopis Kab. Jayapura, Kemptuk Gresi, Nembu Gresi Kab. Merauke, Semangga, Wanninggap Nanggo Kab. Waropen, Waropen Bawah, Sarafambai			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5 Kelompok	1,000,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terbinanya Kelompok Perhutanan Sosial				2 Kelompok	500,000,000	Kab. Jayapura, Demta, Demta Kab. Mimika, Iwaka, Pigapu			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 Kelompok	1,000,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>2,000,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>2,000,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.03	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>						<b>600,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Tercapainya Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingling				1 Tahun	600,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Tahun	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.04	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>						<b>1,000,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Tercapainya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				1 Tahun	1,000,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Tahun	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						400,000,000						0		
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Tercapainya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Tahun	200,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Tahun	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangu- langan Kebakaran Hutan dan Lahan	Tercapainya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan- gan Karhutla				1 Tahun	200,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Tahun	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>850,000,000</b>						<b>850,000,000</b>		
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>850,000,000</b>						<b>850,000,000</b>		
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						150,000,000						150,000,000		
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Identifikasi potensi damar Koordinasi potensi HHBK di Provinsi				1 Lokasi 1 Kali	150,000,000	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Lokasi 1 Kali	150,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						250,000,000						250,000,000		
3 28 03 1.04 06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Koordinasi kegiatan RHL di Provinsi Papua Terpeliharanya tanaman rehabilitasi hutan dan lahan				2 Kali 15 Ha	250,000,000	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 Kali 15 Ha	250,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						450,000,000						450,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Lokasi Patroli Kawasan Hutan yang dilaksanakan Monev perizinan pemanfaatan hasil hutan Pengendalian pengawasan pada IU(HHK				4 lokasi 16 Iizin 4 IUPHHK	450,000,000	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		4 lokasi 16 Iizin 4 IUPHHK	450,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>														
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>														
3 28 03 1.03	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>														
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Terbinanya kelompok Tani				7 kelompok	800,000,000	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		7 kelompok		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.04	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>														
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya pembinaan/pengawasan kegiatan RHL				4 lokasi	300,000,000	Kab. Keerom, Arso Timur, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		4 lokasi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.05	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>														
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya patroli perlindungan hutan				9 lokasi	300,000,000	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		9 lokasi		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terbentuknya masyarakat peduli api				2 kelompok	200,000,000	Kab. Keerom, Senggi, Semua Kelurahan Kab. Keerom, Skanto, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 kelompok	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						600,000,000							0	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						600,000,000							0	
3 28 03 1.03	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>						200,000,000							0	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Tercapainya pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan hasil hutan bukan kayu				1 lokasi	200,000,000	Kab. Mamberamo Raya, Sawai, Poiwai	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.04	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>						400,000,000							0	
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	tercapainya sinergitas pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan peningkatan ekonomi masyarakat				1 lokasi	400,000,000	Kab. Mamberamo Raya, Sawai, Poiwai	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						850,000,000							0	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						850,000,000							0	
3 28 03 1.03	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>						500,000,000							0	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan/budidaya tanaman kehutanan				4 Ha	500,000,000	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		4 Ha	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.05	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						350,000,000							0	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya patroli perlindungan hutan				4 kali	300,000,000	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	4 kali	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	tercapainya koordinasi penanggulangan karhutla				2 lokasi	50,000,000	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	2 lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>							<b>900,000,000</b>						<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>							<b>900,000,000</b>						<b>0</b>	
3 28 03 1.03	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>							<b>200,000,000</b>						<b>0</b>	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Terbentuknya Kelompok Pengelolaan Sagu				1 kelompok	200,000,000	Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 kelompok	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.04	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>							<b>500,000,000</b>						<b>0</b>	
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terbinanya Kelompok Tani Hutan terpeliharanya dan terbangunnya sejumlah Luasan Hutan tanaman rakyat				2 kelompok 10 Ha	500,000,000	Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	2 kelompok 10 Ha	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.05	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>							<b>200,000,000</b>						<b>0</b>	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Pengawasan dan Perlindungan Hutan (Patroli Polhut dan MMP)				2 kali	100,000,000	Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	2 kali	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Kampanye Pencegahan Penanggulangan Karhutla				1 kali	100,000,000	Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 kali	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>							<b>700,000,000</b>						<b>700,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>700,000,000</b>						<b>700,000,000</b>		
3 28 03	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>						<b>187,000,000</b>						<b>187,000,000</b>		
3 28 03	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Meningkatkan usaha pemanfaatan HHK dan HHBK				5 lokasi	187,000,000	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5 lokasi	187,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>						<b>193,000,000</b>						<b>193,000,000</b>		
3 28 03	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya pembinaan dan RHL				3 lokasi	193,000,000	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 lokasi	193,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>320,000,000</b>						<b>320,000,000</b>		
3 28 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya penertiban peraturan kehutanan yang berlaku pada masyarakat				3 lokasi	320,000,000		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 lokasi	320,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>700,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>700,000,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>						<b>400,000,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan yang ditanami gaharu				5 Ha	400,000,000	Kab. Mappi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					5 Ha	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>300,000,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	jumlah lokasi yang diawasi peredaran hasil hutan				4 lokasi	150,000,000	Kab. Mappi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					4 lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangu- ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	jumlah lokasi rawan kebakaran hutan yang dipantau				4 lokasi	150,000,000	Kab. Mappi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					4 lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>1,000,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>1,000,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.03	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>						<b>250,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Meningkatnya Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu sesuai aturan yang berlaku				2 kelompok	250,000,000	Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 kelompok	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.04	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>						<b>250,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kesadaran Masyarakat semakin Meningkat dalam gerakan RHL				200 Ha	250,000,000	Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		200 Ha	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.05	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>500,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan aturan Kehutanan yang berlaku, berkurangnya Illegal Lgging dan Perambahan Hutan				5 Lokasi	250,000,000	Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5 Lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangu- ngan Kebakaran Hutan dan Lahan	Tercapainya penurunan perambahan hutan				3 kelompok	250,000,000	Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 kelompok	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>650,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>650,000,000</b>							<b>0</b>	





**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Sosialisasi dan Pengamanan Hutan				1 Tahun	150,000,000	Kab. Yahukimo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Tahun	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>							<b>600,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>							<b>600,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.04	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>						<b>400,000,000</b>							<b>0</b>		
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan/budidaya tanaman kehutanan				2 kelompok	400,000,000	Kab. Dogiyai, Kamu, Ekemanida	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 kelompok	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.05	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>200,000,000</b>							<b>0</b>		
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pencegahan perambahan dan pembalakan liar				1 lokasi	200,000,000	Kab. Dogiyai, Kamu Utara, Pugatadi I	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>							<b>600,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>							<b>600,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.04	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>						<b>450,400,000</b>							<b>0</b>		
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Tercapainya Pengembangan Rehabilitasi Hutan				2 Ha	450,400,000	Kab. Intan Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 Ha	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.05	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>149,600,000</b>							<b>0</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Tercapainya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan  Tercapainya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				9 Hari 120 Hari	149,600,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Intan Jaya, Sugapa, Semua Kelurahan Kab. Intan Jaya, Hitadipa, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	9 Hari 120 Hari	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>700,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>700,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.04	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>						<b>450,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Tercapainya Sinergitas Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Ekonomi Masyarakat				1 Tahun	450,000,000	Kab. Mamberamo Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 Tahun	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.05	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>250,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggu langan Kebakaran Hutan dan Lahan						250,000,000	Kab. Mamberamo Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>600,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>600,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.03	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>						<b>80,000,000</b>							<b>0</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Terbinanya kelompok tani yang berada diwilayah kerja CDKLH Paniai				3 kelompok	80,000,000	Kab. Paniai, Paniai Timur, Semua Kelurahan Kab. Paniai, Wegee Muka, Semua Kelurahan Kab. Paniai, Pugo Dagi, Semua Kelurahan			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 kelompok	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.04	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>						<b>350,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan diwilayah kerja CDKLH Paniai				10 Ha	350,000,000	Kab. Paniai, Paniai Timur, Woeyubetu			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		10 Ha	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.05	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>170,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Patroli Perlindungan Hutan di wilayah kerja CDKLH Paniai				3 kali	90,000,000	Kab. Paniai, Paniai Timur, Semua Kelurahan			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 kali	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan				3 kali	80,000,000	Kab. Paniai, Paniai Timur, Semua Kelurahan Kab. Paniai, Wegee Muka, Semua Kelurahan			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 kali	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>600,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>600,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.03	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>						<b>200,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Tercapainya pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan hasil hutan bukan kayu				1 Ha	200,000,000	Kab. Tolikara, Yuneri, Wenome	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Ha	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						400,000,000							0		
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Tercapainya sinergitas pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan peningkatan ekonomi masyarakat				1 ha	400,000,000	Kab. Tolikara, Yuni, Wenome		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 ha		0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>550,000,000</b>								<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>550,000,000</b>								<b>0</b>	
3 28 03 1.03	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>						<b>550,000,000</b>								<b>0</b>	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Tersedianya Produk HHBK (Madu) Tersedianya Produk HHBK (Madu) Dataran Tinggi				50 Liter 50 Liter	550,000,000	Kab. Puncak Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Puncak Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		50 Liter 50 Liter		0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>550,000,000</b>								<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>550,000,000</b>								<b>0</b>	
3 28 03 1.03	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>						<b>150,000,000</b>								<b>0</b>	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan/budidaya tanaman kehutanan				1 kelompok	150,000,000	Kab. Puncak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 kelompok		0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						<b>250,000,000</b>								<b>0</b>	
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan/budidaya tanaman kehutanan				5 ha	250,000,000	Kab. Puncak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5 ha		0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						150,000,000							0	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pencegahan perambahan dan pembalakan liar				2 lokasi	150,000,000	Kab. Puncak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>500,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>500,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						400,000,000							0	
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Tersedianya bibit tanaman masoi, pinang dan MPTS Tersedianya data potensi jasa lingkungan				30000 Batang 1 Lokasi	250,000,000	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		30000 Batang 1 Lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Peghijauan lingkungan				10 Ha	150,000,000	Kab. Nabire, Wanggar, Karadiri		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		10 Ha	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						100,000,000							0	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pemetaan wilayah rawan perambahan hutan				2 Lokasi	100,000,000	Kab. Nabire, Yaur, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Yaro, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 Lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>900,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>900,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						300,000,000							0	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemegang Ijin Pemanfaatan Hutan				1 Lokasi	300,000,000	Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.03	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>						<b>405,750,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Meningkatnya kualitas SDM pada KPH Mimika Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemegang Ijin Pemanfaatan Hutan				1 Kali 1 Lokasi	329,600,000	Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Kali 1 Lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Tersedianya produk HHBK				2 Kelompok	76,150,000	Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 Kelompok	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.05	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>194,250,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya patroli dan koordinasi pengamanan hutan				3 Kali	194,250,000	Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 Kali	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>							<b>750,000,000</b>						<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>							<b>750,000,000</b>						<b>0</b>	
3 28 03 1.01	<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>						<b>100,000,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Terpeliharanya sarpras operasional KPH				4 unit	100,000,000	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		4 unit	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						450,000,000							0	
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Terbangunnya demplot tanaman gaharu				4 Ha	200,000,000	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		4 Ha	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Pengembangan produk HHBK				1 Kelompok	250,000,000	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Kelompok	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						200,000,000							0	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Patroli dan koordinasi pengamanan hutan				4 Lokasi	200,000,000	Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		4 Lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>1,000,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>1,000,000,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						381,750,000							0	
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Terbangunnya rumah produksi sagu Tercapainya koordinasi dan konsultasi				1 unit 3 kali	381,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 unit 3 kali	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						418,600,000							0	
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Meningkatnya areal Gaharu				2 ha	99,100,000	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 ha	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Meningkatnya keterampilan KTH dalam mengelola aneka Usaha Kehutanan meningkatnya pengetahuan aparatur dalam pengembangan pengelolaan HHBK				1 kelompok 1 kelompok	319,500,000	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 kelompok 1 kelompok	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.05	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>199,650,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Menurunnya peredaran kayu dan kerusakan Tersediaanya data produksi				4 lokasi 1 IUPHHK	199,650,000	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Pantai Barat, Waim	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	4 lokasi 1 IUPHHK	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
<b>3 28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>700,000,000</b>						<b>0</b>		
<b>3 28 03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>700,000,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03 1.01	<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>						<b>103,575,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Tersediaanya sarana wisata jasling di air terjun Bodem				1 unit	103,575,000	Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kelurahan			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 unit	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.03	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>						<b>235,825,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Terbinanya kelompok usaha HHBK teh gaharu terpeliharanya tanaman gaharu				1 Kelompok 5 Ha	235,825,000	Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kelurahan			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 Kelompok 5 Ha	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.05	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>360,600,000</b>						<b>0</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Berkurangnya aktivitas perambahan hutan atau illegal logging				4 lokasi	360,600,000	Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Semua Kelurahan			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		4 lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
<b>3 28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>							<b>600,000,000</b>							<b>0</b>	
<b>3 28 03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>600,000,000</b>								<b>0</b>	
<b>3 28 03 1.01</b>	<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>						<b>200,000,000</b>								<b>0</b>	
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Terbentuknya Kelompok usaha budidaya HHBK dan jasling				1 kelompok	200,000,000	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 kelompok	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
<b>3 28 03 1.03</b>	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>						<b>300,000,000</b>								<b>0</b>	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan/budidaya tanaman kehutanan				10 Ha	300,000,000	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		10 Ha	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
<b>3 28 03 1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>100,000,000</b>								<b>0</b>	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pencegahan perambahan dan pembalakan liar				2 lokasi	100,000,000	Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
<b>3 28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>							<b>1,000,000,000</b>							<b>0</b>	





**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Tersedianya kendaraan operasional roda 3 untuk mendukung pengembangan produk HHBK				1 unit	80,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 unit	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
<b>3 28 03 1.03</b>	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>						<b>690,000,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Berkurangnya luas lahan kritis Terbangunnya kampung sagu				10 Ha 1 lokasi	350,000,000	Kota Jayapura, Muara Tami, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		10 Ha 1 lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Produksi briket arang Produksi kopi pinang Teridentifikasinya potensi hasil hutan				1 kelompok 1 Kelompok 2 Lokasi	340,000,000	Kota Jayapura, Muara Tami, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 kelompok 1 Kelompok 2 Lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
<b>3 28 03 1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>430,000,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang dampak karhutla Menurunnya peredaran hasil hutan kayu dan kerusakan hutan Terbentuknya brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan				1 kali 1 regu 1 regu	430,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 kali 1 regu 1 regu	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
<b>3 28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>600,000,000</b>						<b>0</b>		
<b>3 28 03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>600,000,000</b>						<b>0</b>		
<b>3 28 03 1.01</b>	<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>						<b>150,000,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Tersedianya sarana prasarana produksi HHBK				1 Kelompok	150,000,000	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Kelompok	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						300,000,000							0	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Terbangun dan terpeliharanya kelompok pengelola hasil hutan				2 Kelompok	300,000,000	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 Kelompok	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						150,000,000						0		
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	berkurangnya aktivitas perambahan hutan				3 Lokasi	150,000,000	Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 Lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>							<b>600,000,000</b>					<b>0</b>		
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>							<b>600,000,000</b>					<b>0</b>		
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						498,200,000						0		
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Terpeliharanya tanaman RHL				1 lokasi	170,663,735	Kab. Pegunungan Bintang, Oksibil, Bunamdol		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Data potensi hasil hutan pengembangan ekowisata				1 dokumen 1 lokasi	327,536,265	Kab. Pegunungan Bintang, Ok Aom, Limarum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 dokumen 1 lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						101,800,000						0		
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Patroli pengamanan hutan				2 kali	101,800,000	Kab. Pegunungan Bintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 kali	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>							<b>1,500,000,000</b>					<b>0</b>		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Terbentuknya Kelompok usaha budidaya HHBK dan jasling				1 kelompok	150,000,000	Kab. Lanny Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 kelompok	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.03	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>						<b>300,000,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan/budidaya tanaman kehutanan				10 Ha	300,000,000	Kab. Lanny Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	10 Ha	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.05	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>150,000,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pencegahan perambahan dan pembalakan liar				2 lokasi	150,000,000	Kab. Lanny Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	2 lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>							<b>600,000,000</b>						<b>0</b>	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>							<b>600,000,000</b>						<b>0</b>	
3 28 03 1.01	<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>						<b>22,400,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Papan himbauan/ larangan				1 Buah	22,400,000	Kab. Nduga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 Buah	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.03	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>						<b>260,800,000</b>						<b>0</b>		
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	terbangun dan terpeliharanya tanaman agroforestri				2 Ha	260,800,000	Kab. Nduga, Krepkuri, Semua Kelurahan			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	2 Ha	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.05	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>316,800,000</b>						<b>0</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Berkurangnya aktivitas perambahan hutan atau illegal logging				3 Lokasi	316,800,000	Kab. Nduga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nduga, Kenyam, Semua Kelurahan Kab. Nduga, Krekuri, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 Lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
<b>3 28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						<b>600,000,000</b>							<b>0</b>	
<b>3 28 03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						<b>600,000,000</b>							<b>0</b>	
<b>3 28 03 1.01</b>	<b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>						<b>142,470,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Terbentuknya kelompok budidaya HHBK				1 kelompok	142,470,000	Kab. Boven Digoel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 kelompok	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
<b>3 28 03 1.03</b>	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>						<b>141,630,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	pengembangan ekowisata				1 unit	141,630,000	Kab. Boven Digoel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 unit	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
<b>3 28 03 1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>						<b>315,900,000</b>							<b>0</b>	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Patroli pengamanan hutan				5 Lokasi	315,900,000	Kab. Boven Digoel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5 Lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>2 11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>1,500,000,000</b>							<b>1,550,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						1,500,000,000						1,550,000,000		
2 11 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi						1,500,000,000						1,550,000,000		
2 11 04 1.01 03	Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah koleksi tumbuhan yang dikembangkan Luas Area Kebun Raya yang terpasang pal batas				5 jenis 600 Ha	1,187,780,000	Kota Jayapura, Abepura, Koya Koso		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5 jenis 600 Ha	1,200,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2 11 04 1.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi terkait Kebun Raya Koya Koso Jumlah SDM Pengelolaan Kebun Raya Koya Koso yang ditingkatkan				150 Orang 8 Orang	312,220,000	Kota Jayapura, Abepura, Koya Koso		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		150 Orang 8 Orang	350,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 28	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						2,000,000,000							0	
3 28 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>						2,000,000,000						0		
3 28 03 1.04	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>						1,500,000,000						0		
3 28 03 1.04 06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Produksi bibit tanaman Terbangunnya areal sumber daya genetik				100000 Batang 2 lokasi	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		100000 Batang 2 lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 03 1.09	<b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>						500,000,000						0		
3 28 03 1.09 02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah sertifikasi areal sumber benih				2 lokasi	500,000,000			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 lokasi	0	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						1,700,000,000							1,700,000,000	
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						1,700,000,000						1,700,000,000		
2 11 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi						1,700,000,000						1,700,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 04 1.01 05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Koleksi Burung dan Anggrek yang dikembangkan Jumlah sarana prasarana yang diperbaiki				5 spesies 2 unit	1,700,000,000	Kab. Biak Numfor, Biak Timur, Bosnik Sup			4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5 spesies 2 unit	1,700,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>1,800,000,000</b>						<b>1,800,000,000</b>		
2 11 03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>1,800,000,000</b>							<b>1,800,000,000</b>	
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						<b>1,800,000,000</b>							<b>1,800,000,000</b>	
2 11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah sampel yang dikumpulkan dan diuji				100 sampe	300,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		100 sampe	300,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2 11 03 1.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi						1,500,000,000				3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			1,500,000,000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 13	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						<b>28,217,429,970</b>						<b>13,680,479,970</b>		
2 13 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>18,217,429,970</b>							<b>13,680,479,970</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	13	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>170,000,000</b>						<b>0</b>		
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	27,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2	13	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	27,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2	13	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	27,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2	13	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	27,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2	13	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	27,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen					4 Dokumen	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			4 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2	13	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>13,815,479,970</b>						<b>13,680,479,970</b>	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang					92 orang	13,680,479,970	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		92 orang	13,680,479,970	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							27,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2	13	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen					1 dokumen	27,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	27,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	27,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	27,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
<b>2 13 01 1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>27,000,000</b>							<b>0</b>	
2 13 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	27,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
<b>2 13 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>717,775,000</b>							<b>0</b>	
2 13 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Barang				5 Unit	33,275,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel				92 Stel	155,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		92 Stel	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan				92 Orang	27,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		92 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai				10 Orang	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		10 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta				29 Orang	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		29 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						82,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
<b>2 13 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>1,757,975,000</b>							<b>0</b>	
2 13 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Gedung				4 Gedung	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		4 Gedung	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang				15 Unit	115,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		15 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						252,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen				20 Dokumen	62,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		20 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						23,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material						20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1,200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>524,000,000</b>							<b>0</b>	
2 13 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.07 05	Pengadaan Mebel						100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						334,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>645,200,000</b>							<b>0</b>	
2 13 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						183,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						432,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>560,000,000</b>							<b>0</b>	
2 13 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						210,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	13	02					400,000,000							0	
2	13	02	1.01				400,000,000							0	
2	13	02	1.01	03			400,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2	13	03					400,000,000							0	
2	13	03	1.01				400,000,000							0	
2	13	03	1.01	03			400,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2	13	05					1,650,000,000							0	
2	13	05	1.01				1,650,000,000							0	
2	13	05	1.01	05			800,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 05 1.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						850,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA</b>						<b>400,000,000</b>							<b>0</b>	
2 13 06 1.02	<b>Pemberdayaan Masyarakat Kampung</b>						<b>400,000,000</b>							<b>0</b>	
2 13 06 1.02 01	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional						400,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 06 1.04	<b>Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>						<b>0</b>							<b>0</b>	
2 13 06 1.04 01	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional						0		Pendapatan Hibah		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 06 1.05	<b>Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>						<b>0</b>							<b>0</b>	
2 13 06 1.05 01	Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua						0		Pendapatan Hibah		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 08	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA</b>						<b>7,150,000,000</b>							<b>0</b>	
2 13 08 1.01	<b>Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua</b>						<b>5,950,000,000</b>							<b>0</b>	
2 13 08 1.01 02	Penyediaan Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua						1,200,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
2 13 08 1.01 06	Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat						1,200,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 13 08 1.01 08	Identifikasi Benda Adat, Adat Istiadat dan Budaya Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat						400,000,000			Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	
2 13 08 1.01 09	Bimtek dan Supervisi Lembaga Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Peserta				60 Orang	300,000,000			Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	60 Orang		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	
2 13 08 1.01 11	Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Pengusaha OAP				100 Orang	1,950,000,000			Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	100 Orang		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	
2 13 08 1.01 12	Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua						900,000,000			Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	
2 13 08 1.02	<b>Pemberdayaan Orang Asli Papua</b>						<b>1,200,000,000</b>								<b>0</b>	
2 13 08 1.02 04	Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat						1,200,000,000			Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2 15	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>							<b>95,956,174,530</b>							<b>40,800,000,000</b>	
2 15 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>43,888,227,850</b>								<b>0</b>	
2 15 01 1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>2,000,000,000</b>								<b>0</b>	
2 15 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1,500,000,000			Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan			Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	100,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	1 Dokumen		Dinas Perhubungan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Document Laporan Rencana Kerja Jumlah Document Revisi Renstra Jumlah Dokumen Laporan Kinerja				1 Dokumen 1 Document 1 Dokumen	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Dokumen 1 Document 1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
<b>2 15 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>28,250,000,000</b>							<b>0</b>	
2 15 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang/pegawai yang menerima gaji dan tunjangan				200 Orang	28,200,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		200 Orang	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Jumlah Laporan TP2K				1 Laporan 1 Berkas	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan 5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Laporan 1 Berkas	0	Dinas Perhubungan
<b>2 15 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>2,750,000,000</b>							<b>0</b>	
2 15 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (Keki) Jumlah pakaian dinas putih (perhubungan)				200 Orang 200 Orang	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		200 Orang 200 Orang	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan			0	Dinas Perhubungan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mendapat anugerah Jumlah orang yang mendapat sosialisasi peraturan transportasi				3 orang 100 orang	650,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		3 orang 100 orang	0	Dinas Perhubungan
<b>2 15 01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>6,223,727,850</b>							<b>0</b>	
2 15 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah tersedianya lampu dan alat listrik				100 buah	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		100 buah	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan Jumlah liter BBM				150 Jenis 92500 Liter	1,275,202,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		150 Jenis 92500 Liter	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						226,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan			0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah banyaknya majalah/koran				240 Eksemplar/tahun	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		240 Eksemplar/tahun	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum tamu/aktivitas lapangan				6000 orang	570,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		6000 orang	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum rapat/aktivitas lapangan Jumlah orang yang mengikuti rapat forum SKPD				6000 Orang 100 Orang	3,992,125,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		6000 Orang 100 Orang	0	Dinas Perhubungan
<b>2 15 01</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>3,119,700,000</b>							<b>0</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat				500 Lembar	124,350,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		500 Lembar	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Kantor				4 Layanan/Tahun	722,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		4 Layanan/Tahun	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Kantor				8 Layanan/Tahun	2,273,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		8 Layanan/Tahun	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1,544,800,000</b>							<b>0</b>	
2 15 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan			0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				50 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		50 Unit	0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						694,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan			0	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan			0	Dinas Perhubungan



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						9,140,000,000						0		
2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						3,525,000,000						0		
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah penyediaan APILL				17 Unit	3,525,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Hamadi	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		17 Unit	0	Dinas Perhubungan	
2 15 02 1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B						5,040,000,000						0		
2 15 02 1.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah dokumen studi terminal tipe B Jumlah dokumen studi yang di review				1 Dokumen 2 Dokumen	2,400,000,000	Kab. Biak Numfor, Padaido, Semua Kelurahan Kab. Jayapura, Sentani, Keheran Kab. Keerom, Arso, Arso Kota	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Dokumen 2 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 1.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Pekerjaan Taman Terminal Pembangunan fasilitas peribadatan terminal (mushola) Pembangunan pagar tembok, pintu pagar belakang terminal Pengadaan Bak Sampah Utama Terminal Pengadaan dan Pemasangan lampu PJU Solar cell				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	2,640,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Waena	Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan	
2 15 02 1.07	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>						575,000,000						0		
2 15 02 1.07 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pemeriksaan/sweeping kendaraan angkutan umum				3 Kali/Tahun	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		3 Kali/Tahun	0	Dinas Perhubungan	
2 15 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi						350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan 5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan			0	Dinas Perhubungan	
2 15 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>						11,927,946,680						9,800,000,000		
2 15 03 1.08	<b>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</b>						2,127,946,680						0		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 03 1.08 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	AMDAL tersusun Studi DED tersusun				1 dokumen 1 dokumen	2,127,946,680	Kota Jayapura, Muara Tami, Holtekamp	Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 dokumen 1 dokumen	0	Dinas Perhubungan
2 15 03 1.09	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>						<b>9,800,000,000</b>							<b>9,800,000,000</b>	
2 15 03 1.09 02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan yang dibangun				6 kegiatan	9,800,000,000	Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Kepulauan Yapen, Teluk Ampimoi, Semua Kelurahan  Kota Jayapura, Muara Tami, Semua Kelurahan  Kab. Boven Digoel, Mandobo, Semua Kelurahan  Kab. Mappi, Obaa, Kapi  Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		6 kegiatan	9,800,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN</b>						<b>31,000,000,000</b>							<b>31,000,000,000</b>	
2 15 04 1.01	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi</b>						<b>31,000,000,000</b>							<b>31,000,000,000</b>	
2 15 04 1.01 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara	Jumlah Bandara/Lapangan Terbang yang di Bangun				12 Unit	31,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		12 Unit	31,000,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Paniai, Bogabaida, Bogobaida							
								Kab. Puncak Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Puncak Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Yahukimo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Yahukimo, Ninia, Ninia							
								Kab. Yahukimo, Samenage, Samenage							
								Kab. Yahukimo, Panggema, Panggema							
								Kab. Tolikara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Waropen, Waropen Bawah, Waren I							
								Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Mamberamo Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
								Kab. Lanny Jaya, Kuyawage, Kuyawage							



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan (map dan amplop) Jumlah Dokumen				500 Cetakan 200 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			500 Cetakan 200 Dokumen	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang				100 Orang	800,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			100 Orang	810,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
<b>2 16 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1,088,317,160</b>						<b>1,190,000,000</b>		
2 16 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 Jumlah Kendaraan Dinas roda 4				4 Unit 3 Unit	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	4 Unit 3 Unit	1,100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kursi Tamu Jumlah Lemari Pendingin Jumlah Penghancur Kertas Jumlah Printer				6 Set 6 Unit 6 Unit 6 Unit	88,317,160		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	6 Set 6 Unit 6 Unit 6 Unit	90,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
<b>2 16 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>636,000,000</b>						<b>651,000,000</b>		
2 16 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Langganan Meeting Zoom Jumlah Langganan SMS Broadcast Jumlah Langganan SMS Gateway Jumlah Langganan Telepon				12 Bulan 50000 Orang 60000 Token 2 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	12 Bulan 50000 Orang 60000 Token 2 Unit	101,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pejabat Pembuat Komitmen Jumlah Pejabat Pengadaan Jumlah Tenaga Honorer K2, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan Jumlah Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan				2 Orang 2 Orang 10 Orang 3 Orang	536,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	2 Orang 2 Orang 10 Orang 3 Orang	550,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
<b>2 16 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1,950,000,000</b>						<b>1,756,000,000</b>		
2 16 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM Jumlah Kendaraan R2 Jumlah Kendaraan R4				30000 Liter 10 Motor 8 Mobil	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			30000 Liter 10 Motor 8 Mobil	155,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Kantor Jumlah Papan Nama Kantor Digital Jumlah Ruang Yang akan direhab				300 M2 1 Lokasi 40 M2	1,000,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		300 M2 1 Lokasi 40 M2	1,100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan partisi pameran Jumlah Pemeliharaan AC Jumlah Pemeliharaan Instalasi Listrik Jumlah Pemeliharaan Lampu Jumlah Pemeliharaan Mesin FotoCopy Jumlah Pemeliharaan Mesin Genset Jumlah Pemeliharaan Pompa Air Jumlah Pemeliharaan Sound sistem				50 Set 20 Unit 1 Paket 40 Buah 1 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Paket	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		50 Set 20 Unit 1 Paket 40 Buah 1 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Paket	501,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 1.14	<b>Fasilitas Keprotokolan</b>						<b>250,000,000</b>							<b>251,000,000</b>	
2 16 01 1.14 01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Peserta Rakornis				100 Orang	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		100 Orang	251,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>						<b>3,850,000,000</b>							<b>4,051,000,000</b>	
2 16 02 1.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>						<b>3,850,000,000</b>							<b>4,051,000,000</b>	
2 16 02 1.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Diseminasi media luar ruang Jumlah Diseminasi media tradisional Jumlah Kerjasama Media Cetak Jumlah Kerjasama Media elektronik Jumlah Kerjasama media online Nasional Jumlah Sosialisasi dan Forum				30 Buah 2 Kelompok 1 Media 6 Media 2 Media 3 Kegiatan	2,400,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		30 Buah 2 Kelompok 1 Media 6 Media 2 Media 3 Kegiatan	2,550,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 02 1.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Kerjasama dengan Media online lokal Jumlah Pembuatan/langganan Flyer, buletin dan majalah Jumlah Pertemuan dengan awak media Jumlah Pertemuan dengan SKPD dalam rangka peningkatan layanan website Pemprov Papua Jumlah Petemuan Influenser Papua Jumlah Tenaga ahli web master, translatter, wartawan, desain grafis dan Interpreter				1 Media 1 Kegiatan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Orang	1,300,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Media 1 Kegiatan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Orang	1,350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Sosialisasi keterbukaan informasi				2 Kali	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Kali	151,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>						<b>14,000,000,000</b>						<b>14,355,000,000</b>		
2 16 03 1.02	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>						<b>14,000,000,000</b>						<b>14,355,000,000</b>		
2 16 03 1.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Sistem layanan pemerintah provinsi Papua berbasis web				5 Aplikasi 8 Layanan	1,100,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5 Aplikasi 8 Layanan	1,200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 03 1.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan yang terkoneksi Jumlah Jasa berlangganan Transponder dan Internet Jumlah Pemeliharaan Sarana Informasi Digital dan multimedia Jumlah Pengadaan Sarana Informasi Digital				50 Lokasi 12 Bulan 7 unit 1 unit	12,900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		50 Lokasi 12 Bulan 7 unit 1 unit	13,155,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 20	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>							<b>400,000,000</b>						<b>450,000,000</b>	
2 20 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>						<b>400,000,000</b>						<b>450,000,000</b>		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
2	20	02	1.01			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi											450,000,000			
2	20	02	1.01	03		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Forum metadata statistik sektoral Jumlah peningkatan kapasitas SDM Statistik Jumlah survey metadata statistik sektoral					1 Kali 2 Orang 1 Paket	400,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 Kali 2 Orang 1 Paket	450,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					1,050,000,000						1,150,000,000			
2	21	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>							1,050,000,000						1,150,000,000	
2	21	02	1.01			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi							1,050,000,000						1,150,000,000	
2	21	02	1.01	01		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi tata kelola persandian Jumlah Pengelola PAPUAPROV-CSIRT Jumlah Pertemuan Kontra Penginderaan					1 Kegiatan 1 Tim 1 Kegiatan	1,050,000,000			Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 Kegiatan 1 Tim 1 Kegiatan	1,150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2	18					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>					24,741,008,110							30,835,000,000		
2	18	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							18,775,040,600						23,860,000,000	
2	18	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							194,000,000						300,000,000	
2	18	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							144,000,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							50,000,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							11,146,765,970						15,400,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbanyarnya gaji dan tunjangan pegawai				12 bulan	10,801,105,110		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		12 bulan	15,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						345,660,860		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>2 18 01</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>625,200,000</b>							<b>650,000,000</b>	
2 18 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						625,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			650,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>2 18 01</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>654,800,000</b>							<b>670,000,000</b>	
2 18 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas sipil harian				69 stel	64,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		69 stel	70,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						590,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			600,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>2 18 01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>2,329,329,630</b>							<b>2,500,000,000</b>	
2 18 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						266,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						206,489,630		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						19,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material						94,120,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1,723,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			1,800,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>2 18 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>1,435,000,000</b>							<b>1,500,000,000</b>	
2 18 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			750,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.07 05	Pengadaan Mebel						570,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			600,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						115,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>2 18 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>830,475,000</b>							<b>945,000,000</b>	
2 18 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						231,135,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						67,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			70,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						512,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			550,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1,559,470,000</b>							<b>1,895,000,000</b>	
2 18 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						16,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						504,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			550,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						1,014,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			1,025,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>						<b>1,415,500,000</b>							<b>1,525,000,000</b>	
2 18 02 1.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>						<b>1,415,500,000</b>							<b>1,525,000,000</b>	
2 18 02 1.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi						1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			1,100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 1.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi						415,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			425,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>						<b>1,500,000,000</b>							<b>2,000,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 03 1.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>						1,500,000,000						2,000,000,000		
2 18 03 1.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi						1,500,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>						2,169,564,510						2,450,000,000		
2 18 04 1.01	<b>Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>						826,256,852						950,000,000		
2 18 04 1.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal						421,539,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 04 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah pertemuan yang terselenggara				1 kali	404,717,852		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 kali	450,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 04 1.02	<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>						1,343,307,658						1,500,000,000		
2 18 04 1.02 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						323,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 04 1.02 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal						231,508,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 04 1.02 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan						199,898,858		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 18 04 1.02 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						588,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			600,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>						<b>880,903,000</b>							<b>1,000,000,000</b>		
2 18 05 1.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>						<b>880,903,000</b>							<b>1,000,000,000</b>		
2 18 05 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal						157,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						324,303,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal						398,920,000				4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2 19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>							<b>196,056,489,740</b>							<b>197,056,489,740</b>	
2 19 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>177,156,489,740</b>							<b>178,156,489,740</b>		
2 19 01 1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>250,000,000</b>							<b>250,000,000</b>		
2 19 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			250,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 01 1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>22,067,249,130</b>							<b>23,067,249,130</b>		
2 19 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						21,947,249,130		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			22,947,249,130	Dinas Olah Raga dan Pemuda	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen				5 Dokumen	60,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5 Dokumen	60,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2 19 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			60,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda
<b>2 19 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>890,000,000</b>							<b>890,000,000</b>	
2 19 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian				280 Pakaian	300,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		280 Pakaian	300,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2 19 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						290,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			290,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2 19 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			300,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda
<b>2 19 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>4,060,000,000</b>							<b>4,060,000,000</b>	
2 19 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			500,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2 19 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi			160,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2 19 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Barang				1500 Barang	500,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1500 Barang	500,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2 19 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			900,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda
2 19 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2,000,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			2,000,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda
<b>2 19 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>128,389,240,610</b>							<b>128,389,240,610</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset				2 Venue	128,389,240,610	Kab. Jayapura, Sentani, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan 5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		2 Venue	128,389,240,610	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>2,300,000,000</b>						<b>2,300,000,000</b>		
2 19 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						300,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			300,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2,000,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			2,000,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>19,200,000,000</b>						<b>19,200,000,000</b>		
2 19 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				14 Kendaraan	200,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		14 Kendaraan	200,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Venue dan Wisma				2 Venur	19,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan 5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		2 Venur	19,000,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>						<b>2,300,000,000</b>						<b>2,300,000,000</b>		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 02 1.01	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>						2,100,000,000						2,100,000,000		
2 19 02 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi						1,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1,000,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 02 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi						200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		200,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi						200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		200,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 02 1.01 04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera						200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		200,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 02 1.01 06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Pemuda				25 Orang	300,000,000					25 Orang	300,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 02 1.01 09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda						200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		200,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 02 1.02	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</b>						200,000,000						200,000,000		
2 19 02 1.02 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi						200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		200,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>						16,600,000,000						16,600,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03 1.01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>						950,000,000						950,000,000		
2 19 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha						350,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		350,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 03 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus						300,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		300,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi						300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		300,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 03 1.03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>						14,050,000,000						14,050,000,000		
2 19 03 1.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah peserta Jumlah Peserta				50 Orang 30 Orang	300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi	50 Orang 30 Orang	300,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 03 1.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi						12,650,000,000				1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12,650,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 03 1.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi						800,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		800,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03 1.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga						300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		300,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
<b>2 19 03 1.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>						<b>1,600,000,000</b>						<b>1,600,000,000</b>		
2 19 03 1.04 01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Peserta				30 Orang	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	30 Orang	500,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 03 1.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah peserta				30 Peserta	500,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	30 Peserta	500,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 03 1.04 03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait						300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		300,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
2 19 03 1.04 04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi						300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		300,000,000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>2 22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>						<b>38,958,900,721</b>							<b>40,116,429,295</b>	
<b>2 22 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>32,632,407,669</b>						<b>32,589,935,605</b>		
<b>2 22 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>30,291,284,970</b>						<b>30,291,284,970</b>		
2 22 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 Bulan	29,691,684,970		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	12 Bulan	29,691,684,970	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Operator Penyusun IKU, PK,LKJ,IKK  Honorarium Tim Pengelola Website  Honorarium Tim Peningkat TPP, Absensi dan Lauk Pauk  Honorarium Tim Penyusun IKU (Indikator kinerja Utama), PK (Perjanjian Kinerja)  Honorarium tim penyusun LKJ (Laporan Kinerja)  Honorarium Tim Penyusun LPPD (Laporan penyelenggaraan Daerah)  Honorarium tim Penyusun RKAP/DPAP  Jumlah Tenaga administrasi yang terbayarkan				4 orang 5 orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 9 orang	588,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	4 orang 5 orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 9 orang	588,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan yang dicetak  Jumlah Laporan yang digandakan				76 buku 1 Exemplar	11,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	76 buku 1 Exemplar	11,600,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
<b>2 22 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>594,997,650</b>						<b>550,000,000</b>		
2 22 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Key yang diadakan				190 Stel	200,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	190 Stel	200,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pim III)  Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Pim IV)  Pelatihan kepemimpinan nasional (Pim II)				5 orang 5 orang 1 orang	394,997,650		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	5 orang 5 orang 1 orang	350,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
<b>2 22 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>935,587,625</b>						<b>937,113,211</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laptop yang diadakan Jumlah Printer yang diadakan				2 unit 5 unit	38,474,414	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 unit 5 unit	40,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan Jumlah Bahan Bakar Minyak				22 Jenis 5500 Liter	193,175,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		22 Jenis 5500 Liter	193,175,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan cetak yang diadakan Jumlah Barang yang digandaakan				50 Dokumen 5000 Lembar	3,500,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		50 Dokumen 5000 Lembar	3,500,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang diadakana				264 Exemplar	2,640,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		264 Exemplar	2,640,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum rapat yang disediakan Jumlah makan minum tamu yang disediakan				350 orang 405 Orang	118,600,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		350 orang 405 Orang	118,600,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi di dalam daerah Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi di Luar daerah				1 Kegiatan 1 Kegiatan	579,198,211		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Kegiatan 1 Kegiatan	579,198,211	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>2 22 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>546,871,424</b>							<b>547,871,424</b>	
2 22 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diadakan Jumlah Pengiriman yang diadakan				200 Buah 50 kali	9,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		200 Buah 50 kali	9,500,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja tagihan Listrik				5372 Kwh	242,771,424	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5372 Kwh	242,771,424	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Biaya Service Komputer Jumlah Biaya Service Mesin Foto Copy Jumlah Pemeliharaan Lemari Arsip Jumlah Pemeliharaan Meja Kursi				1 Paket 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun	45,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 Paket 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun	46,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan kebersihan yang diadakan Jumlah tenaga kebersihan yang terbayarkan				1 Paket 8 orang	249,600,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 Paket 8 orang	249,600,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>263,666,000</b>						<b>263,666,000</b>		
2 22 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM yang diadakan Jumlah kendaraan Dinas (Mobil) yang terkena pajak Jumlah Kendaraan Dinas (Motor) yang terkena pajak Jumlah kendaraan yang diservice				17160 Liter 2 Unit 5 Unit 7 unit	263,666,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	17160 Liter 2 Unit 5 Unit 7 unit	263,666,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>						<b>1,426,494,400</b>						<b>2,626,494,400</b>		
2 22 02 1.02	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>						<b>1,426,494,400</b>						<b>1,426,494,400</b>		
2 22 02 1.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Wairon, Studi Kemaritiman Orang Biak				1 Kegiatan	426,494,400		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 Kegiatan	426,494,400	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2 22 02 1.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Monitoring dan Pembinaan Kebudayaan di 5 Wilayah Adat Papua				5 Wilayah Adat	500,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	5 Wilayah Adat	500,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 02 1.02 03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Peserta Malam Penganugerahan Kebudayaan Papua				29 Kabupaten/Kota	500,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		29 Kabupaten/Kota	500,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 02 1.03	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						0							1,200,000,000	
2 22 02 1.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Peserta Pembinaan Lembaga, Perorangan, (Budayawan)				10 Lembaga/Sanggar	0		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		10 Lembaga/Sanggar	600,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 02 1.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Pusat Kebudayaan Melanesia				1 Dokumen	0		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Dokumen	600,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>						1,200,000,200							1,200,000,200	
2 22 03 1.01	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>						1,200,000,200							1,200,000,200	
2 22 03 1.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Peserta Pengembangan dan Peningkatan Koordinasi dan Informasi Teknis Taman Budaya ( Jakarta, Merauke, Mimika) Jumlah Peserta Workshop Muatan Lokal Seni Budaya Jumlah Peserta Workshop Pengembangan Seni Tari Bagi Sanggar Seni di Merauke				30 Orang 50 Guru 50 Seniman	1,200,000,200		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		30 Orang 50 Guru 50 Seniman	1,200,000,200	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 04	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>						399,999,860							399,999,860	
2 22 04 1.01	<b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>						399,999,860							399,999,860	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 04 1.01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah						399,999,860		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			399,999,860	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 05	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>						<b>799,999,362</b>							<b>800,000,000</b>	
2 22 05 1.01	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>						<b>499,999,900</b>							<b>500,000,000</b>	
2 22 05 1.01 02	Penetapan Cagar Budaya						499,999,900		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			500,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 05 1.02	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>						<b>299,999,462</b>							<b>300,000,000</b>	
2 22 05 1.02 04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya						299,999,462		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			300,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>						<b>2,499,999,230</b>							<b>2,499,999,230</b>	
2 22 06 1.01	<b>Pengelolaan Museum Provinsi</b>						<b>2,499,999,230</b>							<b>2,499,999,230</b>	
2 22 06 1.01 01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah pameran khusus Museum Negeri Papua Jumlah pameran keliling Museum Negeri Papua				1 Kegiatan 1 Kegiatan	650,000,000		DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum				1 Kegiatan 1 Kegiatan	650,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 06 1.01 02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah pemeliharaan koleksi Museum				1 Kegiatan	390,000,000		DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum				1 Kegiatan	390,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 06 1.01 03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Pameran Noken Papua d 5 Wilayah adat Pemeliharaan Koleksi Museum Noken Pemeliharaan/Pengadaan sarana prasarana museum noken				5 Wilayah Adat 200 Koleksi Noken 2 Kegiatan	1,199,999,230		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		5 Wilayah Adat 200 Koleksi Noken 2 Kegiatan	1,199,999,230	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 06 1.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah perbaikan ringan gedung kantor				1 Kegiatan	260,000,000		DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi. 4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Kegiatan	260,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 26	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>						9,258,432,324							10,258,446,750	
3 26 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>						7,858,446,750							7,858,446,750	
3 26 02 1.01	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>						6,995,870,000							6,995,870,000	
3 26 02 1.01 01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Potensi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (5 Wilayah Adat)				2 Kabupaten/Kota	6,995,870,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 Kabupaten/Kota	6,995,870,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3 26 02 1.04	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						862,576,750							862,576,750	
3 26 02 1.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata				2 Kabupaten/Kota	862,576,750	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus	4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 Kabupaten/Kota	862,576,750	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						0						800,000,000		
3 26 04	1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif						0						800,000,000		
3 26 04	1.01 01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif di Kab, Biak, Merauke, Jayawijaya, Mimika, Nabire				7 Unit/Kabupaten,Kota	0		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	7 Unit/Kabupaten,Kota	800,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						1,399,985,574						1,600,000,000		
3 26 05	1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan						1,399,985,574						1,600,000,000		
3 26 05	1.01 04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Peserta Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (5 Kabupaten)				300 Orang	500,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	300 Orang	600,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3 26 05	1.01 08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Kelompok Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif (6 Kabupaten)				200 Kelompok	499,985,574		Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	200 Kelompok	500,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3 26 05	1.01 09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Pelatihan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kreatif (6 Kabupaten/Kota)				200 Kelompok	400,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	200 Kelompok	500,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 25	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						<b>54,794,594,830</b>						<b>60,375,000,000</b>		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						25,245,287,970						28,075,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
														Nasional					Daerah						
3	25	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											<b>875,000,000</b>									
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											350,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			450,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan		
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapai Penyusunan RKA					1 Dokumen	51,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	75,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tercapainya Penyusunan DPA					1 Dokumen	120,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tercapainya Penyusunan DPA Perubahan					1 Dokumen	28,551,540		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Penyusunan Ikhtisar Realisasi dan LKJ					1 Paket	140,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																			<b>23,150,000,000</b>	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia Gaji dan Tunjangan Aparatur					132 Pegawai	21,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		132 Pegawai	23,000,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		132 Pegawai	23,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan					1 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																			<b>600,000,000</b>	
3	25	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tercapainya Disiplin Pegawai					10 Unit	117,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		10 Unit	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		10 Unit	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur					132 Stell	170,300,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		132 Stell	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		132 Stell	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapainya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatus				2 Paket/Kegiatan	189,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		2 Paket/Kegiatan	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>3 25 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>169,000,000</b>							<b>200,000,000</b>	
3 25 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor				1 Paket	89,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan				1 Paket	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>3 25 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>402,000,000</b>							<b>500,000,000</b>	
3 25 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas Jabatan				1 Unit	402,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>3 25 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1,477,256,430</b>							<b>1,650,000,000</b>	
3 25 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				1 Paket	25,656,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				1 Paket	601,600,430		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	700,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Paket/Kegiatan	850,000,000		Pendapatan Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket/Kegiatan	900,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>3 25 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>930,000,000</b>							<b>1,100,000,000</b>	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dinas				1 Peket/Kegiatan	380,000,000		Pendapatan Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Peket/Kegiatan	400,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor				10 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		10 Unit	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehab Gedung dan Kantor				1 Paket	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Paket	600,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>						2,163,000,000						2,500,000,000		
3 25 02	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>						1,863,000,000						2,200,000,000		
3 25 02	1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dokumen RZWP3K			1 Dokumen	600,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 Dokumen	700,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 02	1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pengelolaan Kawasan Konservasi			1 Kegiatan	200,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 Kegiatan	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 02	1.01 03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rehabilitasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			2 Kegiatan	550,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	2 Kegiatan	600,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 02	1.01 04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			1 Paket/Kegiatan	513,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 Paket/Kegiatan	600,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 02	1.03	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>					300,000,000						300,000,000		
3 25 02	1.03 02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			3 Kegiatan	300,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	3 Kegiatan	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 03		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>					9,175,000,000						10,000,000,000		
3 25 03	1.01	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>					150,000,000						200,000,000		
3 25 03	1.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tercapainya Data Statistik Perikanan Tangkap			1 Laporan	150,000,000		Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 1.02	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						<b>300,000,000</b>						<b>500,000,000</b>		
3 25 03 1.02 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersediannya Prasarana Perikanan Tangkap				1 Paket/Kegiatan	200,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Paket/Kegiatan	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.02 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersediannya Penjamin Sarana Usaha Perikanan Tangkap				1 Paket/Kegiatan	100,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Paket/Kegiatan	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.03	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>						<b>400,000,000</b>						<b>550,000,000</b>		
3 25 03 1.03 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tersediannya Izin Usaha Kapal berukuran diatas 10 GT - 30 GT				1 Kegiatan	100,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Kegiatan	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.03 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Izin Usaha Perikanan Kapal ukuran 10 GT sampai dengan 30 GT				1 Kegiatan	300,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Kegiatan	350,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.04	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil</b>						<b>100,000,000</b>						<b>150,000,000</b>		
3 25 03 1.04 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil						0				4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.			0	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 1.04 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Tercapainya Izin Usaha untuk Kapal berukuran 10 GT - 30 GT				1 Kegiatan	100,000,000		Dana Otonomi Khusus			1 Kegiatan	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 03 1.06	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>						<b>8,225,000,000</b>						<b>8,600,000,000</b>		
3 25 03 1.06 01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Tercapainya Penetapan Lokasi Pembangunan PPI				1 Paket/Kegiatan	500,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 Paket/Kegiatan	700,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 03 1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan prasarana PPI				6 Paket/Kegiatan	6,700,000,000		DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	6 Paket/Kegiatan	6,700,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 03 1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan PPI				3 Paket/Kegiatan	1,025,000,000		DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	3 Paket/Kegiatan	1,200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>						<b>11,000,199,000</b>						<b>11,750,000,000</b>		
3 25 04 1.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						<b>150,000,000</b>						<b>200,000,000</b>		
3 25 04 1.01 03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Data Statistik Perikanan Budidaya				1 Laporan	150,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	1 Laporan	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 04 1.05	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>						<b>10,850,199,000</b>						<b>11,550,000,000</b>		
3 25 04 1.05 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				10 Paket/Kegiatan	9,300,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	10 Paket/Kegiatan	9,500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan				1 Paket	700,199,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Paket	800,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Paket/Kegiatan	100,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Paket/Kegiatan	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air payau dan Air Tawar				1 Paket	500,000,000		DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Paket	600,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Ikan pada Budidaya Ikan di Laut				1 Kegiatan	100,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Kegiatan	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kelompok Pembudidayaan Ikan Laut				3 Kelompok	150,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 Kelompok	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						<b>5,111,107,860</b>							<b>5,750,000,000</b>	
3 25 05 1.01	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>						<b>3,900,000,000</b>							<b>4,250,000,000</b>	
3 25 05 1.01 01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Ruang Laut				50 Kali	700,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		50 Kali	750,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Kapal Pengawasan				1 Unit	2,000,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Unit	2,200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.01 03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Pengawasan pembudidaya ikan Laut				50 kali/Kegiatan	550,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		50 kali/Kegiatan	600,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.01 04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok POKMASWAS				20 kelompok	650,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		20 kelompok	700,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.02	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						<b>1,211,107,860</b>							<b>1,500,000,000</b>	
3 25 05 1.02 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Ketersediaan Sarana Pengawasan				1 Paket	750,000,000		DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Paket	1,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.02 03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan				20 kali/Kegiatan	461,107,860		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		20 kali/Kegiatan	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>						<b>2,100,000,000</b>							<b>2,300,000,000</b>	
3 25 06 1.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						<b>900,000,000</b>							<b>1,100,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 06 1.01 01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Pelaksanaan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Usaha Perikanan				2 Paket/Kegiatan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		2 Paket/Kegiatan	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06 1.01 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Usaha Perikanan				3 Paket/Kegiatan	350,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 Paket/Kegiatan	400,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06 1.01 03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan				1 Laporan	300,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		1 Laporan	400,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06 1.03	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>1,200,000,000</b>	
3 25 06 1.03 01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya bahan baku Usaha Pemasaran dan Pengolahan Perikanan				4 Peket/Kegiatan	1,200,000,000		Dana Otonomi Khusus		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		4 Peket/Kegiatan	1,200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 29	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>							<b>69,630,401,787</b>						<b>70,817,601,890</b>	
3 29 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							<b>54,706,051,787</b>						<b>55,617,601,887</b>	
3 29 01 1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>475,100,000</b>							<b>1,420,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					11 laporan	75,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11 laporan	190,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan				1 laporan	50,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 laporan	280,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah koordinasi				11 Kali	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11 Kali	200,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah laporan				1 laporan	150,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 laporan	180,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah laporan				1 laporan	50,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 laporan	180,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah koordinasi				15 kali	75,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15 kali	390,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3 29 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>23,798,409,180</b>							<b>23,763,309,280</b>	
3 29 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dibayarkan				14 bulan	23,253,309,280	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		14 bulan	23,253,309,280	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan				1 laporan	381,500,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 laporan	390,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan				1 laporan	71,500,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 laporan	10,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan				1 laporan	1,500,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 laporan	10,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah laporan				2 laporan	89,099,900	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 laporan	90,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan				1 laporan	1,500,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 laporan	10,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3 29 01 1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>445,000,000</b>							<b>470,000,000</b>	
3 29 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan				1 laporan	75,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 laporan	90,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan				1 laporan	70,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 laporan	70,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan				11 laporan	200,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11 laporan	200,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan				1 laporan	100,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 laporan	110,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3 29 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>6,604,000,000</b>							<b>6,300,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas batik Jumlah Pakaian Dinas key jumlah pakaian dinas putih jumlah seragam olahraga				150 stell 150 stell 150 stell 150 stell	2,000,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		150 stell 150 stell 150 stell 150 stell	2,000,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi				5 kali	130,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 kali	130,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan				1 laporan	70,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 laporan	70,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai				5 orang	500,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5 orang	500,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.05 08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pegawai				40 orang	654,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		40 orang	0	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah diklat				30 kali	1,000,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		30 kali	1,000,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Jumlah Peserta				3 laporan 90 orang	1,250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				3 laporan 90 orang	1,600,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta				60 orang	1,000,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		60 orang	1,000,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3 29 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>3,592,350,000</b>							<b>4,122,350,000</b>	
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan				80 jenis	250,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		80 jenis	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			50,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						52,350,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		52,350,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						50,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		70,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						150,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		150,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2,550,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3,000,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan				1 laporan	250,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 laporan	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
<b>3 29 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>16,076,297,247</b>						<b>16,231,547,247</b>		
3 29 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1,200,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				1,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 01 1.07 05	Pengadaan Mebel						200,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan				35 unit	13,676,297,247		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	35 unit	14,980,547,247	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1,000,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1,000,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
<b>3 29 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>409,895,360</b>						<b>450,395,360</b>		
3 29 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						350,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		390,500,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa layanan				12 bulan	59,895,360		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	59,895,360	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3 29 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>3,305,000,000</b>							<b>2,860,000,000</b>	
3 29 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan				7 unit	175,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		7 unit	200,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					40,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			120,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah rehab ruangan				6 ruangan	3,000,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		6 ruangan	2,500,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3 29 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN</b>						<b>6,300,000,000</b>							<b>7,250,000,000</b>	
<b>3 29 02 1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>						<b>4,400,000,000</b>							<b>4,650,000,000</b>	
3 29 02 1.01 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	jumlah laporan data CAT				4 laporan	2,250,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		4 laporan	2,200,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 02 1.01 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah laporan				5 laporan	650,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua				5 laporan	700,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 02 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Zona Konservasi ABT				4 laporan	1,500,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua				4 laporan	1,750,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3 29 02 1.02</b>	<b>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>						<b>1,500,000,000</b>							<b>2,100,000,000</b>	
3 29 02 1.02 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan				3 laporan	650,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua				3 laporan	800,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 02 1.02 02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan				3 laporan	400,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				3 laporan	700,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 02 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan				3 laporan	450,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				3 laporan	600,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3 29 02 1.03</b>	<b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>						<b>400,000,000</b>							<b>500,000,000</b>	
3 29 02 1.03 02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Peraturan Gubernur				1 PERGUB	400,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				1 PERGUB	500,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3 29 03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>						<b>5,344,350,000</b>							<b>3,100,000,003</b>	





**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 03 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Perusahaan				3 laporan	650,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 laporan	800,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 03 1.04	<b>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</b>						<b>3,444,350,000</b>							<b>500,000,003</b>	
3 29 03 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Koordinasi				10 Kali	650,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				10 Kali	500,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 03 1.04 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah laporan pengawasan 3 lokasi jumlah peserta FGD				3 laporan 90 orang	2,794,350,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.		3 laporan 90 orang		<sup>3</sup> Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>						<b>1,500,000,000</b>							<b>2,000,000,000</b>	
3 29 05 1.04	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>						<b>1,500,000,000</b>							<b>2,000,000,000</b>	
3 29 05 1.04 01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	jumlah dokumen RUED				1 dokumen	1,500,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		1 dokumen	2,000,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKA N</b>						1,780,000,000						2,850,000,000		
3 29 06 1.01	<b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</b>						350,000,000						500,000,000		
3 29 06 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan				2 laporan	350,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi.	2 laporan	500,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 06 1.06	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>						1,430,000,000						2,350,000,000		
3 29 06 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Data masyarakat tidak mampu				3 laporan	350,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	3 laporan	350,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 06 1.06 04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Data masyarakat tidak mampu				5 laporan	400,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	5 laporan	850,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 06 1.06 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Koordinasi				20 Kali	400,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		20 Kali	850,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 06 1.06 07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						280,000,000		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua					300,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
<b>3 29</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>						<b>1,600,000,000</b>							<b>2,000,000,000</b>	
<b>3 29 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>1,100,000,000</b>							<b>1,300,000,000</b>	
<b>3 29 01</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>400,000,000</b>							<b>600,000,000</b>	
3 29 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan jumlah peserta sosialisasi				3 laporan 75 orang	400,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				3 laporan 75 orang	600,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3 29 01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>500,000,000</b>							<b>500,000,000</b>	
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan				20 unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 unit	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi				15 kali	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 kali	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3 29 01</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>50,000,000</b>							<b>50,000,000</b>	
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa layanan				12 bulan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	50,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3 29 01</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>150,000,000</b>							<b>150,000,000</b>	
3 29 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung				1 Gedung	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Gedung	150,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3 29 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN</b>						<b>250,000,000</b>							<b>400,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 02 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						250,000,000							400,000,000	
3 29 02 1.01 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	jumlah laporan				2 laporan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				2 laporan	400,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>						250,000,000							300,000,000	
3 29 06 1.06	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>						250,000,000							300,000,000	
3 29 06 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah laporan				2 laporan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				2 laporan	300,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 29	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>							<b>1,700,000,000</b>						<b>2,100,000,000</b>	
3 29 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>1,400,000,000</b>	
3 29 01 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>400,000,000</b>							<b>600,000,000</b>	
3 29 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan jumlah peserta				3 laporan 75 orang	400,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				3 laporan 75 orang	600,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>500,000,000</b>							<b>500,000,000</b>	
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan				20 unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 unit	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi				15 kali	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 kali	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>250,000,000</b>							<b>250,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah bangunan				1 unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 unit	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3 29 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>50,000,000</b>							<b>50,000,000</b>	
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa layanan				12 bulan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	50,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3 29 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>						<b>250,000,000</b>							<b>400,000,000</b>	
<b>3 29 02 1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>						<b>250,000,000</b>							<b>400,000,000</b>	
3 29 02 1.01 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah laporan				2 laporan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				2 laporan	400,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3 29 06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>						<b>250,000,000</b>							<b>300,000,000</b>	
<b>3 29 06 1.06</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>						<b>250,000,000</b>							<b>300,000,000</b>	
3 29 06 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah laporan				2 laporan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				2 laporan	300,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
<b>3 29</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>							<b>1,700,000,000</b>						<b>2,100,000,000</b>	
<b>3 29 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>1,400,000,000</b>	
<b>3 29 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>400,000,000</b>							<b>600,000,000</b>	
3 29 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan jumlah peserta				3 laporan 75 orang	400,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				3 laporan 75 orang	600,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 01 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						500,000,000						500,000,000		
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan				20 unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 unit	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi				15 kali	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 kali	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						250,000,000							250,000,000	
3 29 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Gedung				1 Gedung	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Gedung	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						50,000,000							50,000,000	
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa layanan				12 bulan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	50,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>						250,000,000							400,000,000	
3 29 02 1.01	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>						250,000,000							400,000,000	
3 29 02 1.01 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah laporan				2 laporan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				2 laporan	400,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKA N</b>						250,000,000							300,000,000	
3 29 06 1.06	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>						250,000,000							300,000,000	
3 29 06 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah laporan				2 laporan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				2 laporan	300,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3	29						1,700,000,000							2,110,000,000		
3	29	01					1,200,000,000							1,410,000,000		
3	29	01	1.05				400,000,000							600,000,000		
3	29	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan jumlah peserta				3 laporan 75 orang	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua			3 laporan 75 orang	600,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3	29	01	1.06				500,000,000							500,000,000		
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan				20 unit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 unit	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi				15 kali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 kali	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3	29	01	1.07				250,000,000							260,000,000		
3	29	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Gedung				1 Gedung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Gedung	260,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3	29	01	1.08				50,000,000							50,000,000		
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa layanan				12 bulan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	50,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3	29	02					250,000,000							400,000,000		
3	29	02	1.01				250,000,000							400,000,000		
3	29	02	1.01	02	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan				2 laporan	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua			2 laporan	400,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3	29	06					250,000,000							300,000,000		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						250,000,000							300,000,000	
3 29 06 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah laporan				2 laporan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				2 laporan	300,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 29	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>							<b>1,700,000,000</b>						<b>2,100,000,000</b>	
3 29 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>1,400,000,000</b>	
3 29 01 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>400,000,000</b>							<b>600,000,000</b>	
3 29 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan jumlah peserta				3 laporan 75 orang	400,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				3 laporan 75 orang	600,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>500,000,000</b>							<b>500,000,000</b>	
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan				20 unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 unit	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi				15 kali	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 kali	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>250,000,000</b>							<b>250,000,000</b>	
3 29 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung				1 Gedung	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Gedung	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>50,000,000</b>							<b>50,000,000</b>	
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa layanan				12 bulan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	50,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>						<b>250,000,000</b>							<b>400,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 02 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						250,000,000						400,000,000		
3 29 02 1.01 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah laporan				2 laporan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua			2 laporan	400,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>						250,000,000						300,000,000		
3 29 06 1.06	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>						250,000,000						300,000,000		
3 29 06 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah laporan				2 laporan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua			2 laporan	300,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 29	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>							<b>1,700,000,000</b>						<b>2,100,000,000</b>	
3 29 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>1,200,000,000</b>						<b>1,400,000,000</b>		
3 29 01 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>400,000,000</b>						<b>600,000,000</b>		
3 29 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan jumlah peserta				3 laporan 75 orang	400,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua			3 laporan 75 orang	600,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 01 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>500,000,000</b>						<b>500,000,000</b>		
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan				20 unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 unit	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi				15 kali	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 kali	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>250,000,000</b>						<b>250,000,000</b>		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Gedung				1 Gedung	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Gedung	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>50,000,000</b>							<b>50,000,000</b>	
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa layanan				12 bulan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	50,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>						<b>250,000,000</b>							<b>400,000,000</b>	
3 29 02 1.01	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>						<b>250,000,000</b>							<b>400,000,000</b>	
3 29 02 1.01 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah laporan				2 laporan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				2 laporan	400,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>						<b>250,000,000</b>							<b>300,000,000</b>	
3 29 06 1.06	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>						<b>250,000,000</b>							<b>300,000,000</b>	
3 29 06 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah laporan				2 laporan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				2 laporan	300,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 29	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>							<b>1,700,000,000</b>						<b>2,100,000,000</b>	
3 29 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>1,400,000,000</b>	
3 29 01 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>400,000,000</b>							<b>600,000,000</b>	
3 29 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan jumlah peserta				3 laporan 75 orang	400,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				3 laporan 75 orang	600,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 01 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						500,000,000						500,000,000		
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan				20 unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 unit	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi				15 kali	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 kali	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						250,000,000							250,000,000	
3 29 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Gedung				1 Gedung	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Gedung	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						50,000,000							50,000,000	
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa layanan				12 bulan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	50,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>						250,000,000							400,000,000	
3 29 02 1.01	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>						250,000,000							400,000,000	
3 29 02 1.01 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah laporan				2 laporan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				2 laporan	400,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>						250,000,000							300,000,000	
3 29 06 1.06	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>						250,000,000							300,000,000	
3 29 06 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah laporan				2 laporan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				2 laporan	300,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						250,000,000							300,000,000	
3 29 06 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah laporan				2 laporan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua			2 laporan	300,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>														
3 29	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>						5,154,250,000						5,554,250,000		
3 29 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						1,200,000,000						1,400,000,000		
3 29 01 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						400,000,000						600,000,000		
3 29 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan jumlah peserta				2 laporan 60 orang	400,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua			2 laporan 60 orang	600,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 01 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						500,000,000						500,000,000		
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan				20 unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 unit	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi				15 kali	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15 kali	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						250,000,000						250,000,000		
3 29 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah bangunan				1 unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 unit	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						50,000,000						50,000,000		
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa layanan				12 bulan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	50,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	
3 29 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>						250,000,000						400,000,000		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi				15 kali	250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15 kali	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>250,000,000</b>							<b>250,000,000</b>	
3 29 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah bangunan				1 unit	250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 unit	250,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>50,000,000</b>							<b>50,000,000</b>	
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa layanan				12 bulan	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 bulan	50,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>						<b>250,000,000</b>							<b>400,000,000</b>	
3 29 02 1.01	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>						<b>250,000,000</b>							<b>400,000,000</b>	
3 29 02 1.01 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah laporan				2 laporan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				2 laporan	400,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
3 29 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKA N</b>						<b>250,000,000</b>							<b>300,000,000</b>	
3 29 06 1.06	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>						<b>250,000,000</b>							<b>300,000,000</b>	
3 29 06 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah laporan				2 laporan	250,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua				2 laporan	300,000,000	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>1,018,544,547,060</b>						<b>1,152,694,557,998</b>		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>1,018,544,547,060</b>						<b>1,152,694,557,998</b>		
4 01 01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>159,900,000</b>						<b>167,895,000</b>		
4 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA				1 Dokumen	119,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	125,895,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja				120 Laporan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	120 Laporan	42,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>37,070,000,000</b>						<b>37,070,000,000</b>		
4 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai				12 Bulan	36,990,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	12 Bulan	36,990,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Semesteran				1 Laporan 120 Laporan	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 Laporan 120 Laporan	80,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>960,000,000</b>						<b>960,000,000</b>		
4 01 01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya				250 Stell	960,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250 Stell	960,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>88,984,717,770</b>						<b>89,172,057,158</b>		
4 01 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik				25 Jenis	350,000,000		Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	25 Jenis	367,500,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				50 Jenis	1,246,787,770		Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	50 Jenis	1,309,127,158	Sekretariat Daerah	
4 01 01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Cetakan				130 Jenis	2,150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	130 Jenis	2,257,500,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan				1 Tahun	399,600,000		Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 Tahun	399,600,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Pelayanan Negara/departemen/lembaga/pemerintah non departemen/luar negeri Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu				12 Bulan 12 Bulan	58,305,640,000		Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	12 Bulan 12 Bulan	58,305,640,000	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Makan Minum Rapat/Kegiatan Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				12 Bulan 300 Kali	26,532,690,000		Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan 300 Kali	26,532,690,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>7,069,998,000</b>							<b>7,069,998,000</b>	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Jumlah Paket Pengiriman				5500 Surat 100 Orang 1000 Kg	7,069,998,000		Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5500 Surat 100 Orang 1000 Kg	7,069,998,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>7,349,993,450</b>							<b>9,000,000,000</b>	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Yang dipelihara				130 Unit	7,349,993,450		Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		130 Unit	9,000,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 1.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>						<b>452,367,107,840</b>							<b>452,754,607,840</b>	
4 01 01 1.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH				12 Bulan	1,554,607,840		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	1,554,607,840	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian dinas Dan Perlengkapannya				50 Stell	312,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		50 Stell	500,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH				12 Bulan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	700,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya dana penunjang operasional KDH/WKDH				12 Bulan	450,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	450,000,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 1.12</b>	<b>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>						<b>213,999,960,000</b>							<b>300,000,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya jasa Kegiatan jasa rumah tangga sekretariat daerah Terlaksananya peningkatan tugas-tugas pemerintahan umum dan stabilitas daerah				12 Bulan 12 Bulan	213,999,960,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	12 Bulan 12 Bulan	300,000,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.13	<b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>						<b>204,400,950,000</b>						<b>250,000,000,000</b>		
4 01 01 1.13 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Koordinasi kedinasan Kepala Daerah ke Jakarta Terlaksananya kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan, anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan terlaksananya koordinasi unsur Muspida dalam menyamakan pola pandang dan pola tindak demi meningkatkan terhadap masyarakat Terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi KDH dan WKDH				12 Bulan 240 Kali 240 Kali 12 Kali	204,400,950,000		Dana Otonomi Khusus			12 Bulan 240 Kali 240 Kali 12 Kali	250,000,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.14	<b>Fasilitasi Keprotokolan</b>						<b>6,181,920,000</b>						<b>6,500,000,000</b>		
4 01 01 1.14 01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dalam Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat				12 Bulan	6,181,920,000		Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	12 Bulan	6,500,000,000	Sekretariat Daerah	
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>119,268,266,080</b>						<b>121,187,800,000</b>	
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							<b>94,748,986,080</b>						<b>96,187,800,000</b>	
4 01 01 1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							<b>226,749,815</b>						<b>227,000,000</b>	
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						68,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		69,000,000	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						157,999,815		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			158,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>53,299,648,956</b>							<b>54,098,000,000</b>	
4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						53,203,748,956		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			54,000,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						52,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			53,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						43,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			45,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>1,595,000,000</b>							<b>1,661,000,000</b>	
4 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						1,235,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			1,300,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			361,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>7,099,367,000</b>							<b>7,313,800,000</b>	
4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan				8137 Unit	480,743,200	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		8137 Unit	480,800,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan dan peralatan yang disediakan				616 Unit	1,161,298,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		616 Unit	1,200,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3,051,114,800				3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			3,100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				3 Paket	477,061,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3 Paket	478,000,000	Sekretariat Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						54,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		55,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1,874,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		2,000,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>4,981,135,000</b>						<b>5,000,000,000</b>		
4 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						4,981,135,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5,000,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>7,087,965,284</b>						<b>7,088,000,000</b>		
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengelolaan Surat Menyurat Dinas				30000 surat 1000 surat	213,988,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	30000 surat 1000 surat	214,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penggunaan Air, Listrik, Telepon dan Faximile				12 Bulan	6,873,977,284	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	12 Bulan	6,874,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>19,179,850,000</b>						<b>19,500,000,000</b>		
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan roda dua yang diperbaharui pajak, stnk dan plat Kendaraan Jumlah kendaraan roda Empat yang diperbaharui pajak, stnk dan plat kendaraan				130 Unit 150 Unit	400,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	130 Unit 150 Unit	500,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan Rutin kendaraan Dinas dan Operasional roda dua dan roda empat				200 Unit	2,552,350,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	200 Unit	2,600,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan yang dipelihara				393 Unit 93 Unit	799,520,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	393 Unit 93 Unit	800,000,000	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang direhab Jumlah Gedung kantor yang terpelihara				1 Tahun 1 Tahun	13,875,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun 1 Tahun	14,000,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1,552,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			1,600,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 1.14</b>	<b>Fasilitas Keprotokolan</b>						<b>1,279,270,025</b>							<b>1,300,000,000</b>	
4 01 01 1.14 03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan						1,279,270,025		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			1,300,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 07</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>						<b>24,519,280,000</b>							<b>25,000,000,000</b>	
<b>4 01 07 1.01</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>						<b>24,519,280,000</b>							<b>25,000,000,000</b>	
4 01 07 1.01 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa						24,519,280,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			25,000,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>4 01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>31,240,830,110</b>							<b>51,905,000,000</b>	
<b>4 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>11,126,830,110</b>							<b>20,505,000,000</b>	
<b>4 01 01 1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>150,000,000</b>							<b>220,000,000</b>	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				3 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3 Dokumen	150,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi				1 laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 laporan	70,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>5,556,212,870</b>							<b>5,780,000,000</b>	
4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5,481,212,870		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			5,700,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan				3 laporan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3 laporan	80,000,000	Sekretariat Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						225,000,000						300,000,000		
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						225,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		300,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						3,868,617,240						12,600,000,000		
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sarana Kantor				1 Paket	250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	300,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						700,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		8,500,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		100,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK				1 Tahun	643,617,240		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 Tahun	700,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu						1,200,000,000				3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1,500,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1,500,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						200,000,000						300,000,000		
4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair				1 Paket	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 Paket	300,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						811,000,000						915,000,000		
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						161,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		200,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						650,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		715,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						316,000,000						390,000,000		
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						216,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		240,000,000	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		150,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 07</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>						<b>20,114,000,000</b>						<b>31,400,000,000</b>		
<b>4 01 07 1.01</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>						<b>12,800,000,000</b>						<b>22,000,000,000</b>		
4 01 07 1.01 01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan				1 laporan	550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 laporan	1,000,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 07 1.01 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengadaan				1 Tahun	11,700,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 Tahun	20,000,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 07 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan				1 laporan	550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 laporan	1,000,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 07 1.02</b>	<b>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>						<b>4,700,000,000</b>						<b>5,900,000,000</b>		
4 01 07 1.02 01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik						4,000,000,000		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5,000,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 07 1.02 02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		600,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 07 1.02 03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		300,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 07 1.03</b>	<b>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>						<b>2,614,000,000</b>						<b>3,500,000,000</b>		
4 01 07 1.03 01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM yang Dibina				50 Orang	639,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	50 Orang	1,000,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 07 1.03 02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kelembagaan yang di Bina				10 Kelembagaan	800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	10 Kelembagaan	1,000,000,000	Sekretariat Daerah	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 07 1.03 03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa						1,175,000,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
4 01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>33,052,630,475</b>							<b>40,700,000,000</b>	
4 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>21,052,630,475</b>							<b>22,350,000,000</b>	
4 01 01 1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>100,000,000</b>							<b>90,000,000</b>	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50,000,000					3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		60,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						50,000,000					3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		30,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>16,814,337,640</b>							<b>17,060,000,000</b>	
4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16,764,337,640			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		17,000,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						50,000,000							60,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>250,000,000</b>							<b>350,000,000</b>	
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur				20 Orang	250,000,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	20 Orang	350,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>3,270,000,000</b>							<b>4,100,000,000</b>	
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						70,000,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		100,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamuh						1,700,000,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		2,000,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1,500,000,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	2,000,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>318,292,835</b>							<b>350,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Barang				50 Jenis	318,292,835		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		50 Jenis	350,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>300,000,000</b>							<b>400,000,000</b>	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			250,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			150,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>						<b>1,950,000,000</b>							<b>2,050,000,000</b>	
<b>4 01 02 1.02</b>	<b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>						<b>1,950,000,000</b>							<b>2,050,000,000</b>	
4 01 02 1.02 04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan						1,250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1,300,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 1.02 05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik						700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					750,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>						<b>7,550,000,000</b>							<b>10,000,000,000</b>	
<b>4 01 03 1.01</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>						<b>3,300,000,000</b>							<b>4,200,000,000</b>	
4 01 03 1.01 01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan						500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					700,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.01 02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum						1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2,000,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.01 03	Fasilitasi Penataan Wilayah						1,300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			1,500,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 03 1.02</b>	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>						<b>3,050,000,000</b>							<b>4,300,000,000</b>	
4 01 03 1.02 01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD						1,300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			1,500,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.02 02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan						500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			1,300,000,000	Sekretariat Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 1.02 03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						1,250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 03</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>						<b>1,200,000,000</b>						<b>1,500,000,000</b>		
4 01 03 1.03 01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah						800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1,000,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 1.03 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		500,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 09</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS**)</b>						<b>2,500,000,000</b>						<b>6,300,000,000</b>		
<b>4 01 09</b>	<b>Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus</b>						<b>2,500,000,000</b>						<b>6,300,000,000</b>		
4 01 09 1.02 01	Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus						500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,300,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 09 1.02 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus						2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5,000,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>4 01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>13,390,000,000</b>							<b>13,440,000,000</b>	
<b>4 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>6,890,000,000</b>						<b>6,940,000,000</b>		
<b>4 01 01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>100,000,000</b>						<b>100,000,000</b>		
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		100,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 01</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>350,000,000</b>						<b>350,000,000</b>		
4 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		350,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>4,690,000,000</b>						<b>4,740,000,000</b>		
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		250,000,000	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		40,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		450,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terselenggara				12 bulan	4,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	12 bulan	4,000,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>400,000,000</b>						<b>400,000,000</b>		
4 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>850,000,000</b>						<b>850,000,000</b>		
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						350,000,000				3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		350,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor serta perbaikan				12 Bulan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	12 Bulan	500,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>500,000,000</b>						<b>500,000,000</b>		
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		500,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 05</b>	<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>						<b>5,900,000,000</b>						<b>5,900,000,000</b>		
<b>4 01 05 1.01</b>	<b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>						<b>4,100,000,000</b>						<b>4,100,000,000</b>		
4 01 05 1.01 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan						1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1,500,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 05 1.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan						600,000,000		Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		600,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 05 1.01 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Tersedianya dokumentasi dan informasi hukum				12 bulan	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	12 bulan	500,000,000	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 05 1.01 04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota						1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1,500,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 05 1.02</b>	<b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>						<b>1,800,000,000</b>						<b>1,800,000,000</b>		
4 01 05 1.02 01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum						1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1,500,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 05 1.02 02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM						300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		300,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 07</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>						<b>600,000,000</b>						<b>600,000,000</b>		
<b>4 01 07 1.01</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>						<b>600,000,000</b>						<b>600,000,000</b>		
4 01 07 1.01 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa						600,000,000				3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		600,000,000	Sekretariat Daerah	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>4 01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>16,182,010,727</b>							<b>15,556,400,061</b>	
<b>4 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>11,058,302,727</b>							<b>10,432,692,061</b>	
<b>4 01 01 1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>30,080,001</b>							<b>30,080,001</b>	
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang tersusun				1 dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 dokumen	15,000,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						1		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15,080,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		15,080,000	Sekretariat Daerah	
<b>4 01 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>7,871,852,060</b>						<b>7,856,852,060</b>		
4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan yang dibayar				35 aparatur	7,841,752,060		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	35 aparatur	7,841,752,060	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun				1 laporan	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 laporan	0	Sekretariat Daerah	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disusun				1 laporan	15,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 laporan	15,100,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>115,000,000</b>							<b>140,000,000</b>	
4 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah aparatur yang mengikuti diklat				2 orang	115,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		2 orang	140,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>2,519,604,666</b>							<b>1,883,994,000</b>	
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan				11 jenis	662,854,666		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		11 jenis	527,800,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia				3 jenis	22,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3 jenis	22,950,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah bahan material yang tersedia				42 jenis	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		42 jenis	110,044,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah makan minum tamu dan rapat				1600 orang	250,000,000				3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1600 orang	223,200,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah aparatur yang melakukan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				43 orang	1,433,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		43 orang	1,000,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>343,100,000</b>							<b>343,100,000</b>	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa surat menyurat				12 bulan	84,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	84,800,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan				96 unit	158,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		96 unit	158,300,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			100,000,000	Sekretariat Daerah
<b>4 01 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>178,666,000</b>							<b>178,666,000</b>	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas /operasional				13 unit	178,666,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		13 unit	178,666,000	Sekretariat Daerah



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>1,741,134,500</b>						<b>1,915,247,950</b>		
4 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1,000,000,000		Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1,100,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		110,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah pembahasan dan dokumen yang di hasil kan				12 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	110,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah pembahasan dan dokumen yang di hasil kan				12 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	12 Dokumen	110,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						441,134,500	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		485,247,950	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>22,412,237,933</b>						<b>22,444,387,933</b>		
4 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji yang di bayarkan				120 orang	17,268,037,933	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	120 orang	17,268,037,933	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		110,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						4,626,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		4,626,500,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						221,500,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		243,650,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah pembahasan dan dokumen yang dihasilkan				12 Dokumen	196,200,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Dokumen	196,200,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
<b>4 02 01</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>2,160,000,000</b>							<b>1,730,000,000</b>	
4 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun				12 Dokumen	500,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Dokumen	550,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang yang diamankan				10 Jenis	960,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		10 Jenis	960,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			110,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Yang di Cetak				12 Dokumen	500,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			110,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
<b>4 02 01</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>3,087,080,000</b>							<b>3,356,673,000</b>	
4 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	JUMLAH PAKAIAN DINAS				220 STEL	1,095,930,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		220 STEL	1,205,523,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1,500,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			1,650,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					110,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS dan Bintek				12 Kali	391,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Kali	391,150,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
<b>4 02 01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>23,937,423,825</b>							<b>25,126,938,708</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						299,969,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		329,965,955	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						452,000,000		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		497,200,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1,650,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1,815,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7,994,179,775				3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		8,793,597,753	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						1,099,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1,208,900,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				12 Bulan	149,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	12 Bulan	149,400,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		220,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi				12 Bulan	5,829,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	12 Bulan	5,829,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dengan SKPD/OPD				12 Kali	6,063,875,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	12 Kali	6,063,875,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
<b>4 02 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>7,615,998,372</b>						<b>8,377,598,211</b>		
4 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel						762,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		838,200,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		2,200,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						2,853,998,372		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3,139,398,211	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		2,200,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>11,879,030,000</b>						<b>13,007,934,000</b>		
4 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		330,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah air yang di gunakan jumlah listrik yg di gunakan				12 Bulan 12 Bulan	1,589,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	12 Bulan 12 Bulan	1,589,990,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1,750,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						8,489,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		9,337,944,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>15,625,500,000</b>						<b>1,061,108,050,000</b>		
4 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1,421,280,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1,563,408,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Aset dan mebel yang terpelihara				4 Jenis	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	4 Jenis	150,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						485,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		533,500,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						950,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1,045,000,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah ruang kerja				4 Ruang	12,419,220,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		4 Ruang	13,661,142,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Kantor yang terpeliharaan Jumlah Bangunan Rumah Dinas Yang Terpelihara				6 Unit 6 Unit	200,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		6 Unit 6 Unit	200,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
<b>4 02 01 1.13</b>	<b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>						<b>200,000,000</b>							<b>220,000,000</b>	
4 02 01 1.13 01	Penyiapan Materi Pimpinan						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			110,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 01 1.13 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			110,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
<b>4 02 01 1.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>						<b>27,799,669,000</b>							<b>27,953,365,500</b>	
4 02 01 1.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Administrasi keuangan				12 Bulan	25,572,704,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	25,572,704,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 01 1.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						1,536,965,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			1,690,661,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 01 1.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota yang cekh up kesehatan				69 orang	690,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		69 orang	690,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
<b>4 02 01 1.16</b>	<b>Layanan Adminstrasi DPRD</b>						<b>1,415,512,000</b>							<b>1,555,512,000</b>	
4 02 01 1.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			220,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 01 1.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	jumlah kegiatan yg terfasilitasi				12 kali	15,512,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 kali	15,512,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 1.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						200,000,000				3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		220,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 01 1.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1,100,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>						<b>238,912,850,000</b>						<b>245,502,850,000</b>		
4 02 02 1.01	<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>						<b>24,348,500,000</b>						<b>26,698,500,000</b>		
4 02 02 1.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah pembahasan dan dokumen yang di hasil kan				24 Dokumen	1,500,000,000				3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	24 Dokumen	1,650,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 02 1.01 02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Perda Yang di Bahas				47 Perda	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	47 Perda	2,200,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 02 1.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah pembahasan dan dokumen yang di hasil kan				24 Dokumen	848,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	24 Dokumen	848,500,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 02 1.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik						20,000,000,000				3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		22,000,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 02 1.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD						0		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 02 1.02	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>						<b>18,318,000,000</b>						<b>20,008,000,000</b>		
4 02 02 1.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS						800,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		880,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 02 1.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						800,000,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		880,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 02 1.02 03	Pembahasan APBD						709,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		709,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	
4 02 02 1.02 04	Pembahasan Perubahan APBD						709,000,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		709,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 1.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Yang di Cetak				10 Dokumen	300,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		10 Dokumen	330,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah pembahasan dan dokumen yang di hasil kan				12 Kali	15,000,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Kali	16,500,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
<b>4 02 02 1.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>						<b>46,595,600,000</b>							<b>46,595,600,000</b>	
4 02 02 1.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Kegiatan Pengawasan				12 Bulan	8,989,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	8,989,800,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Kegiatan Pengawasan				12 Bulan	9,765,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	9,765,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Pengawasan				12 Bulan	8,983,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	8,983,800,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Kegiatan Pengawasan				12 Bulan	8,593,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	8,593,200,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Kegiatan Pengawasan				12 Bulan	565,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	565,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran						8,983,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			8,983,800,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 1.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah pembahasan dan dokumen yang di hasil kan				24 Kali	715,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		24 Kali	715,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
<b>4 02 02 1.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>						<b>17,655,650,000</b>							<b>17,705,650,000</b>	
4 02 02 1.04 01	Orientasi DPRD	Jumlah Kegiatan orientasi				12 Kali	1,555,870,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Kali	1,555,870,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota Yang Mengikuti Bintek jumlah kegiatan Bintek Dewan				69 Orang 12 Bulan	7,571,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		69 Orang 12 Bulan	7,571,780,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Kegiatan Dewan yang di Media Cetaka Jumlah Kegiatan Dewan Yang di Publikasi Jumlah Kegiatan Dewan yang melakukan Siaran Langsung				12 Kali 24 Kali 12 Kali	2,293,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Kali 24 Kali 12 Kali	2,293,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Tenaga Ahli				47 orang	4,476,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		47 orang	4,476,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli				24 orang	960,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		24 orang	960,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang berhubungan dengan Masyarakat				24 Kali	299,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		24 Kali	299,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah pembahasan dan dokumen yang di hasil kan				12 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Dokumen	550,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
<b>4 02 02 1.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>						<b>61,229,000,000</b>							<b>61,229,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 1.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dalam daerah				69 orang	16,765,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		69 orang	16,765,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Kegiatan Pokok Pikiran Dewan Yang di Usulkan				70 orang	490,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		70 orang	490,500,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Daerah yang di kunjungi dalam kegiatan Reses Jumlah Kegiatan Reses oleh Anggota Dewan				30 Daerah 70 orang	43,973,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		30 Daerah 70 orang	43,973,500,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
<b>4 02 02 1.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>						<b>1,183,800,000</b>							<b>1,183,800,000</b>	
4 02 02 1.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen yang di susun				12 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD						1,183,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			1,183,800,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
<b>4 02 02 1.07</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>						<b>20,677,500,000</b>							<b>22,677,500,000</b>	
4 02 02 1.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen yang di Verifikasi Jumlah Fasilitasi Kegiatan Anggota Dewan Jumlah Kegiatan yang terkordinasi dengan Pihak lain Jumlah Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Daerah dengan Dewan				12 Dokumen 12 Kali 70 Kali 12 Dokumen	677,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Dokumen 12 Kali 70 Kali 12 Dokumen	677,500,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Kegiatan Dewan Yang di Publikasi				70 Kali	20,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		70 Kali	22,000,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
<b>4 02 02 1.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>						<b>48,904,800,000</b>							<b>49,404,800,000</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 1.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kegiatan Koordinasi serta Tugas Anggota Dewan				70 Kali	31,395,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		70 Kali	31,395,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah pembahasan dan dokumen yang dihasilkan				12 Dokumen	516,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Dokumen	516,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Kegiatan Badan Musyawarah				70 Kali	1,075,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		70 Kali	1,075,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Kegiatan Pimpinan Dewan				36 Kali	10,918,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		36 Kali	10,918,800,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
4 02 02 1.08 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Kegiatan Pansus Jumlah Pansusus				70 Kali 5 Pansus	5,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		70 Kali 5 Pansus	5,500,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>4 02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						<b>235,057,264,100</b>						<b>0</b>		
<b>4 02 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>121,338,320,800</b>						<b>0</b>		
<b>4 02 01 1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>2,000,000,000</b>						<b>0</b>		
4 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar				Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar				Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar				Sekretariat Majelis Rakyat Papua

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
<b>4 02 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>49,812,720,800</b>							<b>0</b>	
4 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						48,812,720,800		Dana Otonomi Khusus Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
<b>4 02 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>1,800,000,000</b>							<b>0</b>	
4 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						150,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1,650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
<b>4 02 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>3,629,000,000</b>							<b>0</b>	
4 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						425,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1,734,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>1,500,000,000</b>							<b>0</b>	
4 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>12,059,000,000</b>							<b>0</b>	
4 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						575,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						588,356,700		Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						10,895,643,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>4,093,600,000</b>							<b>0</b>	
4 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1,600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						993,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
<b>4 02 01 1.16</b>	<b>Layanan Adminstrasi DPRD</b>						<b>46,444,000,000</b>							<b>0</b>	
4 02 01 1.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						46,444,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
<b>4 02 02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>						<b>51,028,799,928</b>							<b>0</b>	
<b>4 02 02 1.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>						<b>20,000,000,000</b>							<b>0</b>	
4 02 02 1.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan						20,000,000,000		Dana Otonomi Khusus Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar 1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
<b>4 02 02 1.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>						<b>31,028,799,928</b>							<b>0</b>	
4 02 02 1.05 03	Pelaksanaan Reses						31,028,799,928		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
<b>4 02 04</b>	<b>PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROV. PAPUA</b>						<b>62,690,143,372</b>							<b>0</b>	
<b>4 02 04 1.01</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP</b>						<b>56,690,143,372</b>							<b>0</b>	
4 02 04 1.01 01	Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan						6,000,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 04 1.01 02	Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya						43,400,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 04 1.01 03	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya						7,290,143,372		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
4 02 04 1.02	<b>Pelaksanaan Hak dan Kewajiban</b>						<b>6,000,000,000</b>							<b>0</b>	
4 02 04 1.02 06	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan						6,000,000,000		Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
1 03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						<b>2,250,000,000</b>							<b>2,700,000,000</b>	
1 03 12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>						<b>2,250,000,000</b>							<b>2,700,000,000</b>	
1 03 12 1.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>						<b>750,000,000</b>							<b>1,000,000,000</b>	
1 03 12 1.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRWP yang ditetapkan				1 Perda	750,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Perda	1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 03 12 1.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>						<b>1,500,000,000</b>							<b>1,700,000,000</b>	
1 03 12 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Pergub STRADA yang disusun				1 Pergub	1,500,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Pergub	1,700,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
5 01	<b>PERENCANAAN</b>						<b>125,613,719,262</b>							<b>117,613,719,962</b>	
5 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>79,313,719,262</b>							<b>77,963,719,262</b>	
5 01 01 1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>2,450,000,000</b>							<b>2,450,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	300,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	250,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	200,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	150,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan				4 dokumen/Laporan	400,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		4 dokumen/Laporan	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1,000,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan			3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>5 01 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>67,153,719,262</b>							<b>67,053,719,262</b>	
5 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dibayarkan				14 Bulan	66,653,719,262	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				14 Bulan	66,653,719,262	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan				1 dokumen/Laporan	100,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 dokumen/Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen/Laporan				1 Laporan	100,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan				1 Laporan	100,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen/Laporan				1 Laporan	100,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>5 01 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>500,000,000</b>	
5 01 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit				1 unit	50,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 unit	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah baju				570 Stell	700,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan			3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		570 Stell	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah orang				20 orang	300,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		20 orang	300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang				15 orang	150,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		15 orang	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>5 01 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>5,000,000,000</b>							<b>4,700,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik				5 Jenis	100,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5 Jenis	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan				10 unit	500,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		10 unit	300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan				10 Jenis	200,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		10 Jenis	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						300,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen/Laporan				50 dokumen/Laporan	250,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		50 dokumen/Laporan	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen				2 dokumen/Laporan	50,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		2 dokumen/Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan				3 Jenis	100,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3 Jenis	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan				12 Bulan	500,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi diluar dan dalam daerah				12 Bulan	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	2,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem				1 unit	1,000,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 unit	1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>5 01 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>650,000,000</b>							<b>400,000,000</b>	
5 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel				3 Jenis	150,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3 Jenis	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan				5 unit	500,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5 unit	300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>5 01 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1,510,000,000</b>							<b>1,510,000,000</b>	
5 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						60,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa				3 Jenis	200,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3 Jenis	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa				12 Bulan	50,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa				15 orang	1,200,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		15 orang	1,200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>5 01 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1,350,000,000</b>							<b>1,350,000,000</b>	
5 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara				25 unit	1,000,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		25 unit	1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara				10 unit	100,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		10 unit	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas bangunan yang terpelihara				0 .	250,000,000	Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		0 .	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>						<b>23,750,000,000</b>							<b>16,450,000,000</b>	
5 01 02 1.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>						<b>9,250,000,000</b>							<b>9,450,000,000</b>	
5 01 02 1.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah 3T yang disusun				1 Dokumen	1,000,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	1,200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Konsultasi				5 kali	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5 kali	1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah SKPD				34 SKPD	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		34 SKPD	750,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	4,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	4,500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 1.01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen				29 dokumen/Laporan	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		29 dokumen/Laporan	1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.02	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						<b>6,500,000,000</b>							<b>7,000,000,000</b>	
5 01 02 1.02 01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Elemen Data yang tersedia Jumlah Pengelola Data dan Analisa data yang terlatih				230 Buah 150 orang	2,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		230 Buah 150 orang	2,500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Data/Informasi yang di Publikasikan				4 Dokumen	1,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		4 Dokumen	1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.02 03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD dan Kabupaten dalam Pengelolaan SIPD				64 SKPD/Kab	2,500,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		64 SKPD/Kab	2,500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.02 04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Daerah				1 Dokumen	1,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.03	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						<b>8,000,000,000</b>							<b>0</b>	
5 01 02 1.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Jumlah Koordinasi				1 Dokumen 1 Tahun	1,250,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen 1 Tahun	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	750,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 1.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	5,000,000,000		Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		4 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 1.03 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1,000,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>						<b>22,550,000,000</b>							<b>23,200,000,700</b>	
5 01 03 1.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>						<b>3,950,000,000</b>							<b>700,000,700</b>	
5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			700,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	terwujudnya fasilitasi sumber daya manusia				100 %	850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 1.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>						<b>6,000,000,000</b>						<b>6,400,000,000</b>		
5 01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						750,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		800,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 1.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						750,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		800,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 1.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						750,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		800,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 1.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						750,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		800,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 1.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						750,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		800,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 1.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						750,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		800,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						750,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		800,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan yang disusun Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi yang disusun				1 Dokumen 1 Dokumen	750,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen 1 Dokumen	800,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 1.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>						<b>12,600,000,000</b>						<b>16,100,000,000</b>		
5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun				3 Dokumen	1,400,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3 Dokumen	2,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen				2 Dokumen	1,300,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		2 Dokumen	2,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Dokumen	2,000,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		2 Dokumen	2,500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	1,300,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		2 Dokumen	2,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen RAD Inpres No.9/2020 yang disusun Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dokumen rencananya (RPJPD, RPJMD, RTRWK, RDTR dan KLHS) Jumlah Tim RAD Inpres No.9/2020 yang dibentuk				1 Dokumen 10 Kabupaten 1 Tim	3,000,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen 10 Kabupaten 1 Tim	3,300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen koridor yang disusun Jumlah dokumen perencanaan kewilayahan yang diasistensi				1 Dokumen 5 Dokumen	800,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen 5 Dokumen	1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan yang disusun Jumlah laporan koordinasi yang disusun				1 Dokumen 1 Laporan	1,500,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen 1 Laporan	1,800,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah indikator STRANAS yang disiapkan Jumlah Perda RTRWP yang ditetapkan Jumlah RTRWK yang mendapat rekomendasi/evaluasi				4 Indikator 1 Perda 10 Kabupaten	1,300,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		4 Indikator 1 Perda 10 Kabupaten	1,500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						<b>8,688,452,408</b>							<b>9,900,000,000</b>	
5 05 02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>						<b>8,688,452,408</b>							<b>9,900,000,000</b>	
5 05 02 1.01	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>						<b>3,303,000,000</b>							<b>3,850,000,000</b>	
5 05 02 1.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	763,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Kegiatan	800,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.01 03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1,000,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Kegiatan	1,200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.01 04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	710,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Kegiatan	850,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.01 05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	830,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Kegiatan	1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>						<b>1,000,000,000</b>							<b>1,300,000,000</b>	
5 05 02 1.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata						500,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			650,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan						500,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			650,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05 02 1.03	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>						<b>1,800,452,408</b>							<b>2,000,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 05 02 1.03 03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	900,452,408		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Kegiatan	1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 05 02 1.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	900,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Kegiatan	1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
<b>5 05 02 1.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>						<b>2,585,000,000</b>							<b>2,750,000,000</b>		
5 05 02 1.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	735,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Kegiatan	700,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 05 02 1.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						1,000,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 05 02 1.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	850,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Kegiatan	1,050,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
<b>5 02</b>	<b>KEUANGAN</b>							<b>7,691,262,882,136</b>							<b>7,691,212,882,136</b>	
<b>5 02 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							<b>385,181,919,778</b>							<b>385,181,919,778</b>	
<b>5 02 01 1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							<b>2,525,790,000</b>							<b>2,525,790,000</b>	
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	929,750,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	929,750,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	499,950,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	499,950,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	
5 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1 Dokumen	1,096,090,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	1,096,090,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	
<b>5 02 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>349,948,827,928</b>						<b>349,948,827,928</b>		



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang di bayar				14 Bulan	348,956,307,928	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		14 Bulan	348,956,307,928	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 Dokumen	514,500,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	514,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD				1 Dokumen	478,020,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	478,020,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
<b>5 02 01 1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>1,230,730,000</b>							<b>1,230,730,000</b>	
5 02 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga pengamanan				12 Orang	1,230,730,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Orang	1,230,730,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
<b>5 02 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>2,827,280,000</b>							<b>2,827,280,000</b>	
5 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya				340 Orang	825,480,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		340 Orang	825,480,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				35 Orang	2,001,800,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		35 Orang	2,001,800,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
<b>5 02 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>17,056,391,980</b>							<b>17,056,391,980</b>	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan dan perlengkapan kantor				50 Unit	1,353,277,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		50 Unit	1,353,277,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik				150 Jenis	1,923,039,980	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		150 Jenis	1,923,039,980	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				80025 Jenis	1,930,800,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		80025 Jenis	1,930,800,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				100 Buku	333,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		100 Buku	333,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum tamu				12 Bulan	2,999,920,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	2,999,920,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koodinasi dan konsultasi SKPD				12 Bulan	7,111,275,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	7,111,275,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan khusus dana DAK				1 Kegiatan	1,405,080,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Kegiatan	1,405,080,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 01 1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>1,329,990,000</b>							<b>1,329,990,000</b>	
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan				2 Unit	1,329,990,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		2 Unit	1,329,990,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>4,641,923,770</b>							<b>4,641,923,770</b>	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat				1600 surat	2,198,846,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1600 surat	2,198,846,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				12 Bulan	1,498,097,770	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	1,498,097,770	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						944,980,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			944,980,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>5,620,986,100</b>							<b>5,620,986,100</b>	
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas				88 Unit	2,933,694,100	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		88 Unit	2,933,694,100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60 Unit	253,200,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		60 Unit	253,200,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				100 Unit	1,334,100,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		100 Unit	1,334,100,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan lainnya				3 Unit	1,099,992,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3 Unit	1,099,992,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>						<b>7,302,017,632,358</b>							<b>7,302,017,632,358</b>	
5 02 02 1.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>						<b>18,078,020,000</b>							<b>18,078,020,000</b>	
5 02 02 1.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah penyusunan KUA/PPAS				2 Dokumen	2,686,450,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		2 Dokumen	2,686,450,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Orang	2,186,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Orang	2,186,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah penyusunan dan verifikasi RKA- SKPD				1 Orang	1,861,700,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Orang	1,861,700,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD				60 Dokumen	1,447,920,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		60 Dokumen	1,447,920,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah penyusunan dan verifikasi DPA- SKPD				60 Dokumen	1,224,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		60 Dokumen	1,224,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD				60 Dokumen	637,500,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		60 Dokumen	637,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah koordinasi dan penyusunan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD				60 Dokumen	3,984,200,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		60 Dokumen	3,984,200,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah koordinasidan penyusunanPerda tentang perubahan APBD dan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD				60 Dokumen	3,402,500,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		60 Dokumen	3,402,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah koordinasi tentang penyusunan regulasi serta kegiatan di bidang anggaran				1 Kegiatan	299,700,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Kegiatan	299,700,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5.02.02.1.01.13	Pembinaan Perencanaan Penggangan Daerah Pemerintah Provinsi						348,050,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			348,050,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 1.02	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>4,546,566,000</b>							<b>4,546,566,000</b>	
5 02 02 1.02 02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBDKab/Kota				28 Kabupaten/kota	1,832,449,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		28 Kabupaten/kota	1,832,449,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.02 04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota				29 Kabupaten/kota	1,115,200,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		29 Kabupaten/kota	1,115,200,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.02 06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Solialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah				28 Kab/Kota	259,240,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		28 Kab/Kota	259,240,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.02 12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ,konsolidasian provinsi dan kabupaten /kota dan statistik keuangan pemerintah provinsi papua				29 kabuten/kota	1,339,677,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		29 kabuten/kota	1,339,677,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.03	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>						<b>4,975,160,400</b>							<b>4,975,160,400</b>	
5 02 02 1.03 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah korrdinasi dan pengelolaan kas daerah				12 Bulan	668,960,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	668,960,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.03 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah penatausahaan pembiayaan Daerah				12 Bulan	533,460,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	533,460,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dan trasfer lainnya				12 Bulan	394,800,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	394,800,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.03 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi nontunai dan lembaga keuangan bukan bank				12 Bulan	806,320,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	806,320,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.03 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						807,274,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			807,274,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.03 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait				12 Bulan	577,120,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	577,120,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.03 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah SPKD yang mengikuti penyusunan petunjuk teknis adminitrasi keuang yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan				36 SKPD	565,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		36 SKPD	565,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.03 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota				36 SKPD	622,226,400	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		36 SKPD	622,226,400	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.04	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>						<b>6,825,845,000</b>							<b>6,825,845,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 1.04 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban				1 Dokumen	730,190,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	730,190,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.04 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran				3 Dokumen	933,060,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3 Dokumen	933,060,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.04 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah				3 Dokumen	2,286,732,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3 Dokumen	2,286,732,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.04 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah penyusunan rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua				5 Dokumen	2,149,630,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5 Dokumen	2,149,630,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.04 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				10 Buku	726,233,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		10 Buku	726,233,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.05	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>						<b>7,261,598,065,958</b>							<b>7,261,598,065,958</b>	
5 02 02 1.05 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan				12 Bulan	7,261,598,065,958	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	7,261,598,065,958	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 02 1.06	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>						<b>5,993,975,000</b>							<b>5,993,975,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 1.06 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah provinsi papua				12 Bulan	5,993,975,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	5,993,975,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>						<b>4,063,330,000</b>							<b>4,013,330,000</b>	
5 02 03 1.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>						<b>4,063,330,000</b>							<b>4,013,330,000</b>	
5 02 03 1.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah keseragaman satuan harga				1 Dokumen	347,960,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	347,960,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 03 1.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar BMD dan Standar Kebutuhan BMD				2 Dokumen	1,499,990,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		2 Dokumen	1,449,990,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 03 1.01 03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah penyusunan rancangan kebutuhan barang milik daerah				1 Dokumen	380,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	380,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 03 1.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan mutasi BMD				1 Dokumen	224,980,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	224,980,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 03 1.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah pengamanan barang milik daerah				1 Kegiatan	1,148,400,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Kegiatan	1,148,400,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 03 1.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Penghapusan BMD				1 Dokumen	282,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	282,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5 02 03 1.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan dan rekonsiliasi data aset				1 Dokumen	180,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen	180,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
5 02	<b>KEUANGAN</b>							<b>137,339,301,311</b>						<b>144,075,299,960</b>	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>122,381,656,811</b>						<b>126,175,299,960</b>		
5 02 01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>434,170,000</b>						<b>455,878,500</b>		
5 02 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	281,870,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	1 Dokumen	295,963,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja				1 Dokumen	152,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	159,915,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>79,731,777,460</b>						<b>79,734,277,460</b>		
5 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai				12 Bulan	79,681,777,460		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	79,681,777,460	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				3 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	3 Dokumen	52,500,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>756,000,000</b>						<b>793,800,000</b>		
5 02 01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan SKPD				21 Orang	756,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	21 Orang	793,800,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>2,203,925,000</b>						<b>2,206,500,000</b>		
5 02 01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya				814 Stell	1,135,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	814 Stell	1,135,200,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Yang Dipindahkan				10 Orang	97,425,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	10 Orang	100,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai				27 Orang	971,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	27 Orang	971,300,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>10,407,908,111</b>						<b>12,400,000,000</b>		
5 02 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-Alat Listrik				12 Bulan	167,462,480		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	12 Bulan	200,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor				419 Unit	3,264,624,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		419 Unit	3,300,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor				1 Tahun	1,773,157,631		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun	2,000,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	1,584,720,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun	1,700,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				1 Surat Kabar	32,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Surat Kabar	50,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu				1 Tahun	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Tahun	150,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3,435,544,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			5,000,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>5 02 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>14,193,444,000</b>							<b>14,284,844,000</b>	
5 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan				22 Unit	2,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		22 Unit	2,000,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan				5 Unit	1,595,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5 Unit	1,600,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor				62 Buah	313,350,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		62 Buah	400,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Yang Dibangun Jumlah Rumah Dinas Yang Dibangun Jumlah Sewa Rumah				2 Unit 2 Unit 11 Unit	10,284,844,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		2 Unit 2 Unit 11 Unit	10,284,844,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>5 02 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>7,325,816,890</b>							<b>7,800,000,000</b>	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Barang Yang di kirim Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Jumlah Surat Yang di Sediakan Jumlah Tenaga Supir				5137 Kg 28 Orang 4000 Surat 4 Orang	3,699,039,094		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5137 Kg 28 Orang 4000 Surat 4 Orang	4,000,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan berlangganan Listrik,Air,Telepon, Transponder				12 Bulan	1,518,992,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Bulan	1,600,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Tersedianya Makan Minum Rapat/Kegiatan				27 Orang 1 Tahun 1 Tahun	2,107,785,196		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		27 Orang 1 Tahun 1 Tahun	2,200,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>5 02 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>7,328,615,350</b>							<b>8,500,000,000</b>	
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya				143 Unit	1,848,309,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		143 Unit	2,000,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Mobil Dinas/Operasional Lapangan Yang Terpelihara dan Terfasilitasi Perijinannya				8 Unit	442,210,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		8 Unit	600,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang di pelihara				300 Unit	798,595,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		300 Unit	900,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara dan direhabilitasi				18 Unit	4,239,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		18 Unit	5,000,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>5 02 04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>						<b>14,957,644,500</b>							<b>17,900,000,000</b>	
<b>5 02 04 1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>						<b>14,957,644,500</b>							<b>17,900,000,000</b>	
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Terlaksananya evaluasi Rancangan Perda				7 Perda	742,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7 Perda	1,000,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah				17 Samsat	150,780,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		17 Samsat	500,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak Daerah				17 Laporan	131,425,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		17 Laporan	500,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengembangan Aplikasi Samsat Online Terlaksananya kegiatan cleansing data				2 Sistem 5 Samsat	6,381,527,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		2 Sistem 5 Samsat	6,500,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan SP3 Peningkatan Pembayaran Deviden Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Kesamsatan Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi Data Samsat				35 OPD 4 BUMD 17 Samsat 17 Samsat	3,082,988,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		35 OPD 4 BUMD 17 Samsat 17 Samsat	3,500,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan Pajak Rokok Kabupaten/Kota Tersedianya Laporan Pajak Daerah yang valid				6 kabupaten/Kota 6 Samsat	383,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		6 kabupaten/Kota 6 Samsat	400,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Terbayarnya Tunggakan Pajak Daerah				80 Persen	2,116,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		80 Persen	2,500,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian internal				17 UPPD	958,203,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		17 UPPD	1,500,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terciptanya Pembukuan YANG Handal dan Meningkatnya PAD Terdatanya Jumlah Sumber Potensi Retribusi Daerah				1 Laporan 19 OPD	1,009,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Laporan 19 OPD	1,500,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
<b>5</b>															
<b>5 03</b>							<b>46,029,783,000</b>							<b>46,069,783,000</b>	
<b>5 03 01</b>							<b>27,579,783,000</b>							<b>27,849,783,000</b>	
<b>5 03 01 1.01</b>							<b>420,000,000</b>							<b>460,000,000</b>	
5 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen				1 laporan	50,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 laporan	60,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	91,942,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5 Dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen				5 dokumen	100,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5 dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan				5 Laporan	78,058,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5 Laporan	100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen				5 dokumen	100,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5 dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
<b>5 03 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>17,729,783,000</b>							<b>17,749,783,000</b>	
5 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji yang dibayarkan				14 bulan	17,329,783,000				3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		14 bulan	17,329,783,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelayanan Administrasi PNS ASN				3500 Orang	300,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3500 Orang	300,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				5 Laporan	50,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5 Laporan	60,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan				5 Laporan	50,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		5 Laporan	60,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
<b>5 03 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>2,600,000,000</b>							<b>2,800,000,000</b>	
5 03 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Sipil Harian				300 Stell	200,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		300 Stell	250,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang mengikuti Rapat Teknis Kepegawaian				250 Orang	1,500,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		250 Orang	1,650,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah PNS Yang Dievaluasi				12000 Orang	150,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12000 Orang	150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				110 orang	400,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		110 orang	400,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah sosialisasi				300 orang	200,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		300 orang	200,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan				150 orang	150,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		150 orang	150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
<b>5 03 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>3,080,000,000</b>							<b>3,090,000,000</b>	
5 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen alat pemeliharaan listrik dan genset yang disediakan				75 buah	110,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		75 buah	120,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan/Perlengkapan gedung kantor yang disediakan				61 unit	550,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		61 unit	550,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						410,000,000		Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			410,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi makan dan minum yang disediakan				3000 orang	650,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3000 orang	650,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah				50 orang	1,360,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		50 orang	1,360,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
<b>5 03 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>200,000,000</b>							<b>200,000,000</b>	
5 03 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah membeli yang disediakan				10 unit	200,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		10 unit	200,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
<b>5 03 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>2,350,000,000</b>							<b>2,350,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang dikirim				7000 surat	700,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		7000 surat	700,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan				12 layanan	800,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 layanan	800,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga kebersihan dan jumlah alat kebersihan yang tersedia				13 orang	850,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		13 orang	850,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1,200,000,000</b>							<b>1,200,000,000</b>	
5 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/opersional yang dipelihara				40 unit	400,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		40 unit	400,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara				22 unit	800,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		22 unit	800,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>						<b>18,450,000,000</b>							<b>18,220,000,000</b>	
5 03 02 1.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>						<b>3,700,000,000</b>							<b>3,700,000,000</b>	
5 03 02 1.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	jumlah pelamar cpns				4000 orang	1,000,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		4000 orang	1,000,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	jumlah pelamar capra ipdn				2000 orang	1,650,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		2000 orang	1,650,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	jumlah pegawai yang pensiun				200 orang	350,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		200 orang	350,000,000	Badan Kepegawaian Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 1.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	jumlah asn yang difasilitasi				50 orang	300,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		50 orang	300,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	prosentase data base				80 %	150,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		80 %	150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Prosentase pemukhtahiran data kepegawaian				90 %	250,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		90 %	250,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
<b>5 03 02 1.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>						<b>1,100,000,000</b>							<b>800,000,000</b>	
5 03 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	jumlah pegawai yang naik pangkat dan mutasi				4000 orang	800,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		4000 orang	800,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	jumlah pegawai yang mengikuti ujian penyesuaian				200 orang	300,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		200 orang	0	Badan Kepegawaian Daerah
<b>5 03 02 1.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>						<b>12,000,000,000</b>							<b>12,050,000,000</b>	
5 03 02 1.03 03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	jumlah asn yang mengikuti pelaksanaan seleksi pim III dan IV				500 orang	450,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		500 orang	450,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	jumlah asn yang melanjutkan pendidikan				150 orang	10,000,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		150 orang	10,000,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	jumlah asn yang mengikuti ujian dinas				600 orang	750,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		600 orang	750,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	jumlah pejabat fungsional di lingkungan pemerintah provinsi Papua				7000 orang	200,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		7000 orang	250,000,000	Badan Kepegawaian Daerah



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 1.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah kompetensi jabatan pimpinan tinggi				35 skpd	600,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		35 skpd	600,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
<b>5 03 02 1.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>						<b>1,650,000,000</b>							<b>1,670,000,000</b>	
5 03 02 1.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	jumlah purna tugas yang diberi penghargaan				100 orang	1,200,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		100 orang	1,200,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	jumlah asn yang mendapatkan satya lancana				200 orang	250,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		200 orang	250,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	jumlah pns yang melakukan sumpah janji				700 orang	200,000,000	Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		700 orang	220,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>5 04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>						<b>48,194,684,673</b>						<b>50,335,000,000</b>		
<b>5 04 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>30,546,000,000</b>						<b>31,585,000,000</b>		
<b>5 04 01 1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>300,000,000</b>						<b>330,000,000</b>		
5 04 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Data Renja SKPD Tahun 2023 Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2023 Rencana Kinerja Tahunan TA 2023				1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	50,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	55,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA Perubahan APBD BPSDM Tahun 2023				1 Dokumen	50,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Dokumen	55,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKA - SKPD Perubahan APBD Tahun 2022				1 Dokumen	50,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Dokumen	55,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Data Suplemen LKPJ Tahun 2021 Laporan Kinerja BPSDM Tahun 2021 Laporan Tahunan BPSDM Tahun 2021 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2021				1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	150,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	165,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 04 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>22,711,000,000</b>							<b>23,145,000,000</b>	
5 04 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						22,581,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			23,000,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021				1 Laporan	50,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Laporan	55,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Laporan Keuangan Bulanan Tahun 2021 Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2021 Laporan Keuangan Triwulan Tahun 2021				12 Laporan 1 Laporan 3 Triwulan	80,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 Laporan 1 Laporan 3 Triwulan	90,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 04 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>500,000,000</b>							<b>550,000,000</b>	
5 04 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Absensi ASN Administrasi Kepegawaian Penunjang Kenaikan Gaji Berkala ASN Kenaikan Pangkat ASN Pensiun PNS				12 Bulan 1 Tahun 2 Periode 2 Periode 1 Tahun	300,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 Bulan 1 Tahun 2 Periode 2 Periode 1 Tahun	330,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kontribusi Bimtek /Kursus Singkat/Pelatihan				40 Kegiatan	200,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		40 Kegiatan	220,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 04 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>3,414,000,000</b>							<b>3,785,000,000</b>	
5 04 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen dan Instalasi Listrik				1 Paket	50,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Paket	55,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pendukung Kediklatan				1 Paket	900,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Paket	990,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengangkutan beras ASN				12 Bulan	24,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	12 Bulan	30,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 04 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		90,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 04 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu Pusat				1 Tahun	60,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Tahun	70,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 04 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi ke Instansi Pembina				1 Tahun	2,000,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Tahun	2,200,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 04 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Learning Management System (LMS) BPSDM Updating dan maintenance Website BPSDM				1 Tahun 1 Tahun	300,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Tahun 1 Tahun	350,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
<b>5 04 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1,671,000,000</b>						<b>1,705,000,000</b>		
5 04 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Masuk dan Surat Keluar				5000 Surat	50,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	5000 Surat	55,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 04 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air bersih Jasa internet berlangganan Jasa Listrik				1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan	1,030,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan	1,050,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 04 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bahan dan peralatan pembersih Tenaga kebersihan kantor				1 Paket 12 Bulan	591,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	1 Paket 12 Bulan	600,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
<b>5 04 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1,950,000,000</b>						<b>2,070,000,000</b>		
5 04 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4				11 Unit 4 Unit	800,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	11 Unit 4 Unit	900,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 04 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Kantor Komputer Kantor				30 Unit 10 Unit	100,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar	30 Unit 10 Unit	120,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				3 Unit	1,050,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		3 Unit	1,050,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>						<b>17,648,684,673</b>							<b>18,750,000,000</b>	
5 04 02 1.01	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>						<b>4,488,990,000</b>							<b>5,100,000,000</b>	
5 04 02 1.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Analisis Kebutuhan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2023				1 Laporan	500,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Laporan	550,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 1.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta mengikuti diklat/pelatihan teknis umum dan fungsional				210 Orang	3,488,990,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		210 Orang	4,000,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 1.01 04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			550,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 1.02	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>						<b>13,159,694,673</b>							<b>13,650,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 02 1.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Pengajuan akreditasi Diklat Penanggulangan Bencana Pengajuan akreditasi PKA dan PKP Tahun 2021 - 2025				1 Kegiatan 2 Kegiatan	500,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Kegiatan 2 Kegiatan	600,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 1.02 05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Kerjasama antar lembaga kediklatan				10 Lembaga	500,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		10 Lembaga	550,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 1.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pelatihan Kepamongprajaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Pelatihan Kepemimpinan Pengawas				1 Angkatan 2 Angkatan 1 Angkatan 3 Angkatan	11,661,000,000	Kota Jayapura, Abepura, Vim	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		1 Angkatan 2 Angkatan 1 Angkatan 3 Angkatan	12,000,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 1.02 08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan						498,694,673	Kota Jayapura, Abepura, Vim	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			500,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
5 06	<b>PENGLOLAAN PERBATASAN</b>							<b>21,630,199,334</b>						<b>20,856,430,502</b>	
5 06 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							<b>17,030,199,334</b>						<b>17,146,430,502</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
5	06	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												<b>234,400,000</b>		
5	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 dokumen	47,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 dokumen	52,400,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	45,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 dokumen	50,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen				1 dokumen	81,500,000	Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 dokumen	85,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen LAKIP SKPD Jumlah Dokumen TP2K				1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen	42,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen	47,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5	06	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>10,154,723,352</b>							<b>10,168,023,352</b>	
5	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang				54 orang / kali	10,076,023,352		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		54 orang / kali	10,080,023,352	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	48,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 dokumen	53,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5	06	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	30,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 dokumen	35,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5	06	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>679,528,832</b>							<b>723,960,000</b>	
5	06	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah orang				60 orang / kali	171,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		60 orang / kali	176,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 06 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah orang				20 orang / kali	415,568,832		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		20 orang / kali	450,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5 06 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang				20 orang / kali	92,960,000				1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		20 orang / kali	97,960,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
<b>5 06 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>4,341,838,650</b>							<b>4,446,838,650</b>	
5 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dokumen				10 jenis	77,677,964		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		10 jenis	82,677,964	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan				30 jenis	222,959,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		30 jenis	227,959,700	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5 06 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah barang				20 jenis	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		20 jenis	370,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah dokumen				30 jenis	268,071,390		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		30 jenis	273,071,390	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah dokumen jumlah pengadaan				15 jenis 120000 dokumen	232,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		15 jenis 120000 dokumen	237,670,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen				20000 dokumen	63,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		20000 dokumen	68,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5 06 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan				24 kali	275,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		24 kali	280,200,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah orang jumlah orang				114 OT 6000 Orang / kali	2,652,259,596		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		114 OT 6000 Orang / kali	2,657,259,596	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5 06 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			250,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
<b>5 06 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>195,898,500</b>							<b>100,898,500</b>	
5 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah barang				20 jenis	195,898,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		20 jenis	100,898,500	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
<b>5 06 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>460,650,000</b>							<b>475,650,000</b>	
5 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah dokumen				500 dokumen	43,450,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		500 dokumen	48,450,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan				12 Layanan	135,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 Layanan	140,200,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
5 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga kebersihan				3 Orang	282,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3 Orang	287,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama
<b>5 06 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>981,660,000</b>							<b>996,660,000</b>	
5 06 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan				42 unit	455,660,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		42 unit	460,660,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan				40 unit	186,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		40 unit	191,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama	
5 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung				3 unit	340,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		3 unit	345,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama	
5 06 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>						<b>4,600,000,000</b>							<b>3,710,000,000</b>		
5 06 02 1.01	<b>Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama</b>						<b>1,500,000,000</b>							<b>1,605,000,000</b>		
5 06 02 1.01 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah						1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			1,100,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama	
5 06 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan						500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan			505,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama	
5 06 02 1.02	<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>						<b>3,100,000,000</b>							<b>2,105,000,000</b>		
5 06 02 1.02 01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Orang				100 Orang	800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		5. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan		100 Orang	805,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama	
5 06 02 1.02 02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan						1,100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar			0	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama	
5 06 02 1.02 03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara						1,200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan			1,300,000,000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama	
5	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
5 07	<b>PENGELOLAAN PENGHUBUNG</b>							<b>13,769,964,110</b>							<b>17,863,984,230</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 07 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>13,169,964,110</b>						<b>17,138,984,230</b>		
5 07 01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>150,000,000</b>						<b>175,000,000</b>		
5 07 01	1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya RKA OPD				1 dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 dokumen	35,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01	1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Perubahan RKA OPD				1 dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 dokumen	35,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01	1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA OPD				1 dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 dokumen	35,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01	1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya DPA-P OPD				1 dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 dokumen	35,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01	1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD				1 dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		1 dokumen	35,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01	1.02 <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>5,828,984,230</b>						<b>7,838,984,230</b>		
5 07 01	1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	5,768,984,230		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		12 bulan	7,768,984,230	Badan Penghubung Daerah
5 07 01	1.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 bulan	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	35,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01	1.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan				12 bulan	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	35,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01	1.03 <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>30,000,000</b>						<b>50,000,000</b>		
5 07 01	1.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penilaian BMD				12 bulan	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	50,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01	1.05 <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>380,000,000</b>						<b>600,000,000</b>		
5 07 01	1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atributnya				100 Stell	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		100 Stell	175,000,000	Badan Penghubung Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 07 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Sistem Informasi Kepegawaian				12 bulan	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	50,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan				100 orang	200,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		100 orang	375,000,000	Badan Penghubung Daerah
<b>5 07 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>2,616,379,880</b>							<b>3,710,000,000</b>	
5 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik				12 bulan	75,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	100,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	125,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	150,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Barang Peralatan Rumah Tangga				12 bulan	300,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	350,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan				12 bulan	120,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	140,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 bulan	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	120,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 bulan	250,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	350,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi OPD				12 bulan	1,646,379,880		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	2,500,000,000	Badan Penghubung Daerah
<b>5 07 01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>180,000,000</b>							<b>0</b>	
5 07 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Operasional Penunjang Kinerja ASN				6 unit	180,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1. Peningkatan kualitas SDM dan Pemenuhan Kualitas Dasar		6 unit	0	Badan Penghubung Daerah
<b>5 07 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>2,289,600,000</b>							<b>2,850,000,000</b>	
5 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Layanan Umum Kantor				12 bulan	125,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	150,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Layanan Umum Kantor				12 bulan	910,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	1,350,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	75,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	100,000,000	Badan Penghubung Daerah

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Layanan Umum				12 bulan	1,179,600,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	1,250,000,000	Badan Penghubung Daerah
<b>5 07 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>995,000,000</b>							<b>1,120,000,000</b>	
5 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan				12 bulan	120,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	135,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional				12 bulan	175,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	185,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset				12 bulan	400,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	450,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor				12 bulan	300,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	350,000,000	Badan Penghubung Daerah
<b>5 07 01 1.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>						<b>500,000,000</b>							<b>550,000,000</b>	
5 07 01 1.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penunjang Operasional KD/KWD				12 bulan	500,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	550,000,000	Badan Penghubung Daerah
<b>5 07 01 1.13</b>	<b>Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>						<b>100,000,000</b>							<b>120,000,000</b>	
5 07 01 1.13 03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Terlaksananya Dokumentasi Pimpinan				12 bulan	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	120,000,000	Badan Penghubung Daerah
<b>5 07 01 1.14</b>	<b>Fasilitas Keprotokolan</b>						<b>100,000,000</b>							<b>125,000,000</b>	
5 07 01 1.14 03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terlaksananya Peningkatan Keprotokolan				12 bulan	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	125,000,000	Badan Penghubung Daerah
<b>5 07 02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>						<b>600,000,000</b>							<b>725,000,000</b>	
<b>5 07 02 1.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>						<b>600,000,000</b>							<b>725,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 07 02 1.01 01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Tercapainya Peningkatan Pelayanan Publik				12 bulan	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	200,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 02 1.01 03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Budaya				12 bulan	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	175,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 02 1.01 04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Budaya				12 bulan	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	175,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 02 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya Pelayanan Penghubung				12 bulan	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan 3. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan		12 bulan	175,000,000	Badan Penghubung Daerah
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
<b>6 01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						<b>81,967,910,334</b>						<b>81,967,910,334</b>		
<b>6 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>41,371,285,334</b>						<b>41,371,285,334</b>		
<b>6 01 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>28,341,815,180</b>						<b>28,341,815,180</b>		
6 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						28,341,815,180		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					28,341,815,180	Inspektorat
<b>6 01 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>6,373,680,000</b>						<b>6,373,680,000</b>		
6 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						486,500,000							486,500,000	Inspektorat
6 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						5,887,180,000							5,887,180,000	Inspektorat
<b>6 01 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>4,357,816,954</b>						<b>4,357,816,954</b>		
6 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						912,124,800							912,124,800	Inspektorat
6 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						461,742,154							461,742,154	Inspektorat
6 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						58,000,000							58,000,000	Inspektorat

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						547,200,000						547,200,000	Inspektorat	
6 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2,378,750,000						2,378,750,000	Inspektorat	
<b>6 01 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>540,134,500</b>						<b>540,134,500</b>		
6 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						23,534,500						23,534,500	Inspektorat	
6 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						204,000,000						204,000,000	Inspektorat	
6 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						312,600,000						312,600,000	Inspektorat	
<b>6 01 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>1,757,838,700</b>						<b>1,757,838,700</b>		
6 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						709,998,700						709,998,700	Inspektorat	
6 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						32,500,000						32,500,000	Inspektorat	
6 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						165,340,000						165,340,000	Inspektorat	
6 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						850,000,000						850,000,000	Inspektorat	
<b>6 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>						<b>28,208,303,995</b>						<b>28,208,303,995</b>		
<b>6 01 02 1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>						<b>25,048,473,995</b>						<b>25,048,473,995</b>		
6 01 02 1.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						4,137,995,000						4,137,995,000	Inspektorat	
6 01 02 1.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						2,902,750,000						2,902,750,000	Inspektorat	
6 01 02 1.01 03	Reviu Laporan Kinerja						551,950,000						551,950,000	Inspektorat	
6 01 02 1.01 04	Reviu Laporan Keuangan						2,524,650,000						2,524,650,000	Inspektorat	
6 01 02 1.01 05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota						10,630,600,000						10,630,600,000	Inspektorat	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 02 1.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal						258,000,000							258,000,000	Inspektorat
6 01 02 1.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						4,042,528,995							4,042,528,995	Inspektorat
<b>6 01 02 1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>						<b>3,159,830,000</b>							<b>3,159,830,000</b>	
6 01 02 1.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						293,730,000							293,730,000	Inspektorat
6 01 02 1.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						2,866,100,000							2,866,100,000	Inspektorat
<b>6 01 03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>						<b>12,388,321,005</b>							<b>12,388,321,005</b>	
6 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						1,415,303,900							1,415,303,900	
6 01 03 1.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						1,415,303,900							1,415,303,900	Inspektorat
<b>6 01 03 1.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>						<b>10,973,017,105</b>							<b>10,973,017,105</b>	
6 01 03 1.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						1,541,400,000							1,541,400,000	Inspektorat
6 01 03 1.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						1,632,100,000							1,632,100,000	Inspektorat
6 01 03 1.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						7,799,517,105							7,799,517,105	Inspektorat
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>														
<b>8 01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						<b>17,973,567,120</b>							<b>3,773,604,000</b>	
<b>8 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>						<b>12,973,567,120</b>							<b>0</b>	
<b>8 01 01 1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>40,000,000</b>							<b>0</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD				1 dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		1 dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen SAKIP SKPD, LPPD dan Laporan Tahunan				3 dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		3 dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>8 01 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>10,278,814,615</b>							<b>0</b>	
8 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS pada Badan Kesbangpol				56 orang	10,258,814,615		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		56 orang	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen Laporan akhir tahun SKPD				1 dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		1 dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>8 01 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>160,000,000</b>							<b>0</b>	
8 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PIM				4 orang	160,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		4 orang	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>8 01 01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>1,876,000,000</b>							<b>0</b>	
8 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya bahan-bahan penerang kantor				15 buah	6,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		15 buah	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan				30 jenis	200,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		30 jenis	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan jumlah penggandaan				10 jenis 12 bulan	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		10 jenis 12 bulan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia bagi pegawai				2 jenis	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		2 jenis	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis bahan dan alat yang kebersihan kantor disediakan				15 jenis	20,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		15 jenis	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah				100 kali	1,500,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		100 kali	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>15,000,000</b>							<b>0</b>	
8 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang di sediakan				800 surat	7,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		800 surat	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan listrik, air dan telepon				12 bulan	8,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		12 bulan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>603,752,505</b>							<b>0</b>	
8 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor				22 unit	603,752,505		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		22 unit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>						<b>1,250,000,000</b>							<b>0</b>	
8 01 02 1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>						<b>1,250,000,000</b>							<b>0</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara bagi pemuda dan pelajar di kabupaten Terlaksananya gerakan nasional revolusi mental di provinsi papua				25 orang 51 orang	1,250,000,000	Kab. Yalimo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		25 orang 51 orang	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>						1,250,000,000							3,773,604,000	
8 01 03 1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>						1,250,000,000							3,773,604,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya kemitraan antara lembaga eksekutif, legislatif dan parpol Terlaksananya pemilihan anggota MRP Tersedianya bantuan keuangan bagi partai politik				75 orang 56 orang 13 parpol	1,250,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boven Digoel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Otonomi Khusus		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi 2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		75 orang 56 orang 13 parpol	3,773,604,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>						<b>625,000,000</b>							<b>0</b>	
8 01 04 1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>						<b>625,000,000</b>							<b>0</b>	
8 01 04 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Meningkatnya pengetahuan pengurus ormas/lsm tentang undang-undang keormasan				75 orang	625,000,000	Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		75 orang	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>						<b>625,000,000</b>							<b>0</b>	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 05 1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>						625,000,000						0		
8 01 05 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama  Terbayarnya honor anggota Tim Sekretariat Dewan Penasehat FKUB, honor anggota FKUB dan honor tenaga sekertariat FKUB,				50 orang 36 orang	625,000,000	Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		50 orang 36 orang	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>						1,250,000,000						0		
8 01 06 1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>						1,250,000,000						0		
8 01 06 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	meningkatnya pemahaman masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di daerah				75 orang	625,000,000	Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Mimika, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Pegunungan Bintang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		75 orang	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Papua  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 06 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya monitoring terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di kabupaten				6 kabupaten	625,000,000	Kab. Merauke, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nabire, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Boven Digoel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		2. Pemantapan Rasa Aman, Tenram dan Kedewasaan Berdemokrasi		6 kabupaten	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
<b>TOTAL</b>							<b>30,719,726,128,384</b>							<b>18,530,281,055,028</b>	

## DAFTAR USULAN POKIR DPRP

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BENYAMIN ARISOY	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pelabuhan, belum tersedia di distrik pulau kurudu kab. Kepulauan Yapen	Distrik Pulau Kurudu Kabupaten Kepulauan Yapen, Kab. Kepulauan Yapen	Pulau Kurudu	Mnukwar	1 Unit
2	BENYAMIN ARISOY	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Perdagangan	Minimnya Sarna dan Prasarana Distribusi	Peningkatan Jalan Menawi Sumber Baba, Rusak Berat	Mananayam Sumber Baba Kabupaten Kepulauan Yapen, Kab. Kepulauan Yapen	Yapen Timur	Sere Sere	50 KM
3	GERSON SOMA	FRAKSI PARTAI NASDEM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	PEMBANGUNAN JALAN PADAT KARYA DARI DISTRIK LOLAT KE KAMPUNG BINGGILA - MUARA-KALI SENG DAN KALI SOLO TIDAK JALAN DIKAMPUNG TERSEBUT	DISTRIK LOLAT, Kab. Yahukimo	Lolat	Dinggila	50 KM
4	GERSON SOMA	FRAKSI PARTAI NASDEM	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	PEMBANGUNAN PERUMAHAN LAYAK HUNI DI KAMPUNG BEMUSRE DESA BUNRU DISRTIK YAPSI TIDAK ADA RUMAH LAYAK HUNI	DESA BUNRU DISRTIK YAPSI, Kab. Jayapura	Yapsi	Ongan Jaya	50 Unit
5	GERSON SOMA	FRAKSI PARTAI NASDEM	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	PEMBANGUNAN ASRAMA LOLAT KAB. JAYAPURA PASCA KEBAKARAN ASRAMA MAHASISWA LOLAT DI SENTANI KAB. JAYAPURA	JL. PASAR BARU SENTANI, Kab. Jayapura	Sentani	Hinekombe	2 Unit
6	GERSON SOMA	FRAKSI PARTAI NASDEM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG KALI SOLO DISTRIK SOLOIKMA KAMPUNG WEAWEN KABUPATEN YAHUKIMO TIDAK ADANYA AKSES PENGHUBUNG ANTARA DISTRIK SEHINGGA DIBUTUHKAN PEMBANGUNAN JEMBATAN TERSEBUT	DISTRIK SOLOIKMA, Kab. Yahukimo	Soloikma	Weawen	10 KM

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	GERSON SOMA	FRAKSI PARTAI NASDEM	Perhubungan	Kurangnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Bandara	PEMBAGUNAN GUDANG PENYIMPANGAN BARANG PENUMPANG (MASYARAKAT) DI DISTRIK LOLAT DAN DI KABIANGGAMA DESA SOHOPMA KABUPATEN YAHUKIMO	DISTRIK LOLAT DAN DISTRIK KABIANGGAMA, Kab. Yahukimo	Lolat	Lolat	2 Unit
8	GERSON SOMA	FRAKSI PARTAI NASDEM	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya peran Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB)	PEBANGUNAN KANTOR KLASIS LOLAT DI DISTRIK LOLAT KABUPATEN YAHUKIMO	DISTRIK LOLAT, Kab. Yahukimo	Lolat	Lolat	1 Unit
9	GERSON SOMA	FRAKSI PARTAI NASDEM	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya peran Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB)	PEMBANGUNAN KANTOR KLASIS DI DISTRIK ENDOMEN KABUPATEN YAHUKIMO BELUM ADA KANTOR KLASIS	DISTRIK ENDOMEN, Kab. Yahukimo	Endomen	Endomen	1 Unit
10	GERSON SOMA	FRAKSI PARTAI NASDEM	Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat secara merata	PEMBANGUNAN POLIKLINIK DI DISTRIK LOLAT KAMPUNG SAHALIMO KABUPATEN YAHUKIMO	DISTRIK LOLAT KAMPUNG SAHALIMO, Kab. Yahukimo	Lolat	Bunde	2 UNIT
11	GERSON SOMA	FRAKSI PARTAI NASDEM	Kepemudaan dan Olahraga	Rendahnya jati diri pemuda	PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA PEMUDI KAMPUNG LOLAT DISTRIK LOLAT KABUPATEN YAHUKIMO	DISTRIK LOLAT KAMPUNG LOLAT, Kab. Yahukimo	Lolat	Lolat	1 PAKET
12	GERSON SOMA	FRAKSI PARTAI NASDEM	Pendidikan	Angka Melek Huruf yang masih tinggi	PEMBINAAN BAGI MASYARAKAT BUTA HURUF DI KAMPUNG WANIM DISTRIK LOLAT KABUPATEN YAHUKIMO	KAMPUNG WANIM DISTRIK LOLAT, Kab. Yahukimo	Lolat	Wanim	1 PAKET

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	AGUS KOGOYA	FRAKSI BANGUN PAPUA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	PEMBANGUNAN JALAN DISTRIK ILU KE KAMPUNG ARINGGAK TIDAK ADA JALAN PENGHUBUNG ANTARA ARINGGAK DAN ILU	JL. MULIA ILU DISTRIK ILU, Kab. Puncak Jaya	Ilu	Pukipaki	75 KM
14	AGUS KOGOYA	FRAKSI BANGUN PAPUA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DIDISTRIK ILU KAMPUNG MOBIGI DISTRIK ILU	KAMPUNG MOBIGI, Kab. Puncak Jaya	Ilu	Mobigi	100 UNIT
15	AGUS KOGOYA	FRAKSI BANGUN PAPUA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	PEMBANGUNAN JALAN DARI LINTAS JALAN MENUJU KAMPUNG PULOGENGGA	KAMPUNG PULOGENGGA, Kab. Puncak Jaya	Ilu	Pulogengga	60 KM
16	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan masyarakat yang tidak tetap	taiyave, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hulu	Taiyave	10 Unit
17	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan masyarakat yang tidak tetap	kampung papasena 1, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hulu	Pepasena I	10 Unit
18	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan masyarakat yang tidak tetap	kampung papasena 2, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hulu	Pepasena II	10 Unit



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan Masyarakat yang tidak tetap	kampung haiya, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hulu	Haiya	10 Unit
20	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan masyarakat yang tidak tetap	kampung tayai 4, Kab. Mamberamo Raya	Rufaer	Tayai	10 Unit
21	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan masyarakat yang tidak tetap	kampung sikari, Kab. Mamberamo Raya	Rufaer	Sikari	10 Unit
22	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan masyarakat yang tidak tetap	kampung taria, Kab. Mamberamo Raya	Rufaer	Taria	10 Unit
23	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan masyarakat yang tidak tetap	kampung kasonaweja, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Tengah	Kasonaweja	20 Unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapat masyarakat yang tidak tetap	kampung trimuris 2, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hilir	Trimuris	10 Unit
25	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapat yang tidak tetap	kampung suaseso, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hilir	Suaseso	10 Unit
26	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan Masyarakat yang tidak tetap	kampung Kapeso, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hilir	Kapeso	10 Unit
27	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan Masyarakat yang tidak tetap	kampung Bagusa, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hilir	Bagusa	10 Unit
28	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan Masyarakat yang tidak tetap	kampung warembori, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hilir	Warembori	10 Unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan Masyarakat yang tidak tetap	kampung Danau Bira, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Tengah	Danau Bira	10 Unit
30	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan Masyarakat yang tidak tetap	kampung yoke, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hilir	Yoke	10 Unit
31	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan Masyarakat yang tidak tetap	kampung Nadofuai, Kab. Mamberamo Raya	Waropen Atas	Nadofuai	10 Unit
32	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan Masyarakat yang tidak tetap	kampung bonoi, Kab. Mamberamo Raya	Sawai	Bonoi	10 Unit
33	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan Masyarakat yang tidak tetap	Kampung Tamakuri 2, Kab. Mamberamo Raya	Sawai	Tamakuri	10 Unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	sumber pendapatan Masyarakat yang tidak tetap	kampung fokri, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hulu	Fokri	10 Unit
35	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya peran Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB)	kesulitan Biaya Hidup di Tempat Tugas	kampung kasonaweja, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Tengah	Kasonaweja	24 Orang
36	KRISTHINA LULUPORO	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Perdagangan	Minimnya Sarna dan Prasarana Distribusi	kurang memadainya infrastruktur jalan raya menuju Kampung Bengwin Progo Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura yang masih berupa jalan karang	kampung bengwin Progo, Distrik Kemtuk, Kab. Jayapura	Kemtuk	Benggwin Progo	30 km
37	KRISTHINA LULUPORO	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	belum adanya jaringan instalasi listrik bagi rumah warga pada kampung bengwin progo distrik kemtuk kabupaten jayapura, sedangkan jaringan tegangan menengah sudah terpasang.	kampung bengwin progo distrik kemtuk, Kab. Jayapura	Kemtuk	Benggwin Progo	200 rumah
38	THOMAS SONDEGAU, ST	FRAKSI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR LUKMEN DI KABUPATEN NABIRE, BELUM ADA JALAN LINGKAR	DISTRIK NABIRE KOTA MENUJU SAMABUSA, Kab. Nabire	Nabire	Sanoba	50 KM
39	THOMAS SONDEGAU, ST	FRAKSI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	PEMBANGUNAN JALAN PADAT KARYA DISTRIK SUGAPA DESA EKENEBA DAN DESA TITIGI KABUPATEN INTAN JAYA	KAMPUNG TITIGI, Kab. Intan Jaya	Sugapa	Titigi	5 KM
40	THOMAS SONDEGAU, ST	FRAKSI DEMOKRAT	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DI DISTRIK BIME KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, MASIH BANYAK RUMAH YANG TIDAK LAYAK HUNI	DISTRIK BIME, Kab. Pegunungan Bintang	Bime	Bime	50 UNIT

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	THOMAS SONDEGAU, ST	FRAKSI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	PEMBUATAN JEMBATAN GANTUNG DI DISTRIK AGISIGA KABUPATEN INTAN JAYA, MEMUDAHKANN AKSES MASYARAKAT KARENA SEMENTARA MASYARAKAT MASIH MENGGUNAKAN JEMBATAN TALI ROTAN YANG TIDAK LAYAK	DISTRIK AGISIGA, Kab. Intan Jaya	Agisiga	Unabundoga	50 METER
42	THOMAS SONDEGAU, ST	FRAKSI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	PEMBANGUNAN JALAN ENAROTALI - SUGAPA	ENAROTALI, Kab. Paniai	Paniai Timur	Enarotali	60 KM
43	THOMAS SONDEGAU, ST	FRAKSI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	PEMBANGUNAN JALAN PADAT KARYA DARI DESA EMONTI KE DESA NAGASIGA KABUPATEN INTAN JAYA	DESA EMONDI, Kab. Intan Jaya	Sugapa	Emondi	25 KM
44	THOMAS SONDEGAU, ST	FRAKSI DEMOKRAT	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum memadainya pemukiman layak huni	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN INTAN JAYA	DISTRIK SUGAPA, Kab. Intan Jaya	Sugapa	Yokatapa	30 UNIT
45	THOMAS SONDEGAU, ST	FRAKSI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	PEMBANGUNAN JALAN PADAT KARYA DI DISTRIK HOMEYO DESA AGAPA, DESA KENDETAPA, DAN DESA UGITAPA, SAMPAI SAAT INI MASYARAKAT MASIH BELUM ADA AKSES (JALAN) YANG MEMADAI	DISTRIK HOMEYO, Kab. Intan Jaya	Homeyo	Kendetapa	25 KM
46	THOMAS SONDEGAU, ST	FRAKSI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH DI DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA	DI DESA BILOGAI, Kab. Intan Jaya	Sugapa	Bilogai	20 KM
47	THOMAS SONDEGAU, ST	FRAKSI DEMOKRAT	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DI DESA BILOGAI DAN DESA PUYAGIA	DESA PUYAGIA, Kab. Intan Jaya	Sugapa	Puyagiya	50 UNIT
48	THOMAS SONDEGAU, ST	FRAKSI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	PENINGKATAN PEMBANGUNAN JALAN SUGAPA - HITADIPA - BEOGA - PUNCAK	DESA HITADIPA, Kab. Intan Jaya	Hitadipa	Hitadipa	150 KM

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	THOMAS SONDEGAU, ST	FRAKSI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	PEMBANGUNAN JALAN PADAT KARYA DARI KAMPUNG WABUI KE PUGISIGA KABUPATEN INTAN JAYA	DI KAMPUNG WABUI, Kab. Intan Jaya	Hitadipa	Wabui	10 KM
50	KRISTHINA LULUPORO	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Kepemudaan dan Olahraga	Rendahnya jati diri pemuda	perlunya peningkatan kapasitas pemuda dalam berorganisasi dan bersosialisasi dengan pemuda pemudi sejawat dalam bentuk perkemahan Pramuka tingkat Daerah / Provinsi Papua, dengan sasaran peningkatan jati diri dan wawasan kebangsaan	Buper Eme Neme Yaware Mimika, Kab. Mimika	Mimika Baru	Timika Indah	2000 orang
51	KRISTHINA LULUPORO	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya prestasi Olahraga Provinsi Papua	penambahan sarana pendukung Gedung GOR Type B Koya Timur berupa lahan parkir dan pagar pembatas area gedung	Jl. Durian II, Koya Tim., Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Kota Jayapura	Muara Tami	Koya Timur	2250 m2
52	KRISTHINA LULUPORO	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya prestasi pemuda dalam pembangunan	pembangunan gedung pramuka dan arena Bumi Perkemahan Pramuka yang representatif dalam rangka peningkatan kapasitas kepemudaan di provinsi papua	Jalan Pramuka Waean, Kota Jayapura	Heram	Waena	2 paket
53	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum memadainya pemukiman layak huni	pembangunan rumah layak huni	Kelapa lima, Kab. Merauke	Merauke	Kelapa Lima	5 unit
54	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum memadainya pemukiman layak huni	tidak adanya rumah layak huni	kelurahan Karang indah, Kab. Merauke	Merauke	Karang Indah	50 unit
55	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pariwisata	Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata	Pembangunan talud depan Gereja Katolik Distrik Okaba Kab. Merakue	Distrik Okaba, Kab. Merauke	Okaba	Okaba	1 km
56	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	tidak adanya dermaga konstruksi beton	Bine, Kab. Asmat	Atsj	Bine	1 km

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Perbaikan jalan dan jembatan	Eci, Kab. Mappi	Assue	Eci	50 km
58	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	pembangunan sekolah berpola asrama Menengah bagi siswa Seminari Pastor Bonus	Jl.angkasa, Kab. Merauke	Merauke	Kelapa Lima	23 unit
59	MEGA M.F NIKIJULUW, SH	FRAKSI PARTAI PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan jalan kota dari Distrik Ilaga ke Distrik Gome	Ilaga, Kab. Puncak	Ilaga	Seluruh Kelurahan/Desa	40 Km
60	MEGA M.F NIKIJULUW, SH	FRAKSI PARTAI PDI Perjuangan	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Pembangunan pabrik pengolahan kopi di Distrik Mulia	Mulia, Kab. Puncak Jaya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 gedung
61	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Jalan berlumpur di lokasi kelapa sawit Asiki Kab. Boven digul	Asiki, Kab. Boven Digoel	Jair	Getentiri	10 km
62	MEGA M.F NIKIJULUW, SH	FRAKSI PARTAI PDI Perjuangan	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Alat Kerja untuk Pertanian Di Distrik Sinak,Distrik Beoga,Distrik Dofo,Distrik Oneri	Distrik Sinak,Distrik Beoga,Distrik Dofo,Distrik Oneri, Kab. Puncak	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	200 buah
63	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Belum diaspal jalan Okaba-Mappi	okaba, Kab. Merauke	Okaba	Sanggase	50 km
64	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Kehutanan	Degradasi kawasan Lindung dan Tingginya kerusakan hutan	Tidak dilestarikan hutan magrove	okaba, Kab. Merauke	Okaba	Seluruh Kelurahan/Desa	10 km

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	MEGA M.F NIKIJULUW, SH	FRAKSI PARTAI PDI Perjuangan	Pertanian	Rendahnya populasi dan produksi hasil peternakan	Dibutuhkan bibit ternak babi 100 ekor dan ternak sapi 100 ekor di Distrik Omakia dan Distrik Ilaga	Distrik Omakia dan Distrik Ilaga, Kab. Puncak	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	200 ekor
66	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Belum diaspal jalan masuk SMK di Gudang arang Kab. Merauke	Jl. gudang arang, Kab. Merauke	Merauke	Maro	3 km
67	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum memadainya pemukiman layak huni	masyarakat masih menempati rumah tidal layak huni	Atsj, Kab. Asmat	Atsj	Atsy	100 unit
68	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	masyarakat sulit mendapatkan air bersih untuk dikonsumsi	Agats, Kab. Asmat	Agats	Bis Agats	50 km
69	MEGA M.F NIKIJULUW, SH	FRAKSI PARTAI PDI Perjuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Pembangunan 1 tempat penampungan air untuk memenuhi kebutuhan Air Bersih di Distrik Ilaga	Ilaga, Kab. Puncak	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 unit
70	MEGA M.F NIKIJULUW, SH	FRAKSI PARTAI PDI Perjuangan	Pertanian	Rendahnya akses pasar atas produk pertanian/ perkebunan lokal	Pembentukan Koperasi untuk menampung sayur dan buah - buahan petani di Distrik Ilaga dan Distrik Omakia	Distrik Ilaga dan Distrik Omakia, Kab. Puncak	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	2 Unit
71	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Peningkatan sumber daya manusia melalui sekolah berpola asrama	agats, Kab. Asmat	Agats	Bis Agats	5 unit
72	MEGA M.F NIKIJULUW, SH	FRAKSI PARTAI PDI Perjuangan	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Dibutuhkan bibit sayur di Distrik Ilaga, Sinak, Gome, Omakia, Dofo, Beoga	Distrik Ilaga, Sinak, Gome, Omakia, Dofo, Beoga, Kab. Puncak	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	10 paket



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi budidaya perikanan air tawar	bantuan kolam ikan	agast, Kab. Asmat	Agats	Seluruh Kelurahan/Desa	5 unit
74	NIKIUS BUGIANGGE	KEADILAN NURANI GABUNGAN 1	Perhubungan	Kurangnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Bandara	Rehab kelurusan lapangan Terbang Kwegona Distrik Moba - Kabupaten Nduga	Kwegona Distrik Moba, Kab. Nduga	Moba	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit
75	NIKIUS BUGIANGGE	KEADILAN NURANI GABUNGAN 1	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi budidaya perikanan air tawar	Dibutuhkan Keramba Ikan air Tawar di Danau Sentani	Danau Sentani, Kab. Jayapura	Sentani	Seluruh Kelurahan/Desa	50 unit
76	NIKIUS BUGIANGGE	KEADILAN NURANI GABUNGAN 1	Pertanian	Rendahnya populasi dan produksi hasil peternakan	Dibutuhkan bibit ternak babi di desa Sapalek - Sinakma	Desa Sapalek - Sinakma -, Kab. Jayawijaya	Wamena	Sinakma	500 ekor
77	NIKIUS BUGIANGGE	KEADILAN NURANI GABUNGAN 1	Pertanian	Rendahnya populasi dan produksi hasil peternakan	Kebutuhan bibit ternak ayam potong dan pakan di Kabupaten Jayapura	Sentani, Kab. Jayapura	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1000 ekor
78	NIKIUS BUGIANGGE	KEADILAN NURANI GABUNGAN 1	Sosial	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk OAP	Pembangunan Kantor Klasis Kingmi Hitigima	Asotipo - Wamena, Kab. Jayawijaya	Asotipo	Seluruh Kelurahan/Desa	1 gedung
79	NIKIUS BUGIANGGE	KEADILAN NURANI GABUNGAN 1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan jembatan Kali Hitigima -Distrik Asotipo - Wamena	Hitigima - distrik Asotipo, Kab. Jayawijaya	Asotipo	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	PETRUS PIGAI	FRAKSI PARTAI PAN	Sosial	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk OAP	Pembangunan Gereja Kemah Injil di Tanah Papua - Klasis Yatamo Tage -Distrik Yatamo-Kabupaten Paniai	Distrik Yatamo-Kabupaten Paniai, Kab. Paniai	Yatamo	Seluruh Kelurahan/Desa	1 gedung
81	PETRUS PIGAI	FRAKSI PARTAI PAN	Pertanian	Rendahnya populasi dan produksi hasil peternakan	Perlunya bibit ternak Babi di Kabupaten Paniai	Distrik Paniai Timur, Paniai Barat, Kebo, Yatamo, Deyai Miyo, Ekadide, Teluk Deyai, Nakama, Muye, Bidida, Pugodadi, Bogo Baida., Kab. Paniai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	500 ekor
82	PETRUS PIGAI	FRAKSI PARTAI PAN	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi budidaya perikanan air tawar	Di butuhkan peralatan budidaya ikan air tawar	Distrik Paniai Barat, Deyai Miyo, Kampung Mogeya, Kobano, Amopa, Beko, Tipakotu., Kab. Paniai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	20 Paket
83	DANTON GIBAN, S.Pd, Msi	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pertanian	Rendahnya populasi dan produksi hasil peternakan	Diperlukan bibit ternak babi	Distrik Dekai, Kab. Yahukimo	Dekai	Seluruh Kelurahan/Desa	200 ekor
84	DANTON GIBAN, S.Pd, Msi	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Membukanya lokasi persawahan di Dekai	Dekai, Kab. Yahukimo	Dekai	Seluruh Kelurahan/Desa	20 Hektar

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	DANTON GIBAN, S.Pd, Msi	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Sosial	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk OAP	Membangun perumahan rakyat di Jalan Lokbon, Distrik Silimo	Jalan Lokbon, Kab. Yahukimo	Silimo	Seluruh Kelurahan/Desa	50 Unit
86	DANTON GIBAN, S.Pd, Msi	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perhubungan	Kurangnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Bandara	Membuka Lapangan terbang baru di Distrik Silimo untuk akses keluar masuk ke kota	Distrik Silimo, Kab. Yahukimo	Silimo	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit
87	DANTON GIBAN, S.Pd, Msi	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Kelanjutan pembangunan Jalan dari Dekai ke distrik Silimo	Distrik Dekai ke Silimo, Kab. Yahukimo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	50 Km
88	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan jaringan telekomunikasi yang masih sangat terbatas	masyarakat sulit mendapatkan jaringan internet	Agats, Kab. Asmat	Agats	Bis Agats	2 unit
89	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	siswa/siswi lulusan SMA/SMK sulit untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi akibat tidak adanya Sekolah Tinggi di Mappi	Keppi, Kab. Mappi	Assue	Haffo	1 unit
90	PASKALIS LETSOIN	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Jalan Provinsi depan SMK Kurik-Tanah miring belum diaspal	kurik, Kab. Merauke	Kurik	Harapan Makmur	20 km
91	PASKALIS LETSOIN	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	belum diaspal jalan Kepi-Mur	Keppi, Kab. Mappi	Obaa	Kepi	30 km
92	PASKALIS LETSOIN	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan dermaga di Tagaimon	Bamgi, Kab. Mappi	Bamgi	Tagaimon Sino	1 unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	PASKALIS LETSOIN	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan dermaga Hasto Cabang tiga	Bamgi, Kab. Mappi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 unit
94	PASKALIS LETSOIN	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	pembangunan dermaga Sahapikia	Venaha, Kab. Mappi	Venaha	Sien	1 unit
95	PASKALIS LETSOIN	PDIP	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan ruang guru SMAN 2 Obaa	Obaa, Kab. Mappi	Obaa	Obaa	1 ruang
96	PASKALIS LETSOIN	PDIP	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	pembangunan laboratorium SMAN 2 Obaa	obaa, Kab. Mappi	Obaa	Kepi	1 ruang
97	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Peningkatan Jalan Isele - Musatfak	Musatfak, Kab. Jayawijaya	Musatfak	Seluruh Kelurahan/Desa	4 KM
98	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Jembatan Alogolik Kampung Alolik Distrik Witawaya Kab. Jayawijaya	Kampung Alolik, Kab. Jayawijaya	Wita Waya	Alolik	1 unit
99	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Jembatan Kali Kurigima Kampung Tulem Distrik Witawaya Kab Jayawijaya	Kampung Tulem, Kab. Jayawijaya	Wita Waya	Tulem	1 unit
100	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum memadainya jaringan irigasi	Pembangunan Irigasi Kampung Kosilapok, Distrik Hubikosi	Kampung Kosihilapok, Distrik Hubikosi, Kab. Jayawijaya	Hubikosi	Kosihilapok	1 KM
101	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum memadainya jaringan irigasi	Pembangunan Irigasi pada Distrik Witawaya Kampung Alolik	Distrik Witawaya Kampung Alolik, Kab. Jayawijaya	Wita Waya	Alolik	2 KM
102	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum memadainya jaringan irigasi	Pembangunan Irigasi Kampung Siepkosi Distrik Siepkosi	Kampung Siepkosi, Kab. Jayawijaya	Siepkosi	Siepkosi	2 KM

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Normsasi Sungai Kampung Siepkosi Distrik Siepkosi	Kampung Siepkosi Distrik Siepkosi, Kab. Jayawijaya	Siepkosi	Seluruh Kelurahan/Desa	1 KM
104	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Normalisasi Sungai Wiligima Distrik Witawaya kampung Alolik	Sungai Wiligima Distrik Wita Waya kampung Alolik, Kab. Jayawijaya	Wita Waya	Alolik	2 KM
105	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Rehabilitasi Gereja KINGMI Pniel Kampung Tulem Distrik Witawaya Kab.Jayawijaya	Gereja KINGMI Pniel Tulem Distrik Witawaya Kab.Jayawijaya, Kab. Jayawijaya	Wita Waya	Tulem	1 unit
106	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Rehabilitasi Gereja KATOLIK Kristus Jaya Wamena	Jalan Ahmad Yani Wamena Kota, Kab. Jayawijaya	Wamena	Wamena Kota	1 unit
107	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan 2 Ruang Kelas SD YPPK ST Yibrael Kama Distrik Wesaput Kab.Jayawijaya	SD YPPK ST Yibrael Kama Distrik Wesaput Kab.Jayawijaya, Kab. Jayawijaya	Wesaput	Kama	2 unit
108	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	kondisi perumahan masih sangat tradisional	distrik wesaput, Kab. Jayawijaya	Wesaput	Seluruh Kelurahan/Desa	20 unit
109	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Perumahan masyarakat masih tradisional dan jauh darri standar kesehatan	tersebar pada Distrik Witawaya Kab.Jayawijaya, Kab. Jayawijaya	Wita Waya	Seluruh Kelurahan/Desa	20 unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Perumahan masyarakat masih tradisional dan jauh dari standar kesehatan	Distrik Pisugi (penyebarannya), Kab. Jayawijaya	Pisugi	Seluruh Kelurahan/Desa	20 unit
111	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Perumahan masyarakat masih tradisional dan jauh dari standar kesehatan	siep kosi (Penyebarannya), Kab. Jayawijaya	Siepkosi	Seluruh Kelurahan/Desa	20 unit
112	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Sumber Pendapatan masyarakat yang tidak tetap	Kampung Tetom, Kab. Sarmi	Bonggo	Tetom	15 unit
113	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Hambatan Transportasi dari Biak Numfor ke Supiori	Kampung Yomdor-Sopeng-Duber-Mamoribo, Kab. Biak Numfor	Biak Barat	Yomdori	20 Km
114	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Sumber Pendapatan Masyarakat yang tidak tetap	Koya Timur Kampung Mamberamo, Kota Jayapura	Muara Tami	Koya Timur	10 unit
115	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pariwisata	Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata	Mebutuhkan Sarana dan Prasarana	Kampung Bindusi, Kab. Biak Numfor	Biak Timur	Bindusi	1 lahan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Sumber Pendapatan Masyarakat yang tidak tetap	Kampung Wor, Kab. Biak Numfor	Biak Utara	Mnuswor	10 unit
117	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Sumber Pendapatan yang tidak tetap	Kampung Adadikam, Kab. Biak Numfor	Swandiwe	Farusi	10 unit
118	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Hambatan Transportasi dari Biak Numfor ke Supiori	Kampung Mos-Dobo, Kab. Biak Numfor	Biak Utara	Mnuswor	20 Km
119	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Sumber Pendapatan Masyarakat yang tidak tetap	Kampung Dou Dusun Pidari, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hulu	Dou	10 unit
120	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Sumber Pendapatan Masyarakat yang tidak tetap	Kampung Fuao, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hulu	Fuao	10 unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Sumber Pendapatan Masyarakat yang tidak tetap	Kampung Dabra 1- Dabra 2, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hulu	Dabra	10 unit
122	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air Bersih untuk kebutuhan Masyarakat	Kampung Taria, Kab. Mamberamo Raya	Rufaer	Taria	1
123	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air Bersih untuk kebutuhan Masyarakat	Kampung Fokri/ Baso, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hulu	Fokri	1
124	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air Bersih untuk kebutuhan Masyarakat	Kampung Dabra, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hulu	Dabra	1
125	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air Bersih untuk kebutuhan Masyarakat	Kampung Fuao, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hulu	Fuao	1
126	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air Bersih untuk kebutuhan Masyarakat	Kampung Taiyeye, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hulu	Taiyeye	1
127	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air Bersih untuk kebutuhan Masyarakat	Kampung Dou-Tidari, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hulu	Dou	1



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Papasena 1, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hulu	Pepasena I	1
129	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Papasena 2, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hulu	Pepasena II	1
130	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air Bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Haiya, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hulu	Haiya	1
131	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Tayai 4, Kab. Mamberamo Raya	Rufaer	Tayai	1
132	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Sikari, Kab. Mamberamo Raya	Rufaer	Sikari	1
133	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air Bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Danau bira, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Tengah	Danau Bira	1
134	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Trimuris, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hilir	Trimuris	1
135	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air Bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Suaseso, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hilir	Suaseso	1

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Warembori, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hilir	Warembori	1
137	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Bagusa, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hilir	Bagusa	1
138	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Kapeso, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hilir	Kapeso	1
139	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Kasonaweja, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Tengah	Kasonaweja	1
140	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Yoke, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Hilir	Yoke	1
141	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Nadofoai, Kab. Mamberamo Raya	Waropen Atas	Nadofoai	1
142	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air Bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Bono, Kab. Mamberamo Raya	Sawai	Bono	1
143	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Tamakuri, Kab. Mamberamo Raya	Sawai	Tamakuri	1

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air bersih untuk kebutuhan masyarakat	Kampung Tetom, Kab. Sarmi	Bonggo	Tetom	1
145	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Masyarakat di Distrik Kuari umumnya tinggal di rumah-rumah yang kondisinya memprihatinkan, sehingga dibutuhkan bantuan perumahan yang lebih layak untuk ditinggali	Distrik Kuari, Kab. Tolikara	Kuari	Kuari	100 unit
146	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Minimnya ketersediaan air bersih yang sehat untuk dikonsumsi, akibatnya berbagai penyakit menjangkiti masyarakat oleh karena minimnya air bersih	Distrik Kuari, Kab. Tolikara	Kuari	Kuari	2 Instalasi
147	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Minimnya ketersediaan air bersih yang sehat untuk dikonsumsi, akibatnya berbagai penyakit menjangkiti masyarakat oleh karena minimnya air bersih	Distrik Nelawi, Kab. Tolikara	Nelawi	Nelawi	2 Instalasi
148	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembelajaran online tidak dapat berjalan oleh karena ketiadaan fasilitas pendukung seperti laptop di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri BOKONDINI	SMA Negeri Bokondini, Kab. Tolikara	Bokondini	Bokondini	50 Unit Laptop
149	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembelajaran online tidak dapat berjalan oleh karena ketiadaan fasilitas pendukung seperti laptop di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri KEMBU	SMA Negeri Kembu, Kab. Tolikara	Kembu	Kembu	20 Unit Laptop
150	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembelajaran online tidak dapat berjalan oleh karena ketiadaan fasilitas pendukung seperti laptop di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri KARUBAGA	SMAN KARUBAGA, Kab. Tolikara	Karubaga	Karubaga	50 Unit Laptop
151	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembelajaran online tidak dapat berjalan oleh karena ketiadaan fasilitas pendukung seperti laptop di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri KANGGIME	SMAN Kanggime, Kab. Tolikara	Kanggime	Kanggime	50 Unit Laptop

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Ketiadaan Labolatorium Eksakta (IPA) beserta fasilitasnya	SMA Negeri BOKONDINI, Kab. Tolikara	Bokondini	Bokondini	1 ruang LAB dan Fasilitasnya
153	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Kebutuhan akan perumahan Guru. Para Guru tidak bertahan di tempat tugas salah satunya karena tidak tersedianya perumahan bagi para Guru di SMA Negeri Bokondini	SMA Negeri Bokondini, Kab. Tolikara	Bokondini	Bokondini	10 Unit
154	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Kebutuhan akan perumahan Guru. Para Guru tidak bertahan di tempat tugas salah satunya karena tidak tersedianya perumahan bagi para Guru di SMA Negeri Karubaga	SMAN KARUBAGA, Kab. Tolikara	Karubaga	Karubaga	10 unit
155	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Kebutuhan akan perumahan Guru. Para Guru tidak bertahan di tempat tugas salah satunya karena tidak tersedianya perumahan bagi para Guru di SMA Negeri KANGGIME	SMAN Kanggime, Kab. Tolikara	Kanggime	Kanggime	10 unit
156	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Kebutuhan akan perumahan Guru. Para Guru tidak bertahan di tempat tugas salah satunya karena tidak tersedianya perumahan bagi para Guru di SMA YPPGI Karubaga	SMA YPPGI Karubaga, Kab. Tolikara	Karubaga	Karubaga	10 unit
157	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembelajaran online tidak dapat berjalan oleh karena ketiadaan fasilitas pendukung seperti laptop di Sekolah Menengah Atas (SMA) YPPGI Karubaga	SMA YPPGI Karubaga, Kab. Tolikara	Karubaga	Karubaga	50 Unit Laptop
158	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Ketiadaan Labolatorium Eksakta (IPA) beserta fasilitasnya	SMA YPPGI Karubaga, Kab. Tolikara	Karubaga	Karubaga	1 Unit beserta fasilitasnya
159	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan jaringan telekomunikasi yang masih sangat terbatas	Ketiadaan perangkat internet untuk menunjang pembelajaran online	SMA Negeri Bokondini, Kab. Tolikara	Bokondini	Bokondini	1 perangkat/instalasi

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Ketiadaan jaringan penerangan kompleks SMAN Kembu	SMAN Kembu, Kab. Tolikara	Kembu	Kembu	2 Unit Solar Cell 200 Watt
161	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Ketiadaan jaringan penerangan di Kompleks SMAN Kanggime	SMAN Kanggime, Kab. Tolikara	Kanggime	Kanggime	4 Unit Solar Cell 200 Watt
162	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Sosial	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk OAP	Ketiadaan WC bagi Siswa dan Guru di SMAN Kembu	SMAN Kebu, Kab. Tolikara	Kembu	Kembu	4 Unit WC atau Toilet
163	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Jumlah peserta didik serta minat melanjutkan ke SMK yang tinggi yang membutuhkan keberadaan tambahan SMK di Kabupaten Tolikara (Distrik Kuari, Distrik Kay dan Distrik Newawi	DISTRİK KUARI, DISTRİK KAY dan DISTRİK NENAWI, Kab. Tolikara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	3 Unit SMK
164	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Para guru kerap meninggalkan tempat tugas karena minimnya fasilitas, termasuk tempat tinggal	Distrik Kuari, Kab. Tolikara	Kuari	Kuari	3 unit rumah Guru
165	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Para guru kerap meninggalkan tempat tugas karena minimnya fasilitas, termasuk tempat tinggal	Distrik Kai, Kab. Tolikara	Kai	Kaiga	3 unit rumah Guru
166	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Para guru kerap meninggalkan tempat tugas karena minimnya fasilitas, termasuk tempat tinggal	Distrik NELAWI, Kab. Tolikara	Nelawi	Nelawi	3 unit rumah Guru
167	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Hingga saat ini belum ada ketersediaan perpustakaan yang representatif	Distrik Kuari, Kab. Tolikara	Nelawi	Nelawi	1 unit
168	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Masih sangat kurangnya buku-buku pelajaran yang dibutuhkan	Kab. Tolikara, Kab. Tolikara	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	50 Jenis Buku

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Genset yang ada telah rusak	SMKN 04 Kota Jayapura, Kota Jayapura	Muara Tami	Koya Barat	1 Unit
170	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Keinginan masyarakat untuk memperbaiki bangunan rumahnya terhambat oleh tinggi atau mahal nya bahan material dan bahan bangunan di Kabupaten Tolikara.	Distrik Nelawi, Kab. Tolikara	Nelawi	Nelawi	3000 Lembar Seng
171	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Keinginan masyarakat untuk memperbaiki bangunan rumahnya terhambat oleh tinggi atau mahal nya bahan material dan bahan bangunan di Kabupaten Tolikara.	Distrik Kai, Kab. Tolikara	Kai	Kaiga	3000 Lembar Seng
172	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Keinginan masyarakat untuk memperbaiki bangunan rumahnya terhambat oleh tinggi atau mahal nya bahan material dan bahan bangunan di Kabupaten Tolikara.	Distrik Kuari, Kab. Tolikara	Kuari	Kuari	3000 Lembar Seng
173	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Keinginan masyarakat untuk memperbaiki bangunan rumahnya terhambat oleh tinggi atau mahal nya bahan material dan bahan bangunan di Kabupaten Tolikara.	Distrik Nelawi, Kab. Tolikara	Nelawi	Nelawi	500 Kilogram Paku

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Keinginan masyarakat untuk memperbaiki bangunan rumahnya terhambat oleh tinggi atau mahal nya bahan material dan bahan bangunan di Kabupaten Tolikara.	Distrik Kai, Kab. Tolikara	Kai	Kaiga	500 Kilogram Paku
175	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Keinginan masyarakat untuk memperbaiki bangunan rumahnya terhambat oleh tinggi atau mahal nya bahan material dan bahan bangunan di Kabupaten Tolikara.	Distrik Kuari, Kab. Tolikara	Kuari	Kuari	500 Kilogram Paku
176	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Keinginan masyarakat untuk memperbaiki bangunan rumahnya terhambat oleh tinggi atau mahal nya bahan material dan bahan bangunan di Kabupaten Tolikara (Tripleks)	Dsitrik Nelawi, Kab. Tolikara	Nelawi	Nelawi	5000 Lembar Tripleks
177	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Keinginan masyarakat untuk memperbaiki bangunan rumahnya terhambat oleh tinggi atau mahal nya bahan material dan bahan bangunan di Kabupaten Tolikara.	Distrik Kai, Kab. Tolikara	Kai	Kaiga	5000 Lembar Tripleks
178	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Keinginan masyarakat untuk memperbaiki bangunan rumahnya terhambat oleh tinggi atau mahal nya bahan material dan bahan bangunan di Kabupaten Tolikara.	Distrik Kuari, Kab. Tolikara	Kuari	Kuari	5000 Lembar Tripleks

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Jalan Padat Karya di Distrik Kuari ke Distrik Geya masih jauh dari layak untuk dilalui (kegiatan 029.0116 - TA 2020)	Distrik Kuari, Kab. Tolikara	Kuari	Kuari	2 Kilometer
180	TIMILES YIKWA, SE	PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Jalan Padat Karya di Distrik Nelawi - Distrik Wenam masih jauh dari layak untuk dilalui kendaraan.	Distrik Nelawi - Distrik Wenam, Kab. Tolikara	Nelawi	Nelawi	2 Kilometer
181	ELLY WONDA, SH	GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Kondisi rumah warga memprihatinkan dan membutuhkan pembangunan rumah layak huni	Distrik Muara, Kampung kulirik, Kab. Puncak Jaya	Muara	Kulirik	50 Unit
182	ELLY WONDA, SH	GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Kondisi jalan yang buruk dan membutuhkan pengerasan jalan dan jembatan dari Puncak Senyum ke Jembatan Gantung di Distrik Irimuli ke Distrik Gurage	Dsitrik Irimuli, Kab. Puncak Jaya	Irimuli	Seluruh Kelurahan/Desa	3 Kilometer
183	ELLY WONDA, SH	GOLKAR	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Kondisi bangunan SMA Negeri 1 Mulia RUSAK BERAT, termasuk rumah-rumah Guru	SMAN 1 Mulia, Puncak Jaya, Kab. Puncak Jaya	Mulia	Wuyuneri	1 Kompleks
184	ELLY WONDA, SH	GOLKAR	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Minimnya fasilitas pendukung pendidikan dan pengajaran (Komputer PC/Laptob) di SMKN 1 Mulia, Puncak Jaya	SMKN 1 Mulia, Puncak Jaya, Kab. Puncak Jaya	Mulia	Wuyuneri	10 Unit
185	ELLY WONDA, SH	GOLKAR	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Minimnya fasilitas pendukung pendidikan dan pengajaran (Komputer PC/Laptob) di SMAN 1 Ilu, Puncak Jaya	SMAN 01 Ilu, Distrik Ilu, Kab. Puncak Jaya	Ilu	Dolinggame	10 Unit
186	ELLY WONDA, SH	GOLKAR	Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat secara merata	Belum tersedianya unit pelayanan kesehatan Primer, Puskesmas di Distrik yang jauh dari Ibu Kota (Distrik Yambi)	Distrik Yambi, Kab. Puncak Jaya	Yambi	Yambi	1 Unit Puskesmas



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	ELLY WONDA, SH	GOLKAR	Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat secara merata	Belum tersedianya unit pelayanan kesehatan Primer, Puskesmas Standart Rawat Inap (Distrik Gurage)	Distrik Gurage, Kab. Puncak Jaya	Gurage	Gwenggu	1 Unit Puskesmas
188	ELLY WONDA, SH	GOLKAR	Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat secara merata	Ketiadaan rumah bagi petugas Kesehatan di Distrik Yambi	Distrik Gurage, Kab. Puncak Jaya	Gurage	Gwenggu	2 Unit
189	ELLY WONDA, SH	GOLKAR	Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat secara merata	Ketiadaan rumah tinggal bagi petugas Kesehatan di Distrik Gurage	Distrik GURAGE, Kab. Puncak Jaya	Gurage	Gwenggu	2 Unit
190	Natan Pahabol, S.Pd	Gerindra	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Tidak adanya pagar keliling Sekolah di SMAN 1 Dekai, Yahukimo yang menyebabkan banyak gangguan ketika proses belajar mengajar, tidak aman dan nyaman untuk belajar	SMAN 1 Dekai, Yahukimo, Kab. Yahukimo	Dekai	Muara	1 pagar keliling
191	Natan Pahabol, S.Pd	Gerindra	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Selama ini belum tersedianya kamar mandi dan WC untuk siswa sehingga tidak nyaman. Dengan demikian dibutuhkan pembangunan ruang Toilet Sekolah di SMAN 1 Anggruk, Dekai	SMAN 1 Anggruk, Yahukimo, Kab. Yahukimo	Anggruk	Yaholikma	4 Unit
192	Natan Pahabol, S.Pd	Gerindra	Pendidikan	Angka Melek Huruf yang masih tinggi	Angka Buta Aksara masih relatif tinggi, sehingga dibutuhkan aksi pemberantasan Buta Aksara salah satunya dengan pengadaan Buku Nare-Nare (Buku Pendidikan dalam bahasa Yali)	Seluruh Distrik di Yahukimo, Kab. Yahukimo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1000 Eksemplar (buku)

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Natan Pahabol, S.Pd	Gerindra	Pendidikan	Angka Melek Huruf yang masih tinggi	Angka Buta Aksara masih relatif tinggi, sehingga dibutuhkan aksi pemberantasan Buta Aksara salah satunya dengan pengadaan Buku Nare-Nare (Buku Pendidikan dalam bahasa Yali)	Semua Distrik di Kabupaten Yalimo, Kab. Yalimo	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1000 Eksemplar (buku)
194	Natan Pahabol, S.Pd	Gerindra	Pendidikan	Kurangnya Tenaga Pendidik yang berkualifikasi	Tingginya angka buta aksara menuntut direkrutnya sukarelawan Pemberantasan Buta Aksara (PBA) untuk dilatih menjadi Mentor PBA di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo	Distrik Anggruk, Kab. Yahukimo	Anggruk	Seluruh Kelurahan/Desa	135 orang tutor PBA
195	Natan Pahabol, S.Pd	Gerindra	Pendidikan	Kurangnya Tenaga Pendidik yang berkualifikasi	Tingginya angka buta aksara menuntut direkrutnya sukarelawan Pemberantasan Buta Aksara (PBA) untuk dilatih menjadi Mentor PBA di Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo	Distrik Benawa, Kab. Yalimo, Kab. Yalimo	Benawa	Seluruh Kelurahan/Desa	135 orang tutor PBA
196	Natan Pahabol, S.Pd	Gerindra	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Belum ada penyediaan rumah bagi tenaga Guru di SMAN 1 Anggruk sehingga dampaknya menghambat proses belajar mengajar karena Guru akhirnya jarang ditempatkan. Dengan demikian dibutuhkan pembangunan rumah Guru Kopel 2 pintu	SMAN 1 Anggruk, Yahukimo, Kab. Yahukimo	Anggruk	Yaholikma	2 Unit
197	Natan Pahabol, S.Pd	Gerindra	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Belum ada penyediaan rumah bagi tenaga Guru di SMAN 1 Anggruk sehingga dampaknya menghambat proses belajar mengajar karena Guru akhirnya jarang ditempatkan. Dengan demikian dibutuhkan pembangunan rumah Guru Kopel 2 pintu	Distrik Elelim, Kab. Yalimo, Kab. Yalimo	Elelim	Elelim	2 Unit
198	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Ruang Guru di SMKN 3 Merauke sudah tidak cukup lagi untuk menampung jumlah guru dan pegawai yang ada. Untuk itu, dibutuhkan perluasan sekaligus rehabilitasi ruang guru dan kantor di SMKN 03 Merauke	Jl. Kamizaun, Mopah Lama, Kab. Merauke	Merauke	Rimba Jaya	2 ruang
199	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak adir bersih untuk kebutuhan Masyarakat / Sumur Bor	Kampung Kasonaweja, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Tengah	Kasonaweja	4 Titik
200	TAN WIE LONG	FRAKSI PARTAI GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Tidak ada air bersih untuk Kebutuhan Masyarakat / Sumur Bor	Kampung Burmeso, Kab. Mamberamo Raya	Mamberamo Tengah	Burmeso	2 Titik

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Perbaikan Ruas Jalan Provinsi, Jalan Leproseri	Jl. Leproseri - Dalir, Kab. Merauke	Naukenjerai	Kuler	20 Km
202	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Perbaikan Ruas Jalan Provinsi, Jalan Kuprik-Kumbe	Jl. Kuprik - Urumb-Kumbe, Kab. Merauke	Semangga	Urumb	10 Km
203	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Perbaikan Ruas Jalan Kurik 4 - Kurik 6	Jl. Kurik 4 - Kurik 6, Kab. Merauke	Kurik	Jaya Makmur	20 Km
204	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Peningkatan Ruas Jalan Jagebob-Jagebob 13	Jl. Jagebob - Jagebob 13, Kab. Merauke	Jagebob	Obaathrw	25 Km
205	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	perawatan jalan arafura -payum	JL. Arafura Payum, Kab. Merauke	Merauke	Samkai	5 Km
206	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	peningkatan Ruas jalan Kepi -assue (asgon)	JL. Kepi -Assue (asgon), Kab. Mappi	Assue	Eci	35 Km
207	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembuatan Jalan Beton	JL. Mbait IV, Kab. Asmat	Agats	Bis Agats	200 Meter
208	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembuatan Jalan Beton	JIL. Mbait V, Kab. Asmat	Agats	Bis Agats	50 Meter
209	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan dermaga	pelabuhan Tabonji, Kab. Merauke	Tabonji	Tabonji	1 unit
210	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Dermaga	okaba, Kab. Merauke	Okaba	Okaba	1 unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Dermaga speed Boat permanen	asiki, Kab. Boven Digoel	Jair	Asiki	1 unit
212	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	pembangunan rumah layak huni untuk OAP	Bekwar, Kab. Asmat	Akat	Buetkwar	25 unit
213	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Pembangunan Rumah Layak Huni	Fakan, Kab. Asmat	Akat	Fakan	20 unit
214	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Pembangunan Rumah layak huni untuk OAP	Manep, Kab. Asmat	Akat	Menepsimni	20 unit
215	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Pembangunan Rumah layak huni untuk OAP	simini, Kab. Asmat	Akat	Simini	20 unit
216	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Pembangunan Rumah layak huni untuk OAP	emene, Kab. Asmat	Safan	Emene	20 unit
217	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Pembangunan Rumah layak huni untuk OAP	samandoro, Kab. Asmat	Safan	Samendoro	20 unit
218	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Pembangunan Rumah layak huni untuk OAP	kofar, Kab. Mappi	Minyamur	Kofar	25 unit
219	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Pembangunan Rumah layak huni	Sumberaman, Kab. Mappi	Seluruh Kecamatan	Sumuraman	20 unit
220	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Pembangunan Rumah layak huni	haju, Kab. Mappi	Haju	Paghai	20 unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Pembangunan Rumah layak huni	bomakia1, Kab. Boven Digoel	Bomakia	Bomakia I	20 unit
222	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembnagunan Jembatan dalir	dalir, Kab. Merauke	Naukenjerai	Kuler	1 unit
223	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pendidikan	Angka putus sekolah yang masih realtif tinggi	pembangunan asrama siswa/siswi dari distrik Akat	bis agaats, Kab. Asmat	Agats	Bis Agats	1 unit
224	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya ketersediaan air baku	Pembuatan Jaringan air bersih	Payum, Kab. Merauke	Merauke	Samkai	2 unit
225	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Bantuan alat tangkap Ikan	Lampu satu, Kab. Merauke	Merauke	Samkai	50 unit
226	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Bantuan alat tangkap Ikan	Sumuraman, Kab. Mappi	Minyamur	Kofar	50 unit
227	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Bantuan Alat Tangkap Ikan	wanam, Kab. Merauke	Ilwayab	Wogekel	50 unit
228	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pertanian	Rendahnya populasi dan produksi hasil peternakan	Bantuan Bibit sapi	muting, Kab. Merauke	Muting	Enggol Jaya	200 ekor

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Bantuan alat mesin pertanian (Traktor)	Amunkay, Kab. Merauke	Tanah Miring	Amun Kay	10 unit
230	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Bantuan Alat Mesin Pertanian (Traktor)	Marga Mulya, Kab. Merauke	Semangga	Marga Mulya	10 unit
231	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya ketersediaan air untuk irigasi pertanian	Rehabilitasi Saluran Air Primer	Waningsap Miraf, Kab. Merauke	Tanah Miring	Waningsap Miraf	10 Km
232	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya ketersediaan air untuk irigasi pertanian	Rehabilitasi Pintu air	Rawa sari, Kab. Merauke	Malind	Rawasari	1 unit
233	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Bantuan Bus sekolah	Tanah Merah, Kab. Boven Digoel	Mandobo	Sokanggo	2 unit
234	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat secara merata	Bantuan Alat PCR	RSUD Merauke, Kab. Merauke	Merauke	Maro	1 unit
235	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum memadainya pemukiman layak huni	Pembangunan Masjid assalam	seringgu, Kab. Merauke	Merauke	Seringgu Jaya	1 unit
236	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Jalan rusak dari Lepro Distrik Merauke-Kuler Distrik Naukenjerai	Distrik Merauke, Kab. Merauke	Merauke	Bokem	13 km

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	PASKALIS LETSOIN	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan pelabuhan sungai	Isyaman, Kab. Mappi	Edera	Isyaman	1 unit
238	PASKALIS LETSOIN	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	pembangunan pelabuhan sungai	Wagin, Kab. Mappi	Mambioman Bapai	Wagin	1 unit
239	PASKALIS LETSOIN	PDIP	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Pelabuhan sungai	Kofar, Kab. Mappi	Minyamur	Kofar	1 unit
240	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	peningkatan Ruas jalan Provinsi, Jalan Bian - Okaba	Jalan Bian - Okaba, Kab. Merauke	Okaba	Okaba	35 KM
241	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	peningkatan ruas Jalan Provinsi, Jalan Okaba-Ngguti	Jalan Okaba - Ngguti, Kab. Merauke	Ngguti	Salam Epe	50 KM
242	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Peningkatan Ruas Jalan Provinsi, Jalan Arimbit-Bukit - Manggelum	Jalan Arimbet - Bukit - Manggelum, Kab. Boven Digoel	Manggelum	Manggelum	30 KM
243	KUSMANTO	FRAKSI HATI NURANI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	Bantuan Permodalan Koperasi Bina Insan Sejahtera	Jalan Irian Seringgu, Kab. Merauke	Merauke	Seringgu Jaya	1 Miliar

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	PASKALIS LETSOIN	PDIP	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan ruang guru	obaa, Kab. Mappi	Obaa	Obaa	1 unit
245	KRISTHINA LULUPORO	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Selama kuran Lebih 15 Tahun Masyarakat kampung Nanbom distrik kemptuk Gresi Kab jayapura Hidup dengan menggunakan air hujan, pentingnya sarana air bersih pada kampung tersebut sehingga masyarakat bisa hidup sehat	nanbom, Kab. Jayapura	Kemptuk	Nanbom	5 km
246	KRISTHINA LULUPORO	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	kampung yang berbatasan langsung dengan negara tetangga papua nugini, kondisi perumahan yang masih banyak menggunakan papan sebagai dinding dan beratapkan daun sagu, penghasilan masyarakat yang sangat rendah mengakibatkan daya saing masyarakat sangat rendah	Kampung wambes, Kab. Keerom	Mannem	Wambes	50 unit
247	M. DARWIS MASSI, SE	FRAKSI KEADILAN NURANI 1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Peningkatan jalan lingkungan BTN Skyline Residence Jalan Nuri dan Jalan Kasuari 1,2,3,4	RT.10 RW.03 Kota Raja Kelurahan Whaimhorok Kecapamatn Abepura Kota Jayapura, Kota Jayapura	Abepura	Way Mhorock	1300 Meter
248	M. DARWIS MASSI, SE	FRAKSI KEADILAN NURANI 1	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP IT QURROTA A"YUN	Jalan Al Barakah RT 02 RW 03 Pasar Lama Kelurahan Yobe Distrik Abepura Kota Jayapura, Kota Jayapura	Abepura	Yobe	3 Ruang Kelas Baru



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	M. DARWIS MASSI, SE	FRAKSI KEADILAN NURANI 1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Pembangunan pagar kampus HIDAYATULLAH Holtekam Kota Jayapura	Jalan Raya perbatasan RI-PNG Pundok Pesantren Hidayatullah kampung Holtekam Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Kota Jayapura	Muara Tami	Holtekamp	300 Meter
250	M. DARWIS MASSI, SE	FRAKSI KEADILAN NURANI 1	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Pengadaan Hand Traktor dan sarana prasarana pertanian kelompok tani	(Kelompok Tani "SETIA TANI") Jalan Biak RT. 01 RW. 02 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Kota Jayapura	Muara Tami	Koya Barat	5 Unit
251	M. DARWIS MASSI, SE	FRAKSI KEADILAN NURANI 1	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Pengadaan Hand Traktor dan sarana prasarana pertanian kelompok tani	(Kelompok Tani "BINA JAYA") Jalan Mataram RT. 10 RW. 02 Arso 9 Kampung Intaimelyan Distrik Skanto Kabupaten Keerom, Kab. Keerom	Skanto	Intaimelyan	5 Unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	M. DARWIS MASSI, SE	FRAKSI KEADILAN NURANI 1	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Pengadaan bibit sayur - sayuran, cabe, jeruk	(Kelompok Tani "SETIA TANI") Jalan Biak RT. 01 RW. 02 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Kota Jayapura, Muara Tami, Koya Barat, Kota Jayapura	Muara Tami	Koya Barat	500 Paket
253	M. DARWIS MASSI, SE	FRAKSI KEADILAN NURANI 1	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Pengadaan bibit sayur - sayuran, cabe, jeruk	(Kelompok Tani "BINA JAYA") Jalan Mataram RT. 10 RW. 02 Arso 9 Kampung Intaimelyan Distrik Skanto Kabupaten Keerom, Kab. Keerom, Skanto, Intaimelyan, Kab. Keerom	Skanto	Intaimelyan	500 Paket
254	M. DARWIS MASSI, SE	FRAKSI KEADILAN NURANI 1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Peningkatan Jalan lingkungan Gang Ondo Apner Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani	Jalan Makendang gang Ondo Apner kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Kab. Jayapura	Sentani	Sentani Kota	500 Meter

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	M. DARWIS MASSI, SE	FRAKSI KEADILAN NURANI 1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Peningkatan Jalan kompleks Lorenz Mano Distrik Abepura	Jalan Kompleks Lorenz Mano Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura Kota Jayapura, Kota Jayapura	Abepura	Way Mhorock	800 Meter
256	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Tidak tersedianya ruang pertemuan untuk digunakan dalam pertemuan, baik dikalangan guru maupun melibatkan murid di SMA Negeri I Kurik	SMA Negeri I Kuri. Jl. Ahmad Yani, kampung harapan Makmur, Kab. Merauke	Kurik	Harapan Makmur	1 ruang pertemuan
257	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Tidak tersedianya parkir kendaraan (mobil maupun motor) di lingkungan SMAN I Kurik, Kabupaten Merauke	Jl. Ahmad Yani, Distrik Kurik, Harapan Makmur, Kab. Merauke	Kurik	Harapan Makmur	1 areal
258	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Ruang Sekolah di SMK Negeri I Pertanian Tanah Miring RUSAK dan TIDAK LAYAK lagi untuk digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar	SMKN I Pertanian, Kab. Merauke	Tanah Miring	Hidup Baru	1 Sekolah
259	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Sarana praktek di Bidang perbengkelan Otomotif sangat minim di SMKN 1 Obaa. Sebagai SMKN yang berfokus pada edukasi perbengkelan Otomotif dan pertukangan tentu menjadi sebuah keprihatinan yang wajib mendapat perhatian Dinas terkait. Untuk itu, bantuan peralatan perbengkelan otomotif dan pertukangan sebagai sarana praktek siswa menjadi hal yang amat dibutuhkan di SMKN 1 Obaa, Kab. Mappi	SMKN 01 Obaa, Kabupaten Mappi, Kab. Mappi	Obaa	Emete	1 set fasilitas
260	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	SMKN Pertanian di Distrik Edera belum memiliki gedung sendiri sendiri. Selama ini ruangan masih meminjam ruangan milik institusi lain. Untuk itu penting untuk mendapat perhatian Pembangunan unit ledung sekolah yang baru.	SMKN 1 Edera Kabupaten Mappi, Kab. Mappi	Edera	Bade	1 Unit sekolah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	SMAN 1 Citak Mitak mengalami kerusakan serius pada bangunan gedung sekolahnya. Untuk itu, dibutuhkan rehabilitasi bangunan sekolah dimaksud yang kondisinya mengalami kerusakan parah.	SMAN 1 Citak Mitak, Kab. Mappi	Citak-Mitak	Senggo	1 unit sekolah
262	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	SMKN Perikanan di Kampung, Eci, Distrik Asue - Kabupaten Mappi belum memiliki gedung sendiri sendiri. Selama ini ruangan masih meminjam ruangan milik institusi lain. Untuk itu penting untuk mendapat perhatian Pembangunan unit ledung sekolah yang baru.	SMKN Perikanan Asue, Kab. Mappi	Assue	Eci	1 unit sekolah
263	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Keberadaan sekolah alam Bevak Literasi di Distrik Tanah Miring sangat minim buku. Untuk itu dibutuhkan bantuan buku dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua.	Sekolah Alam Bevak Literasi, Kampung Hidup, Distrik Tanah Miring, Kab. Merauke	Tanah Miring	Hidup Baru	1000 Buku
264	HOSEA GENONGGA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pertanian	Rendahnya populasi dan produksi hasil peternakan	Pengadaan bibit ternak babi	Tolikara, Kab. Tolikara	Karubaga	Seluruh Kelurahan/Desa	500 ekor
265	HOSEA GENONGGA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pertanian	Rendahnya populasi dan produksi hasil peternakan	Pengadaan mesin penggiling pakan ternak	Tolikara, Kab. Tolikara	Karubaga	Seluruh Kelurahan/Desa	50 Unit
266	ORGENES KAWAY	GABUNGAN BANGUN PAPUA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pengaspalan jalan masuk Kampung Bambar	Kampung Bambar Waibu, Kab. Jayapura, Kab. Jayapura	Waibu	Bambar	950 Meter persegi
267	ORGENES KAWAY	GABUNGAN BANGUN PAPUA	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya prestasi pemuda dalam pembangunan	Pembangunan lapangan bola Bambar	Kampung Bambar Waibu, Kab. Jayapura, Kab. Jayapura	Waibu	Bambar	1 Unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	ORGENES KAWAY	GABUNGAN BANGUN PAPUA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Pembangunan pagar Gereja GKII Doyobaru	Kampung Doyobaru, Waibu, Kab. Jayapura	Waibu	Doyo Baru	500 meter
269	ORGENES KAWAY	GABUNGAN BANGUN PAPUA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Pembangunan WC (KAKUS) di pinggiran Danau Sentani Yahim	Pinggiran Danau Sentani, Yahim, Kab. Jayapura	Sentani	Yahim	4 unit
270	ORGENES KAWAY	GABUNGAN BANGUN PAPUA	Pertanian	Rendahnya populasi dan produksi hasil peternakan	Pengadaan Bibit Sapi	Doyobaru, Waibu, Kab. Jayapura	Waibu	Doyo Baru	50 Ekor
271	ORGENES KAWAY	GABUNGAN BANGUN PAPUA	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi budidaya perikanan air tawar	Bantuan Keramba	Doyo Baru, Waibu, Kab. Jayapura	Waibu	Doyo Baru	20 Unit
272	ORGENES KAWAY	GABUNGAN BANGUN PAPUA	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi budidaya perikanan air tawar	Pengadaan Bibit Ikan	Doyo Baru, Waibu, Kab. Jayapura	Waibu	Doyo Baru	5000 Ekor
273	ORGENES KAWAY	GABUNGAN BANGUN PAPUA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Dermaga tambatan perahu di Borowai	Borowai, Kab Jayapura, Kab. Jayapura	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit
274	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Perbaikan jalan dari Biak ke Supiori	Biak ke Supiori, Kab. Biak Numfor	Biak Barat	Seluruh Kelurahan/Desa	10 km

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Dermaga kapal barang	Supiori, Kab. Supiori	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit
276	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Perhubungan	Belum optimalnya pemanfaatan terminal	Perbaiki terminal angkutan umum di Terminal Kota	Biak Kota, Kab. Biak Numfor	Biak Kota	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit
277	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan fasilitas laboratorium praktek dan jaringan internet di SMA Negeri 1 Biak Barat	Biak Barat, Kab. Biak Numfor	Biak Barat	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit
278	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan fasilitas laboratorium praktek dan jaringan internet di SMK Kelautan Biak	Biak Kota, Kab. Biak Numfor	Biak Kota	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit
279	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Bantuan Keramba apung	Distrik Supiori selatan, Kab. Supiori	Supiori Selatan	Seluruh Kelurahan/Desa	10 Unit
280	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Kelautan dan Perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah masih rendah	Bantuan Kapal bagi masyarakat di Distrik Supiori timur	Distrik Supiori timur, Kab. Supiori	Supiori Timur	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit
281	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektor-sektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	Bantuan Modal usaha bagi UKM Sagu Forno di serui	Serui, Kab. Kepulauan Yapen	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1000000 00 Rupiah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	Bantuan Modal usaha bagi UKM ikan asap di Kabupaten Supiori	Supiori, Kab. Supiori	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	100000000 Rupiah
283	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	Bantuan Modal usaha bagi UKM ikan asap di Kabupaten Biak Numfor	Biak Numfor, Kab. Biak Numfor	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	100000000 Rupiah
284	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	Bantuan Modal usaha bagi UKM ikan asap di Kabupaten Kepulauan Yapen	Kepulauan Yapen, Kab. Kepulauan Yapen	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	100000000 Rupiah
285	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	Bantuan Modal usaha bagi UKM Pengrajin dari bahan baku kulit kelapa di Kabupaten Biak	Kabupaten Biak, Kab. Biak Numfor	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	500000000 Rupiah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	Bantuan Modal usaha bagi UKM Pengrajin dari bahan baku kulit kelapa di Kabupaten Supiori	Kabupaten Supiori, Kab. Supiori	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	50000000 Rupiah
287	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Pariwisata	Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata	Pengembangan Wisata Anggaduber di Biak	Anggaduber, Biak, Kab. Biak Numfor	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit
288	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Pariwisata	Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata	Pembangunan Home stay di Biak	Biak, Kab. Biak Numfor	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit
289	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Pariwisata	Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata	Pembangunan Home stay di Supiori	Supiori, Kab. Supiori	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit
290	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Pariwisata	Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata	Pengembangan wisata mangrove di Biak	Biak, Kab. Biak Numfor	Biak Kota	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit
291	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Pariwisata	Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata	Pengembangan wisata mangrove di Supiori	Supiori, Kab. Supiori	Supiori Timur	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
292	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Penambahan Alsintan Kombein, alat/mesin pengering padi di Distrik Kurik	Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Kurik	Seluruh Kelurahan/Desa	5 Unit
293	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Penambahan Alsintan Kombein, alat/mesin pengering padi Distrik Semangga	Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Semangga	Seluruh Kelurahan/Desa	5 Unit
294	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Penambahan Alsintan Kombein, alat/mesin pengering padi Distrik Tanah Miring	Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Tanah Miring	Seluruh Kelurahan/Desa	5 Unit
295	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Bantuan Alsinta Handtractor untuk kampung Dagimon Distrik Obaa Kabupaten Mappi	kampung Dagimon Distrik Obaa Kabupaten Mappi, Kab. Mappi	Obaa	Dagimon	10 Unit
296	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Bantuan Alsinta Handtractor untuk Kampung Kogo Distrik Obaa Kabupaten Mappi	Kampung Kogo Distrik Obaa Kabupaten Mappi, Kab. Mappi	Obaa	Kogo	10 Unit
297	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Bantuan alat tangkap ikan berupa jaring, Motor tempel, dan Perahu nelayan untuk masyarakat nelayan lokal (OAP) di Distrik Waan Kabupaten Merauke	Distrik Waan Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Waan	Seluruh Kelurahan/Desa	10 Unit
298	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Bantuan alat tangkap ikan berupa jaring, Motor tempel, dan Perahu nelayan untuk masyarakat nelayan lokal (OAP) di Distrik Kimaam Kabupaten Merauke	Distrik Kimaam Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Kimaam	Seluruh Kelurahan/Desa	10 Unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Bantuan alat tangkap ikan berupa jaring, Motor tempel, dan Perahu nelayan untuk masyarakat nelayan lokal (OAP) di Distrik Ilwayab Merauke	Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Ilwayab	Seluruh Kelurahan/Desa	10 Unit
300	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Bantuan alat tangkap ikan berupa jaring, Motor tempel, dan Perahu nelayan untuk masyarakat nelayan lokal (OAP) di Distrik Okaba Kabupaten Merauke	Distrik Okaba Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Okaba	Seluruh Kelurahan/Desa	10 Unit
301	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Bantuan alat tangkap ikan berupa jaring, Motor tempel, dan Perahu nelayan untuk masyarakat nelayan lokal (OAP) di Distrik Semangga Kabupaten Merauke	Distrik Semangga Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Semangga	Seluruh Kelurahan/Desa	10 Unit
302	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Bantuan alat tangkap ikan berupa jaring, Motor tempel, dan Perahu nelayan untuk masyarakat nelayan lokal (OAP) di Distrik Malind Kabupaten Merauke	Distrik Malind Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Malind	Seluruh Kelurahan/Desa	10 Unit
303	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Bantuan alat tangkap ikan berupa jaring, Motor tempel, dan Perahu nelayan untuk masyarakat nelayan lokal (OAP) di Distrik Muting Kabupaten Merauke	Distrik Muting Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Muting	Seluruh Kelurahan/Desa	10 Unit
304	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Bantuan alat tangkap ikan berupa jaring, Motor tempel, dan Perahu nelayan untuk masyarakat nelayan lokal (OAP) di Distrik Obaa Kabupaten Mappi	Distrik Obaa Kabupaten Mappi, Kab. Mappi	Obaa	Seluruh Kelurahan/Desa	10 Unit
305	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat secara merata	Bantuan Mobil Jenazah buat Puskesmas Distrik Malind Kabupaten Merauke	Distrik Malind Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Malind	Seluruh Kelurahan/Desa	2 Unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat secara merata	Bantuan Mobil Jenazah buat Puskesmas Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke	Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Tanah Miring	Seluruh Kelurahan/Desa	2 Unit
307	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat secara merata	Bantuan Mobil Jenazah buat Puskesmas Distrik Semangga Kabupaten Merauke	Distrik Semangga Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Semangga	Seluruh Kelurahan/Desa	2 Unit
308	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat secara merata	Bantuan Mobil Jenazah buat Puskesmas Distrik Obaa Kabupaten Mappi	Distrik Obaa Kabupaten Mappi, Kab. Mappi	Obaa	Seluruh Kelurahan/Desa	2 Unit
309	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Bantuan Perumahan layak huni untuk OAP di Kampung Bibikem Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke	Kampung Bibikem Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Ilwayab	Bibikem	10 unit
310	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Bantuan Perumahan layak huni untuk OAP di Distrik Tubang Kabupaten Merauke	Distrik Tubang Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Tubang	Seluruh Kelurahan/Desa	10 Unit
311	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Bantuan Perumahan layak huni untuk OAP di Kampung Kogo Distrik Obaa Kabupaten Mappi	Kampung Kogo Distrik Obaa Kabupaten Mappi, Kab. Mappi	Obaa	Kogo	10 Unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Bantuan Perumahan layak huni untuk OAP di Kampung Dagimon Distrik Obaa Kabupaten Mappi	Kampung Dagimon Distrik Obaa Kabupaten Mappi, Kab. Mappi	Obaa	Dagimon	10 Unit
313	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pelebaran dan peningkatan Jalan Poros Distrik Kurik sampai dengan Distrik Malind Kabupaten Merauke	Distrik Kurik sampai dengan Distrik Malind, Kab. Merauke	Kurik	Seluruh Kelurahan/Desa	30 KM
314	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pengaspalan Jalan Neto, Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke	Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	10 KM
315	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Perbaikan jalan poros Jagebob 10, 11, 12, 13	Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Jagebob	Seluruh Kelurahan/Desa	30 KM
316	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Bantuan Komputer untuk SMAN URUMB	Distrik Semangga Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Semangga	Seluruh Kelurahan/Desa	10 Unit
317	SITI SUSANTI	FRAKSI PARTAI GERINDRA	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Permohonan tambahan Kuota Pupuk untuk Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	50 Ton
318	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Agar ditindaklanjuti Pengaspalan Jalan Arso 3 dan Arso 5	Arso, Kab. Keerom	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	15 KM

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Jalan dari Nimbokrang lokasi 200 menuju objek wisata Kali biru menuju Kampung Berap	Nimbokrang lokasi 200 menuju objek wisata Kali biru menuju Kampung Berap, Kab. Jayapura	Nimbokrang	Seluruh Kelurahan/Desa	10 KM
320	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembuatan Jembatan dari Nimbokrang lokasi 200 menuju objek wisata Kali biru	dari Nimbokrang lokasi 200 menuju objek wisata Kali biru, Kab. Jayapura	Nimbokrang	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Buah
321	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pariwisata	Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata	Pengembangan Destinasi Kali Biru	Kali biru, Kab. Jayapura	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Lokasi
322	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembuatan Jembatan di Kampung Tabang Kuari Distrik Kemtuk Gresi	Kampung Tabang Kuari Distrik Kemtuk Gresi, Kab. Jayapura	Kemtuk Gresi	Seluruh Kelurahan/Desa	30 meter
323	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Ruang jalan Lingkar Genyem sampai Nimbokrang	Genyem sampai Nimbokrang, Kab. Jayapura	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	30 KM
324	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Ruas jalan Yoka - Arso 4 dan -> Perawatan Jalan Arso 4 - Arso 5 dan pengaspalan Jalan Prov	Arso, Kab. Keerom	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	30 KM

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Prioritas Pembuatan Parit di Entrop (Jalan masuk pasar Entrop - sampai dengan samping Bank Syariah Mandiri - sampai Horizon)	(Jalan masuk pasar Entrop - sampai dengan samping Bank Syariah Mandiri - sampai Horizon), Kota Jayapura	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 KM
326	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Jalan Lingkar Nimbokrang lokasi 400 - Desa Benyom Jaya	Nimbokrang lokasi 400 - Desa Benyom Jaya, Kab. Jayapura	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	10 KM
327	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Perlu bibit tanaman jangka panjang di SP5 - Bonggo: Kayu Jati, Pembibitan Kelapa Sawit	Bonggo, Kab. Sarmi	Bonggo	Seluruh Kelurahan/Desa	50 Paket
328	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya ketersediaan air untuk irigasi pertanian	Pencetakan sawah dan Irigasi di Distrik Bonggo	Distrik Bonggo, Kab. Sarmi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	10 Hektar
329	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Jaringan Air Bersih Desa Berap Nimbokrang	Desa Berab Nimbokrang, Kab. Jayapura	Nimbokrang	Berab	1 Lokasi
330	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pemasangan Listrik di Arso 9	Arso 9, Kab. Keerom	Arso Timur	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Lokasi
331	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Pengadaan Hand Traktor	Arso barat Skanto, Kab. Keerom	Skanto	Seluruh Kelurahan/Desa	25 Unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Pengadaan Hand Traktor	Bonggo, Kab. Sarmi	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	25 Unit
333	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Pengadaan Hand Traktor	Nimbokrang, Kab. Jayapura	Nimboran	Seluruh Kelurahan/Desa	25 Unit
334	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Pengadaan Hand Traktor	Nimbokrang, Kab. Jayapura	Nimbokrang	Seluruh Kelurahan/Desa	25 Unit
335	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Pengadaan Bibit Sayur - sayuran, Jeruk, Cabai	Arso Barat, Kab. Keerom	Arso Barat	Seluruh Kelurahan/Desa	100 Paket
336	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Pengadaan Bibit Kelapa	Bonggo, Sarmi, Kab. Sarmi	Bonggo	Seluruh Kelurahan/Desa	100 Paket
337	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Pengadaan Bibit Coklat	Nimbokrang, Kab. Jayapura	Nimbokrang	Seluruh Kelurahan/Desa	100 Paket

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Kehutanan	Degradasi kawasan Lindung dan Tingginya kerusakan hutan	Pembangunan Taman burung dan Taman anggrek	Biak Numfor, Kab. Biak Numfor	Biak Kota	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Lokasi
339	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Kehutanan	Degradasi kawasan Lindung dan Tingginya kerusakan hutan	Proses pelepasan Kawasan hutan di Kebun Raya Koya Koso	Kebun Raya Koya Koso, Kota Jayapura	Muara Tami	Koya Tengah	1 Unit
340	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Kehutanan	Degradasi kawasan Lindung dan Tingginya kerusakan hutan	Kegiatan Fisik berupa pagar lokasi Kebun Raya Koya Koso yang sudah pelepasan	Kebun Raya Koya Koso, Kota Jayapura	Muara Tami	Koya Tengah	3 Km
341	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	Bantuan alat Pembuatan Bakso dan Abon Ikan Tuna buat Koperasi Nelayan di Hamadi	Hamadi, Kota Jayapura	Jayapura Selatan	Seluruh Kelurahan/Desa	6 Unit
342	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	Alat pembuatan kerupuk sagu di Nimbokrang, Kabupaten Jayapura	Nimbokrang, Kab. Jayapura	Nimbokrang	Seluruh Kelurahan/Desa	3 Unit



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Pengadaan kapal motor penangkap ikan untuk koperasi Nelayan	Hamadi, Kota Jayapura	Jayapura Selatan	Seluruh Kelurahan/Desa	3 Unit
344	MUSTAKIM HR. SE, SH, M.Si, MH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	Modal usaha untuk Koperasi Nelayan di Hamadi	Hamadi, Kota Jayapura	Jayapura Selatan	Hamadi	100000000 Rupiah
345	M. DARWIS MASSI, SE	FRAKSI KEADILAN NURANI 1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	Pengadaan alat tangkap bagi Koperasi nelayan Orang Asli Papua di Hamadi	Hamadi, Kota Jayapura	Jayapura Selatan	Hamadi	10 Paket
346	M. DARWIS MASSI, SE	FRAKSI KEADILAN NURANI 1	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Pengadaan pupuk dan obat - obatan buat tanaman pangan sayur mayur	Koya barat, Kota Jayapura	Muara Tami	Koya Barat	5 ton
347	M. DARWIS MASSI, SE	FRAKSI KEADILAN NURANI 1	Pertanian	Rendahnya populasi dan produksi hasil peternakan	Pengadaan Bibit ternak sapi di Koya barat	Koya Barat, Kota Jayapura	Muara Tami	Koya Barat	500 Ekor
348	M. DARWIS MASSI, SE	FRAKSI KEADILAN NURANI 1	Perindustrian	Belum Optimalnya pemanfaatan inovasi dan teknologi	Pengendalian harga kebutuhan 9 Bahan Pokok di Kota jayapura	Kota Jayapura, Kota Jayapura	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	NIKIUS BUGIANGGE	KEADILAN NURANI GABUNGAN 1	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Pengadaan alat mesin pertanian handtraktor / kultivator	Asotipo Wamena, Kab. Jayawijaya	Asotipo	Asotipo	10 Unit
350	ANCE WANGGAI	FRAKSI PARTAI NASDEM	Pariwisata	Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata	Lanjutan Pengembangan ekowisata mangrove di kampung Ruar Distrik Biak Timur	kampung Ruar Distrik Biak Timur, Kab. Biak Numfor	Biak Timur	Ruar	1 Lokasi
351	HOSEA GENONGGA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Pengadaan bibit sayur	Tolikara, Kab. Tolikara	Karubaga	Seluruh Kelurahan/Desa	100 Paket
352	HOSEA GENONGGA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pertanian	Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan	Pengadaan bibit kopi	Tolikara, Kab. Tolikara	Karubaga	Karubaga	100 Paket
353	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Kondisi jalan antara Distrik Jagebob - Erambu - Torai - Sota di Kabupaten Merauke teramat sangat memprihatinkan. Jalan ini menjadi jalur penghubung (darat) antara Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel. Oleh karenanya perbaikan jalan dan peningkatan kualitas jalan dimaksud menjadi hal urgen dan sangat dibutuhkan masyarakat pengguna.	Distrik Jagebob, Kab. Merauke	Jagebob	Seluruh Kelurahan/Desa	27 Kilometer
354	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pertanian	Rendahnya akses pasar atas produk pertanian/perkebunan lokal	Rendahnya produksi pertanian salah satunya juga diakibatkan oleh kondisi jalan pertanian yang cukup memprihatinkan. Dengan demikian, dibutuhkan pembangunan jalan usaha tani di kampung Nasem, Kabupaten Merauke	Kampung Nasem, Merauke, Kab. Merauke	Merauke	Nasem	2600 Meter

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pertanian	Rendahnya akses pasar atas produk pertanian/ perkebunan lokal	Rendahnya produksi pertanian salah satunya juga diakibatkan oleh kondisi jalan pertanian yang cukup memprihatinkan. Dengan demikian, dibutuhkan pembangunan jalan usaha tani di kampung Bokem, Kabupaten Merauke	Kampung Bokem, Kab. Merauke	Merauke	Bokem	2300 Meter
356	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pertanian	Rendahnya akses pasar atas produk pertanian/ perkebunan lokal	Rendahnya produksi pertanian salah satunya juga diakibatkan oleh kondisi jalan pertanian yang cukup memprihatinkan. Dengan demikian, dibutuhkan pembangunan jalan usaha tani di kampung Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke	Kampung Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring, Kab. Merauke	Tanah Miring	Sumber Harapan	2700 Meter
357	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pertanian	Rendahnya akses pasar atas produk pertanian/ perkebunan lokal	Rendahnya produksi pertanian salah satunya juga diakibatkan oleh kondisi jalan pertanian yang cukup memprihatinkan. Dengan demikian, dibutuhkan pembangunan jalan usaha tani di kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke	Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kab. Merauke	Malind	Kumbe	3300 Meter
358	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pertanian	Rendahnya akses pasar atas produk pertanian/ perkebunan lokal	Rendahnya produksi pertanian salah satunya juga diakibatkan oleh kondisi jalan pertanian yang cukup memprihatinkan. Dengan demikian, dibutuhkan pembangunan jalan usaha tani di kampung Suka Maju, Distrik Malind, Kabupaten Merauke	Distrik Suka Maju, Distrik Malind, Kab. Merauke	Malind	Suka Maju	2500 Meter
359	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pertanian	Rendahnya akses pasar atas produk pertanian/ perkebunan lokal	Rendahnya produksi pertanian salah satunya juga diakibatkan oleh kondisi jalan pertanian yang cukup memprihatinkan. Dengan demikian, dibutuhkan pembangunan jalan usaha tani di kampung Isano Mbias, Kabupaten Merauke	Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Kab. Merauke	Tanah Miring	Isano Mbias	3500 Meter
360	FAUZUN NIHAYAH, S.Hi., MH	NASDEM	Pertanian	Rendahnya akses pasar atas produk pertanian/ perkebunan lokal	Rendahnya produksi pertanian salah satunya juga diakibatkan oleh kondisi jalan pertanian yang cukup memprihatinkan. Dengan demikian, dibutuhkan pembangunan jalan usaha tani di kampung Kurik, Kabupaten Merauke	Kampung Kurik, Distrik Kurik, Kab. Merauke	Kurik	Kurik	3500 Meter

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	YOSIA BUSUP	FRAKSI PARTAI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Jalan Padat Karya Desa Basal Distrik Korupun Kabupaten Yahukimo	Desa Basal, Kab. Yahukimo	Korupun	Basal	20 KM
362	KRISTHINA LULUPORO	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	ketersedian rumah sangat dibutuhkan oleh masyarakat karna kondisi perumahan masyarakat masih jauh dari harapan .	Kampung Suskun, Kab. Keerom	Arso Timur	Suskun	50 unit
363	YOSIA BUSUP	FRAKSI PARTAI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Padat Karya Di Desa Bime Kabupaten Pegunungan Bintang	Bime, Kab. Pegunungan Bintang	Bime	Bime	250 KM
364	YOSIA BUSUP	FRAKSI PARTAI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Padat Karya Desa Kobukdua Distrik Kobukdua Kabupaten Yahukimo	Kobukdua, Kab. Yahukimo	Kwelemdua	Seluruh Kelurahan/Desa	250 KM
365	YOSIA BUSUP	FRAKSI PARTAI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Padat Karya Desa Emm Distrik Nalca Kabupaten Yahukimo	Emm, Kab. Yahukimo	Nalca	Emm	150 KM
366	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Distrik Witawaya Kab Jayawijaya belum tersedia air bersih untuk itu sangat dibutuhkan ketersediaan air bersih.	Witawaya, Kab. Jayawijaya	Wita Waya	Seluruh Kelurahan/Desa	10 KM
367	YOSIA BUSUP	FRAKSI PARTAI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Padat Karya Desa Endomen Distrik Emdomen Kabupaten Yahukimo	Endomen, Kab. Yahukimo	Endomen	Endomen	150 KM
368	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Pembangunan saluran air bersih kepada masyarakat distrik pisugi	Pisugi, Kab. Jayawijaya	Pisugi	Seluruh Kelurahan/Desa	10 KM
369	YOSIA BUSUP	FRAKSI PARTAI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Padat Karya Di Desa Kona Distrik Kono Kabupaten Yahukimo	Kona, Kab. Yahukimo	Kona	Kona	250 KM

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	pembangunan saluran air bersih kepada masyarakat distrik siepko	siepkosi, Kab. Jayawijaya	Siepkosi	Siepkosi	10 KM
371	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	masyarakat distrik musatfak belum memiliki saluran air bersih	musatfak, Kab. Jayawijaya	Musatfak	Seluruh Kelurahan/Desa	10 KM
372	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	belum tersedia sarana air bersih bagi masyarakat	usilimo, Kab. Jayawijaya	Usilimo	Seluruh Kelurahan/Desa	10 KM
373	HERMAN YOGOBI	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	belum tersedia air bersih bagi masyarakat pada distrik muliama	usilimo, Kab. Jayawijaya	Usilimo	Usilimo	10 KM
374	YOSIA BUSUP	FRAKSI PARTAI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Padat Karya Di Desa Oknanggul Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang	Oknanggul, Kab. Pegunungan Bintang	Kiwirok	Oknanggul	250 KM
375	YOSIA BUSUP	FRAKSI PARTAI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Padat Karya Di Desa Megom Distrik Sela Kabupaten Yahukimo	Megom, Kab. Yahukimo	Sela	Megom	120 KM
376	YOSIA BUSUP	FRAKSI PARTAI PAN	Perhubungan	Kurangnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Bandara	Pekerjaan Lapangan Terbang Okidomon di Desa Olidomon Distrik Sela Kabupaten Yahukimo	Olidomon, Kab. Yahukimo	Sela	Holdomen	400 Meter
377	YOSIA BUSUP	FRAKSI PARTAI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya ketersediaan air baku	Pembangunan Jaringan Air Bersih di Desa Sesezne Distrik Kwelamdua Kabupaten Yahukimo	Sesezne, Kab. Yahukimo	Kwelemdua	Sesezne	100 Meter

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	YOSIA BUSUP	FRAKSI PARTAI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya ketersediaan air baku	Pembangunan Penyediaan Air Bersih di Kampung Langda Distrik Langda Kabupaten Yahumimo	Langda, Kab. Yahukimo	Langda	Langda	80 KM
379	BENYAMIN ARISOY	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Belum tersedia Pengaman pantai/talud terhadap gelombang pasang air laut	Kampung Sawa Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor	Oridek	Sawa	500 M
380	BENYAMIN ARISOY	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Potensi kebencanaan masih cukup tinggi	Pembangunan talud turu dikampung turu distrik yapen selatan kabupaten kepulauan yapen	Kampung turu, Kab. Kepulauan Yapen	Yapen Selatan	Turu	290 M
381	BENYAMIN ARISOY	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Belum tersedianya sarana komputer client dan server ujian nasional berbasis komputer	SMA PGRI Serui, Kab. Kepulauan Yapen	Yapen Selatan	Barawaikap	80 unit
382	KRISTHINA LULUPORO	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Jalan masuk perum organda padang bulan kelurahan hedam distrik Heram sampe hari ini rusak berat dan perlu diperbaiki	Perum Organda Padang Bulan, Kota Jayapura	Heram	Hedam	1 km
383	BENYAMIN ARISOY	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	belum tersedianya ruang belajar dan laboratorium SMA ADVENT Serui	SMA ADVENT Serui, Kab. Kepulauan Yapen	Yapen Selatan	Serui Kota	2 unit
384	BENYAMIN ARISOY	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	Komunikasi dan Informatika	Penyediaan jaringan telekomunikasi yang masih sangat terbatas	Belum tersedianya BTS/ akses jaringan telekomunikasi	kampung Tatui, Kab. Kepulauan Yapen	Kosiwo	Tatui	1 unit
385	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan jalan COR beton/aspal	Danuwage-Koroway, Kab. Asmat	Suru-suru	Suru-Suru	15 km
386	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Jalan	Mabul-Sipanap, Kab. Asmat	Kolf Braza	Seluruh Kelurahan/Desa	20 km

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387	YOSIA BUSUP	FRAKSI PARTAI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Jalan Padat Karya Kampung Borme Distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang	Borme, Kab. Pegunungan Bintang	Borme	Borme	70 KM
388	YOSIA BUSUP	FRAKSI PARTAI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Jalan Padat Karya Di Desa Suntamon Distrik Suntamon Kabupaten Yahukimo	Suntamon, Kab. Yahukimo	Suntamon	Suntamon	250 KM
389	YOSIA BUSUP	FRAKSI PARTAI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Jalan Padat Karya Di Desa Alemson Distrik Alemson Kabupaten Pegunungan Bntang	Awimbon, Kab. Pegunungan Bintang	Alemsom	Alemsom	250 KM
390	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	belum ada jembatan sesuai	Sipanap, Kab. Asmat	Kolf Braza	Seluruh Kelurahan/Desa	5 km
391	YOSIA BUSUP	FRAKSI PARTAI PAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Jalan Padat Karya Di Kampung Dirwemna Distrik Dirwemna Kabupaten Yshukimo	Diswemna, Kab. Yahukimo	Dirwemna	Dirwemna	250 KM
392	YOSIA BUSUP	FRAKSI PARTAI PAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Pembangunan Perumahan Masyarakat Di Kampung Dirwemna Distrik Diswemna Kabupaten Yahukimo	Dirwemna, Kab. Yahukimo	Dirwemna	Dirwemna	10 Unit
393	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	pembangunan jalan Cor beton Kali Bian-Balamepe	Balamepe, Kab. Merauke	Okaba	Sanggase	20 km
394	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	pembangunan jalan Cor beton Kali Bian-Balamepe	Balamepe, Kab. Merauke	Okaba	Alatep	20 km
395	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Lapangan terbang di Kampung Ubio	Asiki, Kab. Boven Digoel	Mandobo	Seluruh Kelurahan/Desa	1 unit
396	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan jalan Asgon-Keppi	asgon, Kab. Mappi	Assue	Haffo	20 km



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Dermaga Beton kampung Bine	Bine, Kab. Asmat	Atsj	Bine	1 unit
398	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Penambahan Laboratorium Sekolah YPK Asmat	Agats, Kab. Asmat	Agats	Bis Agats	1 unit
399	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat secara merata	pembangunan puskesmas di Koroway	Koroway batu, Kab. Boven Digoel	Mindiptana	Mindiptana	1 unit
400	EDOARDUS KAIZE, SS	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Kesehatan	Kurangnya Tenaga Kesehatan	Penambahan tenaga dokter, bidan dan mantri	agats, Kab. Asmat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	3 orang
401	PETRUS PIGAI	FRAKSI PARTAI PAN	Sosial	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk OAP	Pembangunan Gedung Aula Klasis Tage - Yatamo (30 x 18) M2	Distrik Yatamo, Kab. Paniai	Yatamo	Seluruh Kelurahan/Desa	540 Meter persegi
402	KAMASAN YAKOB SS. KOMBOY	KEADILAN NURANI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Tersumbatnya Jalur Saluran Pembuangan Pada Gorong- gorong di sekeliling Lapangan Diaspora hingga ke arah pemukiman warga telah menyebabkan Banjir Dibeberapa Titik Dan Merendam Perumahan Guru SMP/SMA Di Kompleks Pendidikan Kristen Kotaraja Dalam. Kondisi ini selain diperkirakan disebabkan oleh banyaknya material pasir yang menimbun drainase tersebut, diameter saluran pembuangan (drainase) yang kecil juga dipandang menjadi salah satu penyebab meluapnya air tersebut.	Kotaraja Dalam, Kota Jayapura	Abepura	Vim	7000 Meter Persegi



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
403	KAMASAN YAKOB SS. KOMBOY	KEADILAN NURANI	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya prestasi Olahraga Provinsi Papua	Lapangan Basket King City, kompleks Pemda Cigombong Kotaraja menjadi salah satu tempat olahraga yang kerap digunakan oleh anak-anak muda untuk bermain basket. Lapangan tersebut senyatanya perlu direhabilitasi untuk menjadikannya lebih layak, diantaranya dengan perbaikan lantai lapangan, perlu dibangunnya kawat pelindung yang mengelilingi lapangan, perlu ditambahkan mini Bench di belakang Guard serta perlu adanya Bench Pemain.	Lapangan Basket Cigombong Kotaraja, Kota Jayapura	Abepura	Vim	1 Unit
404	KAMASAN YAKOB SS. KOMBOY	KEADILAN NURANI	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya prestasi Olahraga Provinsi Papua	Lapangan Obhokhouw atau Lapangan Sepak Bola Emsik Waena menjadi salah satu lapangan kondisi lapangannya terbilang baik, namun minim fasilitas. Salah satu yang dibutuhkan adalah pembangunan pagar keliling lapangan tersebut. Keberadaan pagar keliling lapangan selain memberi manfaat untuk membatasi para penonton untuk tidak memasuki areal lapangan saat pertandingan berlangsung, keberadaan pagar lapangan juga akan menghindarkan bola untuk melintas hingga ke areal jalan umum, maupun pemukiman warga.	Lapangan Obhokhouw/ Lapangan Emsik, Waena, Kota Jayapura	Heram	Yabansai	1 Unit Pagar Keliling
405	KAMASAN YAKOB SS. KOMBOY	KEADILAN NURANI	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	SMK Negeri 7 Agrobisnis dan Agroteknologi yang terletak di Skouw Mabo, Distrik Muaratami terbilang cukup memprihatinkan karena minim sarana yakni meja dan kursi untuk belajar. Salah satu contohnya adalah tentang penggunaan kelas yang harus bergantian oleh karena hanya beberapa ruang kelas yang memiliki bangku dan kursi. Demikian halnya ruang Guru, para Guru pun harus bergantian duduk oleh karena terbatasnya meja dan kursi untuk duduk.	SMKN 07 Skouw Mabo, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura	Muara Tami	Skouw Mabo	1 Unit sekolah
406	NASON UTTY, SE	Fraksi Gabungan Bangun Papua	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Peningkatan jalan antar kabupaten Dogiyai dan Paniai	Ogiyai, Kab. Dogiyai	Dogiyai	Dogimani	50 km

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407	KRISTHINA LULUPORO	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	KURANG MEMADAINYA INFRASTRUKTUR JALAN RAYA MENUJU KAMPUNG BENGWIN PROGO DISTRIK KEMTUK KABUPATEN JAYAPURA YANG MASIH BERUPA JALAN KARANG	KAMPUNG BENGWIN PROGO, Kab. Jayapura	Kemtuk	Benggwin Progo	30 km
408	KRISTHINA LULUPORO	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	KONDISI PERUMAHAN WARGA MASYARAKAT YANG KURANG MEMADAI DAN JAUH DARI KONDISI LAYAK HUNI	KAMPUNG BONGGRANG, Kab. Jayapura	Kemtuk	Nambom	100 UNIT
409	KRISTHINA LULUPORO	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	SEJAK ADANYA KAMPUNG SAMPAI SEKARANG MASYARAKAT BERGANTUNG PADA AIR HUJAN UNTUK KEBUTUHAN SEHARI HARI	KAMPUNG KWANSU, Kab. Jayapura	Kemtuk	Kwansu	20 km
410	DEKI NAWIPA, SE	DEMOKRAT	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Rehabilitasi gedung sekolah SMA Negeri I Distrik Komopa yang rusak	Jl. Poros antar kabupaten Paniai dan Kab, Intan Jaya, Kab. Paniai	Paniai Timur	Enarotali	1 Paket
411	DEKI NAWIPA, SE	DEMOKRAT	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pengadaan Bus Sekolah Untuk SMK Negeri 5 Penerbangan,	Jl. Waibu, Kab. Jayapura	Waibu	Doyo Lama	1 Unit
412	DEKI NAWIPA, SE	DEMOKRAT	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK YPPGI Timika	jl. Cenderawasih, Gang Weyapo, Kab. Mimika	Mimika Baru	Timika Indah	50 Unit
413	DEKI NAWIPA, SE	DEMOKRAT	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Pagar Tembok Keliling SMA YPK I Ridge yang rusak	Jl. Sriwijaya, Kab. Biak Numfor	Samofa	Brambaken	11500 m3
414	NASON UTTY, SE	Fraksi Gabungan Bangun Papua	Pertanian	Rendahnya akses pasar atas produk pertanian/ perkebunan lokal	Pengadaan Bibit Kopi untuk perkebunan rakyat	District Obano, Kab. Paniai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	5000 Buah
415	NASON UTTY, SE	Fraksi Gabungan Bangun Papua	Perdagangan	Minimnya Sarna dan Prasarana Distribusi	Pembangunan Pelabuhan Perintis Danau yang menghubungkan antar kampung-kampung dan distrik	Kampung Obano, Kab. Paniai	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Buah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416	NASON UTTY, SE	Fraksi Gabungan Bangun Papua	Perdagangan	Minimnya Sarna dan Prasarana Distribusi	Pengadaan Speed Boat kepada petugas Gereja Kingmi dan Katolik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.	Kab. Paniai, Kab. Paniai	Paniai Barat	Seluruh Kelurahan/Desa	2 Unit
417	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Sekolah Berpola Asrama SD/SMP/SMA/SMK (Anak-anak Di Distrik Mbua masih belajar di tenda darurat dan tinggal di Honai)	Distrik Mbua, Kab. Nduga	Kenyam	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket
418	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Perumahan Guru SMA (Guru selama tidak berada ditempat kerja sampai berbulan - bulan karena tidak memiliki rumah)	Distrik Mbua, Kab. Nduga	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	10 Unit
419	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 2 Pintu (Ruang yang tersedia tidak mampu lagi menampung anak-anak pengungsi dari distrik lain yang datang)	SMK Kenyam, Kab. Nduga	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	5 Unit
420	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan MCK SMK 2 Pintu (Ruang kelas sudah tidak mampu menampung jumlah siswa yang membludak akibat pengungsian dari distrik lain)	SMK Kenyam, Kab. Nduga	Kenyam	Kenyam	5 Unit
421	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Rumah Guru 1 Barak 4 pintu (Rumah Guru belum ada)	SMK Kenyam, Kab. Nduga	Kenyam	Kenyam	1 Paket
422	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Kenyam 2 Pintu (terbatasnya ruang kelas belajar)	SMK Kenyam, Kab. Nduga	Kenyam	Kenyam	6 Unit
423	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Rumah Guru 1 Barak 3 Pintu (Belum tersedianya perumahan guru yang mengakibatkan jarang kehadiran guru di sekolah)	Distrik Kenyam, Kab. Nduga	Kenyam	Kenyam	10 Unit
424	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Pagar Keliling Sekolah-Sekolah (Tidak amannya proses belajar mengajar karena daerah konflik)	Distrik Kenyam, Kab. Nduga	Kenyam	Kenyam	1 Paket
425	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan MCK 2 Pintu (sampai saat ini belum ada MCK di SMA Kenyam)	SMA Kenyam, Kab. Nduga	Kenyam	Kenyam	4 Unit
426	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Ruang Belajar 3 Pintu (Ruang yang digunakan selama ini sudah rusak dan tidak layak lagi)	SMTK Distrik Mbua, Kab. Nduga	Kenyam	Kenyam	6 Unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
427	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Pagar SMTK Tom Bourmen (Daerah, pagar menjadi salah satu pelindung bagi siswa dan guru)	SMTK Tom Bourmen Distrik Napua, Kab. Jayawijaya	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket
428	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Penimbunan Lokasi Sekolah SMAN 1 Kenyam (Lokasi sekolah selalu banjir)	SMAN 1 Kenyam, Kab. Nduga	Kenyam	Kenyam	1 Paket
429	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (Anak-anak sekolah pengungsi yang berada di kab. wamena bisa diterima di sekolah dengan syarat harus membangun tambahan gedung baru)	SD YPPGI Sinakma, Kab. Jayawijaya	Wamena	Seluruh Kelurahan/Desa	3 Unit
430	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Pelangi II Wamena	Asrama Pelangi II Wamena, Kab. Jayawijaya	Wamena	Wamena Kota	1 Paket
431	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Asrama Mahasiswa asal Kabupaten Nduga	Kota Jayapura, Kota Jayapura	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket
432	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Asrama Mahasiswa dan Pelajar di Kabupaten Jayapura	Kabupaten Jayapura, Kab. Jayapura	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket
433	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Penimbunan dan Pengaspalan Jalan Masuk Kompleks Masyarakat Pengungsi asal kabupaten Nduga	Wamena, Kab. Jayawijaya	Wamena	Wamena Kota	1 Paket
434	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Pembangunan Air Bersih dari sumber mata air dari gunung untuk pengungsi asal kabupaten Nduga	Wamena, Kab. Jayawijaya	Wamena	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket
435	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Daya beli penduduk yang masih rendah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni	Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Pengungsi asal Kabupaten Nduga di Wamena	Wamena, Kab. Jayawijaya	Wamena	Seluruh Kelurahan/Desa	50 Unit

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
436	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Pembangunan Pagar Keliling Gereja Weneroma Simaklah Wamena	Gereja Weneroma Simaklah Wamena, Kab. Jayawijaya	Wamena	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket
437	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Pembangunan Rumah Layak Huni bagi 100 KK (Kepala Keluarga) di Kenyam	Kenyam, Kab. Nduga	Kenyam	Kenyam	100 Unit
438	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	NASDEM	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA 2 Pintu	SMA 2 Pintu Distrik Kenyam, Kab. Nduga	Kenyam	Kenyam	1 Paket
439	TARIUS MUL, S.Sos	DEMOKRAT	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Gedung Baru SMAN Borme (Hingga saat ini masih menggunakan Gedung SMPN Borme)	Pegunungan Bintang, Kab. Pegunungan Bintang	Oksibil	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket
440	TARIUS MUL, S.Sos	DEMOKRAT	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Pembangunan Gedung Baru SMAN Kiwirok	Pegunungan Bintang, Kab. Pegunungan Bintang	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket
441	TARIUS MUL, S.Sos	DEMOKRAT	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	Pembangunan Rumah Guru (Banyak guru belum memiliki rumah yang mengakibatkan guru jarang berada ditempat tugas dan masih menggunakan gedung SMPN Kiwirok)	Okbibab, Kab. Pegunungan Bintang	Okbibab	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket
442	TARIUS MUL, S.Sos	DEMOKRAT	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Rehabilitasi Gedung Sekolah SMA YPPGI Oksibil (sebagian gedung sekolah sudah rusak)	SMA YPPGI Oksibil, Kab. Pegunungan Bintang	Oksibil	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Paket
443	KAMASAN YAKOB SS. KOMBOY	Keadilan Nurani	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya prestasi Olahraga Provinsi Papua	Lapangan Sepak Bola di Kampung Nafri menjadi salah satu fasilitas publik yang seringkali digunakan oleh para pemuda, maupun klub sepak bola kampung Nafri untuk melakukan latihan dan pembinaan bagi kalangan muda di kampung tersebut. Namun fasilitas publik tersebut kini dalam kondisi yang relatif rusak, sehingga butuh perbaikan dan penataan kondisi lapangan maupun infrastruktur penunjangnya.	Lapangan Sepak Bola Kp. Nafri, Kota Jayapura	Abepura	Nafri	7100 meter persegi

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
444	John NR Gobai	Kelompok Khusus	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	PEMBANGUNAN RUMAH MAKAN PADA USAHA IKAN TAWAR DARI BAGAN DAN TEMPAT WISATA KELUARGA KELOMPOK OLORA DI MIMIKA	Jl.Sosial, Pinggiran BANDARA Timika, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Kab. Mimika	Mimika Baru	Kwamki	1000000 000 Rp.
445	John NR Gobai	Kelompok Khusus	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	PEMBANGUNAN RUMAH PENDINGIN DAN ALAT PENDINGIN BAGI KOPERASI NELAYAN MANDIRI	Jl. Hamadi,Kawasan Nelayan Ikan Asar Hamadi, Kota Jayapura, Kota Jayapura	Jayapura Selatan	Hamadi	1000000 000 Rp.
446	John NR Gobai	Kelompok Khusus	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	PEMBANGUNAN RUMAH PRODUKSI KOPI P-5 MOANEMANI, KABUPATEN DOGIYAI DAN PENAMPUNGAN BIJI KOPI MASYARAKAT -YAYASAN ISODORUS MOAEMANI	Jl. Poros Nabire-Paniai, Kampung Mauwa, Kabupaten Dogiyai, Kab. Dogiyai	Kamu	Mauwa	2000000 000 Rp.
447	YOHANIS LUIS RONSUMBRE	KELOMPOK KHUSUS	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Jalan Biak Kota ke Biak Timur dalam kondisi rusak parah. Jalan ini butuh perbaikan oleh Dinas terkait	Antara Distrik Biak Kota dan Biak Timur, Kab. Biak Numfor	Biak Kota	Swapodibo	45 Kilometer

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448	John NR Gobai	Kelompok Khusus	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	PAKET PELATIHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN PANIAI PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) YPPK ENAROTALI	Komplex Misi Katolik, Kampung Iyaitaka, Distrik Paniai, Timur Kabupaten Paniai, Kab. Paniai, Paniai Timur, Iyaitaka, Kab. Paniai	Paniai Timur	Iyaitaka	2000000 000 Rupiah
449	KOPE WENDA, S.Pak	Kelompok Khusus	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	MODAL USAHA PRODUKSI SABUN DARI BUAH MERAH	Jln. Ifar Gunung Kelurahan Sentani Kota Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, Kab. Jayapura	Sentani	Sentani Kota	2500000 000 Rupiah
450	KOPE WENDA, S.Pak	Kelompok Khusus	Pariwisata	Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata	PEMBANGUNAN TEMPAT WISATA NUSANTARA (Pembangunan 2 Tempat Wisata)	Jl. Raya Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Kota Jayapura	Muara Tami	Holtekamp	2000000 000 Rupiah

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
451	KOPE WENDA, S.Pak	Kelompok Khusus	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rendah ketersediaan rumah layak huni	PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI BURUH ORANG ASLI PAPUA (Jl. Raya Amphibi Hamadi Kompleks Wajib Snyum Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura 2 Unit, Jl. Kampung Nafri Distrik Abepura 4 Unit, Jl. Holtekam Distrik Muara Tami 2 Unit, Pos Tujuh Sentani Kabupaten Jayapura, 10 Unit)	(Jl. Raya Amphibi Hamadi Kompleks Wajib Snyum Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, Jl. Kampung Nafri Distrik Abepura, Jl. Holtekam Distrik Muara Tami, Pos Tujuh Sentani Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1000000 0000 Rupiah
452	KOPE WENDA, S.Pak	Kelompok Khusus	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	PEMBANGUNAN 1 UNIT POMPA BENSIN SPBU	Kelompok Buruh Orang Asli Papua (Jl. Raya Holtekam Distrik Muara Tami Kota Jayapura), Kota Jayapura, Muara Tami, Holtekamp Kelompok Pencari Kerja (Di Kota Jayapura), Kota Jayapura	Muara Tami	Holtekamp	3500000 000 Rupiah



No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
453	KOPE WENDA, S.Pak	Kelompok Khusus	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	BANTUAN MODAL USAHA BAGI MAMA – MAMA PAPUA YANG JAUHAN BENSIN PERTALITE DAN PINANG DI KOTA JAYAPURA DAN KABUPATEN JAYAPURA	Jln Masuk Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Kabupaten Jayapura, Jln. Ifar Gunung Sentani Kabupaten Jayapura, Kab. Jayapura	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1000000 000 Rupiah
454	KOPE WENDA, S.Pak	Kelompok Khusus	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rendahnya peranan sektorsektor sekunder dan tersier (non ekstratif) dalam perekonomian wilayah	PELATIHANPERBENGKELANBLKJAYAPURABAGI PENGANGGURANDAN MODAL USAHA BENGKEL DI KOTA JAYAPURA DAN KABUPATEN JAYAPURA	Jln. Baru Holtekam Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Kota Jayapura	Muara Tami	Holtekamp	1000000 000 Rupiah
455	KOPE WENDA, S.Pak	Kelompok Khusus	Pertanian	Rendahnya populasi dan produksi hasil peternakan	PENGADAAN DAN PEMBANGUNAN KANDANG TERNAK BABI Volume Pengadaan 100 Ternak Babi  Volume Pembangunan Kandang 60 X 40 Meter	Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Kab. Jayapura	Sentani	Sentani Kota	1500000 000 Rupiah
456	HENGKI BAYAGE, S.AP	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum	Sulitnya air bersih bagi masyarakat Kampung Golowen, Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo telah berdampak pada kualitas hidup masyarakatnya. Untuk itu, kiranya mohon bantuan penyediaan instalasi air bersih di wilayah dimaksud.	Kampung Golowen, Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Kab. Yahukimo	Amuma	Golowen	1 Instalasi

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
457	HENGKI BAYAGE, S.AP	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Perhubungan	Kurangnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Bandara	Untuk menunjang lalu lintas udara dari dan ke Distrik Amuma, masyarakat Distrik Amuma sangat membutuhkan lapangan terbang yang memadai. Secara swadaya masyarakat sudah membuka lahan, namun masih membutuhkan peningkatan kualitas landasan agar selain mempermudah pendaratan, juga akan memungkinkan bagi pesawat yang berukuran besar untuk mendarat di landasan tersebut	Kampung Golowen, Distrik Amuma, Kab. Yahukimo	Amuma	Golowen	1 lapangan terbang
458	HENGKI BAYAGE, S.AP	FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Kondisi bangunan Gereja maupun Kantor Klasis GKII tidak lagi cukup untuk menampung banyaknya jumlah Jemaat yang beribadah. Demikian halnya kantor Klasis Daerah GKII Yahukimo dipandang sudah seharusnya untuk dibangun kembali secara lebih layak.	Kampung Golowen, Distrik Amuma, Kab. Yahukimo	Amuma	Golowen	2 Unit
459	PITER KWANO	KELOMPOK KHUSUS	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	Jalan mengalami kerusakan akibat banjir	Jln,sermai bawakampung klaisu, Kab. Jayapura	Gresi Selatan	Klaisu	7 Kilo Meter
460	PITER KWANO	KELOMPOK KHUSUS	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah	jembatan putus selama 10 tahun	Tebangkware, Kab. Jayapura	Kemtuk Gresi	Swentab	1 unit
461	PITER KWANO	KELOMPOK KHUSUS	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	sekolah di tengga rawa	Sewan 2, Kab. Sarmi	Sarmi Timur	Sewan	600 Meter
462	YOHANIS LUIS RONSUMBRE	KELOMPOK KHUSUS	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	SMA YPK 2 Biak adalah salah satu sekolah vokasi di Biak yang menjadi pilihan anak-anak muda di Biak dalam meningkatkan kompetensi dan keahlian di bidang teknik mesin, konsutruksi, listrik serta otomotif. Namun menjadi kendala adalah keterbatasan/ ketersediaan peralatan dan mesin untuk praktek. Untuk itu dimohonkan kepada instansi terkait yakni Dinas Pendidikan untuk dapat membantu kebutuhan dimaksud.	Jl. Dr. Sam Ratuangi Nomor 49, Kab. Biak Numfor	Biak Kota	Burokup	1 perangkat peralatan

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
463	YOHANIS LUIS RONSUMBRE	KELOMPOK KHUSUS	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	SMK Kesehatan Terpadu Biak Numfor dalam upaya pengembangan SDMnya membutuhkan tambahan fasilitas di laboratorium komputer. Adapun kebutuhan tersebut adalah untuk menunjang pembelajaran dan pengembangan diri siswa dan guru di SMK Kesehatan Terpadu Biak Numfor. Fasilitas tersebut diantaranya juga untuk mengganti perangkat yang rusak.	Gedung A, Jalan Gunung Brindo Ridge I Gedung B, Jalan Mandouw Dalam, Biak, Kab. Biak Numfor	Samofa	Mandouw	1 perangkat
464	YOHANIS LUIS RONSUMBRE	KELOMPOK KHUSUS	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya prestasi Olahraga Provinsi Papua	Stadion Cenderawasih di Kabupaten Biak Numfor membutuhkan perhatian berupa rehabilitasi bangunan agar menjadi lebih layak dan sesuai standart untuk digunakan.	Jalan Pramuka, Kab. Biak Numfor	Biak Kota	Burokup	1 unit stadion
465	YOHANIS LUIS RONSUMBRE	KELOMPOK KHUSUS	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya prestasi Olahraga Provinsi Papua	Minat dan bakat generasi muda di Kabupaten Supiori umumnya mengarah pada bidang keolahragaan. Salah satu yang digemari namun belum terfasilitasi sarana dan prasarannya adalah lapangan Futsal. Untuk itu, dimohon untuk adalah pembangunan lapangan Futsal dengan standar yang layak di Distrik Supiori Timur	Distrik Supiori Timur, Kab. Supiori	Supiori Timur	Sorendidori	1 Unit Lapangan Futsal
466	YOHANIS LUIS RONSUMBRE	KELOMPOK KHUSUS	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya prestasi Olahraga Provinsi Papua	Minat dan bakat generasi muda di Kabupaten Supiori umumnya mengarah pada bidang keolahragaan. Salah satu yang digemari namun belum terfasilitasi sarana dan prasarannya adalah lapangan Futsal. Untuk itu, dimohon untuk adalah pembangunan lapangan Futsal dengan standar yang layak di Distrik Supiori Barat	Distrik Supiori Barat, Kab. Supiori	Supiori Barat	Amyas	1 Unit Lapangan Futsal
467	YOHANIS LUIS RONSUMBRE	KELOMPOK KHUSUS	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya prestasi Olahraga Provinsi Papua	Minat dan bakat generasi muda di Kabupaten Supiori umumnya mengarah pada bidang keolahragaan. Salah satu yang digemari namun belum terfasilitasi sarana dan prasarannya adalah lapangan Futsal. Untuk itu, dimohon untuk adalah pembangunan lapangan Futsal dengan standar yang layak di Distrik Supiori Utara	Distrik Supiori Utara, Kab. Supiori	Supiori Utara	Warsa	1 Unit Lapangan Futsal

No	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468	YOHANIS LUIS RONSUMBRE	KELOMPOK KHUSUS	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya prestasi Olahraga Provinsi Papua	Minat dan bakat generasi muda di Kabupaten Supiori umumnya mengarah pada bidang keolahragaan. Salah satu yang digemari namun belum terfasilitasi sarana dan prasarananya adalah lapangan Futsal. Untuk itu, dimohon untuk adalah pembangunan lapangan Futsal dengan standar yang layak di Distrik Supiori Selatan	Distrik Supiori Selatan, Kab. Supiori	Supiori Selatan	Fanindi	1 Unit Lapangan Futsal
469	YOHANIS LUIS RONSUMBRE	KELOMPOK KHUSUS	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya prestasi Olahraga Provinsi Papua	Minat dan bakat generasi muda di Kabupaten Supiori umumnya mengarah pada bidang keolahragaan. Salah satu yang digemari namun belum terfasilitasi sarana dan prasarananya adalah lapangan Futsal. Untuk itu, dimohon untuk adalah pembangunan lapangan Futsal dengan standar yang layak di Distrik Kepulauan Aruri	Distrik Kepulauan Aruri, Kab. Supiori	Kepulauan Aruri	Aruri	1 Unit Lapangan Futsal
470	YOHANIS LUIS RONSUMBRE	KELOMPOK KHUSUS	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	Fasilitas ruang kelas di SMA YPK 3 Urfu masih kurang. Dengan demikian dibutuhkan tambahan ruang kelas baru di SMA YPK e Urfu	Jalan Raya Sorido - Samber, Kab. Biak Numfor	Yendidori	Urfu	16 Unit
471	YOHANIS LUIS RONSUMBRE	KELOMPOK KHUSUS	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya prestasi Olahraga Provinsi Papua	Lapangan Hockey (2 lapangan Indoor dan 1 lapangan Outdoor) di Biak Numfor perlu direnovasi agar sarana dan pra sarana serta lapangan maupun fasilitas penunjangnya menjadi lebih layak untuk bs digunakan.	Kelurahan Mandala, Kab. Biak Numfor	Biak Kota	Mandala	3 unit
472	YOHANIS LUIS RONSUMBRE	KELOMPOK KHUSUS	Pendidikan	Kurangnya Akses pendidikan	SMKN Negeri 2 Kemaritiman Biak Numfor menjadi salah satu sekolah vokasi yang potensial untuk melahirkan peserta didik yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia usaha dan industri kelautan dan perikanan. Namun menjadi kendala salah satunya bahwa hingga kini adalah ketiadaan kapal latih sebagai sarana penting untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi peserta didik.	Jalan Sopeno Raya, Kab. Biak Numfor	Biak Barat	Sopeno	1 unit Kapal